



ISBN: 978-623-465-064-8 (PDF)



PROSIDING

Seminar Nasional dan Call For Paper

Global Health dan **COVID-19**

Tantangan dan Adaptasi dalam Konstelasi
Hubungan Internasional

PURWOKERTO

06 Juli
2022

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER

**“Global Health dan COVID-19:
Tantangan dan Adaptasi dalam
Konstelasi Hubungan Internasional”.**

Purwokerto; Rabu, 6 Juli 2022



Penerbit
Universitas Jenderal Soedirman
2022

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER

“Global Health dan COVID-19:

Tantangan dan Adaptasi dalam Konstelasi Hubungan Internasional”.

Disusun oleh Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
bekerjasama dengan Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Peradaban, Bumiayu
Didukung oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)

Buku Elektronik Kesatu, Desember 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

Pengarah	:	Dr. Wahyuningrat, M.Si
Penanggung Jawab	:	Luthfi Makhasin, M.A., Ph.D
Ketua Panitia	:	1. Ayusia Sabhita Kusuma, S.IP., M.Soc.Sc, 2. Rafika Arsyad., S.IP., M.H.I
Sekretaris	:	1. Kholifatul Sa'adah, S.Hub.Int., M.Hub.Int, 2. Sigid Widyantoro, S.IP., MA
Anggota	:	1. Dr. Agus Haryanto S.IP., M.Si. 2. Nuriyeni Kartika Bintarsari S.IP., M.A. 3. Renny Miryanti S.IP. M.Si. 4. Tundjung Linggarwati S.IP., M.Si. 5. Sri Wijayanti S.I.P., M.Si. 6. Arif Darmawan S.I.P., M.Si 7. Muhammad Yamin S.IP., M.Si. 8. Arief Bakhtiar Dannawan S.IP., M.A. 9. Soni Martin Anwar S.IP., M.A 10. Dwi Yulianto 11. M. Fathoni, S.IP., M.Si 12. Agung Triyatno, S.Sos., M.Si 13. Rifqi Itsnaeni Yusuf, S. Hum., M.A
Reviewer	:	1. Untari Narulita Madyar Dewi, S.IP., M.H.I 2. Agung Triyatno, S.Sos., M.Si 3. Ayusia Sabhita Kusuma, S.IP., M.Soc.Sc 4. Renny Miryanti, S.IP., M.Si
Editor	:	1. Ayusia Sabhita Kusuma, S.IP., M.Soc.Sc 2. Rafika Arsyad., S.IP., M.H.I

Penerbit:

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan (UNSOED Press)

Telp. (0281) 626070

Email: unsoedpresspwt@gmail.com

ix + 140 hal., 21 x 29,7 cm

ISBN: 978-623-465-064-8 (PDF)

Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, photoprint, maupun microfilm.

Kata Pengantar

EDITOR

Pandemi COVID-19 telah membawa warna baru dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kajian hubungan internasional, fenomena ini telah memperlihatkan berbagai macam tantangan maupun peluang yang mendorong munculnya berbagai tingkat kesadaran baru didunia internasional. Dalam *proceeding* ini, terdapat berbagai pembahasan menarik yang merupakan hasil dari penelitian para akademisi hubungan internasional maupun praktisi terkait yang telah mempresentasikan hasil penelitiannya pada rangkaian acara Seminar Nasional dan *Call for Paper* (CFP) "Global Health dan COVID-19: Tantangan dan Adaptasi dalam Konstelasi Hubungan Internasional" pada bulan Juni lalu. *Proceeding* ini merangkum berbagai topik pembahasan seperti; Pandemi Covid-19, Politik dan Keamanan Global, Diplomasi, Kebijakan Luar Negeri, dan Tata Kelola Global, Gender dan Inklusi Sosial, Ekonomi Politik Global, dan Isu-isu non-Tradisional.

Di mulai pada isu keamanan global, terdapat pembahasan mengenai analisis penanganan pandemi COVID-19 di Afghanistan pasca dikuasai penguasaan Taliban, dimana dalam pembahasannya penulis menggambarkan fluktuasi politik yang terjadi telah mengancam isu *health security* di Afghanistan yang menarik sejak kelompok bersenjata tersebut berhasil mengambil alih kekuasaan. Selanjutnya gagasan tentang ancaman epidemi virus Ebola terhadap keamanan kesehatan (*health security*) negara Republik Demokratik Kongo juga sangat menarik, dimana dalam penulisannya peneliti menitik beratkan perhatian terhadap wabah virus Ebola yang mampu menimbulkan ancaman terhadap isu Keamanan Kesehatan berdasarkan pada pendekatan Keamanan Manusia (*Human Security*). Masih terkait dengan negara Demokratik Kongo, pada artikel yang berjudul adaptasi pasukan perdamaian PBB di era pandemi: MONUSCO dan Republik Demokratik Kongo menjelaskan tentang pergeseran peran pasukan perdamaian PBB dalam upayanya beradaptasi untuk menjalankan misi di era pandemi, beserta tantangan dan maupun keberhasilan yang diperoleh dari misi yang dilakukan

Pada topik tentang diplomasi dan tata Kelola politik luar negeri, artikel tentang diplomasi budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Lengger Lanang selama masa Pandemi. Artikel serupa dengan titik fokus pada isu Diplomasi Digital, dengan konsep *Product Placement* dari wacana Wonderful Indonesia juga muncul sebagai salah satu praktik Diplomasi Publik Indonesia pada masa transisi pasca Pandemi COVID-19 untuk mendorong sektor pariwisata untuk bangkit seperti sedia kala. Pada artikel penerapan teknologi informasi (TI) pada industri pariwisata Indonesia berbasis pariwisata berkelanjutan pasca pandemi COVID-19, menggambarkan gagasan tentang pentingnya kolaborasi antara teknologi informasi dan konsep pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata Indonesia.

Topik Gender dan Inklusi sosial menyajikan beberapa artikel yang di antaranya adalah wacana tentang peran perempuan pada masa Pandemi COVID-19 di beberapa negara seperti Selandia Baru, Taiwan, Jerman dan Norwegia. Dalam tulisan tersebut penulis menyajikan beberapa aspek yang menjadi penyebab keberhasilan para

pemimpin perempuan merespons dengan baik berbagai tantangan yang muncul selama masa-masa krisis. Dalam hasil penelitian tentang adaptasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), memaparkan tentang *branding* program “Ibu Siaga COVID 19” dengan pendekatan gender yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa tahapan atau proses yang dapat menyukseskan adaptasi program TJSL di tengah pandemik. Selanjutnya terdapat artikel yang membahas tentang upaya COVID-19 *Vaccines Global Access* (COVAX) dalam memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 di negara-negara kawasan Afrika. Selanjutnya isu sosial lain yang muncul selama pandemik juga semakin diperjelas dengan penjelasan tentang fenomena meningkatnya praktik pernikahan dini selama Pandemi yang terjadi di kecamatan Sumbang, kabupaten Banyumas.

Pembahasan menarik lainnya juga dapat ditemui pada penelitian tentang pendampingan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pada artikel ini, penulis memberikan gambaran bahwa Pandemi telah “memaksa” dilakukannya perubahan dalam implementasi program pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh *Project Child Indonesia* (PCI). Dalam paparannya, Pandemi telah menyebabkan adanya pergeseran isu pembangunan global, yang mana hal tersebut berpengaruh dalam pengembangan program PCI. Dalam pengaruh pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan krisis pasca-pandemi: pelajaran dari Sri Lanka, penulis memberikan pemaparan atas tindakan pemerintah Sri Lanka dalam menangani penyebaran COVID-19 seiring dengan upayanya meningkatkan pendapatan pada sektor industri tekstil dan teh. Dari paparan singkat tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa berbagai hasil penelitian yang dimuat dalam *proceeding* ini dapat digunakan sebagai acuan dan bahan berpikir dalam memahami fenomena yang terjadi pada masa Pandemi COVID-19, maupun masa-masa transisi setelah Pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir.

Tim Editor

Sambutan

KETUA PANITIA

Assalamualaikum wr wb, selamat pagi, salam sejahtera, om swasti astu, namo budhaya, salam kebajikan

Yang kami hormati, Dekan FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Dr. Wahyuningrat, M.Si

Yang kami hormati, Ketua AIHII Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag., M.Si

Yang kami hormati, Ketua Jurusan HI UNSOED Dr. Agus Haryanto, M.Si dan Ketua Prodi HI Universitas Peradaban mba Rafika Arsyad S.IP., M.HI

Yang kami hormati ketiga narasumber

Yang kami hormati perwakilan AIHII Jawa Tengah selaku moderator panel dan reviewer

Serta yang kami hormati peserta seminar nasional maupun diskusi panel

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izin-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal afiat baik secara daring dan luring untuk bersama-sama mengikuti acara ini.

Ibu bapak semua, Seminar Nasional dan Call For Paper ini adalah kerjasama jurusan HI Unsoed dengan Prodi HI Universitas Peradaban dengan tema yang kami angkat "**Global Health dan COVID-19: Tantangan dan Adaptasi dalam Konstelasi Hubungan Internasional**". Seminar nasional ini akan melihat bagaimana kondisi dunia internasional setelah pandemi, walaupun pandemi sendiri belum secara internasional dinyatakan berhenti menjadi endemi. Selama dua tahun, tentu banyak perubahan dan pergeseran yang terjadi, inilah yang kemudian menjadi topik yang menarik untuk kita bahas bersama. Untuk itu seminar nasional dan call for paper ini bertujuan untuk :

1. Mengelaborasi kajian Hubungan Internasional dalam menjelaskan aspek dimensi global dari pandemi COVID sebagai isu kesehatan global.
2. Mengidentifikasi tantangan-tantangan pandemi global dalam konteks kesehatan, ekonomi politik, keamanan, sosial, dan Hubungan Internasional secara umum.
3. Membagikan praktik-praktik baik, proses-proses adaptasi, dan tata kelola dalam penanganan pandemi COVID-19 oleh organisasi internasional, regional, negara dan *non-state actor*.

Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan tiga orang narasumber sebagai pembicara utama sesuai di bidangnya yang masing-masing akan menyampaikan materinya di hadapan kita semua yaitu:

1. Mbak Irma Hidayana PhD, co-founder platform Lapor Covid
2. Bapak apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid (peneliti/konsultan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK FK-KMK UGM
3. Mbak Nuriyeni Kartika Bintarsari, MA., PhD selaku dosen HI UNSOED

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER

“Global Health dan COVID-19: Tantangan dan Adaptasi dalam Konstelasi Hubungan Internasional”.

Setelah sesi seminar dan diskusi panel sudah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2022, selanjutnya ialah pengiriman naskah full paper dari para peserta diskusi untuk kemudian dilakukan proses review dan diproses ke prosiding sekitar 12 paper.

Seminar dan pembuatan prosiding seminar ini dapat dilakukan berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Dekan FISIP beserta jajarannya, AIHII pusat dan regional Jawa Tengah terutama dari Universitas Sebelas Maret, Universitas Diponegoro, Universitas Slamet Riyadi, dan Universitas Wakhid Hasyim.

Penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada segenap panitia dari HI UNSOED dan HI Universitas Peradaban yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan seminar dan pembuatan prosiding ini ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan seminar maupun penerbitan prosiding ini masih banyak kekurangan untuk itu, kami mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata semoga kita semua mendapatkan manfaat dengan penerbitan prosiding ini.

Wassalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Purwokerto, 5 Desember 2022
Ketua Panitia,

Ayusia Sabhita Kusuma

Sambutan

KETUA AIHII

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah, bershawat kepada nabi dengan ucapan allahumma sholli 'ala Muhammad.

Atas nama Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), saya mengucapkan selamat dengan terbitnya prosiding sebagai output seminar nasional yang diselenggarakan oleh rekan – rekan AIHII Korwil Jawa Tengah . dengan thema "***Global Health dan COVID-19: Tantangan dan Adaptasi dalam Konstelasi Hubungan Internasional***".

Sebagaimana kita pahami bahwa Pandemi Covid-19 membuka babak baru dalam konstelasi Hubungan Internasional. Saya mencatat: (1) Isu-isu low politics/ non-traditional security makin dominan dalam diskursus Hubungan Internasional. Ambil contoh di pertemuan G20, yang isu-isu prioritasnya mencakup kesehatan global, ekonomi digital dan transisi energi bersih; (2) Kata kunci "kerjasama", "kolaborasi", "harmonisasi" dan padanannya menjadi prioritas dalam upaya mengkonstruksikan relasi antar aktor dalam Hubungan Internasional. Menariknya, ini terjadi saat tren deglobalisasi berlangsung; (3) Perspektif para penstudi dari Global South makin relevan dalam membaca situasi global, mencari akar permasalahan dll. Mengingat dampak pandemi Covid-19 paling terasa di Global South, yang lebih dari setengah populasi dunia berada di sini. (4) Pendekatan interdisipliner dan multidisipliner harus menjadi arus utama dalam HI. Hal ini adalah konsekuensi logis dari sifat ancaman yang makin kompleks. Sangat mungkin seseorang dengan latar belakang ilmu-ilmu kesehatan menjadi pakar HI di kemudian hari. Begitupun seseorang dengan latar belakang ilmu Hubungan Internasional, mengambil kepakaran dalam bidang kesehatan nantinya; Pandemi Covid-19 juga membuka kesempatan bagi Hubungan Internasional untuk makin *down to earth*. Misalnya: Bilamana kondisi sistem internasional yang, menurut saya (**karena ini perdebatan**), memiliki karakteristik multipolar, dekonsentrik, dan asimetrik. Kemudian berpengaruh terhadap meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi, lalu tensi politik identitas yang marak berlangsung belakangan ini.

Lagi-lagi semua ini menjadi tantangan yang harus dihadapi para penstudi HI dimanapun berada. Berkaitan dengan tema yang diangkat dalam prosiding ini, saya ingin menambahkan dan bertanya: Apakah kita siap?...

Tentunya kita berharap bahwa prosiding ini bisa menjadi salah satu referensi akademik dalam memahami keilmuan hubungan internasional baik ditingkat nasional, regional maupun internasional .

Salam Hangat
Ketua Umum AIHII

Dr. Asep Kamaluddin Nashir, M.Si., C.T. CIRR.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor.....	iii
Sambutan Ketua Panitia	v
Sambutan Ketua AIHII.....	vii
Daftar Isi.....	viii
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KRISIS: RESPON SELANDIA BARU, TAIWAN, JERMAN DAN NORWEGIA TERHADAP PANDEMI COVID-19	
Dias Pabyantara Swandita Mahayasa, Aminannisa Rahmatika Hayati, Ester Sinambela.....	1
PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI DAN KRISIS PASCA-PANDEMI: STUDI KASUS SRI LANKA	
Arief Bakhtiar Darmawan, Chika Cahyani	16
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19: BERHENTI ATAU BERTRANSFORMASI?	
Anjani Tri Fatharini, Palupi Anggraheni	29
ANALISIS PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI AFGHANISTAN PASCA DIKUASAI TALIBAN PADA TAHUN 2021-2022	
I Putu Arya Aditia Utama, Abishay Muhammad Maulidio	40
ADAPTASI PASUKAN PERDAMAIAN PBB DI ERA PANDEMI: MONUSCO DAN REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO	
Firza Aulia Rossanti, Kholifatus Saadah	49
DIPLOMASI BUDAYA DI ERA PANDEMI (STUDI KASUS AKTIVITAS PENARI TRANSNASIONAL LENGGER LANANG BANYUMAS DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021)	
Agung Triyanto	56
DIPLOMASI DIGITAL INDONESIA PASCA PANDEMI: PROMOSI BALI SEBAGAI TUJUAN WISATA DI DALAM DRAMA KOREA	
Rafika Arsyad.....	64

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI) PADA INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA BERBASIS PARIWISATA BERKELANJUTAN PASCA PANDEMI COVID-19	
Muhammad Yamin, Ratna Sukmawati, David Yoanedi Putra, Afrizal Fajri	73
PERAN JUSTICE WITHOUT BORDERS DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19	
Ratna Ningtyas, Sri Wijayanti.....	91
ANALISIS ANCAMAN EPIDEMI VIRUS EBOLA TERHADAP KEAMANAN KESEHATAN (HEALTH SECURITY) NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO TAHUN 2018-2020	
Dea Winanda Dwi Lestari, Nuriyeni Kartika Bintarsari	98
FENOMENA PERNIKAHAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN SUMBANG, KABUPATEN BANYUMAS	
Dyah Retna Puspita, Slamet Rosyadi, Pawrtha Dharma, Alizar Isna	115
ADAPTASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) DENGAN PENDEKATAN GENDER SEBAGAI BENTUK INKLUSI SOSIAL MENGHADAPI COVID 19 (STUDI KASUS PROGAM TJSL ‘IBU SIAGA COVID 19’ PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT IV CILACAP)	
Aditya Anung Dwi Nugroho, Puji Rahmawati, King Amil Hamzah Al Hakim Shodikin	126

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KRISIS: RESPON SELANDIA BARU, TAIWAN, JERMAN DAN NORWEGIA TERHADAP PANDEMI COVID-19

Dias Pabyantara Swandita Mahayasa¹; Aminannisa Rahmatika Hayati²; Ester Sinambela³

^{1, 2, 3} Jurusan HI, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

¹ dias.pabyantara@unsoed.ac.id; ² aminannisarahma@gmail.com ; ³ ester.sinambela2003@gmail.com

Abstrak

Pada kuartal pertama, Maret sampai Juni 2020, negara di dunia merespon pandemi dengan cara beragam mulai dari melakukan karantina wilayah sampai dengan memberikan insentif ekonomi lokal. Di tengah keberagaman respon tersebut, terdapat pola yang menarik. Negara-negara yang pada awal pandemi dianggap responsif terhadap krisis seperti Selandia Baru, Taiwan, Jerman dan Norwegia dipimpin oleh perempuan. Berbeda dengan pemahaman umum yang mengaitkan kepemimpinan laki-laki dengan maskulinitas dan gaya kepemimpinan yang tegas, performa kepemimpinan perempuan di negara-negara tersebut justru berhasil memunculkan respon efektif terhadap krisis. Gaya kepemimpinan perempuan justru dianggap berhasil meminimalisasi korban jiwa di negara-negara tersebut. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini membandingkan kondisi dan gaya kepemimpinan pemimpin perempuan di Selandia Baru, Taiwan, Jerman dan Norwegia untuk mengetahui prakondisi yang menyebabkan efektivitas kepemimpinan perempuan di negara-negara tersebut. Argumen pertama yang ditawarkan adalah karena sifat krisis kesehatan lebih dekat kepada femininitas daripada maskulinitas. Kedua, kondisi relasi gender di masyarakat negara-negara tersebut relatif setara. Terakhir, gaya komunikasi keibuan yang diartikulasikan oleh pemimpin perempuan berhasil menyampaikan urgensi dari pandemi. Ketiga aspek tersebut yang membuat struktur demokratik di keempat negara tersebut merespon dengan baik gaya kepemimpinan perempuan di tengah krisis.

Kata Kunci: *Pemimpin Perempuan, COVID-19, Taiwan, Jerman, Selandia Baru, Norwegia.*

Abstract

In the March to June 2020, countries in the world responded to the pandemic in various ways, from conducting regional quarantines to providing local economic incentives. Countries that were considered responsive to the crisis, such as New Zealand, Taiwan, Germany, and Norway, were led by women. In contrast to the general understanding that links male leadership with masculinity and assertive leadership styles, the performance of women's leadership in these countries were top notch. Women's leadership style is considered successful in minimizing casualties in these countries. This study compares the leadership styles of women leaders in New Zealand, Taiwan, Germany, and Norway to determine the preconditions that lead to the effectiveness of women's leadership in these countries. The first argument offered that women's leadership is effective during a pandemic crisis is that the nature of the health crisis is closer to femininity than masculinity. Second, the conditions of gender relations in the societies of these countries are relatively equal. Lastly, the motherly communication style articulated by the female leader successfully conveys the urgency of the pandemic. These three aspects make the democratic structures in the four countries respond well to women's leadership styles during a crisis.

Keywords: *Female leader, Covid-19, Taiwan, German, New Zealand, Norway*

I. PENDAHULUAN

Dilansir dalam data WHO (2021), virus Covid-19 ini disebabkan oleh SARS-CoV-2. Virus Covid-19 telah menyebabkan penyakit pada sistem pernapasan dan dideteksi muncul pada Desember 2019 di Wuhan, China (Christensen & Senthilingam, 2020). Covid-19 memiliki sistem penyebaran secara cepat dan telah menyerang banyak negara secara global sehingga membuat status penyakit ini menjadi "pandemi global" yang telah ditetapkan oleh Direktur WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus (Elvina, 2020). World Health Organization atau WHO sebagai organisasi yang bergerak dibagian kesehatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melakukan tindakan pengarahan dan koordinasi terhadap semua negara untuk respon dalam menangani Covid-19, dimulai dari cara pencegahan, penekanan penyebaran hingga vaksinasi (WHO, 2022).

Adanya pernyataan yang dicetuskan oleh WHO ini memunculkan berbagai macam respon dari negara-negara di dunia, dimulai dari pembatasan sosial, menutup perbatasan, hingga kebijakan meminimalisasi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi. Tindakan yang dilakukan oleh tiap negara dalam menanggapi Covid-19 ini tentunya memiliki perbedaan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti Uni Eropa melakukan penguatan kesehatan dan bantuan ekonomi pada tahun 2020 (UE, 2020). Pandemi Covid-19 tentunya menimbulkan kejutan besar bagi seluruh dunia, adanya ketidaksiapan dalam krisis kesehatan ini memicu berbagai tindakan seperti keterlambatan dalam penanganan pada kuartal pertama tahun 2020. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Brazil, India, dan Rusia menjadi empat negara dengan jumlah kasus terbanyak (Kompas, 2020). Hal tersebut ditandai dengan ketidaksiapan Amerika Serikat di bidang kesehatan dengan kasus meninggal akibat Covid-19 tercatat sebanyak 163.000 jiwa pada agustus 2020 (Farzan et.al., 2020). Brazil dengan tidak meratanya sistem perawatan kesehatan yang mana bagian Utara dan Timur Laut dari negara tersebut memiliki perawatan kesehatan yang rendah (THE WORLD BANK, 2020). Rusia dengan keterlambatan dan tidak konsistennya yang absen pada tahap awal krisis dan ketidakpercayaan mayoritas rakyat Rusia akan kemampuan sistem kesehatan dikarenakan perpanjangan usia pensiun Presiden Putin (CSIS, 2020). Adanya ketidaksiapan ini tentunya merugikan banyak pihak, namun disamping itu ditemukan beberapa pola menarik terhadap respon penanganan Covid-19. Pola menarik tersebut dapat dilihat dari beberapa negara dalam tindakan cepat responsif dan keberhasilan penanganan untuk menekan penyebaran pandemi, negara tersebut adalah Selandia Baru, Taiwan, Jerman dan Norwegia yang pemimpinnya adalah perempuan. Dilansir dalam lembaga *think tank* Australia, sebagai pengevaluasi 116 negara untuk mengelola data pandemi Covid-19 selama 43 minggu setelah kasus terkonfirmasi hingga 9 januari 2021, negara yang dipimpin oleh perempuan memberikan respon yang lebih cepat seperti: Selandia Baru menduduki peringkat satu, Taiwan menduduki peringkat tiga, Norwegia menduduki peringkat delapan belas, dan Jerman menduduki peringkat lima puluh lima (Lowy, 2021). Pola menarik ini telah membuka diskusi bahwa selain struktur material sebagai penyusun kebijakan, faktor ideasional seperti gender juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas respon pemimpin dalam menanggapi suatu peristiwa.

Selandia Baru yang menduduki peringkat satu sebagai negara yang paling responsif terhadap Covid-19 ini, tercatat kasus yang terdeteksi pertama kali pada 26 Februari 2020 dan sebulan kemudian terkonfirmasi mengalami peningkatan sebanyak 100 kasus (Dyer, 2021). Pada awal maret 2020, Selandia Baru telah melakukan tindakan dengan mengikuti rencana pandemi berdasarkan mitigasi influenza untuk memperlambat masuknya pandemi, menekan penyebaran dan kemudian menerapkan langkah-langkah *social distancing*. Namun pendekatan mitigasi yang dilakukan sebagai respon pertama oleh Selandia Baru ternyata tidak dapat membendung penyebaran Covid-19 (Baker et.al., 2020). Kegagalan mitigasi ini mengakibatkan Selandia Baru melakukan tindakan baru, tindakan tersebut adalah strategi

eliminasi yang berupaya memberantas atau meminimalkan kasus Covid-19 dan telah diumumkan oleh Perdana Menteri Kesehatan Selandia Baru, Jacinda Ardern (MINISTRY OF HEALTH, 2020). Selandia Baru dengan prinsip "*early and hard*" telah berkomitmen pada strategi eliminasi dan terbukti berhasil membatasi penyebaran dan dampak virus Covid-19 (Cumming, 2022), dan pendekatan *All-of-government* (Dyer, 2021). Strategi eliminasi ini adalah strategi penguncian negara secara intensif atau yang lebih dikenal dengan *lockdown* dan pembatasan jarak fisik yang intens (Baker et.al., 2020). *Lockdown* yang telah dilakukan oleh Selandia Baru ini terbagi dalam empat tingkatan seperti siaga 1, siaga 2, siaga 3, dan siaga 4. Penerapan *lockdown* di negara Selandia Baru dimulai dengan dilakukannya karantina wajib kepada warga atau turis yang memasuki negaranya, pertemuan yang melebihi kapasitas 100 orang harus dibatalkan, membatasi kegiatan perjalanan domestik dan melakukan penerapan siaga sesuai tinjauan situasi (Unite against COVID-19, 2022). Pendekatan *All-of-government* diselenggarakan untuk meningkatkan tanggapan efektif pengobatan penyakit, kontrol perbatasan, penegakan mandat jarak fisik, kesejahteraan sosial dan dukungan pekerja, stimulus ekonomi, manajemen rantai pasokan, perdagangan, dan perdagangan asing (Dyer, 2021). Keberhasilan strategi eliminasi dengan prinsip "*Hard and Early*" yang dilakukan oleh Perdana Menteri Kesehatan Jacinda Ardern, dapat dibuktikan dengan laporan bahwa tidak adanya kasus baru Covid-19 pada 4 Mei 2020 dan pada 8 Juni 2020 dilaporkan bahwa tidak adanya kasus aktif Covid-19 lagi (Unite against COVID-19, 2022).

Presiden Taiwan, Tsai Ing-Wen juga merespon dengan cepat dan tegas. Dalam menanggapi wabah di China, Taiwan melakukan sistem pengawasan dengan sensitif dan intervensi kepada masyarakat dengan pelacakan kontak yang bertujuan menekan wabah Covid-19 di masyarakat (Cheng et.al., 2020). Dengan total 446 kasus pada 22 Juni 2020 dengan populasi 23,8 juta jiwa, Taiwan sejauh ini relatif sebagai negara yang memiliki jumlah kasus terendah meskipun dekat dengan pusat virus di China, keberhasilan negara ini dilakukan atas tanggapan pemerintah Taiwan terhadap Covid-19 dengan kecepatan, kewaspadaan, dan ketegasan (Han et.al., 2020). Pendekatan campuran yang dilakukan negara ini seperti kontrol perbatasan, peningkatan pengawasan, deteksi kasus dengan pelacakan kontak, karantina, peningkatan kapasitas laboratorium dan intervensi berbasis populasi seperti penggunaan masker wajah terbukti mampu menekan penyebaran COVID-19 di dalam negeri dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat. Semenjak kemunculan kasus Covid-19 terjadi di Wuhan, Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan (CDC Taiwan) yang diperintahkan oleh pemerintah mengumpulkan intelijen epidemi melalui sistem pengawasan berbasis peristiwa (Cheng et.al., 2020). Adanya laporan pertama tentang virus baru muncul di China, Taiwan segera melakukan monitoring dan memberlakukan karantina bagi kedatangan dari Wuhan. Taiwan juga kembali mengaktifkan Pusat Komando Epidemi Pusat (CECC) pada Januari 2020 (Su & Han, 2020). Taiwan, sejak 19 Maret juga melarang masuknya non-penduduk dan memberlakukan karantina rumah pada semua penduduk yang kembali (Cheng et.al., 2020). Melakukan pendanaan darurat untuk mendukung upaya pencegahan Covid-19 dan industri yang terkena dampak dengan menerapkan skema asuransi kesehatan nasional (NHI). Strategi Taiwan ini bertujuan untuk integrasi database NHI dengan database imigrasi, yang memberikan pihak medis mengakses riwayat perjalanan pasien. Taiwan juga meningkatkan teknologi inovatif, dengan pemindaian kode *Quick Response (QR)* dan pelaporan online untuk monitoring riwayat perjalanan, riwayat kontak, dan gejala kesehatan (Han et.al., 2020).

Penyebaran Covid-19 ini, membuat Norwegia terpukul keras namun dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Erna Solberg, negara ini secara cepat melakukan tindakan (Godin, 2020). Terlapor kasus pertama sebanyak satu kasus pada 21 Februari 2020 dan mengalami peningkatan pada 9 Maret 2020 dengan total kasus terdeteksi Covid-19 sebanyak 247 kasus (Statista, 2020). Kasus Covid-19 yang pertama kali terdeteksi di Norwegia pada

pertengahan Februari 2020, menjadikan Norwegia melakukan tindakan pengendalian infeksi, seperti: isolasi mandiri maupun isolasi pengawasan medis, penelusuran kontak kasus, menerapkan kebersihan tangan, dan kebiasaan bersin, batuk yang baru. Selanjutnya pada Maret-Juni 2020, negara ini memperketat aturan dengan memberlakukan karantina wajib kepada orang yang hendak memasuki negara tersebut dan melakukan lockdown (Helsingen et.al., 2020). Keberhasilan atas tindakan responsif Norwegia tersebut dalam menekan penyebaran virus Covid-19 membuahkan hasil sebagai salah satu negara dengan tingkat kematian terendah dan dapat membuka kembali perbatasannya serta menyambut wisatawan kembali pada Juli 2020 (Godin, 2020).

Kasus terdeteksi Covid-19 di Jerman, pertama kali pada 28 Januari 2020 dengan satu kasus dan mengalami lonjakan pada 4 April 2020 dengan total terdeteksi sebanyak 6.082 kasus (Statista, 2022). Jerman secara cepat tanggap dalam membuat kebijakan guna menekan penyebaran virus Covid-19. Keberhasilan Jerman dalam menekan penyebaran virus covid-19 ini ditandai dengan kasus infeksi yang rendah dan perlahan lahan melonggarkan status *lockdown*. Adapun tindakan mengatasi pandemi Covid-19 ini, pemerintah federal dan negara bagian terus berkoordinasi seperti yang telah diumumkan oleh Kanselir Angela Merkel (Bundesregierung | Startseite, 2020). Dilansir dalam website pemerintahan Jerman (Bundesregierung | Startseite, 2022), pada Maret 2020, Jerman telah membentuk resolusi yang berisikan penanganan cepat tanggap, konsentrasi medis pada Covid-19, melakukan edukasi tindakan dan pencegahan kepada populasi yang rentan beresiko Covid-19, membatasi ruang sosial, dan bekerjasama di Eropa khususnya dengan negara-negara tetangganya dalam pembahasan lintas batas. Adapun tindakan lain yang dilakukan pada bulan ini seperti penutupan tempat kecuali tempat kebutuhan primer yang tetap dibuka dengan memerhatikan protokol kesehatan, dan melakukan arahan jaga jarak. Pada April 2020, mengingat kasus Covid-19 yang masih tinggi, Kanselir Federal dan kepala pemerintahan negara bagian federal mengeluarkan resolusi yang mengacu pada resolusi sebelumnya tentang pengurangan kontak fisik dengan orang lain, membatasi perjalanan, melakukan intervensi kepada masyarakat dengan pelacakan kontak dengan sistem "*Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing*", mewajibkan penggunaan masker yang menutupi mulut dan hidung, melakukan *lockdown* serta membatasi jumlah perkumpulan. Pada awal Mei hingga Juni 2020, Jerman masih menerapkan peraturan sesuai resolusi sebelumnya namun memberi sedikit kelonggaran dengan pembukaan taman bermain, museum, kebun binatang, tempat ibadah dan pelanggaran perbatasan antara Jerman, Austria, Swiss, dan Prancis, namun untuk acara besar masih tetap dilarang untuk diadakan hingga 31 Agustus 2020.

Pandemi COVID-19 yang pada awalnya dianggap sebagai sebuah isu kesehatan masyarakat, telah berkembang menjadi suatu isu yang sangat kompleks, di mana juga mempengaruhi dinamika pada tingkat lokal regional, bahkan internasional. Dampak dari COVID-19 bukan hanya telah memakan banyak korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi suatu negara, baik dalam kestabilan politik, ekonomi, hingga krisis pangan. Hal-hal tersebut pun pada akhirnya turut menguji kepemimpinan dan kemampuan komunikasi para pemimpin politik dalam menangani pandemi COVID-19 karena salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan pandemik di masing-masing negara adalah kehadiran elemen kepemimpinan politik yang kuat pada semua tingkatan pemerintahan dalam mengendalikan kurva COVID-19 dan mengkomunikasikan langkah-langkah kesehatan kepada masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh para kepala negara (Aprilia et.al., 2020:92). Sangat krusialnya peran pemimpin dalam mengatasi pandemic COVID-19 ini membuat setiap langkah-langkah yang mereka ambil menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya yaitu dengan mencoba mengaitkan kesuksesan sejumlah pemimpin politik dalam menangani pandemic COVID-19 dengan menggunakan perspektif gender. Menurut The New York Times (2020), negara-negara yang memiliki pemimpin perempuan lebih efektif dalam memerangi krisis kesehatan

global COVID-19. Begitu juga opini yang dikeluarkan oleh Forbes (2020), bahwa kesamaan dari negara-negara yang berhasil dalam mengatasi pandemi global COVID-19 adalah mereka dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan. Hal ini juga dikuatkan oleh salah satu badan PBB, UN WOMEN. Mereka mempublikasikan laporan singkat yang menyoroti kepemimpinan perempuan dalam menanggapi COVID-19 dinilai lebih efektif meskipun mereka seringkali kurang terwakili di tingkat pengambilan keputusan tertinggi di sektor-sektor yang terkena dampak langsung pandemi COVID-19. Saat ini, hanya 21 negara di dunia yang memiliki kepala negara dan pemerintahan seorang perempuan. Namun, pemimpin mereka dipuji karena efektivitasnya lebih besar dalam mengelola krisis kesehatan COVID-19. Beberapa negara yang dikepalai oleh perempuan yaitu Selandia Baru, Taiwan, Jerman, dan Norwegia. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi domestik pada masing-masing negara tersebut. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Selandia Baru, negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern ini menyatakan bahwa tidak ada kasus baru dan kematian yang disebabkan oleh COVID-19 per 28 September 2020 (Ministry of Health New Zealand, 2020). Keberhasilan tersebut juga tercatat di Jerman yang dipimpin oleh Kanselir Angela Merkel yang memiliki tingkat kematian lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara, seperti Inggris, Italia, Prancis, Spanyol, dan lainnya yaitu sebanyak 71 orang per 21 September 2020 (WHO, 2020). Begitu juga dengan Norwegia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ema Solberg, berhasil mengalami penurunan jumlah peningkatan kasus COVID-19 mingguan pada 28 September (WHO, 2020). Selain ketiga negara tersebut, Taiwan yang dipimpin oleh Presiden Tsai Ing-wen, menyatakan bahwa tidak ada laporan kasus baru per 28 September 2020 (Taiwan Centres for Disease Control, 2020).

Hal ini berbanding terbalik dengan negara-negara, seperti Amerika Serikat, Brazil, Spanyol, dan Rusia, yang menjadi empat negara dengan jumlah kasus terbanyak. (CNBC, 2020). Menurut laporan, pada 1 September 2020, Amerika Serikat tercatat telah melampaui enam juta kasus (CNBC, 2020). Meskipun jumlah kasus harian menurun akan tetapi Amerika Serikat masih menjadi negara yang paling terdampak di dunia dalam hal jumlah total kasus dan kematian. Brazil juga mencatat peningkatan 46.809 kasus harian pada 3 September 2020 (The New York Times, 2020). Sementara itu, menurut laporan CNN pada 25 September 2020, Rusia terus mengalami peningkatan jumlah kasus harian sejak Juni 2020. Sedangkan kasus COVID-19 baru di Spanyol telah melonjak setelah pembukaan kembali sekolah sehingga totalnya menjadi lebih dari 500.000 kasus pada September 2020 (DW, 2020). Hal yang menarik adalah bahwa keempat negara dengan jumlah kasus terbanyak tersebut memiliki kesamaan yaitu keempatnya dipimpin oleh seorang pemimpin laki-laki. Hal tersebut membuktikan bahwa pemimpin laki-laki cenderung efektif, proaktif, dan cepat tanggap dalam menangani COVID-19 yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah kasus di keempat negara di atas dibandingkan dengan negara yang dipimpin oleh perempuan. Fakta-fakta di atas juga menentang persepsi dan konsepsi akan kepemimpinan yang kuat dan maskulinitas dalam politik yang selalu diasosiasikan dengan figur laki-laki. Selain itu, anggapan yang selama ini berkembang adalah kebijakan luar negeri biasanya lebih condong ke arah karakteristik laki-laki atau maskulinitas di mana terdapat anggapan bahwa kebijakan luar negeri biasanya adalah memperjuangkan kekuasaan dan otonomi yang dapat melindungi masyarakatnya. Tulisan ini menjelaskan fenomena tersebut. Fokus yang diangkat adalah mengapa negara-negara dengan pemimpin perempuan mempunyai respon yang baik terhadap krisis kesehatan COVID-19. Tulisan ini menggunakan empat negara yang dipimpin perempuan yaitu Selandia Baru, Taiwan, Jerman dan Norwegia. harian sejak Juni 2020. Sedangkan kasus COVID-19 baru di Spanyol telah melonjak setelah pembukaan kembali sekolah sehingga totalnya menjadi lebih dari 500.000 kasus pada September 2020 (DW, 2020). Hal yang menarik adalah bahwa keempat negara dengan jumlah kasus terbanyak tersebut memiliki kesamaan yaitu keempatnya dipimpin oleh seorang pemimpin laki-laki. Hal tersebut membuktikan bahwa

pemimpin laki-laki cenderung efektif, proaktif, dan cepat tanggap dalam menangani COVID-19 yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah kasus di keempat negara di atas dibandingkan dengan negara yang dipimpin oleh perempuan. Fakta-fakta di atas juga menentang persepsi dan konsepsi akan kepemimpinan yang kuat dan maskulinitas dalam politik yang selalu diasosiasikan dengan figur laki-laki. Selain itu, anggapan yang selama ini berkembang adalah kebijakan luar negeri biasanya lebih condong ke arah karakteristik laki-laki atau maskulinitas di mana terdapat anggapan bahwa kebijakan luar negeri biasanya adalah memperjuangkan kekuasaan dan otonomi yang dapat melindungi masyarakatnya. Tulisan ini menjelaskan fenomena tersebut. Fokus yang diangkat adalah mengapa negara-negara dengan pemimpin perempuan mempunyai respon yang baik terhadap krisis kesehatan COVID-19. Tulisan ini menggunakan empat negara yang dipimpin perempuan yaitu Selandia Baru, Taiwan, Jerman dan Norwegia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagai dasar paradigmanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pemaknaan terhadap subjek yang diteliti dengan kondisi yang dialami subjek (Creswell, 1998). Dalam kaitan ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk melakukan deskripsi dan elaborasi terhadap relasi subjek dengan lingkungannya dengan menonjolkan perspektif subjek terhadap fenomena (Creswell, 1998). Dalam penelitian kualitatif posisi teori tidak berfungsi untuk menjelaskan fenomena, melainkan untuk memandu peneliti dalam memahami fenomena secara komprehensif. Sehingga dalam tinjauan teoritik, teori-teori yang dihasilkan tidak bersifat menjelaskan fenomena, hanya memberi gambaran umum terhadap fenomena. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengelaborasi relasi antara kepemimpinan perempuan dalam krisis kesehatan dengan konteks krisis kesehatan dari sisi gender. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan dilakukan bersifat non-partisipatif. Teknik pengumpulan data ini memposisikan peneliti di luar dari objek yang diteliti, sehingga peneliti bersifat sebagai pengamat dari objek penelitian.

III. PEMBAHASAN

Dalam tulisan ini terdapat tiga argumen yang diajukan sebagai penjelasan hubungan relasional antara kepemimpinan perempuan dengan respon yang baik terhadap krisis kesehatan di masa pandemi. Pertama dari sisi sifat dari krisis kesehatan, kemudian dari sisi kondisi masyarakat empat negara tersebut dan gaya komunikasi keibuan yang dilakukan pemimpin di negara tersebut.

A. Nilai Feminime Dalam Krisis Kesehatan

Kesuksesan para pemimpin perempuan dalam mengendalikan pandemik COVID-19 membuat gaya kepemimpinan mereka mendapat banyak sorotan. Melalui berbagai media, negara-negara yang dipimpin perempuan ini dinyatakan cenderung lebih efektif dalam memerangi krisis kesehatan global COVID-19. UN WOMEN, bahkan merilis ringkasan kebijakan yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam penanganan COVID-19 mempercepat proses pemulihan dan penanganan lebih efektif dan inklusif. Bahkan, pada tingkat pengambilan keputusan (*decision-making*) yang paling tinggi, misalnya, keterlibatan perempuan sebagai kepala negara di 21 negara menunjukkan adanya langkah pengelolaan krisis kesehatan yang lebih efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh fakta bahwa kebanyakan pemimpin perempuan memiliki batas toleransi terhadap kondisi ambiguitas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pemimpin laki-laki, yang mana hal tersebut menyebabkan pemimpin perempuan cenderung mengambil kebijakan-

kebijakan yang bersifat preventif untuk menekan resiko yang mungkin terjadi (*risk-averse*) (Forbes, 2020). Karena sifat preventifnya tersebut, para pemimpin ini juga dipuji akan ke tanggapannya dalam melakukan langkah-langkah pencegahan yang sekaligus meratakan kurva COVID-19 melalui berbagai usaha karantina, social distancing, testing, hingga penyediaan informasi kesehatan berbasis fakta yang transparan melalui gaya kepemimpinan yang lebih interpersonal dengan menekankan pada teknik-teknik komunikasi yang lebih interaktif.

Jika dibandingkan dengan gaya kepemimpinan laki laki dalam merespon perang, pemimpin laki laki cenderung lebih responsif, dan agresif. Perang dianggap sebagai produk biososial laki-laki dan bidang manifestasi laki-laki (Goldstein, 2001). Hal tersebut berkaitan erat dengan sisi maskulinitas. Konsep sosial gender melihat maskulinitas dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial dan budaya dengan stereotip bahwa maskulin itu agresif, analitis, ambisius, kompetitif, mandiri, dominan, kuat, kebal dan asertif (Moynihan, 1998). Salah satu bentuk responsif agresif dari pemimpin laki-laki dapat dilihat dari sejarah Perang Dunia ke-2, yang mana Presiden Franklin Roosevelt dari Amerika Serikat meminjamkan kapal perang dan senjata ke Inggris Raya serta membuat bahan perang (Britannica, n.d.). Berbeda dengan respon negara yang dipimpin oleh laki-laki dalam krisis kesehatan, seperti: virus ebola yang jika diulik kembali, respon terjadi secara lambat. Presiden Ernest Bai Koroma selaku pemimpin Sierra Leone masa itu mengkritik kepala Dana Moneter Internasional, Bank Dunia dan Ban Ki-moon selaku Sekjen PBB bahwa reaksi global terjadi lebih lambat daripada ritme penularan penyakit (AFP, 2014). Oleh karena itu, terdapat kecenderungan terhadap kepemimpinan laki laki dalam memberikan respon yang lambat dalam masalah kesehatan, dibuktikan dengan kegagalan WHO dan beberapa negara seperti Guinea, Liberia, Sierra Leone dalam penanganan kasus ebola yang masa itu dipimpin oleh pemimpin laki-laki (BBC, 2015).

Keberhasilan pemimpin perempuan dalam menghadapi krisis kesehatan juga dipengaruhi oleh karakteristik kepemimpinan mereka yang lebih kolektif (*collective*), kolaboratif (*collaborative*), empatik, serta membina (*coaching*) jika dibandingkan para pemimpin laki-laki sehingga karakteristik tersebut sangat diperlukan untuk melengkapi respon atas kondisi krisis kesehatan global (Medium, 2020). Selain itu, pada situasi-situasi darurat seperti krisis kesehatan global, representasi perempuan dibutuhkan untuk menekan resiko pengabaian atas unsur pengembangan, pengawasan dan pemantauan kebijakan, penetapan rencana dan anggaran, hingga langkah-langkah pemulihan ekonomi dan ketahanan kesehatan di masa yang akan datang. Hal tersebut didukung oleh penanganan perempuan dalam pandemi yang pernah terjadi sebelumnya, seperti Ebola, Zika, dan SARS, yang mana kebutuhan atas perempuan dalam menangani keadaan darurat sangat besar dalam proses mitigasi dan pemulihan kebijakan.

B. Kesetaraan Gender yang Tinggi dalam Masyarakat

Keberhasilan dari para pemimpin perempuan di keempat negara tersebut juga didukung oleh tingkat kesetaraan gender di negara-negara tersebut. Pada 2021, Jerman menempati peringkat 10 di Uni Eropa dalam indeks kesetaraan gender dengan jumlah skor yaitu 68.6 dari 100 poin. Sejak 2010, skor Jerman dalam kesetaraan gender terus meningkat sebesar 6 poin dan terhitung sejak 2018, Jerman telah meningkat 1,1 poin dan peringkatnya meningkat satu tempat (EIGE, 2021). Sementara itu, di tingkat dunia, Jerman menduduki peringkat ke-11 dalam indeks kesetaraan gender 2021 dengan total indeks mencapai 79.60%. Sementara itu, Norwegia berada pada peringkat ke-3 dunia untuk tingkat kesetaraan gender dengan indeks 84.90%. Tepat di bawah Norwegia, yaitu posisi keempat diduduki oleh Selandia Baru dengan perolehan 84.00% (World Economic Forum, 2021). Jerman dengan status kesetaraan gender yang tinggi namun dibawah

Norwegia (Carter, 2019), memiliki populasi perempuan lebih tinggi dibanding pria dengan selisih 1 juta jiwa. Keterlibatan perempuan dalam ranah publik seperti pengusaha, direktur perusahaan, ilmuwan atau ahli, memainkan peran penting dalam bisnis Jerman. Dalam hal pendapatan, ada ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari kesenjangan upah gender sekitar 18 persen pada tahun 2020. Perempuan Jerman dalam posisi pendidikan tergolong tinggi sekitar 50 persen lulusan universitas dan sekitar 45 persen mahasiswa doktoral adalah perempuan (Iglhaut, 2022). Keterlibatan perempuan dalam politik Jerman juga sangat tinggi, Jerman memiliki 30,9 persen menteri perempuan di kabinet baru koalisi pemerintahan (Carter, 2019)

Norwegia sebagai salah satu negara dengan kesetaraan gender yang tinggi dibuktikan dengan pengesahan Perundang-undangan gender pada tahun 2002. Hal tersebut mengatur diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kehamilan, cuti berbayar sehubungan dengan melahirkan atau adopsi, tanggung jawab perawatan, etnis, agama, kepercayaan, kecacatan, orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, usia atau karakteristik penting lainnya dari seseorang (Gundersen, 2020). Keadaan kesetaraan gender di Norwegia juga mengalami peningkatan dalam peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup dan pemberdayaan politik. Selandia Baru dalam UN WOMEN mengakui tujuan penting akan kesetaraan gender dalam agenda 2030 (SDGs) dan mengutamakan gender di seluruh program pembangunan nasional serta menargetkan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Komitmen Selandia Baru dalam prioritas kesetaraan gender ditandai dengan mendukung perempuan dan anak perempuan dalam pendidikan dan pelatihan; memanfaatkan keterampilan perempuan dan menumbuhkan ekonomi; mendorong dan mengembangkan pemimpin perempuan; dan meningkatkan keamanan perempuan dari kekerasan. Selandia Baru juga mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1325 tentang Perdamaian dan Keamanan Perempuan, yang fokusnya pada partisipasi dan kepemimpinan perempuan, termasuk penempatan staf senior di Angkatan Pertahanan Selandia Baru, Polisi Selandia; dan dukungan bantuan pembangunan yang relevan dengan kepemimpinan di Pasifik. Prioritas Pemerintah untuk perempuan difokuskan pada: mendorong perempuan dan anak perempuan dalam pendidikan dan pelatihan; memanfaatkan keterampilan perempuan dan menumbuhkan ekonomi; mengembangkan pemimpin perempuan; dan memastikan perempuan dan anak perempuan bebas dari kekerasan; menyediakan akses gratis ke sekolah dan berupaya mengurangi stigma menstruasi dan menjadikannya bagian dari kehidupan di sekolah serta meningkatkan akses kesehatan. Taiwan menunjukkan proporsi kesetaraan gender dengan memiliki legislator perempuan tertinggi di Asia dan ke-16 di dunia, pengambilan keputusan yang diperankan oleh perempuan di ranah pemerintahan, sekolah dan swasta menyumbangkan 43% peran, kesenjangan upah gender semakin menurun dari upah rata-rata 17,9% tahun 2009 menjadi 14,2% di tahun 2020, dalam sektor pendidikan peran perempuan ditandai dengan insinyur berada dalam presentasi 13% (TAIPEI TIMES, 2020). Namun hal kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga masih terus terjadi dengan adanya laporan lebih dari 120.000 laporan pertahun (Hsin-fang & Chung, 2022).

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa keempat negara tersebut memberikan perhatian yang positif terhadap kepemimpinan dan partisipasi perempuan, dalam hal ini yaitu di ranah politik dan pengambilan keputusan. Keempat pemimpin perempuan ini dipercaya memiliki kemampuan unggul untuk memegang kendali atas manajemen krisis dan mengambil suatu kebijakan publik. Adanya *tren-balanced* di dalam pemerintahan yang mulai diterapkan pada sebagian besar negara, memungkinkan munculnya perubahan menuju kondisi dunia yang lebih setara. Usaha peningkatan angka partisipasi perempuan dalam pemerintahan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi bangku politik yang

kosong. Akan tetapi, lebih dari itu, partisipasi perempuan pada ranah politik ini juga dipercaya mampu membawa perubahan positif yang signifikan. Kehadiran perempuan dalam ranah politik ini akan membawa perspektif baru yang dapat berpengaruh terhadap agenda politik. Jika dihubungkan dengan isu pandemi COVID-19, setiap pemimpin di masing-masing negara di dunia pastinya telah menerapkan kebijakan nasionalnya untuk menghadapi permasalahan ini. Namun, nyatanya, keempat negara yang menggunakan pendekatan-pendekatan berbasis kesetaraan gender, yang mana menghubungkan sifat-sifat feminitas dan maskulinitas dalam kebijakan para pemimpin perempuan telah menjadi faktor-faktor keberhasilan dalam penanganan COVID-19. Hal ini mematahkan stigma yang berkembang dalam masyarakat mengenai konsep kepemimpinan. Konsepsi tradisional yang kental dan ideal bahwa seorang pemimpin politik membutuhkan sifat maskulinitas yang sering diasosiasikan dengan gender laki-laki, sekaligus mengacu pada sosok yang rasional dan tegas menjadi pembatas bagi partisipasi perempuan dalam politik domestik maupun global karena sifat perempuan yang cenderung dipandang lemah, emosional, dan tidak rasional (Aprilia et.al., 2020) Ketidaksetaraan gender ini menjadi akar permasalahan dari ketidakadilan yang diterima perempuan untuk berpartisipasi sebagai pembuat keputusan. Hal ini yang menyebabkan peran perempuan menjadi terbatas.

C. Gaya Komunikasi “Keibuan”

Gaya komunikasi keibuan yang dilakukan oleh pemimpin perempuan di negara Taiwan, Jerman, Norwegia dan Selandia Baru identik dengan stereotip feminis. Stereotip feminis yang mana bercirikan emosional, lembut, loyal, memahami, peka, hangat, ekspresif, dan penuh kasih (Moynihan, 1998). Perdana menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan pada pidatonya “Kabinet bertemu pagi ini untuk membahas tindakan kamu selanjutnya dalam perang melawan COVID-19. Seperti bagian dunia lainnya, kita menghadapi potensi dampak buruk dari virus ini. Tetapi, melalui tindakan tegas, dan melalui kerja sama, apakah kita memiliki jendela kecil untuk maju” (Newshub, 2020). Tindakan responsif untuk perang melawan Covid-19 dan melakukan status lockdown secara bertahap yang bertujuan menekan penularan virus oleh Jacinda Ardern tersebut tentunya memunculkan urgensi bahwa pandemi Covid-19 ini sangat berbahaya. Diikuti dengan gaya komunikasi pemimpin perempuan di Taiwan yang bertindak tegas dengan memasok stok masker, melakukan lockdown dan melakukan penelitian medis di tengah-tengah kebimbangan negara lain dalam mengambil tindakan (Griffiths, 2020). Kanselir Angela Merkel dalam pidatonya pada 18 maret 2020 kepada warga Jerman dengan mengatakan “Virus corona saat ini secara dramatis mengubah hidup kita”, “pemahaman kita tentang normalitas, kehidupan publik, kebersamaan sosial - semua ini sedang diuji tidak seperti sebelumnya”, “saya sangat yakin bahwa kami akan mengelola tugas ini jika semua warga negara melihatnya sebagai tugas mereka,” ujar Merkel. "Ini serius. Ambillah dengan serius.” (North, 2020). Erna Solberg selaku perdana menteri negara Norwegia juga optimis dalam tindakannya yang cepat tanggap dalam memberlakukan lockdown demi menekan penyebaran virus Covid-19 (Godin, 2020). Keunikan dari respon pemimpin perempuan ini dalam menanggapi Covid-19 yang ditandai dengan kepekaan sehingga mampu bertindak lebih cepat, memahami bahwa pandemi ini berdampak buruk, ekspresif dan penuh kasih sayang dengan mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Keunikan tersebut yang tergolong dalam stereotip feminisme tentunya mampu menimbulkan urgensi bahwa Covid-19 adalah kasus yang serius dan mematikan.

C.1 Pesan Keibuan Jacinda Ardern

Pada pemerintahan Jacinda Ardern, ia lebih mengedepankan kebijakan yang terencana, tegas, jelas, dan cepat tanggap. Ia juga memiliki gaya komunikasi yang efektif sehingga mampu mendukung terlaksananya kebijakan yang sudah direncanakan. Jacinda Ardern menyatakan bahwa pemerintah Selandia Baru memprioritaskan masalah kesehatan dan visi untuk mengatasi penyebaran virus. Dalam pelaksanaannya, Ardern dan Kementerian Kesehatan Selandia Baru sangat mengutamakan basis laporan situasi dan panduan dari WHO dalam implementasi yang mengarahkan pada pencarian kasus, pelaksanaan isolasi, dan penelusuran terhadap kontak kasus secara cepat. Hal tersebut yang menyebabkan kepemimpinan Ardern sangat mengutamakan transparansi data kondisi domestik sebagai salah satu alat komunikasi publik yang mengacu pada *four-level COVID-19 alert system*. Selain itu, gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan Ardern yang efektif juga terlihat dari press release yang dilakukan secara jelas, tegas, konsisten, dan empatik. Sifat dan karakteristik ini menunjukkan kombinasi kepemimpinan maskulinitas dan feminitas yang keibuan. Dalam hal ini, Ardern tak hanya memberikan pengaruh segi rasionalitas dalam memberikan himbauan terhadap masyarakat, akan tetapi juga mempengaruhi level emosional mereka melalui sifat dan pesan-pesan keibuan yang ia miliki. Pesan keibuan tersebut ia ekspresikan melalui ungkapan-ungkapan Ardern, misalnya "*Unite Against Covid*" dan "*Be Strong. Be Kind*". Kepemimpinan Ardern tersebut mendapat respon yang baik dari masyarakat sehingga mampu memberikan hasil yang lebih efektif sekaligus menjadikan Selandia Baru sebagai salah satu negara dengan kasus dan angka kematian COVID-19 terendah (The Guardian, 2020). Gaya komunikasi publik Ardern sendiri memang tidak perlu diragukan. Misalnya yaitu setelah ia memberlakukan karantina total pada Maret 2020 yang terbukti efektif dalam mengajak publik untuk mematuhi kebijakan pemerintah, ia melakukan siaran langsung melalui akun Facebook pribadinya dengan hanya memakai kaos, sweater, dan celana panjang. Dalam siaran tersebut ia juga menyampaikan permintaan maafnya dengan mengatakan "*it can be messy putting toddlers to bed*". Kalimat yang disampaikan melalui gaya komunikasinya tersebut memberikan kesan bahwa seorang perdana menteri juga merupakan seorang ibu ketika di rumah, yang mana tidak ada bedanya dengan warga negaranya di masa pandemi.

C.2 Pesan Keibuan Angela Merkel

Jerman juga merupakan salah satu negara yang berhasil mengendalikan pandemik COVID-19 dengan sangat baik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari gaya kepemimpinan Angela merkel dan praktik yang baik dari metode komunikasi efektif yang secara intensif dilakukannya. Angela Merkel sendiri memiliki latar belakang sebagai seorang ilmuwan sehingga hal tersebut juga mempengaruhi gaya komunikasi publiknya cenderung metodologis yang berdasarkan pada analisis sains dan medis. Namun, di sisi lain juga ia gaya komunikasi Merkel dalam press release-nya juga terlihat tenang dan menunjukkan kepedulian secara emosional, yang mana memperkuat sisi feminitasnya. Ia bahkan mendapatkan julukan mummy (mutter). Hal ini disebabkan oleh gaya komunikasinya dianggap para pendukungnya seperti seorang ibu yang selalu ada untuk mereka. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh kebiasaan Merkel yang berbelanja sendiri bahan-bahan makanan ke supermarket bahkan setelah ia menjabat sebagai kanselir sehingga menimbulkan citra bahwa di luar keputusan-keputusan yang ia buat, ia juga merupakan seorang ibu yang harus memasak untuk keluarganya. Dalam kondisi pandemik, ketika ia

menyampaikan kebijakannya mengenai karantina wilayah, ia juga menyampaikan sebuah pesan yang memiliki kesan "keibuan" dengan mengatakan, "*even now, grandchildren are recording podcasts for their grandparents, let them know they are not alone*" yang memberikan kesan bahwa di luar posisinya sebagai kanselir, ia juga merupakan seorang nenek yang merindukan cucunya (Centrius, 2021).

C.3 Pesan Keibuan Erna Sjoberg

Selama pandemi, Erna Sjoberg mengadakan konferensi pers khusus bagi anak-anak. Menurutnya banyak anak-anak akan merasa ketakutan dengan kondisi saat ini (Johnson et.al., 2020). Dalam konferensi pers tersebut ia memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi keluarga mereka dengan lembut. Selain itu, dalam kesempatan tersebut ia juga menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menangani pandemik COVID-19 kepada orang tua secara lebih spesifik. Dalam hal ini, Sjoberg berusaha untuk membangun pemahaman bahwa para orang tua bukan hanya dilindungi sebagai seorang warga negara, melainkan juga karena mereka memiliki anak-anak yang harus dirawat. Sjoberg berusaha untuk menempatkan posisi warga negara tidak hanya dalam kerangka politik, tetapi juga sebagai sesama manusia dan orang tua. Gaya komunikasi yang memberikan kesan keibuan ini tentunya mendapatkan respon yang baik dari masyarakat.

C.4 Pesan Keibuan Tsai Ing-wen

Dalam penanganan terhadap COVID-19 di Taiwan, Tsai Ing-wen mengambil beberapa langkah, seperti penekanan terhadap *contract-tracing*, *testing*, karantina, dan isolasi. Tsai Ing-wen sendiri memiliki gaya kepemimpinan yang bersifat *people-oriented*. Hal tersebut terlihat dari usahanya bersama pemerintah dalam memastikan ketersediaan masker dan peralatan medis, serta akses publik terhadap *massive testing* secara gratis dan mudah. Ia juga menyampaikan perkembangan dan transparansi data pada publik sebagai bentuk kepercayaan pada masyarakat Taiwan dalam menangani COVID-19. Usaha tersebut juga didukung oleh gaya komunikasi Tsai Ing-wen yang jelas, tenang, tegas, dan konsisten dalam menangani pandemik tetapi di sisi lain juga memiliki kepedulian dalam memastikan inklusivitas dan aksesibilitas alat medis bagi masyarakat Taiwan.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, kepemimpinan perempuan dalam menanggapi krisis kesehatan lebih responsif dibanding kepemimpinan laki-laki. Hal tersebut merujuk pada data yang disediakan oleh lembaga think tank Australia yang memperoleh hasil dengan empat negara yang dipimpin oleh perempuan berada pada peringkat teratas dalam penanganan Covid-19, negara tersebut adalah Selandia Baru, Norwegia, Taiwan dan Jerman. Keberhasilan kepemimpinan perempuan dalam menekan Covid-19 ini tentunya memunculkan pola menarik dan dikaitkan dengan stereotip feminis. Keterkaitan antara kepemimpinan perempuan dengan respon yang baik terhadap krisis kesehatan dapat dijelaskan seperti: nilai-nilai feminis dekat dengan krisis kesehatan sehingga memunculkan tindakan yang cepat tanggap, kondisi kesetaraan gender di negara-negara tersebut relatif setara, dan gaya komunikasi dari pemimpin negaranya yang komunikatif dan bersifat keibuan sehingga mampu menciptakan urgensi terhadap Covid-19 ini.

Dari pemaparan di atas, penelitian ini berupaya memberi kontribusi terhadap kajian nilai-nilai feminisme, khususnya kepemimpinan perempuan dalam menanggapi krisis kesehatan. Oleh karena itu, peneliti berharap pada penelitian selanjutnya diadakan kajian lebih

lanjut mengenai peran pemimpin perempuan dalam menghadapi perang, sehingga diperoleh gambaran bagaimana pemimpin perempuan dalam merespon situasi perang tersebut. Hal ini penting untuk memberikan narasi alternatif terhadap kajian kepemimpinan dan krisis yang sejauh ini didominasi sudut pandang maskulin.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. I. 2020. *Manajemen Krisis: Kepemimpinan Dalam Menghadapi Situasi Krisis Covid-19*. Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, 1(2), 223. <https://doi.org/10.32478/leadership.v1i2.448>
- Aprilia, B., Maria Surya, F., & Svarna Pertiwi, M. 2020. *Analisis Pergeseran Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Feminitas dan Maskulinitas dalam Kepemimpinan Perempuan: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan*. Jurnal Sentris, 1(2), 91–108. <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i2.4294.91-108>
- Baker, M. G., Kvalsvig, A., & Verrall, A. J. 2020. *New Zealand's COVID-19 elimination strategy*. The Medical journal of Australia, 213(5), 198–200.e1. <https://doi.org/10.5694/mja2.50735>
- BBC News. 2015. Ebola global response 'too slow'. (Online), <<https://www.bbc.com/news/av/health-34901636>>, diakses 20 Juni 2022.
- Bundesregierung.de. 2022. *Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 17. Juni 2020*. (Online), <<https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1761544/62599d82665457ff0428504eade9a5c0/2020-06-17-bewaeltigung-corona-data.pdf?download=1>>, diakses 12 Juni 2022.
- Bundesregierung.de. 2022. *Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 6. Mai 2020*. (Online), <<https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1750986/fc61b6eb1fc1d398d66cfea79b565129/2020-05-06-mpk-beschluss-data.pdf?download=1>>, diakses 12 Juni 2022.
- CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES. 2020. *Russia's Response to Covid-19*. (Online), <<https://www.csis.org/analysis/russias-response-covid-19>>, diakses 29 Juni 2022.
- Cheng, H. Y., Chueh, Y. N., Chen, C. M., Jian, S. W., Lai, S. K., & Liu, D. P. 2021. *Taiwan's COVID-19 response: Timely case detection and quarantine, January to June 2020*. Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 120(6), 1400–1404. <https://doi.org/10.1016/j.jfma.2020.10.023>
- Christensen, J., & Senthilingam, M. 2020. *Coronavirus explained: What you need to know*. CNN, (Online), <<https://edition.cnn.com/2020/01/20/health/what-is-coronavirus-explained/index.html>>, diakses 29 Juni 2022.
- Creswell, J.W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*. London: Sage Publications.
- Cumming, J. 2022. *Going hard and early: Aotearoa New Zealand's response to Covid-19*. Health Economics, Policy and Law, 17(1), 107-119. doi:10.1017/S174413312100013X
- Dyer, P. 2021. *Policy and institutional responses to COVID-19: New Zealand*. Brookings. (Online), <<https://www.brookings.edu/research/policy-and-institutional-responses-to-covid-19-new-zealand/>>, diakses 29 Juni 2022.
- Elvina, L. 2020. *WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global*. KOMPAS.tv. (Online), <<https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>>, diakses 29 Juni 2022.

- Gender.no. 2022. Gender Equality | Gender in Norway. (Online), <<https://gender.no/gender-equality>>, diakses 19 Juni 2022.
- European Institute for Gender Equality. 2022. Gender Equality Index |2020 | Germany | European Institute for Gender Equality. <<https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/country/DE>>, diakses 19 Juni 2022.
- Godin, M. 2020. Erna Solberg on COVID-19 in Norway, Reopening and a Greener Economy | TIME. (Online), <<https://time.com/5868670/erna-solberg-on-how-norway-is-reopening-with-cautious-optimism-we-know-where-the-risk-points-are/>>
- Goldstein J. 2001. War and gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa. Cambridge: Cambridge University Press.
- Griffiths, J. 2020. Taiwan's coronavirus response is among the best globally - CNN. (Online), <<https://edition.cnn.com/2020/04/04/asia/taiwan-coronavirus-response-who-intl-hnk/index.html>>
- Gundersen, M. 2022. Gender Equality: How Norway Measures Up - Life in Norway. Life in Norway. (Online), <<https://www.lifeinnorway.net/gender-equality/>>, diakses 19 Juni 2022.
- Han, E., Chiou, S. T., McKee, M., & Legido-Quigley, H. 2020. The resilience of Taiwan's health system to address the COVID-19 pandemic. *EClinicalMedicine*, 24, 100437. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100437>
- Harini, S. 2021. *THE ROLE OF WOMEN'S TRANSFORMATIVE POLITICAL LEADERSHIP IN DECONSTRUCTING PATRIARCHY DURING COVID-19 PANDEMIC*. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 2(2), 96. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v2i2.10954>
- Helsingen, L. M., Refsum, E., Gjøstein, D. K., Løberg, M., Bretthauer, M. Emilsson, L. 2020. *The COVID-19 pandemic in Norway and Sweden – threats, trust, and impact on daily life: a comparative survey*. *BMC Public Health*, 20(1). doi:10.1186/s12889-020-09615-3
- Hbanet.org. 2022. Germany: Facts About the Status of Gender Equality | HBA. (Online), <<https://www.hbanet.org/news/2021/05/5/germany-facts-about-the-status-of-gender-equality%C2%A0>>, diakses 19 Juni 2022..
- IamExpat. 2022. Gender equality in Germany is 10th best worldwide. (Online) <<https://www.iamexpat.de/expat-info/german-expat-news/gender-equality-germany-10th-best-worldwide>>, diakses 19 Juni 2022.
- Iglhaut, C. 2022. How women live and work in Germany. *deutschland.de*. (Online), <<https://www.deutschland.de/en/topic/life/women-in-germany-society-politics-education>>, diakses 19 Juni 2022.
- Interactives.lowyinstitute.org. 2021. Covid Performance Index DECONSTRUCTING PANDEMIC RESPONSES. (Online), <<https://interactives.lowyinstitute.org/features/covid-performance/#overview>>, diakses 29 June 2022.
- Johnson, C. 2020. *Gender and Political Leadership in a Time of COVID | Politics & Gender*. Cambridge Core. (Online), <<https://www.cambridge.org/core/journals/politics-and-gender/article/gender-and-political-leadership-in-a-time-of-covid/AA1F587847633222555949D9BD0FB5BC>> diakss 27 Juni 2022.
- KOMNAS Perempuan. 2020. *Resiliensi Perempuan dalam Menyikapi Pandemi COVID-19* (Policy Brief No.3). <<https://komnasperempuan.go.id/kertas-posisi-detail/policy-brief-3-resiliensi-perempuan-dalam-menyikapi-pandemi-covid-19>>
- Kurniawan, A. 2021. *GENDER DI MASA KRISIS: TELAAH REFLEKSI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREMPUAN*.

- Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 3(1), 17.
<https://doi.org/10.24235/equalita.v3i1.8378>
- Media, K. 2020. 20 Negara dengan Kasus Aktif Corona Tertinggi, Indonesia Nomor 14. KOMPAS.com. (Online),
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/28/190000965/20-negara-dengan-kasus-aktif-corona-tertinggi-indonesia-nomor-14>>, diakses 29 Juni 2022.
- Ministry of Health NZ. (2020). COVID-19 Health and Disability System Response Plan. (Online),
<https://www.health.govt.nz/publication/covid-19-health-and-disability-system-response-plan>>, diakses 29 Juni 2022.
- MODERN GHANA. 2014. Global Ebola response 'slower than the disease': S.Leone leader. (Online),
<https://www.modernghana.com/amp/news/573457/global-ebola-response-slower-than-the-disease-sleone-lea.html>>, diakses 20 Juni 2022.
- Moynihan, C. 1998. Theories of masculinity. *British Medical Journal*, 317(7165), 1072–1075.
- Newshub. 2020. Coronavirus: Prime Minister Jacinda Ardern's full COVID-19 speech. (Online),
<https://www.newshub.co.nz/home/politics/2020/03/coronavirus-prime-minister-jacinda-ardern-s-full-covid-19-speech.html>>
- Noori Farzan, A., Hassan, J., Bellware, K., O'Grady, S., Hawkins, D., & Beachum, L. et al. 2020. U.S. was 'unprepared' for 'greatest public health crisis' in a century, CDC director says. *The Washington Post*. (Online),
<https://www.washingtonpost.com/nation/2020/08/13/coronavirus-covid-live-updates-us/>>, diakses 29 Juni 2022.
- North, A. 2020. Are women leaders better at fighting coronavirus? It's complicated. <https://www.vox.com/2020/5/21/21263766/coronavirus-women-leaders-germany-new-zealand-taiwan-merkel>>
- Number of new coronavirus (COVID-19) cases in Norway since February 2020, by date of report. Statista. 2022. (Online),
<https://www.statista.com/statistics/1102246/coronavirus-cases-development-in-norway/>>, diakses 30 June 2022.
- Op.europa.eu. 2021. The EU in 2020 - General Report on the Activities of the European Union. (Online), <https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2020/en/>>, diakses 29 Juni 2022.
- Statista. 2022. Number of new confirmed coronavirus (COVID-19) cases and deaths in Germany in 2022. (Online), <https://www.statista.com/statistics/1100823/coronavirus-cases-development-germany/>>, diakses 30 Juni 2022.
- Striving for Equality. 2022. Striving for Equality. (Online),
<https://www.nzstory.govt.nz/stories/striving-for-equality/>>, diakses 19 June 2022.
- Su, S. F., & Han, Y. Y. 2020. *How Taiwan, a non-WHO member, takes actions in response to COVID-19*. *Journal of global health*, 10(1), 010380.
<https://doi.org/10.7189/jogh.10.010380>
- Taipeitimes.com. 2022. Domestic violence cases up: national report - Taipei Times. (Online),
<https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2022/06/16/2003779982>>, diakses 19 Juni 2022.
- Taipeitimes.com. 2022. Taiwan legislature top in Asia for gender equality - Taipei Times. (Online),
<https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2020/03/09/2003732361>>, diakses 19 Juni 2022.
- THE 17 GOALS | Sustainable Development. (n.d.). <https://sdgs.un.org/goals>
- THE WORLD BANK. 2020. Covid-19 in Brazil: Impacts and Policy Responses. (Online),
<https://www.worldbank.org/en/country/brazil/publication/covid-19-in-brazil-impacts-policy-responses>>, diakses 29 Juni 2022.

- United States - World War II. Encyclopedia Britannica. Diakses 20 Juni 2022, <<https://www.britannica.com/place/United-States/World-War-II>>.
- Unite against COVID-19. 2022. History of the COVID-19 Alert System. (Online), <<https://covid19.govt.nz/about-our-covid-19-response/history-of-the-covid-19-alert-system/>>, diakses 12 Juni 2022.
- UN WOMEN. (2020). *COVID-19 AND WOMEN'S LEADERSHIP: FROM AN EFFECTIVE RESPONSE TO BUILDING BACK BETTER* (Policy Brief No. 18).
- UN Women – Headquarters. 2022. New Zealand commits to supporting women's education, leadership and participation, and improving women's safety (updated). (Online), <<https://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/new-zealand>>, diakses 19 Juni 2022.
- Webseite der Bundesregierung | Startseite. 2022. Auch künftig enger Austausch zwischen Bund und Ländern. (Online), <<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/mpk-ost-1755682>> diakses 12 Juni 2022.
- Webseite der Bundesregierung | Startseite. 2022. Beschluss von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie. (Online), <<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bund-laender-beschluss-1744224>>, diakses 12 Juni 2022.
- Webseite der Bundesregierung | Startseite. 2022. Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs. (Online), <<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/beschluss-zu-corona-1730292>>, diakses 12 Juni 2022.
- Webseite der Bundesregierung | Startseite. 2022. Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 22.03.2020. (Online) , <<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-vom-22-03-2020-1733248>>, diakses 12 Juni 2022.
- Webseite der Bundesregierung | Startseite. 2022. Corona: Basis-Schutz und Hotspot-Maßnahmen | Bundesregierung. (Online), <<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-regeln-und-einschrankungen-1734724>>, diakses 12 Juni 2022.
- Webseite der Bundesregierung | Startseite. 2022. Leitlinien zum Kampf gegen die Corona-Epidemie vom 16.03.2020. (Online), <<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/leitlinien-zum-kampf-gegen-die-corona-epidemie-vom-16-03-2020-1730942>>, diakses 12 Juni 2022.
- Webseite der Bundesregierung | Startseite. 2022. Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 1. April 2020. (Online), <<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/telefonschaltkonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-1-april-2020-1738534>>, diakses 12 Juni 2022.
- Who.int. 2022. Advice for the public: Coronavirus disease (COVID-19). (Online), <<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>>
- Women.govt.nz. 2022. New Zealand women. (Online), <<https://women.govt.nz/about/new-zealand-women>>, diakses 19 Juni 2022.
- Yusriana, A., Sunarto, S., & Hasfi, N. 2021. *The Crisis Management Experiences of Female Media Leaders During The Pandemic*. Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan, 25(2), 98–109. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v25i2.164>

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI DAN KRISIS PASCA-PANDEMI: STUDI KASUS SRI LANKA

Arief Bakhtiar Darmawan¹, Chika Cahyani²

¹Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman

²Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman
arief.darmawan@unsoed.ac.id, chika.cahyani@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pandemi Covid-19 terhadap ekonomi Sri Lanka yang semakin dalam menuju krisis. Padahal, dalam 10 tahun setelah gerilyawan Macan Tamil dikalahkan pada tahun 2009, Sri Lanka berhasil menjadikan beberapa sektor industrinya diakui secara global, seperti sektor pariwisata, tekstil, dan teh. Menjelang pandemi Covid-19 tahun 2019, Sri Lanka dihadapkan pada pemilihan umum presiden. Gotabaya Rajapaksa akhirnya terpilih sebagai presiden Sri Lanka dengan ambisi melakukan transformasi keamanan nasional, ekonomi, dan kesehatan. Namun, pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi Sri Lanka terhambat dan membahayakan prospek kemajuan negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menekankan pada sumber sekunder seperti laman pemerintah resmi Sri Lanka, laman statistik yang akuntabel, berita-berita internasional daring, serta penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya dengan topik serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sri Lanka relatif bisa menangani pandemi Covid-19 dengan cukup baik dan berhasil menaikkan pendapatan di sektor industri tekstil & teh, remiten, dan pariwisata menuju titik sebelum pandemi. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan Sri Lanka lepas dari pengeluaran impor dan mengelola utang luar negeri. Legitimasi Gotabaya Rajapaksa yang rendah akibat nepotisme menjadikan krisis ekonomi Sri Lanka bertambah parah dengan adanya krisis politik.

Kata kunci: krisis ekonomi, pandemi Covid-19, Sri Lanka

Abstract

This study aims to analyze the impact of the Covid-19 pandemic on the Sri Lankan economy, which is getting deeper into crisis. In fact, in the 10 years after the Guerrilla Tamil Tiger were defeated in 2009, Sri Lanka has succeeded in making several of its industrial sectors recognized globally, such as tourism, textiles, and tea. Ahead of the 2019 Covid-19 pandemic, Sri Lanka is faced with a presidential election. Gotabaya Rajapaksa was finally elected president of Sri Lanka with the ambition of transforming national security, the economy, and health. However, the Covid-19 pandemic has hampered Sri Lanka's economic growth and jeopardized the country's prospects for progress. This study uses a qualitative method by emphasizing secondary sources such as the official Sri Lankan government website, accountable statistics pages, online international news, and previous scientific studies on similar topics. The results showed that Sri Lanka was relatively able to handle the Covid-19 pandemic quite well and succeeded in increasing income in the textile and tea industries, remittances, and tourism sectors to the pre-pandemic point. The current economic crisis is caused more by Sri Lanka's inability to escape from import spending and manage foreign debt. Gotabaya Rajapaksa's low legitimacy due to nepotism made Sri Lanka's economic crisis worse with the political crisis.

Keywords: Covid-19 pandemic, economic crisis, Sri Lanka

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pandemi Covid-19 terhadap ekonomi Sri Lanka yang semakin dalam menuju krisis. Sri Lanka merupakan negara di kawasan tropis yang terkenal dengan pariwisata, dan dalam beberapa tahun terakhir mengembangkan industri tekstil dan teh dengan baik. Sektor pariwisata dan industri Sri Lanka telah mencapai taraf global. Hal itu merupakan langkah kemajuan karena sebelumnya, selama 30 tahun dari 1983 sampai 2009, Sri Lanka mengalami perang sipil antara pasukan pemerintah dan gerilyawan Macan Tamil. Perang berakhir ketika pemerintah Sri Lanka berhasil mengalahkan Macan Tamil. Hanya sepuluh tahun kemudian, pandemi Covid-19 yang muncul pada tahun 2019 memberikan dampak yang besar bagi sektor ekonomi global, termasuk Sri Lanka. World Travel & Tourism Council (WTTC, 2022) memperkirakan bahwa sektor perjalanan pariwisata membuka 333 juta lapangan kerja dan memberikan kontribusi sekitar \$9,2 miliar atau 10,3% dari total GDP global pada tahun 2019. Pada tahun 2020, sektor ini mengalami kehilangan 62 juta lapangan kerja dan kekurangan pendapatan sebesar \$4,9 miliar. Setahun berikutnya, sektor pariwisata mencoba bangkit dengan menambah 18,2 juta lapangan kerja dan kontribusi \$1 miliar pendapatan.

Sri Lanka merupakan salah satu negara yang menjadikan pariwisata sebagai sumber utama pemasukan negara. Sektor lain yang turut menjadi tumpuan ekonomi Sri Lanka adalah sektor industri tekstil dan teh. Dalam sektor industri tekstil, Sri Lanka berhasil memaksimalkan potensi pasar internasional dengan kualitas produksi yang tinggi dan praktik etik terhadap pekerja dan lingkungan yang memenuhi standar internasional. Beberapa merek global yang bekerja sama di sektor industri tekstil Sri Lanka, diantaranya adalah Nike, Uniqlo, Ralph Lauren, Gap, Tommy Hilfiger, Levi's, Abercrombie & Fitch, Victoria's Secret, Ann Taylor, Speedo, Jones New York, Pink, H&M, Triumph, dan Marks & Spencer (Export Development Board Sri Lanka, 2017). Teh Sri Lanka juga menjadi komoditas ekspor yang menopang ekonomi. Negara tujuan utama ekspor teh Sri Lanka adalah Irak, Turki, Rusia, dan Iran. Hal ini berbeda dengan pasar utama industri tekstil yang menasar negara-negara Barat dan Eropa, seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Italia, Jerman, dan Belanda.

Pada tahun 2019, Gotabaya Rajapaksa memenangi pemilihan umum Sri Lanka dengan meraih 52,25 persen suara. Gotabaya Rajapaksa menggantikan saudaranya sendiri, Mahinda Rajapaksa, yang telah menjadi presiden selama dua periode (2005-2015). Mahinda Rajapaksa sendiri kemudian diangkat menjadi perdana menteri. Meski minim pengalaman politik, Gotabaya Rajapaksa memiliki keunggulan karena berasal dari keluarga politisi dan pernah berkiprah di militer. Hanya beberapa bulan setelah memegang kepemimpinan tertinggi, Gotabaya Rajapaksa dipaksa menghadapi pandemi Covid-19. Kasus pertama Covid-19 di Sri Lanka tercatat muncul pada bulan Januari 2020 yang berasal dari turis Tiongkok (Reuters, 2020). Sementara kasus transmisi lokal pertama Covid-19 muncul pada bulan Maret 2020 (Perera, 2020). Namun, kepemimpinan Gotabaya Rajapaksa yang sukses mengatasi pandemi gelombang pertama tidak mencegah Sri Lanka ke dalam krisis kesehatan dalam gelombang selanjutnya dan krisis ekonomi saat ini. Setelah serangkaian protes masyarakat, Gotabaya bahkan terpaksa untuk melarikan diri dan menjanjikan pengunduran diri sebagai presiden.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berupaya untuk menganalisis bagaimana strategi Sri Lanka menghadapi pandemi Covid-19 dan bagaimana efek pandemi Covid-19 terhadap situasi krisis ekonomi terkini di Sri Lanka. Beberapa penelitian sebelumnya telah dengan baik memaparkan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap negara. Gunasekara et.al. (2022) meneliti respons pemimpin Sri Lanka menghadapi pandemi Covid-19 gelombang pertama dengan model kepemimpinan paternalistik. Ravindra Deyshappriya (2020) menganalisis pengaruh pandemi Covid-19 terhadap ekonomi makro dan mikro Sri Lanka, yang dalam hal ini memberikan efek negatif terhadap bursa saham dan dinamika kemiskinan di negara itu. Membahas ekonomi secara lebih spesifik, Thushanga & Piyadasa (2021) mendiskusikan

pengaruh pandemi terhadap sektor pariwisata Sri Lanka. Menurut Piyadasa, perlu kebijakan yang tepat secara makro dan mikro untuk membuat turisme di Sri Lanka kembali bangkit.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, penulis berupaya melakukan interpretasi terhadap persoalan tanpa meninggalkan pemahaman terhadap sejarah Sri Lanka, konteks isu, dan pemahaman dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar sumber yang dipakai adalah sumber sekunder. Penulis mengumpulkan data-data sekunder melalui laman pemerintah resmi Sri Lanka (*Central Bank Sri Lanka, Export Development Bank Sri Lanka, Sri Lanka Tourism Development Authority, Sri Lanka Tourism Promotion Bureau*), laman statistik yang akuntabel (WHO, World Bank, Trading Economics, Global Economy, Statista), berita-berita daring terkait pandemi Covid-19 dan ekonomi (Reuters, BBC, Xinhua, VOA News, Asia News), serta jurnal-jurnal ilmiah. Penulis kemudian mereduksi data dari sumber-sumber yang tersedia, kemudian melakukan interpretasi untuk analisis dan menarik kesimpulan.

III. ANALISIS

A. Strategi Sri Lanka Menghadapi Pandemi Covid-19

Kasus pertama Covid-19 di Sri Lanka baru tercatat pada 27 Januari 2020, yang dialami turis berkebangsaan Tiongkok. Kasus lokal pertama Covid-19 terjadi pada 11 Maret 2020, ketika seorang pemandu wisatawan Sri Lanka terkonfirmasi mengidap virus tersebut (Amaratunga, et.al., 2020: 2). Sampai dengan 27 Juni 2022, kasus Covid-19 di Sri Lanka tercatat 664.065 kasus, dengan 16.521 kematian. Sri Lanka menghadapi kasus Covid-19 terparah pada tahun 2021. Pada akhir Desember 2020, secara kumulatif, Sri Lanka memiliki total 44.774 kasus, dengan total kematian 213 orang. Sementara pada akhir Desember 2021, telah terjadi 587.935 kasus Covid-19 dengan total kematian 15.019 orang (World Health Organization, 2022).

Sri Lanka dianggap sukses menghadapi pandemi gelombang pertama yang dimulai sejak bulan Januari 2020 sampai Oktober 2020 (Epidemiology Unit, 2022). Gelombang pertama tercatat memiliki total 3.396 kasus dan 13 kematian, dengan tingkat kematian kasus 0,38 saja. Sri Lanka dinilai sigap dalam menangani penyebaran virus Covid-19 melalui upaya perolehan vaksin, regulasi *lockdown* dan karantina, serta distribusi vaksin. Dibantu oleh lembaga-lembaga internasional seperti WHO, UNICEF, World Bank, dan sejumlah proyek kerja sama, Sri Lanka mampu menghadapi pandemi Covid-19 dengan baik meskipun termasuk ke dalam kategori negara berkembang yang terbatas secara kapabilitas dan bergantung pada sektor pariwisata yang notabene tidak bergerak akibat pembatasan berskala besar.

Salah satu proyek yang berperan signifikan membantu Sri Lanka dalam mengatasi Covid-19 adalah *Emergency Response and Health Systems Preparedness Project (ERHSP)* yang telah memberi pasokan medis kepada pemerintah Sri Lanka sejak Mei 2020 untuk membantu memenuhi kebutuhan darurat. Tidak hanya itu, proyek ini juga memfasilitasi rumah sakit dengan 1 juta alat tes antigen, 390.000 alat tes PCR, dan 1,1 juta set alat pelindung diri (APD). Selama gelombang pertama pandemi, proyek ini juga memberikan bantuan kepada 629.303 orang lanjut usia, 52.940 individu dengan kebutuhan khusus, dan 18.972 pasien dengan penyakit ginjal kronis. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan respons Sri Lanka terhadap dampak pandemi dalam ranah nasional dengan menciptakan fasilitas karantina dan perawatan, memperluas

kemampuan pengujian dan diagnostik, serta memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan infeksi (World Bank, 2021).

Mulai awal tahun 2021, pemerintah Sri Lanka mendapatkan bantuan pasokan vaksin Covid-19 dari India yang merupakan salah satu negara dengan industri farmasi terbesar di dunia (Singh, et.al., 2022: 9). Vaksin dari India berupa AstraZeneca yang diproduksi oleh Serum Institute of India dan Covaxin oleh Bharat Biotech. Pada tanggal 21 Januari, Sri Lanka menerima bantuan sekitar 500 ribu dosis vaksin dari India, disusul pembelian sekitar 500 ribu dosis lagi pada bulan Februari 2021. Pada bulan Maret, Sri Lanka kembali menerima Covaxin sekitar 260 ribu dosis. Namun, pada bulan Mei, India menghentikan pasokan ke Sri Lanka untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mulai langka akibat gelombang kedua pandemi Covid-19. Pada akhirnya, Sri Lanka beralih ke Tiongkok dan mendapatkan pasokan 1,1 juta vaksin yang diproduksi oleh Sinopharm Group (Pasricha, 2021).

Penanganan upaya Covid-19 tidak lepas dari *human development index* (HDI) yang tinggi. Sri Lanka merupakan negara di Asia Selatan yang secara konsisten memiliki angka HDI tertinggi dalam beberapa tahun terakhir (lihat tabel 1). HDI merupakan pengukuran terhadap tiga dimensi dasar dari pengembangan manusia, yaitu hidup yang sehat dan masa umur yang panjang, pengetahuan, serta standar hidup yang memadai. HDI menggunakan empat indikator untuk menghitung indeks, yaitu angka harapan hidup, rata-rata partisipasi di sekolah, lama pendidikan sekolah yang diharapkan, dan pendapatan nasional bruto (*gross national income*) per kapita.

Tabel 1. Tabel *Human Development Index* Negara Anggota SAARC, 2016-2022

No.	Negara	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sri Lanka	0,774	0,776	0,780	0,780	0,782
2.	Maladewa	0,713	0,716	0,719	0,719	0,740
3.	Bhutan	0,610	0,615	0,617	0,617	0,654
4.	India	0,637	0,643	0,647	0,647	0,645
5.	Bangladesh	0,599	0,609	0,614	0,614	0,632
6.	Nepal	0,572	0,574	0,579	0,579	0,602
7.	Pakistan	0,556	0,558	0,560	0,560	0,557
8.	Afghanistan	0,491	0,493	0,496	0,496	0,511

Sumber: The Global Economy (2022a), mengutip dari PBB.

Berdasarkan tabel di atas, Sri Lanka merupakan negara di Asia Selatan yang memiliki HDI tertinggi di kawasan. Angka itu bahkan mengungguli dua negara besar di kawasan Asia Selatan, yaitu India dan Pakistan. Pada tahun 2020, rata-rata HDI di kawasan Asia Selatan adalah 0,64 poin, sementara HDI Sri Lanka konsisten di angka 0,77 dan 0,78 dalam lima tahun terakhir. Dengan kata lain, selama ini Sri Lanka berhasil mempertahankan kualitas pengembangan manusia dan standar hidup dengan cukup baik. Dengan kemampuan sumber daya manusia itulah Sri Lanka mampu menghadapi pandemi pada gelombang awal.

Ketika relatif mampu menghadapi pandemi, Sri Lanka mulai membuka industri pariwisata pada tanggal 28 Desember 2020. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang pada saat itu masih berlutut dengan bagaimana cara paling ideal untuk mengatasi Covid-19, Sri Lanka terbilang cukup cepat karena telah memasuki tahap pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata. Berkat regulasi penanganan pandemi Covid-19 yang baik, disertai dengan badan pemerintahan terkait sektor pariwisata yang matang seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, dan WHO, Sri Lanka siap untuk menerima turis-turis terutama yang berasal dari mancanegara.

Untuk memperkuat sektor turisme, sebagai langkah pertama pengaktifan industri pariwisata, Sri Lanka membuka sejumlah destinasi wisata untuk turis-turis Ukraina yang diantarkan dengan pesawat khusus secara berkala. Strategi pembukaan kembali industri pariwisata Sri Lanka terinspirasi kerja sama trilateral untuk turisme di tengah pandemi yang dipraktikkan Estonia, Latvia, dan Lithuania melalui program *Travel Bubble* (SLTDA, 2021). Dengan strategi yang sama, Sri Lanka bekerja sama dengan negara lain dalam sistem yang dinamakan sebagai *Bio Bubble*. Sistem tersebut mengimplementasikan sistem interaksi para turis yang hanya diperbolehkan berkunjung dan berinteraksi dengan sesama turis di tempat destinasi tertentu selama 14 hari.

Kesiapan Sri Lanka dalam mewujudkan strategi pariwisata di tengah pandemi Covid-19 didukung oleh mekanisme solid yang telah diakui oleh lembaga internasional seperti *World Travel and Tourism Council's* (WTTC) melalui penghargaan yang dinamakan "Safe Travels". Sri Lanka menerapkan sistem sertifikasi bernama *Safe & Secure* yang mengharuskan setiap pelaku industri pariwisata untuk memperoleh perizinan dengan cara mendaftar dalam sebuah aplikasi dan mendapat *QR Code* spesial. Sertifikat *Safe & Secure* diberikan kepada perusahaan pariwisata dan penyedia layanan yang telah diaudit oleh KPMG, sebuah perusahaan audit independen dan memenuhi persyaratan protokol kesehatan Covid-19 (Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, 2020).

Namun, seiring pandemi yang tidak selesai pada tahun pertama dan kedua, Sri Lanka mulai mengalami kesulitan dalam menjaga konsistensi penanganan Covid-19, terutama saat gelombang ketiga pada bulan April 2021. Akumulasi permasalahan yang dialami oleh negara tersebut membuat pemerintah perlu mengalihkan fokus pada sektor yang lain.

B. Kondisi Ekonomi Sri Lanka di Tengah Pandemi Covid-19

Sebagaimana pertumbuhan ekonomi global terus menurun akibat pandemi pada tahun 2019, 2020, dan 2021, pertumbuhan ekonomi Sri Lanka turut mengalami hal serupa. Seperti yang terlibat dalam tabel di bawah ini, efek pandemi terhadap ekonomi Sri Lanka tahun 2019 dan 2020 meliputi penurunan pertumbuhan ekonomi, kenaikan tingkat pengangguran, dan peningkatan rasio utang terhadap GDP.

Tabel 2. Data Kondisi Perekonomian Sri Lanka, 2016-2020

No.	Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertumbuhan ekonomi (dalam %)	4,49	3,58	3,27	2,26	-3,57
2.	Tingkat pengangguran (dalam %)	4,4	4,2	4,4	4,8	5,5
3.	Rasio utang terhadap GDP (dalam %)	79	79,9	83,7	86,8	101

Sumber: Data GDP Sri Lanka diperoleh dari O'Neill (2022); Tingkat pengangguran diperoleh dari Central Bank Sri Lanka (2022); Data rasio utang terhadap GDP diperoleh dari Trading Economics (2022a).

Meski sejak tahun 2016 sampai 2018 pertumbuhan ekonomi Sri Lanka terus menurun, angka tersebut turun cukup drastis pada awal pandemi Covid-19 tahun 2019 sebesar 30%, yaitu dari 3,27% (2018) ke 2,26% (2019). Pertumbuhan ekonomi Sri Lanka kembali turun sangat drastis sebesar 257% pada tahun 2020, yaitu -3,57%. Angka tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang terburuk sejak Sri Lanka merdeka dari Inggris pada tahun 1948. Dalam tulisan ini, beberapa penyebab dari pertumbuhan ekonomi yang buruk adalah menurunnya pendapatan di sektor pariwisata dan industri manufaktur, terutama tekstil dan teh.

Padahal, industri pariwisata di Sri Lanka telah mengakar secara historis dan geografis yang kemudian berhasil mendorong daya tarik negara tersebut sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia (Thusanga & Piyadasa, 2020). Sri Lanka memiliki

regulasi turisme yang cukup matang dengan pengkategorian wisata berdasarkan *Adventure Tourism, Community Based Tourism, Nature Tourism, Eco Tourism, Culture Tourism, dan Agri Tourism*. Kategori-kategori tersebut diimplementasikan guna memaksimalkan potensi dari masing-masing jenis wisata. Pada tahun 2017, industri pariwisata telah menghasilkan \$3,9 juta, yang kemudian meningkat 12% pada tahun 2018 dengan total pelaporan pendapatan sebesar \$4,4 juta (SLTDA, 2022). Dengan jumlah tersebut, bagi Sri Lanka, pariwisata merupakan sumber pendapatan mata uang asing terbesar ketiga, setelah industri tekstil dan remiten pekerja migran. Sejak adanya Covid-19, pendapatan sektor pariwisata pada tahun 2019 dilaporkan sebesar \$3,6 juta dan mengalami kerugian 50% pada tahun 2020 karena situasi pandemi (SLTDA, 2022).

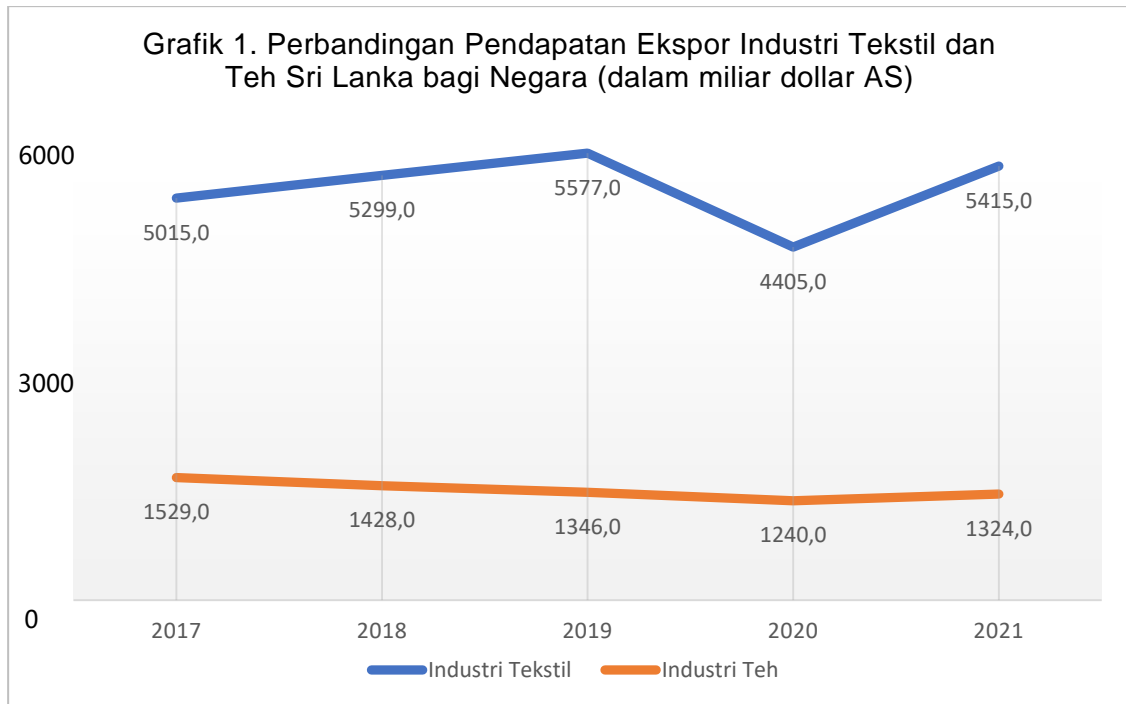
Tabel 3. Jumlah Kedatangan Turis Asing di Negara-negara Asia Selatan, 2016-2020 (dalam ribuan)

No.	Negara	2016	2017	2018	2019	2020
1.	India	14.570	15.543	17.423	17.914	6.330
2.	Sri Lanka	2.168	2.248	2.521	2.027	540
3.	Maladewa	1.286	1.390	1.484	1.703	555
4.	Nepal	753	940	1.173	1.197	230
5.	Bhutan	210	255	274	316	30

Sumber: The Global Economy (2022b), mengutip dari World Tourism Organization; data India tahun 2020 berasal dari Keelery (2022).

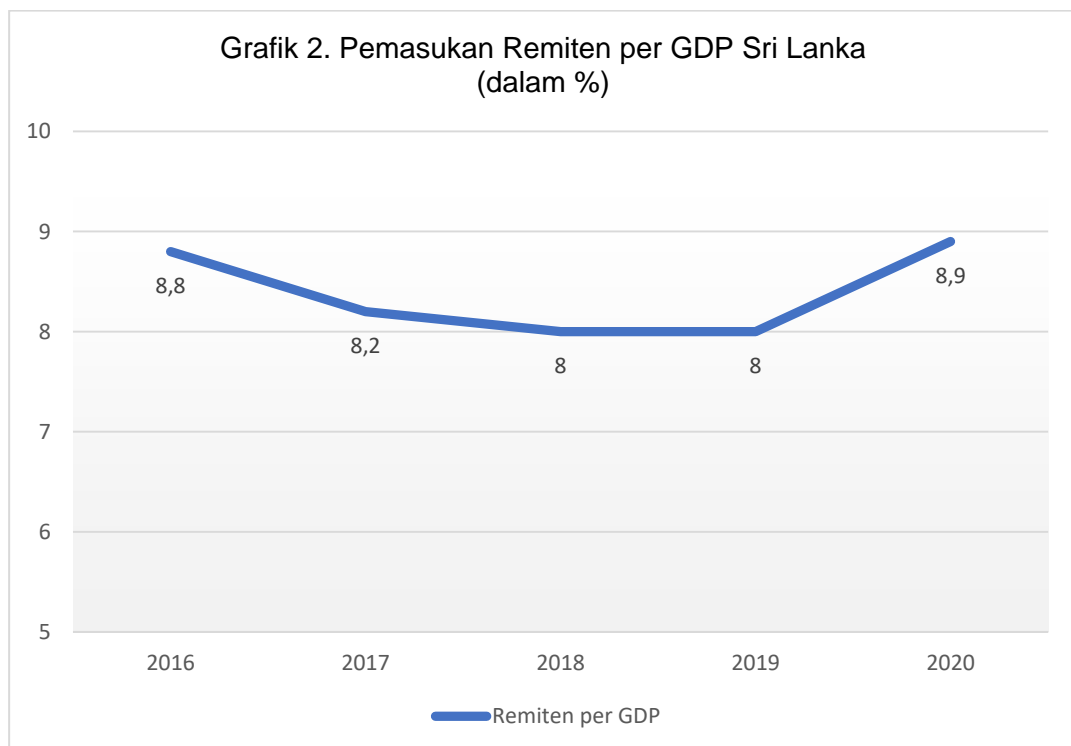
Adanya kebijakan *lockdown* dan pelarangan bepergian ke luar negeri oleh pemerintah Sri Lanka dan negara-negara di dunia selama pandemi membuat jumlah kedatangan turis asing di Sri Lanka menurun drastis. Berdasarkan tabel di atas, kedatangan turis asing di Sri Lanka pada tahun 2019 sekitar 2 juta orang. Jumlah itu turun pada tahun 2020 dengan hanya 540 ribu orang, atau hanya 26% dari jumlah turis asing pada tahun 2019. Sepanjang tahun 2021, jumlah turis tercatat hanya 190 ribu orang (Srinivasan, 2022). Pada tahun 2022, pemerintah Sri Lanka mengharapkan kedatangan 2,3 juta turis, hampir sama dengan kedatangan turis sebelum pandemi pada tahun 2018. Namun, pemerintah kemudian merevisi menjadi 1,1 juta karena kemunculan varian Omicron (Huaxia, 2022).

Selain sektor turisme, industri lain yang terpengaruh pandemi adalah ekspor dari industri tekstil dan teh. Pemasukan ekspor tekstil menurun dari \$5577 miliar pada tahun 2019 ke \$4405 miliar pada tahun 2020, sementara ekspor teh menurun \$1346 miliar pada tahun 2019 ke \$1240 miliar pada tahun 2020. Grafik berikut menunjukkan perbandingan pemasukan ekspor industri tekstil dan teh Sri Lanka bagi negara dalam lima tahun terakhir:



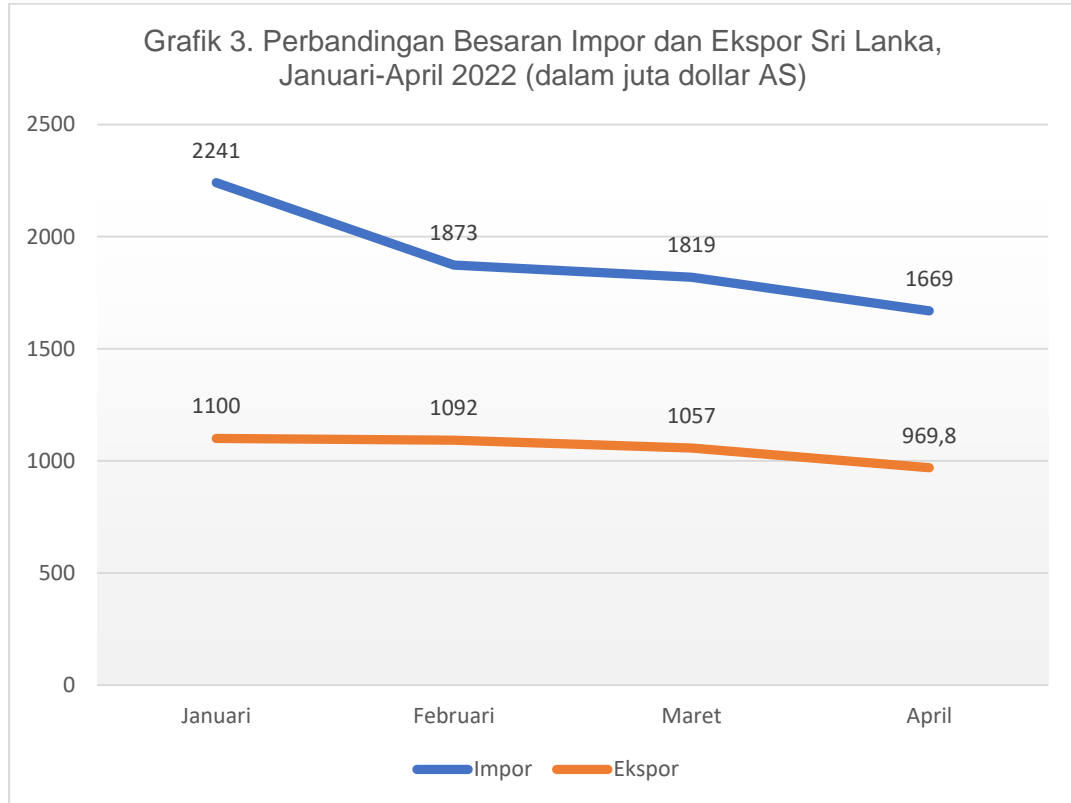
Sumber: Export Development Board Sri Lanka (2022a), Export Development Board Sri Lanka (2022b).

Di samping turisme dan industri, Sri Lanka merupakan negara yang bergantung pada remiten. Selama lima tahun terakhir, remiten memberikan kontribusi sebesar 8,38% dari total GDP Sri Lanka. Pandemi Covid-19 yang melanda secara global berpotensi membuat para pekerja migran Sri Lanka kehilangan pekerjaan dan kembali ke rumah. Data menunjukkan bahwa remiten Sri Lanka masih menunjukkan kondisi yang cukup stabil.



Sumber: World Bank (2022).

Meskipun performa ekspor tekstil dan teh berhasil ditingkatkan, Sri Lanka memiliki masalah dengan kuantitas impor yang lebih besar daripada ekspor. Pada tahun 2020, dalam masa pandemi, impor produk Sri Lanka sebesar \$16,2 miliar, berbanding dengan ekspor sebesar \$11,3 miliar (OEC, 2022). Pada tahun 2021, impor Sri Lanka naik drastis sebesar \$20,6 miliar, berbanding dengan ekspor sebesar \$12,5 miliar (Economy Next, 2022). Data terbaru pada bulan Januari-April 2022 menunjukkan bahwa tren tersebut masih berlanjut:



Sumber: Trading Economics (2022b; 2022c).

Dengan menganalisis berbagai data relevan di atas, penulis mengamati bahwa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi Sri Lanka, terutama pada sektor pariwisata serta ekspor tekstil dan teh, sementara rasio remiten terhadap GDP masih relatif stabil. Namun, setelah pandemi Covid-19 mulai mereda dan sektor ekonomi tertentu mulai pulih, Sri Lanka malah dilanda krisis ekonomi. Krisis terbaru ini dipicu oleh meningkatnya utang luar negeri yang tidak berhasil ditangani. Krisis ekonomi dan protes massa membuat Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa mengundur diri.

C. Krisis Sri Lanka Pasca-Pandemi: Beberapa Pelajaran

Upaya-upaya penindakan pandemi Covid-19 yang telah diterapkan oleh berbagai negara di dunia seperti *lockdown* dan karantina secara signifikan membawa efek domino bagi tata kelola suatu negara. Pembatasan tersebut menyebabkan disrupsi dalam perdagangan global meliputi terganggunya stabilisasi pola dan alur kegiatan ekspor-impor oleh setiap negara, termasuk Sri Lanka. Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap perdagangan global, turut mempengaruhi ekonomi Sri Lanka yang bergantung pada sektor pariwisata serta ekspor-impor (Wijayasiri, 2019: 57). Situasi krisis ekonomi yang berlangsung saat ini bukan semata-mata pengaruh dari pandemi Covid-19. Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, Sri Lanka relatif mampu menangani dan

bertahan dari pandemi, bahkan mengembalikan potensi pemasukan ekspor ke arah titik sebelum pandemi.

Menurut penulis, krisis ekonomi pasca-pandemi yang terjadi di Sri Lanka memberikan beberapa pelajaran bagi negara lain. Pertama, meski berangsur-angsur berhasil memulihkan sektor pariwisata dan sektor industri pasca-pandemi, Sri Lanka tetap dilanda krisis ekonomi. Tahun ini, Sri Lanka berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan asing (Huaxia, 2022). Pada bulan Januari 2022, Sri Lanka menerima 82.327 turis asing. Hal itu meningkatkan sangat drastis dibandingkan Januari 2021 yang sebesar 1.682 turis. Bagaimanapun, sektor pariwisata belum kembali seperti sebelumnya ketika Sri Lanka menerima 228.434 turis pada bulan Januari 2020. Selain itu, Sri Lanka terus berupaya memperbaiki ekspor tekstil dan teh. Sejauh ini, upaya tersebut memberikan hasil yang positif. Berdasarkan grafik 1, industri tekstil dan teh mulai pulih pada tahun 2021. Pada tahun 2021, pendapatan Sri Lanka dari industri tekstil adalah, \$5,42 miliar atau setara dengan 44,24% total pendapatan ekspor negara (Export Development Board Sri Lanka, 2022a). Pada tahun 2021, ekspor teh Sri Lanka menyumbang sekitar \$1,32 miliar atau setara dengan 10,82% dari total pendapatan ekspor negara (Export Development Board Sri Lanka, 2022b). Pemasukan dari ekspor tekstil dan teh tersebut lebih tinggi daripada pemasukan ekspor tahun 2020. Meski demikian, pulihnya sektor pariwisata dan industri ini menjadi sia-sia karena pemerintah tidak mampu mengelola utang, seperti yang akan dibahas dalam poin selanjutnya.

Kedua, Sri Lanka memiliki kuantitas impor yang lebih besar daripada ekspor, dan hal itu tidak sehat bagi ekonomi negara. Kesenjangan tersebut tidak hanya terlihat pada tahun 2022 saja (lihat grafik 2), tetapi cenderung membesar dari tahun ke tahun sejak satu dekade terakhir (World Integrated Trade Solution, 2022). Sri Lanka merupakan negara yang relatif dependen terhadap perdagangan global. Sektor ekspor memang sempat terganggu karena disrupsi terhadap *supply chains*, yang dibersamai oleh kolapsnya permintaan global untuk barang dan jasa. Sebabnya, target pasar utama dari Sri Lanka, yakni Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan India ikut terpengaruh oleh instabilitas sebagai akibat dari pandemi. Besaran nilai impor yang lebih besar ini menjadi masalah ketika akhirnya Sri Lanka tidak memiliki cadangan mata uang asing yang cukup. Cadangan mata uang asing Sri Lanka adalah \$1,6 miliar pada bulan Maret 2020, berbanding utang jatuh tempo senilai \$7 miliar (Pladson, 2022). Selain itu, pemerintah Sri Lanka tidak mampu mengimpor bahan makanan dan minyak sehingga menyebabkan kelangkaan.

Ketiga, Sri Lanka memiliki utang luar negeri yang sangat besar dan tidak mampu mengelola utangnya menjadi sesuatu yang produktif. Selama beberapa tahun terakhir, Sri Lanka dilaporkan membangun infrastruktur besar-besaran seperti jalan tol, pelabuhan, dan transportasi kereta api cepat dengan dana pinjaman luar negeri, tetapi proyek tersebut kurang strategis dan tidak menguntungkan. Total utang luar negeri Sri Lanka adalah \$51 miliar. Pada tahun 2020, rasio utang terhadap GDP mencapai 101% (lihat tabel 2). Sri Lanka harus membayar utang jatuh tempo sebesar \$7 miliar pada tahun 2022. Lebih dari itu, Sri Lanka memiliki kewajiban pelunasan sebesar 25 miliar sampai tahun 2026 (The Times of India, 2022). Jumlah pinjaman utang luar negeri yang terus membesar berpengaruh terhadap kelangkaan makanan dan bahan bakar minyak. Akibatnya, harga-harga mengalami inflasi sebesar 17,5% pada bulan Februari 2022. Pengusaha membeli gas dengan harga sangat tinggi di pasar gelap dan mulai kesulitan memasok bahan baku yang selama ini bergantung pada impor. Kontainer menumpuk di pelabuhan karena pemerintah tidak memiliki uang untuk membayarnya (Thowfeek, 2022).

Untuk mengatasi hal tersebut, Sri Lanka melakukan upaya restrukturisasi pembayaran utang dan mengajukan pinjaman baru untuk mengatasi krisis dalam waktu

dekat. Tiongkok mempertimbangkan \$1 miliar untuk pinjaman dan \$1,5 miliar untuk membeli produk dari Tiongkok (Pladson, 2022). Padahal, bulan Maret 2021 lalu, Sri Lanka baru saja mengamankan utang sebesar \$500 juta dari Tiongkok. Meski bukan merupakan negara utama tujuan ekspor Sri Lanka, Tiongkok merupakan negara utama impor dan menjadi rekanan pembangunan infrastruktur pasca-berakhirnya perlawanan Macan Tamil tahun 2009. India juga mempertimbangkan fasilitas kredit \$2 miliar untuk penyediaan makanan, obat, bahan bakar, dan produk esensial lainnya (The Economic Times, 2022).

Keempat, pemerintah Sri Lanka gagal mengelola bom waktu legitimasi rakyat akibat sistem nepotisme dalam pembentukan kabinet. Sebagai presiden terpilih, Gotabaya Rajapaksa memilih beberapa anggota keluarga untuk menduduki posisi perdana menteri dan beberapa menteri. Karena protes masyarakat yang berujung bentrok dan pembakaran, pada bulan April 2022, seluruh menteri yang berjumlah 26 orang mengumumkan pengunduran diri dari kabinet (BBC, 2022). Dengan demikian, presiden bisa membentuk kabinet baru. Dalam kabinet yang baru, Mahinda Rajapaksa masih menjabat sebagai perdana menteri, sementara Gotabaya telah mengganti dua saudara dan satu sepupu yang sebelumnya menjadi menteri. Masyarakat masih belum puas dan tetap melakukan protes, sehingga pada bulan Mei 2022, Mahinda terpaksa mengundurkan diri sebagai perdana menteri. Kelompok oposisi juga menolak tawaran Gotabaya untuk bekerja sama.

IV. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Pemerintah Sri Lanka sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup ketika berhasil mengatasi pandemi Covid-19 gelombang pertama. Sri Lanka juga mampu meningkatkan pemasukan di sektor turisme dan sektor industri (terutama tekstil dan teh), serta mempertahankan remiten ketika pandemi mulai teratasi dengan keberadaan vaksin pada tahun 2021. Dengan demikian, secara garis besar, pandemi Covid-19 bukan menjadi penyebab utama krisis ekonomi yang saat ini terjadi di Sri Lanka. Menurut penulis, krisis politik dan ekonomi Sri Lanka saat ini merupakan dampak dari ketidakmampuan pemerintah mengelola legitimasi politik dan utang luar negeri, yang kemudian menjadi bom waktu bagi stabilitas politik dan ekonomi.

Sejauh ini, pemerintah Sri Lanka nampaknya lebih ingin mengambil langkah populis dengan menyenangkan rakyatnya melalui tambahan utang luar negeri. Padahal, bagi negara berpendapatan menengah ke bawah, utang luar negeri memiliki konsekuensi yang berat. Pada tahun 2017, Sri Lanka terpaksa memberikan hak pengelolaan pelabuhan Hambantota selama 99 tahun kepada perusahaan Tiongkok karena tidak mampu membayar utang \$1,4 miliar untuk pembangunan pelabuhan tersebut. Untuk memperbaiki krisis, Sri Lanka perlu memulai dengan memperbaiki legitimasi pemerintah, menjauh dari nepotisme politik dan menggunakan utang luar negeri untuk menunjang dan memperbanyak sektor-sektor produktif ekonomi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Amaratunga, D., Fernando, N., Haigh, R., Jayasinghe, N. (2020). *The COVID-19 outbreak in Sri Lanka: A synoptic analysis focusing on trends, impacts, risks and science-policy interaction processes*. Progress in Disaster Science, Vol. 8.
- BBC. (2022, 4 April). *Sri Lanka: Reshuffle begins after cabinet quits over protests*. (Online), <<https://www.bbc.com/news/world-asia-60975941>, diakses 7 Juni 2022>.
- Central Bank Sri Lanka. (2022). *Unemployment Rate*. (Online), <<https://www.cbsl.gov.lk/en/economic-and-statistical-charts/unemployment-rate-chart>, diakses 10 Juni 2022>.

- Deyshappriya, N.P.R. (2020). *Economic Impacts of COVID-19: Macro and Microeconomics Evidences from Sri Lanka*. SSRN.
- Epidemiology Unit. (2022). *COVID-19 Epidemiology in Sri Lanka*. Ministry of Health Sri Lanka. (Online), <http://www.epid.gov.lk/web/images/pdf/corona_monthly_summery/esummery-june.pdf, diakses 29 Juni 2022>.
- Export Development Board Sri Lanka. (2022a). *Apparel Export Performance*. (Online), <<https://www.srilankabusiness.com/apparel/about/export-performance.html>, diakses 15 Juni 2022>.
- Export Development Board Sri Lanka. (2022b). *Ceylon Tea Export Performance*. (Online), <<https://www.srilankabusiness.com/tea/about-tea/export-performance.html>, diakses 15 Juni 2022>..
- Export Development Board Sri Lanka. (2017). *Industry Capability Report: Sri Lankan Apparel Sector*. (Online) <<https://www.srilankabusiness.com/ebooks/2017-06-industry-capability-report-sri-lankan-apparel.pdf>, diakses 15 Juni 2022>.
- Gunasekara, A., Dahanayake, P., Attanayake, C., & Bertone, S. (2022). *Paternalistic leadership as a double-edged sword: Analysis of the Sri Lankan President's response to the COVID-19 crisis*. *Leadership*, Vol. 0, No. 0.
- Huaxia, Huaxia. (2022, 2 Februari). *Sri Lanka records 82,327 tourist arrivals in January despite pandemic*. Xinhua. (Online), <<https://english.news.cn/20220202/8f3e02cb58db428ebe7dd29121adf13e/c.html>, diakses 16 Juni 2022>.
- Keelery, Sandhya. (2022, 24 Maret). *Number of international tourist arrivals in India from 2010 to 2020 (in millions)*. Statista. (Online), <<https://www.statista.com/statistics/305501/number-of-international-tourist-arrivals-in-india/>, diakses 16 Juni 2022>.
- O'Neill, Aaron (2022, 8 Juni). *Sri Lanka: Growth rate of the real gross domestic product (GDP) from 2017 to 2027 (compared to the previous year)*. Statista. (Online), <<https://www.statista.com/statistics/728507/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-sri-lanka/>, diakses 22 Juni 2022>.
- Observatory of Economic Complexity (OEC). (2022). *Sri Lanka*. (Online), <<https://oec.world/en/profile/country/lka>, diakses 22 Juni 2022>.
- Pasricha, Anjana. (2021, 28 Mei). *South Asia Turns to China for COVID Vaccines after India Halts Exports*. VOA News. (Online), <<https://www.voanews.com/a/covid-19-pandemic-south-asia-turns-china-covid-vaccines-after-india-halts-exports/6206320.html>, diakses 12 Juni 2022>.
- Perera, Melani M. (2020). *First local coronavirus case in Sri Lanka*. Asia News. (Online), <[https://www.asianews.it/news-en/\(South-Asia,East-Asia,China,Sri-Lanka\)-First-local-coronavirus-case-in-Sri-Lanka-49529.html](https://www.asianews.it/news-en/(South-Asia,East-Asia,China,Sri-Lanka)-First-local-coronavirus-case-in-Sri-Lanka-49529.html), diakses 13 Juni 2022>.
- Pladson, Kristie. (2022). *Sri Lanka's foreign debt default: Why the island nation went under*. (Online), <<https://www.dw.com/en/sri-lankas-foreign-debt-default-why-the-island-nation-went-under/a-61475596>, diakses 15 Juni 2022>.
- Reuters. (2020). *Sri Lanka confirms first case of coronavirus: health official*. (Online), <<https://www.reuters.com/article/us-health-china-sri-lanka-idUSKBN1ZQ1WF>, diakses 7 Juni 2022>.
- Singh, B., Singh, S., Singh, B., & Chattu, V.K. (2022). *India's Neighbourhood Vaccine Diplomacy During COVID-19 Pandemic: Humanitarian and Geopolitical Perspectives*. *Journal of Asian and African Studies*, Vol. 0, No. 0.
- SLTDA. (2022). *Annual Statistical Report*. (Online), <<https://www.sltlda.gov.lk/en/annual-statistical-report>, diakses 8 Juni 2022>.

- SLTDA. (2021). *Reopening Sri Lanka for Tourism*. (Online), <https://sltda.gov.lk/storage/common_media/Reopening_Sri_Lanka_for_Tourism_240421F661193673.pdf, diakses 14 Juni 2022>.
- Srinivasan, Meera. (2022, 8 Januari). *India tops Sri Lanka's tourism charts 2021*. The Hindu. (Online), <<https://www.thehindu.com/news/national/india-tops-sri-lankas-tourism-charts-2021/article38196048.ece>, diakses 14 Juni 2022>.
- Sri Lanka Tourism Promotion Bureau. (2020). *"Safe & Secure" Certified Tourism Service Providers*. (Online), <<https://srilanka.travel/safe-and-secure>, diakses 20 Juni 2022>.
- The Global Economy. (2022a). *Human Development Index (0-1) in SAARC*. (Online), <https://www.theglobaleconomy.com/rankings/human_development/SAARC/, diakses 8 Juni 2022>.
- The Global Economy. (2022b). *Tourist arrivals in SAARC*. (Online), <https://www.theglobaleconomy.com/rankings/tourist_arrivals/SAARC/, diakses 10 Juni 2022>.
- The Economic Times. (2022, 23 April). *India extends additional \$500 million credit line to Sri Lanka for purchasing fuel*. (Online), <https://economictimes.indiatimes.com/news/india/india-extends-additional-500-million-credit-line-to-sri-lanka-for-purchasing-fuel/articleshow/91024342.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst, diakses 20 Juni 2022>.
- The Times of India. (2022, 19 Mei). *Explained: 10 things about Sri Lanka's worst economic crisis*. (Online), <http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/91648850.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst, diakses 7 Juni 2022>.
- Thowfeek, Rehana. (2022, 25 Maret). *Tourism in Sri Lanka: One step forward, two steps back*. Al-Jazeera. (Online), <<https://www.aljazeera.com/economy/2022/3/25/hold-tourism-in-sri-lanka-one-step-forward-two-steps-back>, diakses 10 Juni 2022>.
- Thushanga, Y.T. & Piyadasa, R. (2021). *The Effect of COVID 19 pandemic to the Tourism Industry in Sri Lanka*. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology, Vol. 9, No. 5.
- Trading Economics. (2022a). *Sri Lanka Government Debt to GDP*. (Online), <<https://tradingeconomics.com/sri-lanka/government-debt-to-gdp>, diakses 20 Juni 2022>.
- Trading Economics. (2022b). *Sri Lanka Imports*. (Online), <<https://tradingeconomics.com/sri-lanka/imports>, diakses 16 Juni 2022>.
- Trading Economics. (2022c). *Sri Lanka Exports*. (Online), <<https://tradingeconomics.com/sri-lanka/exports>, diakses 16 Juni 2022>.
- Wijayasiri, Janaka. (2019). *COVID-19 and Impact on Export Sector in Sri Lanka*. Dalam Cho Choongjae, *Crisis and Fragility: Economic Impact of COVID-19 and Policy Responses*. Korea Institute for International Economy Policy.
- World Bank. (2022). *Personal remittances, received (% of GDP) - Sri Lanka*. (Online), <<https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=LK>, diakses 25 Juni 2022>.
- World Bank. (2021). *Sri Lanka's COVID-19 Response: Saving Lives Today, Preparing for Tomorrow*. (Online), <<https://www.worldbank.org/en/results/2021/08/25/sri-lanka-s-covid-19-response-saving-lives-today-preparing-for-tomorrow>, diakses 7 Juni 2022>.
- World Health Organization. (2022). *Sri Lanka Situation*. (Online), <<https://covid19.who.int/region/searo/country/lk>, diakses 29 Juni 2022>.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER

"Global Health dan COVID-19: Tantangan dan Adaptasi dalam Konstelasi Hubungan Internasional".

World Integrated Trade Solution. (2022). *Sri Lanka Trade Summary 2017 Data*. (Online), <<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/LKA/Year/LTST/Summary>, diakses 25 Juni 2022>..

World Travel & Tourism Council (WTTC). (2022). *Economic Impact Reports*. (Online), <<https://wtcc.org/Research/Economic-Impact/Economic-Impact>)The, diakses 24 Juni 2022>.

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19: BERHENTI ATAU BERTRANSFORMASI?

Anjani Tri Fatharini¹; Palupi Anggraheni²

¹Afiliasi Penulis pertama: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

²Afiliasi Penulis kedua: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

Abstrak

Pandemi COVID-19 memaksa adanya perubahan implementasi program pendampingan masyarakat oleh organisasi non negara (NGOs) dengan adanya pembatasan sosial dari pemerintah. Di sisi lain peran serta civil society semakin diperlukan untuk menguatkan partisipasi masyarakat di sektor publik yang luput dari perhatian negara maupun sektor privat. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran Project Child Indonesia (PCI) sebagai gerakan sosial berbasis komunitas dalam kerangka konseptual civil society. Konsep civil society dan peran NGO sebagai intermediary actor antara masyarakat dan pemerintah digunakan untuk mengidentifikasi ruang lingkup PCI dalam mengadvokasi kegiatan pendampingan masyarakat di era pandemi COVID-19. Metode penelitian dalam artikel ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka. Dari penelitian ini ditemukan bahwa transformasi pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh PCI difokuskan pada optimalisasi dukungan media digital untuk melaksanakan program dan kampanye di komunitas binaan. Pergeseran isu pembangunan global yang terjadi akibat dampak dari pandemi berpengaruh dalam pengembangan program PCI yakni perubahan pola pendanaan bantuan dan penyesuaian program sesuai dengan pola isu-isu yang dominan oleh donor. Sebagai non governmental organizations PCI mampu mewujudkan peran sebagai aktor penghubung antara pemerintah dan masyarakat dengan mengawal isu-isu yang menjadi program prioritasnya.

Kata Kunci: *civil society, pembangunan global, pendampingan masyarakat, COVID-19*

Abstract

The COVID-19 pandemic has forced a change in the implementation of community assistance programs by non-state organizations (NGOs) with social restrictions from the government. On the other hand, the role of civil society is increasingly needed to strengthen public participation in the public sector that is out of reach by the state and the private sector. This article aims to explain the role of Project Child Indonesia (PCI) as a community-based social movement within the conceptual framework of civil society. The concept of civil society and the role of NGOs as intermediary actors between the community and the government are used to identify the scope of PCI in advocating for community assistance activities in the era of the COVID-19 pandemic. Research methods in this article is using qualitative methodology and data is accuired by interview and library research. The community assistance transformation carried out by PCI is focused on optimizing digital media support to implement programs and campaigns in the target communities. The shift in global development issues that occurred due to the impact of the pandemic had an effect on the development of the PCI program, namely changes in the pattern of aid funding and program alignment in accordance with the pattern of dominant issues by donors. As a non-governmental organization, PCI is able in realizing its role as a liaison actor between the government and the community by overseeing issues that are its priority programs.

Keywords: *civil society, global development, community assistance, COVID-19*

I. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai aktor dalam Hubungan Internasional, maka tidak hanya akan berbicara tentang aktor negara tetapi juga aktor non-negara yang memainkan peran penting dalam porsinya masing-masing. Aktor non-negara tidak hanya terbatas pada organisasi/institusi yang bergerak di sektor profit misalnya perusahaan multinasional, tetapi juga sektor nirlaba yakni *Civil Society Organization* (CSO) atau *Non-Governmental Organizations* (NGOs). Sebagai aktor non-negara dalam hubungan internasional, masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menjalankan kegiatan berbasis *altruism*. Menurut Avenell dan Ogawa, masyarakat sipil atau *civil society* adalah sejumlah lembaga, organisasi, dan individu yang terletak di antara keluarga, negara, dan pasar yang mana orang-orang berserikat secara sukarela untuk memajukan kepentingan bersama (Avenell & Ogawa, 2022). NGOs harus bersifat nirlaba atau tidak berorientasi pada keuntungan, harus menjunjung nir-kekerasan, tidak dapat berbentuk sekolah, universitas, atau partai politik, juga selalu menjunjung nilai-nilai humanis dengan menjunjung hak asasi manusia yang tidak dibatasi atas dasar kelompok, kebangsaan, atau negara tertentu (Ahmed & Potter, 2006, 8). Signifikansi aktor non-negara yang bersifat nirlaba mulai masif dalam politik internasional sejak berakhirnya perang dingin dengan semakin aktifnya keterlibatan NGOs dalam pertemuan internasional.

Secara normatif, NGOs memainkan peran penting dalam usaha untuk menjamin hak asasi manusia tanpa pandang bulu. Dalam menjalankan perannya, NGOs terbagi dalam beberapa bentuk sesuai dengan karakteristiknya. NGO yang secara spesifik bekerja dengan komunitas disebut sebagai *Community Based Organization* (CBO). CBO seringkali memberi dukungan kepada masyarakat marginal dan masyarakat rentan (Wilson et al., 2012, 1-2). Humaedi, et.al (2020), membagi penyebab kerentanan suatu kelompok masyarakat menjadi dua kategori yakni karena keterbatasan aset (fisik maupun non fisik) dan keterbatasan akses. Jika dijabarkan dalam beberapa faktor, hal tersebut meliputi faktor ekonomi, budaya, biologis dan psikologis (Humaedi et al., 2020, 62-65).

Pendampingan komunitas/kelompok masyarakat oleh CBO secara lumrah dijalankan secara langsung di komunitas binaan dengan melakukan komunikasi, pelaksanaan program kegiatan dan pendampingan secara tatap muka. Namun, implementasi aksi di lapangan menjadi terhambat dengan adanya pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), mengatur mengenai peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Setneg, 2020). Dengan adanya pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, aksi-aksi kolektif yang sifatnya tradisional (melalui kampanye, demonstrasi, atau petisi yang dimobilisasi secara langsung di lapangan) menjadi tidak bisa dilakukan. Pengendalian yang ketat melalui PSBB kemudian dilonggarkan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan kategorisasi level COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali pada tahun 2021 hingga saat ini.

Project Child Indonesia (PCI) merupakan salah satu NGO di Indonesia yang berbentuk CBO, dengan komunitas binaan di tepi pantai di Pacitan, Jawa Timur dan komunitas binaan di tepi sungai Yogyakarta. Berdiri sejak tahun 2011 dan berfokus pada pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan bencana alam dengan pendampingan terhadap masyarakat yang rentan terhadap bencana alam dan berasal dari sektor informal (*low income family*). Sebelum pandemi, program utama PCI merupakan Sekolah Sungai, Sekolah Pantai, *Drinking Water Program*, dan *Internet Literacy Program* yang dilaksanakan secara luring. Ketika COVID-19 dideklarasikan sebagai pandemi global, PCI melakukan penyesuaian dan memiliki program yakni COVID-19 *Responses* dengan melakukan penyesuaian implementasi

program baik secara luring terbatas maupun secara daring (Project Child Indonesia, 2022). Penulis mengkaji mengenai PCI sebagai aktor non negara dalam hubungan internasional terutama dalam melihat bagaimana NGOs terutama CBO dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat di masa pandemi dengan segala keterbatasan yang ada.

Penelitian tentang pendampingan masyarakat di masa pandemi telah dikaji. Westoby dan Harris (2020) menuliskan mengenai bagaimana pengembangan masyarakat (*community development*) selama dan pasca COVID-19 membawa pada konsekuensi kehidupan digital dan juga transformatif di masyarakat. Pandemi global telah menciptakan peluang yang belum pernah ada sebelumnya, salah satunya dengan hadirnya komunitas daring serta munculnya peran, praktik dan efektivitas komunitas virtual selama pembatasan fisik (Westoby & Harris, 2020, 553-554). Seiringan dengan itu, penelitian dengan bahasan NGO di Indonesia dalam merespon pandemi dituliskan oleh Hidayah (2021) dalam melihat strategi adaptif NGO berbasis pelayanan sosial dengan melihat bahwa strategi adaptif yang dilakukan dalam merespon pandemi adalah melalui aktivitas dan koordinasi berbasis daring (Hidayah, 2021). Kedua penelitian ini memiliki kesamaan aspek dalam menekankan pada adaptasi kegiatan pendampingan masyarakat menjadi berbasis daring. Di sisi lain, Shi, et.al (2020) mengkaji mengenai model respons dari organisasi nirlaba dalam kerangka model *Disruptions-Ambiguities-Innovations-Challenges* (DAIC) untuk melihat bagaimana organisasi nirlaba di wilayah Dallas, Amerika Serikat, merespons tantangan selama COVID-19. Organisasi nirlaba melakukan inovasi dalam menghadapi krisis di tengah ambiguitas dalam menerapkan pedoman kesehatan masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah dalam berinteraksi dengan masyarakat (Shi et al., 2020, 875).

Mencoba melengkapi beberapa penelitian yang ada sebelumnya, tulisan ini hadir untuk menambah literatur dalam kajian hubungan internasional menggunakan pendekatan peran aktor non-negara dalam hubungan internasional yang dielaborasi dengan perubahan urgensi isu-isu pembangunan berkelanjutan di level global. Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan: "Bagaimana transformasi pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh PCI sebagai salah satu organisasi yang fokus pada pendampingan komunitas binaan? Sejauh mana perubahan fokus isu pembangunan global yang terjadi akibat dampak dari pandemi mempengaruhi program PCI?".

II. KERANGKA PEMIKIRAN

***Civil Society Organization* dalam Transformasi Sosial di Masyarakat**

Konsep tentang *Civil Society* mengalami perkembangan baik di ranah domestik di Indonesia maupun secara global. Istilah "civil society" berkaitan erat dengan penguatan kapitalisme dan penurunan absolutisme negara dan mulai terbentuk di Asia maupun Amerika Selatan pada era kolonial maupun poskolonial (Hewison, 2017). Para ahli belum dapat menjelaskan secara definitif tentang *civil society*. Meskipun terdapat beberapa varian terjemahan mengenai *civil society* di Indonesia, secara terminologis tetap menitik beratkan pada "penguatan masyarakat dalam sebuah komunitas negara untuk mengimbangi dan mengontrol kebijakan-kebijakan negara yang cenderung memposisikan masyarakat sebagai pihak yang lemah. Sementara itu, dalam tulisannya mengenai identifikasi beberapa konsep tentang *civil society*, Aswin Aryanto Aziz menyebutkan tentang definisi umum dari *civil society* yang umumnya disepakati para ahli, yakni:

"collection of diverse interest groups and social organizations that is strong enough to provide some autonomy and protection to individuals from authoritarian and hegemonic tendencies of states" (Aziz, 2016, 239).

Peranan *civil society* semakin menguat di era global karena kemampuannya untuk mempengaruhi masyarakat dan pada akhirnya negara dalam proses pengambilan keputusan. *Civil society* juga disebutkan mampu mengisi "ruang hampa" yang selama ini belum mendapatkan advokasi yang mumpuni dari negara, maupun dianggap kurang menguntungkan secara ekonomis bagi sektor privat. Keberadaan *civil society* sendiri, tidak bisa lepas dari cita-cita masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai demokratis yang mendukung partisipasi masyarakat yang lebih luas di sektor publik. Partisipasi masyarakat yang digerakkan oleh *civil society*, menurut Aziz (2018) seperti yang dikutip dari Bauzon, mampu mengubah konsentrasi *power* dari institusi yang bersifat impersonal dan tidak akuntabel menjadi lebih berkeadilan dan berfokus pada komunitas. Sehingga dapat disimpulkan *civil society* berperan dalam mendefinisikan kepentingan masyarakat melalui partisipasi sosial yang seiring dengan nilai-nilai demokratis.

Selanjutnya, Miltin dalam Aziz, (2016, 244) menyebutkan *non-governmental organizations* (NGO) sebagai salah satu bentuk institusionalisme dari *civil society*. Karena cakupan aktivitasnya yang beragam, *civil society* memiliki keanggotaan yang beragam pula baik individual, kelompok keagamaan, akademisi, maupun organisasi non profit. Gemmil-Herren & Bamidele-Izu (2002) menyebutkan luasnya peran NGO dalam konteks *civil society* membuatnya berperan sebagai aktor yang cukup terkemuka dalam tatanan *global governance*, khususnya di bidang lingkungan. Lebih lanjut, NGO didefinisikan sebagai organisasi profesional yang bersifat non profit dan independen dari negara yang memiliki aktivitas kegiatan tertentu dengan tujuan yang terukur. Peran dari NGO, seperti yang dikutip dari MacPherson and Wong, 1998 dalam Aziz (2016, 245) sebagai salah satu aktor non negara yang penting digaris bawahi adalah kemampuannya untuk tetap menjadi aktor independen namun masih membuka kemungkinan untuk bekerjasama dengan negara. Peran NGO yang menjadi *intermediary actors* antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam mencapai tujuan-tujuan objektif tertentu inilah yang digunakan oleh penulis sebagai kerangka berpikir untuk melihat bagaimana transformasi yang dijalankan PCI dalam mengadvokasi isu-isu terkait hak kesehatan maupun pendidikan di era pandemi COVID-19.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena secara deskriptif. Menurut Nurdin dan Hartati (2019), dalam melakukan penelitian kualitatif, tahap yang harus dilakukan adalah melalui pengangkatan masalah, perumusan pertanyaan penelitian, proses pengumpulan data, proses analisis data, dan menjawab pertanyaan penelitian (Nurdin & Hartati, 2019). Penulis mengangkat permasalahan dalam artikel yaitu: "Bagaimana transformasi pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh PCI sebagai salah satu organisasi yang fokus pada pendampingan komunitas binaan? Sejauh mana perubahan fokus isu pembangunan global yang terjadi akibat dampak dari pandemi mempengaruhi program PCI?. Setelah merumuskan kedua pertanyaan penelitian tersebut, proses pengumpulan data dilakukan. Data dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan staf Project Child Indonesia yang dilakukan pada bulan Januari 2022 dan dilengkapi dengan data-data sekunder dari buku, laporan, artikel jurnal, maupun data yang berasal dari *website*. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini.

IV. ANALISIS

A. Transformasi Pendampingan Masyarakat

Sebelum pandemi COVID-19, PCI telah menjalankan empat program utamanya secara luring dengan melibatkan berbagai pihak untuk mendukung para penerima

manfaat. Jika dikategorikan, sasaran masyarakat dari program yang dijalankan oleh PCI adalah komunitas binaan dan sekolah binaan. Komunitas binaan mencakup sasaran masyarakat yang terdiri dari warga masyarakat baik orang tua maupun anak-anak di lingkup komunitas tersebut. Sedangkan sekolah binaan mencakup seluruh warga sekolah seperti guru, siswa, penjaga sekolah maupun orang tua siswa. Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada program yang berkaitan dengan pendampingan masyarakat di komunitas binaan dengan memetakan program sesuai dengan sasaran program.

Tabel 1. Pemetaan sasaran dalam program PCI

Program	Sasaran Masyarakat
Sekolah Sungai	Komunitas binaan di tepi sungai Winongo, Gajah Wong, dan Code.
Sekolah Pantai	Komunitas binaan di tepi pantai Pancer Door.
<i>Drinking Water Program</i>	Sekolah dasar di Yogyakarta, Pacitan, Fak-Fak, dan Banten.
<i>Internet Literacy Program</i>	Sekolah dasar di Yogyakarta.

Sumber: Pengolahan data oleh penulis dari website www.projectchild.ngo

Berdasarkan tabel di atas, program yang secara spesifik menargetkan masyarakat binaan di komunitas rentan adalah program Sekolah Sungai dan Sekolah Pantai. Program Sekolah Sungai menargetkan masyarakat yang rentan secara ekonomi dan rentan terhadap bencana alam. PCI melakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik masyarakat di setiap lokasi sungai terutama dalam aktivitas terkait dengan *community engagement and community development* yang menargetkan anggota komunitas. Program untuk anak-anak dibuat selaras untuk dijalankan di tiga lokasi dengan membawa aspek kampanye tentang isu kesehatan, bencana alam, dan lingkungan dalam bentuk kelas informal menggunakan pendekatan *project based learning*. Kegiatan pendampingan dilaksanakan di rumah warga maupun di balai RT dan RW dengan berinteraksi secara aktif dengan masyarakat dan membangun kedekatan melalui kegiatan-kegiatan luring. Seiringan dengan hal tersebut, Sekolah Pantai menjalankan kegiatan kampanye dengan isu yang sama dengan Sekolah Sungai untuk mengeksplorasi pembelajaran anak-anak yang tidak hanya dari segi kognitif tetapi juga perkembangan emosional, motorik, dan spiritual. Berbeda dengan Sekolah Sungai, Sekolah Pantai memiliki fasilitas belajar tersendiri yang terbuat dari bangunan bambu sebagai tempat untuk melaksanakan program dengan menargetkan anak-anak di sekitar lokasi tempat belajar yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan Tsunami.

Kegiatan pendampingan masyarakat oleh PCI melibatkan berbagai pihak. Dari sisi implementasi program, kegiatan tidak hanya pemangku kebijakan di lingkungan setempat tetapi juga adanya pelibatan relawan internasional dan lokal. Relawan internasional datang dari berbagai negara dan melakukan kegiatan di lokasi komunitas binaan selama waktu tertentu (kegiatan relawan dan magang di PCI dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dalam satu *batch*). Begitu pula dengan relawan lokal yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Dari segi pendanaan, PCI mengandalkan donasi/sponsor/*grants* dari donatur pribadi/kelompok, organisasi, perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*), maupun pemerintah (sebagian besar berasal dari luar negeri), serta melalui kegiatan *charity* atau *crowdfunding*.

Di masa pandemi, seluruh program utama yang dijalankan oleh PCI kemudian ditunda sampai pada waktu yang belum ditentukan dan mengalami penyesuaian. Perubahan urgensi isu yang dijalankan oleh NGO tidak hanya terjadi pada PCI tetapi juga NGO lain di berbagai negara. Berdasarkan hasil laporan dari CIVICUS pada tahun 2020, masyarakat sipil melakukan penyesuaian aktivitas menjadi isu responsif terhadap pandemi, dengan merubah haluan program menjadi program yang bertujuan untuk kebutuhan mendesak selama pandemi, misalnya pasokan makanan dan pelayanan kesehatan (CIVICUS, 2020). Bagi organisasi yang telah terbiasa dengan program berkaitan dengan kesehatan, maka organisasi tersebut dapat dengan mudah untuk memperluas program mereka dengan memasukan inisiatif terkait dengan COVID-19 seperti menyediakan masker dan mengedukasi tentang jaga jarak. Namun organisasi yang tidak aktif dalam masalah kesehatan, mungkin akan menghadapi tantangan untuk menerapkan inisiatif tersebut (iMMAP, 2021). Kemudian bagaimana dengan PCI?

PCI mengubah haluan program dengan membentuk program COVID-19 *Response* yang terdiri dari program *Public Kitchen*, *Aid Distribution*, *Online Learning Assistance*, dan *Sanitation and Hygiene*. Berdasarkan fokus gerakan, PCI bergerak pada bidang kesehatan, bencana alam, dan lingkungan. Oleh karenanya, PCI mampu memperluas program yang berkaitan dengan COVID-19. Dari sisi kesehatan, kampanye edukasi PCI lebih kepada implementasi *practical health* yang berkaitan dengan gaya hidup bersih dan sehat, sehingga hal ini bersinergi dengan upaya terkait dengan respon terhadap pandemi. Dari beberapa program dalam COVID-19 *Response*, penulis memetakan khususnya program pendampingan di masyarakat binaan berdasarkan dengan aktivitas, sasaran masyarakat, dan relevansinya dengan COVID-19.¹

Tabel 2. Pemetaan aktivitas PCI dalam merespon COVID-19 pada tahun 2020-2021

Program	Aktivitas	Sasaran Masyarakat	Relevansi dengan COVID-19
<i>Public Kitchen</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi makanan sehat kepada Ibu-Ibu di komunitas. - Kampanye penggunaan wadah bekal untuk mengurangi sampah plastik. - Menyediakan makan siang sehat kepada masyarakat. - Berkolaborasi dengan pelaku bisnis makanan di komunitas dalam menyediakan makanan. 	Komunitas binaan di tepi sungai Winongo, Gajah Wong, dan Code.	<p>Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, konsumsi makanan sehat sangat penting selama pandemi COVID-19 dan dapat membantu dalam mencegah, melawan, dan pulih dari infeksi virus (WHO, 2022).</p> <p>Penelitian oleh Aman dan Masood (2020) menjelaskan tentang pentingnya asupan nutrisi yang optimal untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam menghadapi pandemi (Faseeha & Masood, 2020).</p>

¹ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan lebih memfokuskan pada program yang berkaitan dengan pendampingan masyarakat di komunitas binaan, sehingga program seperti *Sanitation and Hygiene* dengan target sasaran sekolah binaan tidak akan dieksplorasi lebih lanjut untuk membatasi penelitian ini.

Program	Aktivitas	Sasaran Masyarakat	Relevansi dengan COVID-19
<i>Aid Distribution</i>	- Pembagian paket sembako.	Komunitas binaan di tepi sungai Winongo, Gajah Wong, dan Code.	Studi oleh SMERU (2021) memaparkan bahwa pandemi telah mempengaruhi kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi keluarga di rumah tangga terdampak yang diperparah dengan krisis perekonomian Indonesia yang terjadi sejak triwulan kedua pada tahun 2020 (SMERU, 2021).
<i>Online Learning Assistance</i>	- Fasilitasi paket internet dan peminjaman <i>gadget</i> . - Pendampingan belajar daring dan luring terbatas untuk materi sekolah dan materi tentang kesehatan, bencana alam, dan lingkungan.	Komunitas binaan di tepi sungai Winongo, Gajah Wong, dan Code.	Santosa (2020) menandai ketidaksiapan implementasi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi dengan infrastruktur yang belum memadai terutama akses internet serta dari sisi kapabilitas tenaga pengajar dan digitalisasi industri pendidikan di Indonesia masih dirasa tertinggal (Santosa, 2020, 2-5).

Sumber: Pengolahan data oleh penulis dari website www.projectchild.ngo dan beberapa sumber seperti yang telah dikutip dalam tabel.

Berdasarkan data tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa di situasi COVID-19, melakukan penyesuaian program menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Meskipun begitu, masyarakat sipil yang dalam konteks ini CBO, bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melakukan penyesuaian tersebut. Pada dasarnya, CBO dapat memberikan umpan balik tentang sumber daya dan kebutuhan masyarakat termasuk kelayakan strategi mitigasi pemerintah dan organisasi yang lebih besar dengan menginformasikan kepada pihak berwenang terkait dengan hasil pemetaan sumber daya dan kebutuhan masyarakat (iMMAP, 2021). Dari sisi program yang berkaitan dengan pendidikan, PCI melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat terutama anak-anak yang terpaksa harus belajar dari rumah dengan melakukan wawancara kepada orang tua di ketiga komunitas sungai pada bulan Maret 2020. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa adanya kebutuhan fasilitasi belajar tambahan bagi anak-anak. Secara umum masyarakat di komunitas sungai tersebut bekerja di sektor informal dan tidak mampu untuk membayar guru les maupun kesulitan memenuhi kebutuhan *gadget* dan kuota internet.² Selanjutnya, PCI menggunakan hasil pemetaan kebutuhan tersebut untuk

² Sumber dari laporan internal Project Child Indonesia tentang kesiapan belajar dari rumah selama pandemi pada bulan Maret 2020.

berkolaborasi dengan mitra yang dapat mendukung kegiatan yang relevan sesuai kebutuhan.

Selama pandemi, ketika aktivitas di lapangan menjadi sulit untuk dilakukan maka transformasi dari luring menjadi daring menjadi sebuah alternatif (Pinckney, 2020) (Brechenmacher et al., 2020). Dengan adanya urgensi terkait dengan pendampingan belajar, maka program *Online Learning Assistance* dijalankan secara luring terbatas pada awal implementasi program dan hanya menysasar anak-anak di komunitas binaan. Kemudian setelah berjalan selama satu tahun, program dilaksanakan secara daring sepenuhnya yang menysasar anak-anak dari komunitas rentan di seluruh Indonesia dan melibatkan relawan dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mendampingi belajar secara daring. Transformasi dari luring menjadi daring tidak hanya terbatas pada saat penyelenggaraan program oleh NGO dan berbagai gerakan masyarakat sipil di berbagai negara, tetapi juga saat proses persiapan, koordinasi, hingga penyelesaian program yang mana pengorganisasian dan mobilisasi dilakukan secara daring melalui pertemuan dan *webinar* daring, *work from home*, dan koordinasi daring (CIVICUS, 2020). Hal ini juga diterapkan oleh PCI yang memaksimalkan dukungan media digital untuk melaksanakan kerja manajerial juga koordinasi tim. Selain itu, kampanye digital juga dieksplorasi dengan memaksimalkan peran media sosial dan *platform digital campaign*.

B. Pandemi dan Tujuan Pembangunan Global

Sebagai sebuah NGO, PCI menysasar pada isu-isu global sesuai dengan kesepakatan internasional dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang memiliki 17 pilar tujuan berkelanjutan. Jika diklasifikasi, PCI bergerak pada tujuan-tujuan meliputi SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan), SDGs 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas), SDGs 6 (Air dan Sanitasi Layak), SDGs 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDGs 14 (Ekosistem Lautan), dan SDGs 17 (Kemitraan untuk mencapai tujuan). Meskipun terjadi perubahan fokus kegiatan dan perubahan program yang dijalankan di komunitas binaan, PCI tidak serta merta menghentikan usaha dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, fokus SDGs yang disinkronisasikan dengan program *COVID-19 Response* disesuaikan dengan tujuan yang relevan dengan kebutuhan pandemi terutama yang utama berkaitan dengan SDGs 3 dan SDGs 4.

Dengan adanya pandemi, respon terhadap krisis global berdampak pada kemampuan untuk mewujudkan SDGs dan menciptakan ketidakpastian disaat upaya percepatan pencapaian tengah dilaksanakan. COVID-19 tidak hanya menghentikan upaya untuk mencapai beberapa pilar SDGs, tetapi badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kesehatan Dunia juga mengalihkan fokus untuk menangani ancaman pandemi (Fenner & Cernev, 2021). Krisis COVID-19 juga memukul ekonomi negara pada saat kritis. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah mungkin akan kesulitan dalam membiayai respon kesehatan masyarakat, ekonomi, dan sosial yang terdampak oleh pandemi. Sehingga pembiayaan terhadap isu pembangunan beresiko untuk tidak menjadi hal yang utama, ditambah dengan terganggunya mobilisasi sumber daya domestik akibat dari aktivitas ekonomi yang berkurang (OECD, 2020).

COVID-19 telah memicu krisis pendanaan bagi NGO dengan adanya kecenderungan menurunnya anggaran bantuan dan sumbangan sebagai akibat dari penurunan ekonomi (World Economic Forum, 2020). Menurut survei terhadap 550 badan amal di Inggris oleh *Institute of Fundraising*, 48% badan amal Inggris berisiko kehilangan pendapatan sukarela mereka karena pandemi (Bond, 2020). Dalam konteks Indonesia, terjadi hambatan pendanaan terutama bagi NGO di daerah. Ditambah dengan

ketersediaan sumber-sumber pendanaan pemerintah belum dapat diakses secara merata (Makdori, 2022). Dalam level negara, bantuan pembangunan melalui *Official Development Assistance* (ODA) menjadi sumber keuangan eksternal yang penting bagi negara berkembang. Dalam merespon pandemi, negara penerima manfaat ODA harus dapat menyesuaikan prioritas yang harus ditangani oleh bantuan eksternal dengan menyelaraskan pada rencana pembangunan nasional termasuk diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (United Nations, 2022). Sedangkan bagi NGO sumber pendanaan yang penting bagi mereka tidak terbatas dari negara donor melalui kerjasama program tertentu tetapi juga donor individu atau kelompok, pengumpulan dana amal melalui kegiatan *charity*, dana program tanggung jawab sosial perusahaan dan sumber-sumber pendanaan lain yang bersifat bantuan.

Sejauh mana perubahan fokus isu pembangunan global yang terjadi akibat dampak dari pandemi mempengaruhi program PCI? Fokus pembangunan global saat ini adalah bagaimana merespon dampak pandemi dalam berbagai aspek kehidupan dan proses pemulihan dari dampak yang ditimbulkan. Sebagai sebuah NGO dengan program yang beroperasi melalui dana bantuan dari donor, PCI turut merasakan dampak selama pandemi. Perubahan arah dana bantuan dalam isu-isu pembangunan global menjadi ke dana-dana untuk menopang program berkaitan dengan respon COVID-19 membuat PCI harus menyesuaikan program dengan prioritas pendanaan yang turut berubah. Dapat dilihat dari program respon COVID-19 yang telah dipaparkan sebelumnya, program seperti *Online Learning Assistance* misalnya, memiliki urgensi penting berkaitan dengan fokus terhadap dampak pandemi kepada pendidikan. Dalam program ini, PCI berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dalam memfasilitasi pengadaan *gadget* untuk mendukung proses pendampingan belajar bagi anak-anak di komunitas binaan. Kemudian PCI berkolaborasi dengan pihak swasta yakni XL Axiata dalam memfasilitasi penyediaan bantuan paket data internet. Selain itu, pembiayaan dalam menjalankan program pada tahun 2020 didapatkan melalui hasil *crowdfunding* melalui platform *kitabisa.com* dengan berkolaborasi dengan kelompok mahasiswa Indonesia di Hong Kong untuk mendukung pendidikan anak-anak. Di tahun 2021, PCI kemudian mendapat pendanaan melalui program *grants* dari salah satu organisasi yaitu Frans Seda Foundation. Kolaborasi NGO dengan berbagai pihak merupakan hal yang krusial dalam menjalankan program untuk mencapai tujuan pembangunan.

V. KESIMPULAN

Keterbatasan yang muncul sebagai dampak dari pandemi COVID-19 membawa pada pertanyaan terhadap kegiatan pendampingan di masyarakat, apakah kemudian berhenti secara total atau kemudian bertransformasi. PCI sebagai organisasi masyarakat sipil yang berbasis komunitas melakukan transformasi pendampingan masyarakat melalui program COVID-19 *Response*. PCI memperluas fokus gerakannya pada isu-isu yang berkaitan dengan respon COVID-19 dan memaksimalkan dukungan media digital untuk melaksanakan program di komunitas dan kampanye program. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat sipil berperan dalam mengisi "ruang hampa" yang selama ini belum mendapatkan advokasi yang mumpuni di masa pandemi terutama dalam hal pendampingan masyarakat. PCI menjalankan peran sebagai *intermediary actors* antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam mencapai tujuan-tujuan dalam mengadvokasi isu-isu terkait hak dalam memperoleh akses pendidikan maupun kesehatan di era pandemi COVID-19. Di sisi lain, perubahan pola pendanaan bantuan yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan global juga mempengaruhi program PCI. PCI menyelaraskan program yang mereka jalankan dengan pola isu-isu yang dominan oleh donor terutama terkait pandemi. Penguatan hubungan kolaboratif dalam menjalankan program

kemudian mendukung bagaimana program pendampingan masyarakat yang telah disesuaikan dapat tetap berjalan dalam meraih tujuan normatif sesuai dengan visi dan misi organisasi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I., & Rumtini. (2010). Civil Society Dan Pendidikan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 10.24832/jpnk.v16i9.518
- Ahmed, S., & Potter, D. M. (2006). NGOs and International Relations Theory. In *NGOs in International Politics* (pp. 5-17). Kumarian Press, Incorporated. -
- Avenell, S., & Ogawa, A. (2022). Introduction: Transnational civil society in Asia. In *Transnational Civil Society in Asia: The Potential of Grassroots Regionalization* (pp. 1-20). Routledge.
- Aziz, A. A. (2016). The Concept of Civil Society and Its Significance on Development Practice. *Transformasi Global*, 3(2), 239. <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/download/57/52>
- Bond. (2020, April 8). *How is Covid-19 affecting NGOs' finances and operations?* Bond. Retrieved July 21, 2022, from <https://www.bond.org.uk/news/2020/04/how-is-covid-19-affecting-ngos-finances-and-operations>
- Brechenmacher, S., Carothers, T., & Youngs, R. (2020, April 21). *Civil Society and the Coronavirus: Dynamism Despite Disruption*. Carnegie Endowment for International Peace. Retrieved July 19, 2022, from <https://carnegieendowment.org/2020/04/21/civil-society-and-coronavirus-dynamism-despite-disruption-pub-81592>
- CIVICUS. (2020, November). *SOLIDARITY IN THE TIME OF COVID-19*. Civicus. Retrieved July 19, 2022, from https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/solidarity-in-the-time-of-covid-19_en.pdf
- Faseeha, A., & Masood, S. (2020, May). *How Nutrition can help to fight against COVID-19 Pandemic*. NCBI. Retrieved July 20, 2022, from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306972/>
- Fenner, R., & Cernev, T. (2021, April). *The implications of the Covid-19 pandemic for delivering the Sustainable Development Goals*. Science Direct. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328721000355#bib0230>
- Gemill-Herren, Barbara & Bamidele-Izu, Abimbola. 2002. The role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance.< https://www.researchgate.net/publication/228786506_The_role_of_NGOs_and_Civil_Society_in_Global_Environmental_Governance/stats>
- Hewison, K. (2017, 11 6). *Rethinking Southeast Asian civil society*. New Mandala. Retrieved 07 29, 2022, from <https://www.newmandala.org/illiberal-civil-society/>
- Hidayah, N. F. (2021, Oktober 1). *View of Strategi Adaptif NGO saat Pandemi COVID 19 (Studi Kasus Pelayanan Sosial Mitra Wacana Women Resource Centre)*. E-JOURNAL STISIPOL CANDRADIMUKA PALEMBANG. Retrieved July 29, 2022, from <http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/article/view/64/4>
- Humaedi, S., Wibowo, B., & Raharjo, S. T. (2020). Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang). *Social Work Journal*, 10(1), 61-72. <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/29014/13758>
- iMMAP. (2021, December 10). *The Role of Community-based Organizations in COVID-19 Response: Case Studies of Bangladesh, Burkina Faso, Nigeria, and Syria - Bangladesh*. ReliefWeb. Retrieved July 19, 2022, from <https://reliefweb.int/report/bangladesh/role-community-based-organizations-covid-19-response-case-studies-bangladesh>
- Makdori, Y. (2022, February 16). *Pandemi Covid-19 Melanda, Banyak LSM di Indonesia Kesulitan*. Liputan6.com. Retrieved July 21, 2022, from

- <https://www.liputan6.com/news/read/4888823/pandemi-covid-19-melanda-banyak-lsm-di-indonesia-kesulitan>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. BUKU METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL.pdf. Retrieved July 30, 2022, from <http://eprints.ipdn.ac.id/4510/2/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20SOSIAL.pdf>
- OECD. (2020, June 24). *The impact of the coronavirus (COVID-19) crisis on development finance*. OECD. Retrieved July 21, 2022, from <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-the-coronavirus-covid-19-crisis-on-development-finance-9de00b3b/>
- Pinckney, J. (2020, April 28). *Amid Coronavirus, Online Activism Confronts Digital Authoritarianism*. United States Institute of Peace. Retrieved July 19, 2022, from <https://www.usip.org/publications/2020/04/amid-coronavirus-online-activism-confronts-digital-authoritarianism>
- Project Child Indonesia. (2022). *Our Program*. Project Child Indonesia. Retrived Juli 21, 2022, from <https://projectchild.ngo/>
- Santosa, A. B. (2020, Juni 5). Potret Pendidikan di Tahun Pandemi: Dampak COVID-19 Terhadap Disparitas Pendidikan di Indonesia. *CSIS Commentaries DMRU-079-ID*, 1-5. <https://www.csis.or.id/publications/potret-pendidikan-di-tahun-pandemi-dampak-covid-19-terhadap-disparitas-pendidikan-di-indonesia/>
- Setneg. (2020, Maret 31). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020*. JDIH BPK RI. Retrieved July 19, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>
- Shi, Y., Jang, H. S., Keyes, L., & Dicke, L. (2020). Nonprofit Service Continuity and Responses in the Pandemic: Disruptions, Ambiguity, Innovation, and Challenges. *Public Administration Review*, 80(5), 874-879. 10.1111/puar.13254
- SMERU. (2021, July 26). *Situasi Kemiskinan Selama Pandemi | The SMERU Research Institute*. Smeru. Retrieved July 21, 2022, from <https://smeru.or.id/id/article-id/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>
- United Nations. (2022). *Impact of the Covid-19 Pandemic on Trade and Development: Lessons Learned*. UNCTAD. Retrieved July 30, 2022, from https://unctad.org/system/files/official-document/osg2022d1_en.pdf
- Westoby, P., & Harris, V. (2020, Juli 8). Community development 'yet-to-come' during and post the COVID-19 pandemic: from Derrida to Zubo. *Community Development Journal*, 55(4), 553-569. 10.1093/cdj/bsaa026
- Wilson, Michael G., Lavis, John N., & Guta, Adrian (2012). Community-based organizations in the health sector: A scoping review. *Health Research Policy and Systems*, 10(36), 1-9. <https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4505-10-36#citeas>
- WHO. (2022). *#HealthyAtHome - Healthy Diet*. WHO | World Health Organization. Retrieved July 20, 2022, from <https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet>
- World Economic Forum. (2020, April 2). *How to reform NGO funding to deal with threats like COVID-19*. The World Economic Forum. Retrieved July 21, 2022, from <https://www.weforum.org/agenda/2020/04/how-to-reform-ngo-funding-so-we-can-deal-with-threats-like-covid-19/>

ANALISIS PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI AFGHANISTAN PASCA DIKUASAI TALIBAN PADA TAHUN 2021-2022

I Putu Arya Aditia Utama³; Abishay Muhammad Maulidio⁴

¹Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

²Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
aditiaarya123@gmail.com; abishay.maulidio@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Untuk pertama kalinya Taliban menunjukkan pengaruhnya dengan menguasai ibu kota Afghanistan, yaitu Kabul pada tahun 1996. Pengaruh Taliban menyebar luas sampai berhasil menguasai hampir 90 persen wilayah Afghanistan pada tahun 1998. Namun, pada tahun 2001, kekuasaan Taliban runtuh akibat serangan dari Amerika Serikat. Hampir 20 tahun berselang, Taliban kembali berhasil menguasai Afghanistan pada 15 Agustus 2021 dengan menduduki istana presiden Afghanistan. Menariknya, momentum tersebut juga diwarnai dengan adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda Afghanistan. Penelitian ini menjawab penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi di Afghanistan pasca dikuasai Taliban pada tahun 2021-2022. Penelitian ini berupa studi kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data dari buku, artikel ilmiah, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taliban berhasil menangani pandemi COVID-19 pasca menguasai Afghanistan. Awalnya, Taliban sempat menolak kelanjutan vaksinasi yang mengakibatkan angka vaksinasi turun 80 persen. Namun, beberapa bulan berselang, Taliban kembali melanjutkan program vaksinasinya dengan mendistribusikan ke 34 provinsi di Afghanistan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan kasus yang signifikan dari periode bulan sebelumnya ketika Afghanistan belum dikuasai oleh Taliban. Keberhasilan Taliban dalam menangani pandemi COVID-19 dilatarbelakangi oleh bantuan dari beberapa negara dan organisasi internasional melalui dosis vaksin, fasilitas medis, dan juga bantuan finansial.

Kata Kunci: Afghanistan, Penanganan COVID-19, Taliban

Abstract

For the first time, the Taliban showed their influence by taking control of the Afghan capital, Kabul in 1996. The Taliban's influence was widespread until it succeeded in controlling almost 90 percent of Afghanistan in 1998. However, in 2001, the Taliban's power collapsed due to attacks from the United States. Nearly 20 years later, the Taliban managed to regain control of Afghanistan on August 15, 2021, by occupying the Afghan presidential palace. Interestingly, this momentum is also marked by the COVID-19 pandemic that is hitting Afghanistan. This study answers the handling of the COVID-19 pandemic that occurred in Afghanistan after being controlled by the Taliban from 2021 to 2022. This research is a literature study using qualitative methods, collecting data from books, scientific articles, and the internet. The results showed that the Taliban managed to handle the COVID-19 pandemic after taking control of Afghanistan. Initially, the Taliban refused to continue vaccination which resulted in the vaccination rate dropping by 80 percent. However, a few months later, the Taliban resumed its vaccination program by distributing it to 34 provinces in Afghanistan. This resulted in a significant decrease in cases from the previous month's period when Afghanistan was not yet under the control of the Taliban. The success of the Taliban in dealing with the COVID-19 pandemic was motivated by assistance from several countries and international organizations through vaccine doses, medical facilities, as well as financial assistance.

Keywords: Afghanistan, Handling COVID-19, Taliban

I. PENDAHULUAN

Tahun 2020 bukan menjadi tahun pertama kelompok Taliban berkuasa atas pemerintahan Afghanistan, Taliban pernah berkuasa di Kabul pada tahun 1996 silam dengan menyebarkan pengaruhnya ke penjuru negeri hingga berhasil menguasai sebagian besar wilayah di Afghanistan yang disambut baik oleh masyarakat karena membawa angin segar untuk kehidupan masyarakat dan politik karena sebelumnya Afghanistan dibawah pemerintahan sipil berjalan dibawah pengaruh Uni Soviet. Taliban memberlakukan hukum syariah dalam menjalankan pemerintahannya yang mengundang unsur kontroversial karena beberapa pihak dan negara lain mengakui bahwa hukum Syariah yang diberlakukan oleh Taliban dinilai ekstrimis. Akan tetapi, pemerintahan Taliban juga diakui oleh tiga negara muslim terbesar, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Pakistan (VOA,2021). Pada tahun 2001 terjadi serangan 9/11 di WTC, serangan ini menjadi pemicu masuknya atau intervensi AS di Afghanistan karena AS menganggap pihak teroris yang bertanggung jawab atas serangan tersebut bersarang di Afghanistan. Taliban diduga menjadi payung berteduh kelompok Al-Qaeda dibawah pimpinan Osama Bin Laden yang saat itu diduga sebagai tersangka utama penyerangan 9/11 sehingga AS dibawah Presiden Bush melalui doktrinnya menyatakan perang dengan terorisme dan dimulai lah konflik antara tentara AS dan Taliban yang terjadi bertahun-tahun lamanya. Kekacuan dalam konflik ini semakin pelik karena melibatkan pihak luar negeri yaitu AS, gerakan domestik yaitu Taliban, dan pemerintahan sipil Afghanistan yang berkuasa pada saat itu.

Afghanistan sebelumnya memang sudah mengalami krisis seperti kemanusiaan, kesehatan (dilihat dari kurangnya tenaga kesehatan, rumah sakit, dan alat medis), hingga sosio-politik. Krisis kemanusiaan di Afghanistan berwujud krisis pangan, kelaparan, dan ekonomi yang sebelumnya sudah terjadi dan sayangnya di tahun 2020 COVID-19 berhasil masuk dan menyebar di Afghanistan yang selaras dengan konflik yang terjadi sehingga menyebabkan peningkatan krisis yang terjadi di Afghanistan hingga di muara bencana kemanusiaan (WHO, 2022). Tidak banyak rumah sakit di Afghanistan yang dapat menampung pasien COVID-19 karena memang pada dasarnya Afghanistan "belum siap" untuk menghadapi pandemi semacam ini ditambah ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan dan peralatan medis seperti alat tes COVID-19 yang masih kurang memadai bahkan tidak tersedia jika tidak dibantu oleh pihak eksternal. Berdasarkan data dari laman WHO menunjukkan adanya tiga gelombang tertinggi kasus COVID-19 sebelum Taliban berkuasa, gelombang pertama pada tanggal 1 Juni 2020 dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 5,248 dan gelombang kedua pada tanggal 30 November 2020 sebanyak 1,675 kasus terkonfirmasi. Penurunan yang signifikan dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh menunjukkan adanya keberhasilan pemerintah sipil Afghanistan dalam menanggulangi COVID-19. Pada Februari 2021 kesepakatan damai antara AS dan Taliban pun terjadi, AS dibawah komando Presiden Joe Biden menarik pasukannya dari Afghanistan dan Taliban pun dengan segera menyusun strategi dan mengeksekusi untuk menginvasi Afghanistan. Saat konflik ini terjadi lah gelombang tertinggi kasus COVID-19 terjadi pada tanggal 21 Juni 2021 sebanyak 12,314 kasus terkonfirmasi beberapa saat sebelum Taliban berkuasa. Kondisi COVID-19 Afghanistan sebelum Taliban berkuasa cenderung dinamis dengan beberapa kali gelombang.

Pada tahun 2021 resolusi damai antara AS dan Taliban berhasil dicapai di bawah Presiden Joe Biden dengan penarikan militer AS beserta sekutu seperti NATO, Jerman, dan Australia sehingga sesaat setelah perundingan diputuskan pihak Taliban langsung beraksi dengan membuat strategi untuk merebut kekuasaan yang sukses diraih per tanggal 15 Juni 2021 dilanjutkan pada kedudukan sepenuhnya di Kabul pada tanggal 15 Agustus 2021 (Savero 2021). Penelitian ini menganalisis perebutan kekuasaan oleh Taliban beriringan dengan momentum pandemi COVID-19 yang makin mempersulit keadaan di Afghanistan dan

mengekspos bagaimana kondisi COVID-19 dan domestik Afghanistan pasca dikuasai Taliban, ditambah ketersediaan vaksin untuk COVID-19 di dunia baru tersedia kurang lebih dalam kurun waktu Taliban berkuasa. Penulis ingin melihat bagaimana kelanjutan penanganan COVID-19 di Afghanistan pasca Taliban berkuasa mengingat sebelumnya, kasus COVID-19 di Afghanistan cenderung dinamis. Hukum Syariah yang diterapkan Taliban juga kontroversial dan nilai ekstrimis hukum ini dinilai tidak berubah sejak terakhir mereka menguasai Afghanistan.

Sebagai basis atau acuan dari penelitian ini penulis mengambil tiga penelitian terdahulu yang menjadi referensi utama sebelum ditambahkan referensi lainnya yang sekiranya dapat membantu penulis untuk menganalisa dan mengekspos objek penelitian. Penelitian pertama berjudul “Strategi Awal Penanganan COVID-19 Di Negara Berpendapatan Menengah ke Bawah: *Systematic Review*” karya Mirza Aulia dan Atik Nurwahyuni. Penelitian terdahulu ini relevan dengan penelitian kami dikarenakan persamaan berupa analisis respon dan penanganan suatu negara terhadap pandemi COVID-19. Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian kami terletak pada spektrum pembahasan dimana penelitian terdahulu membahas strategi penanganan tidak pada satu negara berpendapatan menengah ke bawah saja dan penelitian kami secara spesifik membahas negara “mana” yaitu Afghanistan untuk dianalisis respon dan strategi penanganan COVID-19 serta implikasi dengan isu lainnya seperti kemanusiaan, ekonomi, dan politik. Penelitian ini juga membahas kelanjutan strategi pasca peralihan kedudukan pemerintahan oleh Taliban. Penelitian terdahulu kedua berjudul “Afghanistan di Bawah Kekuasaan Taliban: Tantangan dan Peran Dunia Internasional” karya Sigit Aris Prasetyo dan Adam Janitra Valdy Savero. Relevansi penelitian ini dengan penelitian kami terletak pada objek penelitian dimana Afghanistan dan Taliban sebagai objek utama dalam penelitian dan membahas bagaimana respon internasional walaupun pada penelitian ini fokus kajiannya bukanlah isu internasional. Perbedaannya terletak fokus pembahasan dimana penelitian terdahulu kedua ini mengkaji tentang kondisi realita Afghanistan dibawah kekuasaan Taliban hingga tantangan dan peran dunia internasional terhadap kondisi domestik Afghanistan sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana kondisi pandemi COVID-19 di Afghanistan pasca pemerintahan Taliban berkuasa serta isu politik, keamanan, dan krisis kemanusiaan seperti kesehatan dan kelaparan. Penelitian terdahulu terakhir berjudul “Taliban Merebut Kembali Kekuasaan di Afghanistan” karya Poltak Partogi Nainggolan. Aspek substansial yang menyamakan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian kami dimana kedua penelitian mengekspos dinamika dan realita yang terjadi saat perebutan kekuasaan pemerintahan Afghanistan oleh Taliban. Transisi pemerintahan menjadi perhatian dalam kedua penelitian ini, hanya saja penelitian terdahulu berfokus pada fenomena politik berupa perebutan atau transisi kekuasaan yang dilakukan oleh Taliban terhadap pemerintahan sipil Afghanistan dan kondisi politik Afghanistan akibat perpindahan kekuasaan menjadi aspek pembahasan utama, sedangkan penelitian kami menjadikan transisi kekuasaan sebagai dinamika atau fenomena yang meningkatkan angka kasus COVID-19 di Afghanistan dan pembahasan lanjutan berupa bagaimana kondisi COVID-19 pasca Taliban berkuasa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang kami lakukan berjenis studi kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh sumber data sekunder berupa jurnal, buku, dan *website* yang dengan data yang dapat mendukung penelitian ini. Untuk mendapatkan data sebelum dilakukan analisa penulis berusaha untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi penelitian-penelitian terdahulu yang membahas eksistensi Taliban di Afghanistan mulai dari masa kedudukan awal, konflik dengan pihak internal maupun eksternal, resolusi damai antara AS dan Taliban, dan terakhir melihat dan mengekspos bagaimana situasi pandemi COVID-19

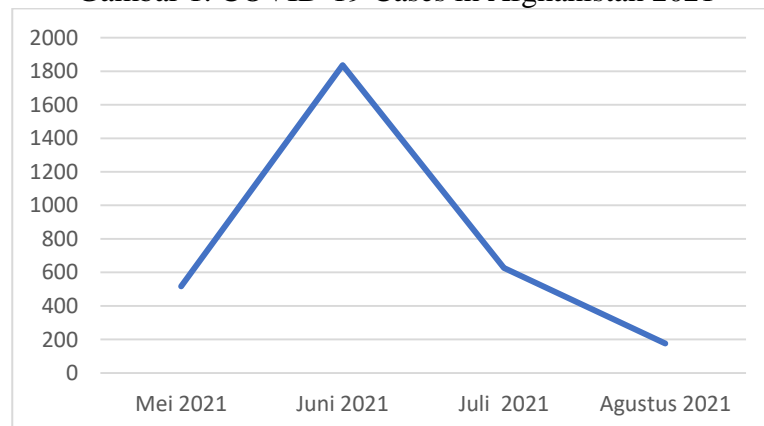
dibawah pemerintahan Taliban. Penulis juga berusaha melihat implikasi terhadap isu-isu yang sebelumnya sudah eksis seperti krisis kemanusiaan, ekonomi, dan politik. Penulis mengumpulkan data-data sekunder berupa jurnal, buku, laporan, dan *website* untuk mendukung kemajuan-kemajuan terkini atau data pendukung untuk mengembangkan penelitian terdahulu agar *update*. Sumber yang digunakan penulis tentu relevan dengan tema dan judul yang diangkat dalam tulisan ini, hanya saja penulis melalui tulisan ini berusaha mengekspos lebih lanjut dan membuka mata dunia mengenai Taliban dan COVID-19 karena masyarakat internasional memandang Afghanistan hanya dari isu terorisme dan konflik.

III. ANALISIS

A. Kondisi Pandemi COVID-19 di Afghanistan Pasca Dikuasai Taliban

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Afghanistan bertepatan dengan momentum terjadinya konflik antara pemerintah sah Afghanistan dengan kelompok Taliban. Konflik yang terjadi tentunya sangat mempengaruhi kinerja pemerintah Afghanistan dalam melakukan pengendalian terhadap penyebaran COVID-19 ditambah dengan kondisi Afghanistan yang memang memiliki banyak kekurangan dari aspek kesehatan, seperti jumlah rumah sakit yang kurang memadai, tenaga kesehatan yang sedikit, dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya yang sulit untuk diakses oleh masyarakatnya (Anugrah & Purba, 2021). Buruknya penanganan pandemi COVID-19 di Afghanistan ketika terjadinya konflik dengan kelompok Taliban dapat dilihat dari peningkatan kasus terkonfirmasi positif yang signifikan terjadi di Afghanistan yang mengalami kenaikan di gelombang ketiga (April-Juni) sebanyak 2400% dan menjadi peningkatan kasus tertinggi sepanjang Afghanistan dilanda pandemi COVID-19 (Macias, 2021).

Gambar 1. COVID-19 Cases in Afghanistan 2021

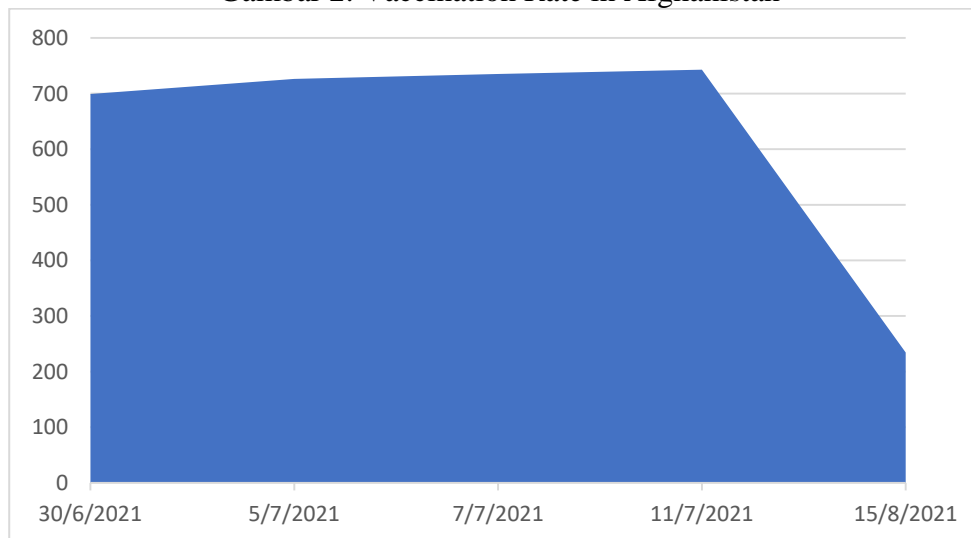


Sumber: WHO, 2021

Sementara itu, kondisi yang cukup menarik terjadi ketika Afghanistan jatuh di tangan Taliban pada 15 Agustus 2021. Konfirmasi kasus positif dari penyebaran virus COVID-19 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun, penurunan kasus yang terjadi bukanlah disebabkan oleh keberhasilan Taliban dalam menangani pandemi COVID-19, tetapi penurunan yang terjadi disebabkan oleh ketidakpedulian kelompok Taliban terhadap eksistensi pandemi COVID-19 sebagai sebuah permasalahan yang besar. Oleh karena itu, laju pengetesan atau *tracking* COVID-19 di Afghanistan dibawah kelompok Taliban mengalami penurunan sampai menyentuh angka 77% (Narain et al, 2022). Minimnya pengetesan atau *tracking* inilah yang mengakibatkan pelaporan konfirmasi positif menjadi berkurang, padahal penyebaran COVID-19 diprediksi semakin marak terjadi pada awal kepemimpinan kelompok Taliban di Afghanistan.

Ketidakpedulian kelompok Taliban terhadap eksistensi pandemi COVID-19 yang sedang melanda Afghanistan tidak hanya ditunjukkan oleh penurunan laju pengetesan atau *tracking* COVID-19, tetapi juga dibuktikan dengan penolakan kelompok Taliban terhadap vaksinasi COVID-19. Bahkan tidak hanya menolak, Taliban juga melarang vaksinasi COVID-19 yang sebenarnya telah berlangsung di Afghanistan. Sikap yang dilakukan oleh kelompok Taliban berdampak signifikan terhadap kelangsungan vaksinasi yang terjadi Afghanistan karena Afghanistan mengalami penurunan laju vaksinasi sampai dengan 80% pasca dikuasai oleh Taliban (Cunningham, 2021). Dengan demikian, beberapa badan internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan dan kesehatan, seperti UNICEF dan WHO memberikan peringatan tegas kepada kelompok Taliban karena tindakan yang dilakukannya telah mengakibatkan krisis kesehatan yang luar biasa.

Gambar 2. Vaccination Rate in Afghanistan



Sumber: OurWorldData, 2022

Sikap dan tindakan Afghanistan yang tidak peduli terhadap pandemi COVID-19 nampaknya tidak bertahan lama. Satu bulan berselang, kelompok Taliban akhirnya menyadari bahwa pandemi COVID-19 adalah permasalahan nyata yang harus segera diatasi karena kematian yang terjadi di Afghanistan banyak disebabkan oleh COVID-19. Kesadaran kelompok Taliban akan pentingnya mengatasi pandemi COVID-19 ditunjukkan oleh tertanganinya pandemi COVID-19 di bawah kekuasaan Taliban dengan berbagai strategi dan upaya penanganan pandemi yang dilakukannya. Pasca memberikan komitmen untuk menangani pandemi COVID-19 di Afghanistan, lonjakan tertinggi konfirmasi kasus positif COVID-19 hanya terjadi pada akhir bulan Januari 2022 dengan angka 4440 kasus yang terkonfirmasi (WHO, 2022). Namun, untuk periode bulan berikutnya, penyebaran kasus COVID-19 sudah relatif lebih stabil dan dapat dikendalikan dengan baik. Kondisi yang sama pada kasus kematian yang terjadi di Afghanistan, lonjakan kasus kematian tertinggi hanya terjadi pada awal bulan Februari sebesar 64 kasus dan di bulan-bulan berikutnya, angka kematian tergolong dapat dikendalikan dengan baik (WHO, 2022). Strategi dan upaya Taliban dalam menangani pandemi COVID-19 yang memperoleh keberhasilan menarik untuk diteliti lebih lanjut karena Taliban sedang menangani pandemi di daerah yang berkonflik terlebih baru saja mengalami transisi kekuasaan. Ditambah lagi dengan ketidakpercayaan negara-negara di dunia terhadap kelompok ini. Oleh karena itu, pada pembahasan berikutnya, penulis akan mengulas hasil penelitian mengenai upaya penanganan pandemi COVID-19 oleh Taliban di Afghanistan.

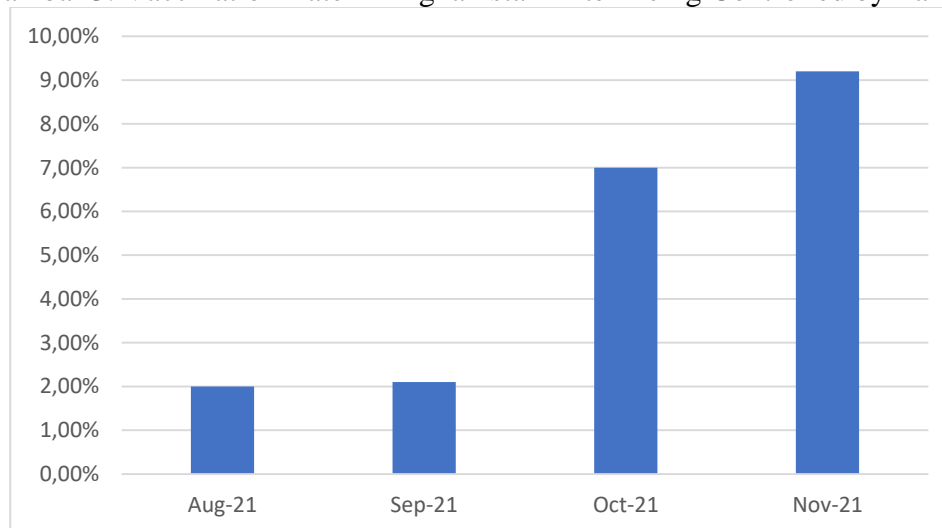
B. Upaya Penanganan Pandemi COVID-19 oleh Taliban di Afghanistan

Upaya Taliban dalam menanganai pandemi COVID-19 dilakukan dengan beberapa strategi yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu strategi eksternal dan internal. Artinya, dalam melakukan tugasnya untuk menangani pandemi, Taliban bergerak secara komprehensif. Pertama, strategi eksternal yang dilakukan oleh kelompok Taliban merujuk pada upaya kerja sama dengan beberapa negara untuk mendapatkan bantuan dana, dosis vaksin, dan fasilitas kesehatan lainnya. Upaya kerja sama yang dilakukan oleh Taliban memang tidak mudah karena kelompok ini kehilangan kepercayaan dari berbagai negara di dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh krisis kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan yang dianggap sebagai kondisi yang disebabkan oleh Taliban. Oleh karena itu, negara-negara yang terdapat di belahan Eropa, seperti Inggris maupun Jerman serta 39 negara lainnya memilih untuk menyalurkan dananya langsung kepada badan-badan bantuan kemanusiaan yang terdapat di Afghanistan agar dana yang diberikan tidak disalahgunakan oleh kelompok Taliban (UN News, 2022).

Meskipun mengalami banyak tantangan untuk melakukan kerja sama dengan beberapa negara, tetapi nyatanya, Taliban berhasil bekerja sama dengan China, Pakistan, Rusia, maupun Amerika Serikat. Di balik kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing negara yang memutuskan bekerja sama dengan Taliban, tetapi bantuan yang diberikan ke Taliban memang berdasar kemanusiaan dan kepercayaan bahwa Taliban akan menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 di Afghanistan. China memberikan bantuan dana sebesar Rp. 441 Miliar sekaligus bantuan vaksin, obat-obatan, fasilitas, kesehatan, dan makanan (Regan & Alam, 2021). Bantuan yang berasal dari China langsung diberikan kepada pihak Taliban dengan harapan bahwa Afghanistan di bawah kelompok ini mampu mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Begitu juga halnya dengan Pakistan, Rusia, dan Amerika Serikat, semuanya sepakat untuk membantu Taliban bahkan menyerukan ke masyarakat dunia untuk memberikan bantuan langsung dengan dalil kemanusiaan. Keberhasilan Taliban untuk melakukan kerja sama dengan beberapa negara sekaligus mendapatkan bantuan mengakibatkan Taliban semakin optimal dalam menjaalankan strategi penanganan pandeminya untuk masyarakat Afghanistan.

Tidak hanya melakukan strategi eksternal, dalam upayanya menanganai pandemi COVID-19, Taliban juga melaksanakan strategi secara internal dengan menjadikan masyarakat Afghanistan menjadi sasarannya. Meskipun pada awalnya kelompok Taliban cukup tidak peduli dengan keberadaan pandemi COVID-19 bahkan sampai menurunkan laju pengetesan dan vaksinasi sampai di angka 80%, tetapi pada akhirnya Taliban menyadari bahwa tindakannya salah dan berpotensi besar mengakibatkan krisis kesehatan di luar krisis kemanusiaan yang telah disebabkan. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh kelompok Taliban dalam menanganai pandemi COVID-19 secara internal, seperti meningkatkan laju vaksinasi, memenuhi fasilitas kesehatan, meningkatkan laju pengetesan, dan memberikan kebutuhan obat-obatan kepada masyarakat Afghanistan. Pertama, upaya Taliban terkait dengan peningkatan laju vaksinasi, melalui Menteri Kesehatan Masyarakatnya, Qalendar Ebad telah menyebutkan bahwa Afghanistan di bawah kelompok Taliban telah mendistribusikan vaksin ke seluruh distrik di 34 Provinsi yang terdapat di Afghanistan (Ani, 2022). Pemenuhan vaksinasi di Afghanistan pasca dikuasi oleh kelompok Taliban tergolong cukup sukses karena berhasil memenuhi kebutuhan vaksin yang didapatkannya dari bantuan berbagai negara. Selain itu, laju vaksinasi yang terjadi di Afghanistan juga meningkat dengan signifikan, misalnya dari bulan September 2021 ke bulan November 2021 mengalami kenaikan sebesar 7% dan terus meningkat di bulan-bulan berikutnya (OurWorldData, 2022).

Gambar 3. Vaccination Rate in Afghanistan After Being Controlled by Taliban



Sumber: OurWorldData, 2022

Kedua, terkait dengan pemenuhan fasilitas kesehatan dan obat-obatan. Afghanistan adalah negara dengan fasilitas kesehatan yang sangat buruk di dunia sehingga sebelum dikuasai Taliban pun sebenarnya fasilitas kesehatan di Afghanistan sangat kurang memadai. Selain itu, ketika terhantam oleh pandemi COVID-19, permasalahan tidak hanya berujung pada fasilitas kesehatan, tetapi juga pada ketersediaan obat-obatan. Oleh karena itu, Afghanistan di bawah kelompok Taliban tidak hanya berfokus pada peningkatan laju vaksinasi, tetapi juga berfokus pada pembenahan fasilitas kesehatan dan pemenuhan obat-obatan yang telah didapatkannya dari bantuan negara lain. Selanjutnya, tindakan lainnya yang juga dapat dilihat dari upaya Taliban dalam menangani pandemi COVID-19 dari sisi kesehatannya adalah perlakuannya terhadap perempuan yang bekerja di rumah sakit. Selama ini, perempuan Afghanistan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari kelompok Taliban, tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi perempuan Afghanistan yang bekerja di rumah sakit. Nampaknya, kelompok Taliban menyadari bahwa tanpa kehadiran perempuan di rumah sakit maka hal tersebut akan mempengaruhi penanganan pandemi COVID-19 di Afghanistan (Glinski, 2022). Dengan demikian, perlakuan diskriminatif Taliban yang biasa ditemukan pada diri seorang perempuan tidak berlaku bagi perempuan yang bekerja di rumah sakit.

Terakhir adalah tentang peningkatan laju pengetesan atau *tracking* COVID-19. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Afghanistan di bawah kelompok Taliban pada awalnya dikhawatirkan karena berpotensi besar mengakibatkan krisis kesehatan dengan tindakan-tindakannya yang berlawanan dengan penanganan pandemi COVID-19, salah satunya seperti memberhentikan pengetesan atau *tracking* COVID-19. Padahal, pelaksanaan pengetesan atau *tracking* COVID-19 penting untuk dilakukan agar dapat memantau daerah yang tinggi penyebaran virusnya sehingga rantai penyebarannya dapat diatasi. Namun, setelah beberapa bulan berselang, Taliban kembali melaksanakan pengetesan. Bahkan laju pengetesan COVID-19 di Afghanistan kembali normal, hal ini dapat dilihat dari konfirmasi kasus positif COVID-19 yang awalnya tidak masuk akal karena sempat berada pada kondisi 0 kasus di bulan september 2021, tetapi tepatnya di bulan november 2021 sudah kembali terdapat konfirmasi kasus (WHO, 2022).

Ketiga upaya dan strategi penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Taliban berjalan dengan baik dalam menangani pandemi COVID-19. Penanganannya dapat disebut berhasil karena penyebaran virus COVID-19 di Afghanistan sudah dapat dikontrol dengan baik pasca dikuasai oleh Taliban. Meskipun pada awalnya Taliban

sempat melakukan tindakan yang bertentangan dengan penanganan pandemi COVID-19, tetapi nyatanya kesadaran untuk melihat pandemi sebagai permasalahan yang nyata sudah terdapat di benak kelompok Taliban. Selain itu, kehilangan kepercayaan dari berbagai negara juga tidak turut menyurutkan semangat Taliban dalam menangani pandemi COVID-19 karena pada akhirnya masih terdapat beberapa negara yang membantu kelompok ini dengan dalil kemanusiaan, seperti China, Rusia, Pakistan, dan Ukraina. Oleh karena itu, strategi dan upaya penanganan pandemi COVID-19 di Afghanistan oleh kelompok Taliban baik secara internal maupun eksternal dapat disebut sebagai keberhasilan.

IV. KESIMPULAN

Fenomena COVID-19 telah melanda seluruh negara yang ada di dunia tanpa peduli akan kondisi negara tersebut, apakah sedang berkonflik atau tidak. Afghanistan menjadi contoh negara dari keganasan COVID-19 yang tidak memandang bulu. Pada awal COVID-19 memasuki Afghanistan, negara ini cukup berjuang untuk bisa mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ditambah dengan kehadiran kelompok Taliban yang ingin merebut kekuasaannya kembali sehingga perjuangan pengendalian COVID-19 di Afghanistan diwarnai dengan konflik yang tidak berkesudahan dengan kelompok Taliban sehingga kondisi ini mengakibatkan Afghanistan mengalami krisis kemanusiaan. Pelonjakan kasus terus terjadi secara signifikan ketika Afghanistan masih berada di bawah pemerintahan yang sah. Kondisi semakin mengkhawatirkan ketika Afghanistan berhasil direbut dan dikuasai oleh kelompok Taliban. Pada awal kekuasaannya, Taliban melakukan tindakan yang cukup kontroversial karena menghentikan laju pengetesan atau *tracking* COVID-19 serta melarang untuk melanjutkan vaksinasi. Oleh karena itu, Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban mendapatkan banyak perhatian karena dikhawatirkan Taliban tidak hanya mengakibatkan krisis kemanusiaan, tetapi juga krisis kesehatan.

Kekhawatiran yang dimiliki oleh beberapa negara dan badan kesehatan dunia nampaknya tidak dapat dibuktikan. Hal ini disebabkan oleh perubahan sikap Taliban dalam menangani pandemi COVID-19. Dua bulan berselang, melalui menteri kesehatan masyarakatnya, Taliban akhirnya menyadari pentingnya menangani pandemi COVID-19 sehingga tindakan Taliban yang awalnya bertolak belakang dalam menangani pandemi COVID-19 berubah menjadi peduli terhadap penanganan pandemi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penurunan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang terjadi di Afghanistan. Keberhasilan Taliban dalam menurunkan pandemi COVID-19 disebabkan oleh upaya penanganan yang dilakukan oleh Taliban yang dapat dikategorikan menjadi dua upaya, yaitu strategi secara internal dan eksternal. Secara internal, Taliban melakukan penanganan pandemi COVID-19 dengan melanjutkan kembali pengetesan atau *tracking* COVID-19 dan vaksinasi COVID-19 sedangkan secara eksternal, Taliban berupaya untuk melakukan kerja sama dengan beberapa negara, seperti China, Rusia, Pakistan, dan Amerika Serikat. Meskipun memiliki beberapa hambatan dan penolakan saat berupaya bekerja sama dengan negara lain, tetapi Taliban akhirnya berhasil untuk menjalin kerja sama sekaligus mendapatkan bantuan dari berbagai negara. Oleh karena itu, Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban menoreh keberhasilan dalam penanganan pandemi COVID-19.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ani. 2022. *Covid: Taliban's acting health minister asks people to get vaccinated*. (Online), < https://www.business-standard.com/article/international/covid-taliban-s-acting-health-minister-asks-people-to-get-vaccinated-122013000047_1.html >, diakses 2 Juli 2022

- Anugrah, Boy & Purba, Jabinson. 2021. *Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global*. Jurnal Lemhannas RI, Vol.9, No. 3
- Aulia, Mirza dan Atik N. 2021. *Strategi Awal Penanggulangan COVID-19 Di Negara Berpendapatan Menengah Ke Bawah: Systematic Review*. JMH: Jurnal Medika Utama, Vol.3, No.1.
- Cunningham, Erin. 2021. *Taliban takeover could drive covid crisis in Afghanistan as vaccinations plummet, U.N. warns.* (Online), < <https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/25/afghanistan-coronavirus-pandemic-taliban/> >, diakses 2 Juli 2022
- Glinski, Stefanie. 2022. *'The Taliban know they need us': the Afghan hospitals run by women.* (Online), < <https://www.theguardian.com/global-development/2022/may/09/taliban-afghanistan-hospitals-run-by-women-doctors> >, diakses 2 Juli 2022
- Macias, Amanda. 2021. *Covid outbreak forces lockdown at U.S. Embassy in Kabul as cases surge in Afghanistan.* (Online), <<https://www.cnbc.com/2021/06/17/covid-outbreak-forces-lockdown-at-us-embassy-in-kabul.html>>, diakses 2 Juli 2022.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2021. *Taliban Merebut Kembali Kekuasaan Di Afghanistan*. Info Singkat, Vol.13, No.16.
- Narain, Kapil., Rackimuthu, Sudhan., Essar, Mohammad., & Vink, Martijn. 2022. *Call for solidarity: The war may be over in Afghanistan but the health crises continue.* Jurnal of Global Health. (Online), Volume 12, < 10.7189/jogh.12.03002 >, diakses 2 Juli 2022
- OurWorldData. 2022. *Coronavirus (COVID-19) Vaccinations.* (Online), < <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=AFG> >, diakses 2 Juli 2022
- Regan, Helen & Alam, Hande. 2021. *China to provide Afghanistan with \$31 million worth of food and Covid vaccines.* (Online), < <https://edition.cnn.com/2021/09/09/asia/china-vaccines-aid-afghanistan-intl-hnk/index.html> >, diakses 2 Juli 2022
- Savero, Sigit Aris Prasetyo dan Adam Janitra Valdy. 2021. *AFGHANISTAN DI BAWAH KEKUASAAN TALIBAN Tantangan Dan Peran Dunia Internasional*. Jurnal Hubungan Luar Negeri, Vol. 6, No.1.
- UN News. 2022. *World can end 'downward humanitarian spiral' of Afghanistan.* (Online), < <https://news.un.org/en/story/2022/03/1115102> >, diakses 2 Juli 2022
- VOA. 2021. *Penularan Covid-19 Di Afghanistan Meningkat 684 Persen.*(Online), < <https://www.voaindonesia.com/a/penularan-covid-19-di-afghanistan-meningkat-684-persen/5444407.html> >, diakses 3 Juli 2022.
- WHO. 2022. *Afghanistan: WHO Coronavirus.* (Online), < <https://covid19.who.int/region/emro/country/af> >, diakses 2 Juli 2022.

ADAPTASI PASUKAN PERDAMAIAN PBB DI ERA PANDEMI: MONUSCO DAN REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Firza Aulia Rossanti¹; Kholifatus Saadah²

¹Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

²Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
firza.rossanti@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 mengubah beberapa hal yang sudah menjadi kebiasaan di dalam tatanan dunia internasional. Tidak terkecuali Operasi Perdamaian PBB. Operasi Perdamaian PBB bergerak dibawah wewenang Dewan Keamanan PBB sesuai dengan pasal 24 Piagam PBB yang menyatakan bahwa para anggota memberikan Dewan Keamanan PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui tindakan atas nama anggota dalam upaya menjalankan kewajibannya. Salah satu Operasi Perdamaian PBB yang masih berlangsung sampai dengan sekarang adalah United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo atau yang lebih dikenal dengan MONUSCO. Misi di Kongo rata-rata terkait dengan perlindungan warga sipil, dukungan untuk perpanjangan status otoritas di Kongo bagian timur, serta perlindungan personel PBB dan fasilitas pemerintah. Jika tetap menjalankan misi yang sama persis, maka pandemi akan menjadi hambatan terbesar karena mobilitas ke Kongo akan dibatasi, dan jika pasukan perdamaian tidak ikut serta dalam penanganan pandemi, maka dapat dipastikan Kongo akan semakin terpuruk. Pada tulisan ini, penulis akan menganalisis mengenai pergeseran peran pasukan perdamaian milik PBB dalam beradaptasi untuk menjalankan misinya di era pandemi beserta tantangan dan cerita keberhasilan di dalamnya.

Kata kunci: *pandemi, Covid-19, Operasi Perdamaian PBB, MONUSCO, Republik Demokratik Kongo.*

Abstract

The Covid-19 pandemic inevitably changed several things that have become habits in the international order. The UN Peacekeeping Operations is no exception. UN Peacekeeping Operations is an operation under the authority of the UN Security Council in accordance with article 24 of the UN Charter which states that members assign the UN Security Council to maintain international peace and security, and approve actions on behalf of members in an effort to carry out their obligations. One of the UN Peace Operations that is still ongoing today is the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo or better known as MONUSCO. Missions in Congo are usually related to the protection of civilians, support for the extension of authority status in eastern Congo, and the protection of UN personnel and government facilities. The pandemic will be the biggest obstacle to them, because mobility to Congo will be limited, and if peacekeepers do not participate in handling the pandemic, it is certain that Congo will be even worse. In this paper, the author will analyze the shift in the role of the UN peacekeeping force in adapting to carry out its mission in the pandemic era along with the challenges and their success stories.

Keywords: *pandemic, Covid-19, UN Peacekeeping Operation, MONUSCO, the Democratic Republic of the Congo.*

I. PENDAHULUAN

PBB sebagai institusi yang bisa bertindak untuk mencegah, menghentikan konflik, serta memelihara perdamaian dan keamanan internasional membentuk United Nations Peacekeeping atau Operasi Perdamaian PBB. United Nations Peacekeeping bergerak dibawah wewenang Dewan Keamanan PBB sesuai dengan pasal 24 Piagam PBB yang menyatakan bahwa para anggota memberikan Dewan Keamanan PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui tindakan atas nama anggota dalam upaya menjalankan kewajiban (United Nations, n.d). Menurut buku *The Blue Helmets: a Review of United Nations Peacekeeping*, United Nations Peacekeeping adalah operasi di bawah PBB yang melibatkan personel militer tanpa kekuatan menyerang untuk membantu memelihara atau memulihkan perdamaian di daerah konflik. Personel militer yang terlibat berasal dari negara-negara anggota PBB atas dasar sukarela.

United Nations Peacekeeping lahir pada saat terjadinya Perang Dingin sehingga praktek *peacekeeping* terbatas hanya pada menjaga gencatan senjata, menstabilkan situasi di lapangan, dan memberikan dukungan bagi upaya politik untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai (United Nation, n.d). Mereka memiliki misi yang terdiri dari pengamat militer tak bersenjata dan pasukan bersenjata ringan dengan peran utama memantau, melaporkan, dan membangun kepercayaan. United Nations Peacekeeping dimulai ketika Security Council mengizinkan adanya pengerahan pengamat militer PBB ke Timur Tengah, yaitu UN Truce Supervision Organization (UNTSO) dan UN Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) pada tahun 1948 yang bertujuan untuk memantau gencatan senjata antara Israel dan negara tetangga (United Nations, n.d). Kedua misi ini merupakan jenis operasi pengamatan dan pemantauan yang memiliki anggota berjumlah ratusan dan tidak bersenjata. Sayangnya anggota operasi ini harus menerima ancaman militer dan penyerangan sehingga konsep *Peacekeeper* ini diubah. Operasi UN Peacekeeping bersenjata pertama yang diterjunkan oleh PBB yaitu UN Emergency Force (UNEF I). Operasi ini diterjunkan pada tahun 1956 untuk mengatasi krisis yang terjadi di Suez. Pada tahun 1960, UN Operation in the Congo (ONUC) diterjunkan untuk mendemonstrasikan risiko dalam upaya membawa stabilitas ke wilayah yang dilanda perang. Semenjak itu, PBB menerjunkan pasukan dengan misi jangka pendek dan jangka panjang.

United Nations Peacekeeping bertugas untuk memantau dan mengamati proses perdamaian di daerah pasca konflik dan membantu implementasi perjanjian damai yang telah ditandatangani. Mereka memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, seperti membangun kepercayaan, pengaturan pembagian kekuasaan, dukungan pemilihan, penguatan supremasi hukum, dan pembangunan ekonomi dan sosial. Pasukan ini berasal dari satuan tentara, petugas polisi, dan personel sipil yang menggunakan ciri khas baret biru, sehingga biasa disebut sebagai *Blue Helmet* atau *Blue Barret* (United Nations, n.d). United Nations Peacekeeping memiliki misi yang terdiri dari pengamat militer tak bersenjata dan pasukan bersenjata ringan dengan tugas utamanya yaitu memantau, melaporkan, dan membangun kepercayaan di wilayah berkonflik. Pada tahun 1988, United Nations Peacekeepers dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa UN Peacekeepers sebagai salah satu perangkat keamanan militer di bawah naungan PBB telah memberikan kontribusi penting terhadap perdamaian dunia. Sejak pertama kali beroperasi, PBB telah banyak menerjunkan pasukan perdamaian ke berbagai wilayah konflik dan beberapa diantaranya masih berjalan hingga saat ini. Operasi yang saat ini masih berjalan antara lain MINURSO di Sahara Barat, MINUSCA di Republik Afrika Tengah, MINUSMA di Mali, MONUSCO di Kongo, UNDOF di Golan, UNFICYP di Siprus, UNIFIL di Lebanon, UNISFA di Abyei, UNMIK di Kosovo, UNMISS di Sudan Selatan, UNMOGIP di India dan Pakistan, serta UNTSO di Timur Tengah.

Baru-baru ini, dunia mengalami krisis akibat pandemi virus Covid-19 yang mulai muncul di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar sangat cepat melalui cairan tubuh hingga akhirnya WHO menetapkan bahwa Covid-19 ini sebagai sebuah pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 (WHO, 2020). Virus ini menyebar ke seluruh dunia tanpa terkecuali wilayah yang sedang berada dalam kondisi berkonflik, seperti Republik Demokratik Kongo. Salah satu operasi *United Nations Peacekeepers* yang masih berjalan hingga saat ini yaitu MONUSCO harus menghadapi berbagai tantangan akibat merebaknya virus Covid-19 di wilayah Kongo. Pandemi ini mengakibatkan dunia internasional harus menghadapi krisis ekonomi yang berdampak juga pada pendanaan operasi. Selain itu, akses-akses ke fasilitas umum juga mengalami permasalahan akibat diterapkannya *lockdown* untuk menghambat penyebaran virus. Hal ini tentunya mempengaruhi kemampuan pasukan *Peacekeepers* untuk menjalankan tugasnya untuk memenuhi mandat perlindungan warga sipil akibat adanya tindakan mitigasi, pembatasan, penanggulangan penerapan baru, serta konsekuensi ekonomi dan politik dari COVID-19. Berdasarkan uraian dari latar belakang, tulisan ini akan beruaha menjelaskan mengenai adaptasi pasukan perdamaian PBB di era pandemi dalam studi kasus MONUSCO dan Republik Demokratik Kongo.

Beberapa penelitian telah menjadikan topik ini sebagai bahasan. Contohnya yaitu artikel berjudul *UN Peacekeeping After the Pandemic: An Increased Role for Intelligence* dalam Jurnal *Survival* tahun 2021 volume 2 Halaman 77-83 yang ditulis oleh Allison Carnegie dan Austin Carson. Artikel ini berfokus pada krisis kepercayaan yang muncul akibat penyebaran virus Covid-19 terhadap pasukan penjaga perdamaian. PBB berusaha merubah konsep penjaga keamanan kearah struktur intelijen yang kemudian menghadapi masalah berupa kerentanan pada bocornya data penting terkait kedaulatan sebuah negara (Carnegie & Carson, 2021). Selain itu, terdapat kemungkinan metode ini akan ditiru oleh negara-negara lain sehingga dapat menurunkan kredibilitas informasi yang diperoleh PBB. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana lebih berfokus pergeseran fungsi dan tugas dari misi operasi perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO) bukan perubahan konsep atau struktur dari pasukan.

Artikel berikutnya yaitu *Peacekeeping after Covid-19* karya Han Dorussen dalam Jurnal *Peace Economics, Peace Science and Public Policy* Tahun 2020 Volume 3 yang membahas terkait kepentingan politik negara-negara anggota PBB selama Covid-19 yang kemudian mempengaruhi penerjungan operasi perdamaian. Keberadaan Covid-19 dinilai semakin membatasi sumber daya yang tersedia untuk badan-badan sehingga kehilangan kekuatan intervensi dalam skala besar (Dorussen, 2020). Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, artikel ini membahas perubahan faktor eksternal sehingga berpengaruh pada penurunan misi dan efektifitas dari operasi pasukan perdamaian. Sedangkan, penulis akan lebih berfokus pada perubahan faktor internal dari pasukan penjaga perdamaian PBB selama menjalankan misi di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, di tahun yang sama, terdapat artikel berjudul *Peacekeeping missions in the time of coronavirus: new configurations and new challenges* karya El Mostafa Rezrazi dalam *AfricaPortal* yang membahas terkait perubahan kerangka hukum terkait pelaksanaan misi dan mandat yang dibawa oleh pasukan perdamaian PBB di wilayah Afrika. Artikel ini membahas perubahan pedoman penjaga perdamaian PBB tentang Covid-19 dan hambatanya. Meskipun memiliki topik yang hampir sama, penelitian yang dilakukan akan berfokus pada parktek lapangan dalam studi kasus MONUSCO di Republik Demokratik Kongo.

II. METODE PENELITIAN / PETA PEMIKIRAN

Metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam menganalisis studi kasus untuk penelitian adalah metode kualitatif. Penelitian akan menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menyajikan uraian dari studi kasus yang akan diteliti yaitu adaptasi pasukan

perdamaian PBB di era pandemi dalam studi kasus MONUSCO terutama dalam pemenuhan *health security* di wilayah Republik Demokratik Kongo. *Global Health Security* atau Keamanan Kesehatan Global sendiri merupakan sebuah konsep yang mencakup kegiatan dan tindakan yang berpusat pada pencegahan, pendeteksian, dan respons terhadap ancaman kesehatan masyarakat akut terutama penyakit menular yang dapat mengancam orang dan masyarakat di seluruh dunia (Malik, 2021). Dasar utama pelaksanaan agenda *health security* terdapat dalam International Health Regulation (IHR) tahun 2005 yang berisi panduan untuk mengawasi, komunikasi risiko, dan koordinasi dalam mengatasi ancaman kesehatan masyarakat nasional yang berpotensi menjadi keadaan darurat global (Lal, Erandu, Heymann, dkk, 2020).

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library reasearch*) yang berasal dari dokumen jurnal, buku, artikel, maupun sumber lain. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk memahami bentuk adaptasi dari MONUSCO dalam menghadapi fenomena pandemi Covid-19 selama bertugas di Republik Demokratik Kongo secara lebih mendalam dengan melakukan analisis yang terbatas oleh periode atau waktu kejadian. Sehingga nantinya data yang dihasilkan berupa kata-kata penjelasan dari yang terjadi di lapangan.

III. ANALISIS

Seiring berjalannya waktu, sifat konflik juga berubah setiap tahunnya. *UN Peacekeepers* yang awalnya dibentuk sebagai sarana untuk menangani konflik antar-negara, kini lebih banyak diterjunkan pada konflik di tingkat intra-negara dan perang saudara. Mereka juga semakin banyak diminta untuk melakukan berbagai tugas yang bersifat lebih kompleks, mulai dari membantu membangun institusi pemerintahan yang berkelanjutan, melakukan pemantauan hak asasi manusia, reformasi sektor keamanan, perlucutan senjata, serta demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan. Mengikuti hal tersebut, meskipun militer tetap menjadi pasukan utama pada sebagian besar operasi pemeliharaan perdamaian, sekarang terdapat lebih banyak ahli bidang lain yang terlibat dalam pemeliharaan perdamaian. Peran militer dalam pemeliharaan perdamaian saat ini pada dasarnya adalah usaha untuk mendukung proses politik antara pihak-pihak yang telah berperang satu sama lain. Mereka memfasilitasi adanya transformasi politik, pembangunan institusi, dan pembangunan kembali kepercayaan publik terhadap negara yang seharusnya mengikuti kesepakatan damai. Oleh karena itu, dalam operasi United Nations Peacekeeping ini, militer dan ahli di bidang lain bekerja sama mewujudkan hal tersebut.

Pandemi Covid-19 telah memaksa PBB untuk mengulas kembali kegiatan dalam upaya memenuhi tanggung jawab yang telah diamanatkan. Mandat yang dibawa oleh pasukan MONUSCO selama melakukan operasi di Republik Demokratik Kongo yaitu perlindungan warga sipil, dukungan untuk perpanjangan status otoritas di Kongo timur, serta perlindungan personel PBB dan fasilitas. Namun, tindakan pencegahan terkait virus Covid-19 termasuk pembatasan pergerakan, penutupan sementara perbatasan internasional, dan penangguhan penerbangan mengakibatkan terhentinya rotasi operasi *peacekeepers* di Kongo. Hal ini tentunya berpengaruh pada mental dan kinerja dari pasukan perdamaian MONUSCO. Selain itu, kondisi ini memancing kembali merebaknya konflik kekerasan dan kasus penyerangan di wilayah tersebut. Allied Democratic Forces (ADF) yang merupakan angkatan bersenjata pemberontak melakukan penyerangan terhadap konvoi dari pasukan MONUSCO.

Pasukan perdamaian juga harus menghadapi permasalahan seperti timbulnya ketakutan, rumor, dan berita palsu yang menyebar. Permasalahan juga timbul di masyarakat seperti memburuknya ketidakesetaraan sosial yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan di daerah konflik akibat dampak sosial, politik dan, ekonomi yang ditimbulkan virus ini. Hal ini mengakibatkan mereka mengalami hambatan untuk mengakses fasilitas

kesehatan dan peningkatan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, munculnya masalah kepercayaan pemerintah dan masyarakat lokal terhadap Pasukan Perdamaian juga menjadi masalah, tidak hanya dalam upaya pemenuhan mandat namun juga upaya mengatasi penyebaran virus Covid-19 di Kongo.

Pandemi Covid-19 merubah bentuk operasi pasukan MONUSCO dalam melaksanakan mandatnya terkait perlindungan warga sipil dimana mereka berfokus pada pelaksanaan agenda *health security*. Agenda dari *health security* juga melibatkan bahwa militer sebagai alat dalam atau sarana dalam upaya perlindungan terhadap ancaman kesehatan masyarakat yang menimbulkan ancaman bagi perdamaian, kedaulatan, dan kepentingan ekonomi negara. Virus Covid-19 sebagai salah satu penyakit menular dan telah ditetapkan sebagai pandemi merupakan potensi ancaman keamanan yang berpotensi mengancam kesejahteraan masyarakat, melemahkan ekonomi dan militer, serta munculnya migrasi massal (Lal, Erandu, Heymann, dkk, 2020). Pasukan MONUSCO sebagai aktor pembawa mandat perlindungan warga sipil di Republik Demokratik Kongo yang merupakan wilayah konflik memegang peran fasilitator dalam upaya penegakan *health security* di masa pandemi Covid-19.

Dalam usaha mengurangi tingkat penyebaran penyakit, kegiatan patroli yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil, pengawalan konvoi, dan lainnya untuk bantuan kemanusiaan, perlindungan, dan dukungan untuk lembaga negara tuan rumah dan otoritas lokal semakin dibatasi. Kegiatan-kegiatan tersebut mengalami penyesuaian dengan meminimalisir kontak dengan warga sipil. Keterbatasan operasi lapangan membuat Pasukan Perdamaian PBB di Kongo melakukan tugasnya dari rumah dengan memanfaatkan teknologi. Radio Okapi sebagai stasiun radio PBB membantu membagikan informasi akurat terkait virus Covid-19 dalam bahasa lokal. Selain itu, mereka juga memaksimalkan penggunaan alat elektronik dengan melakukan teleworking dan konferensi video (de Coning, 2020). Hal ini tentunya memaksa PBB untuk mempercepat implementasi digital di negara tuan rumah.

MONUSCO menyediakan masker dan pembersih tangan untuk penduduk lokal di Kivu Utara dalam rangka melaksanakan mandat untuk mendukung otoritas pemerintah lokal membatasi penyebaran virus. Selain itu, mereka juga melakukan kerjasama terkait pengadaan dan distribusi peralatan perlindungan terkait Covid-19 dengan instansi lokal. Sedangkan untuk merespon adanya peningkatan ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan maupun anak perempuan, MONUSCO melakukan tindakan khusus berupa langkah-langkah untuk mengurangi efek berbahaya dari pandemi pada perempuan dan anak perempuan. Hal ini menjadi upaya mereka dalam melaksanakan agenda *Women, Peace, Security*. Terlepas dari tantangan operasional yang dihadirkan virus, pasukan penjaga perdamaian tetap berkomitmen untuk melindungi dan mendukung wanita, selama pandemi dan setelahnya. UN Peacekeeping bermitra dengan perempuan untuk memperkuat suara mereka dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan kesejahteraan mereka selama pandemi.

MONUSCO menyelenggarakan kampanye terkait kesadaran tentang Covid-19 untuk perempuan di Bunia. Mereka menjelaskan gejala Covid-19, cara penularannya, dan tindakan pencegahan yang dapat mereka lakukan untuk menghentikan penyebaran virus. MONUSCO juga melatih perempuan lokal dalam melakukan mediasi untuk meningkatkan resolusi konflik. Bersama Polisi PBB, MONUSCO juga menyelenggarakan lokakarya bagi petugas polisi yudisial dari Kepolisian Nasional Kongo tentang praktik terbaik untuk menyelidiki kejahatan kekerasan seksual dan melindungi korban dan anak-anak (Martin, 2020). Hal ini menunjukkan komitmen MONUSCO dalam upaya perlindungan warga sipil, terutama perempuan sebagai kelompok rentan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.

Timbulnya ketakutan muncul dari pemerintah dan masyarakat lokal terhadap Pasukan Perdamaian yang dianggap bisa menjadi pembawa virus menyebabkan keraguan terkait pemakaian masker oleh pasukan. Pemakaian masker bisa digunakan untuk meyakinkan

penduduk, namun juga bisa menimbulkan ketakutan yang lebih besar lagi diantara mereka. Oleh karena itu, penting untuk membangun dukungan dan kepercayaan antara masyarakat lokal dengan Pasukan Perdamaian dengan memastikan bahwa pasukan tidak menjadi vektor penularan dan menerapkan sistem *new normal* dalam proses interaksi. Pandemi global telah membuat Pasukan Perdamaian PBB menyesuaikan operasi kesehariannya dengan memasukkan langkah-langkah mitigasi terhadap penyebaran COVID-19 untuk membantu melindungi mereka dan masyarakat lokal dengan memastikan masyarakat lokal memiliki akses ke informasi yang akurat tentang COVID-19 melalui berbagai saluran komunikasi seperti radio dan media sosial serta menginformasikan penduduk lokal tentang COVID-19 dalam bahasa lokal, mendidik tentang langkah-langkah mitigasi, dan menangani rumor dan melawan informasi yang salah (Makasso, 2020).

Disisi lain, keberadaan pandemi Covid-19 ini bisa memberikan dampak positif bagi Pasukan Perdamaian PBB. Meskipun dampak negatif memiliki presentasi lebih besar, dampak positif juga tidak dapat diabaikan. Pandemi Covid-19 mengharuskan PBB melakukan percepatan implementasi digital untuk menunjang operasi yang di masa depan tentunya akan menjadi hal yang penting. Perkembangan ini menjadikan PBB melakukan modernisasi terkait cara menggunakan teknologi dan mengubah beberapa fungsi sipil di masa depan.

IV. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Banyak masalah yang dihadapi oleh United Nations Peacekeeping, terutama MONUSCO sebagai salah satu operasi yang masih berjalan dalam melakukan mandatnya di wilayah konflik pada saat pandemi COVID-19 berlangsung. Krisis ekonomi dunia yang berdampak pada permasalahan pendanaan operasi, penghentian rotasi akibat *lockdown*, timbulnya ketakutan, rumor, dan masalah kepercayaan terhadap Pasukan Perdamaian menghambat tugas-tugas mereka dalam melakukan perlindungan warga sipil. Perubahan kondisi ini menyebabkan adanya penyesuaian misi oleh Pasukan Perdamaian dengan menempatkan serangkaian langkah-langkah mitigasi untuk mempromosikan keselamatan, keamanan, dan kesehatan semua personel PBB sambil menjaga kelangsungan operasi. Kantor Pusat PBB juga terus melakukan koordinasi secara teratur dengan negara-negara penyumbang pasukan dan polisi dan bekerja sama dengan Departemen Dukungan Operasional, Kantor Urusan Militer, dan Divisi Polisi untuk memantau situasi dan memberi saran kepada pemerintah sesuai dengan perkembangan terakhir. Selain itu, Unit Gender DPO, dalam konsultasi dengan misi lapangan, telah mengembangkan analisis tentang COVID-19 dan *Women, Peace and Security* (WPS), dan mengumpulkan cara mengorientasikan ulang pelaksanaan mandat WPS dengan mempertimbangkan pandemi.

Dalam prakteknya, markas besar PBB dan Pasukan Perdamaian telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa dengan melakukan beberapa perubahan. Mereka menerapkan cara khusus untuk periode pandemi dan akan dibatalkan jika keadaan memungkinkan. Mereka memaksimalkan penggunaan teknologi seperti radio, telepon, konferensi video, dan lain-lain. Hal ini menjadi lebih sistemik dan akan mengubah cara PBB melakukan pemeliharaan perdamaian di masa depan. Meskipun begitu, kondisi ini tetap berpengaruh pada efektifitas kinerja dari Pasukan Perdamaian. Tidak semua kegiatan bisa dilakukan jarak jauh karena bagaimanapun patroli tanpa interaksi sosial tidak memiliki efek yang sama dengan patroli langsung.

Selayaknya pasukan yang membawa misi perdamaian, tugas MONUSCO di Kongo semakin berat setelah adanya kondisi pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan efek dari virus corona, ditambah dengan faktor lain seperti perubahan iklim, akan meningkatkan ketidakstabilan dan risiko dimana terdapat kemungkinan terhentinya proses politik akibat faktor-faktor tersebut. Beban operasi penjaga perdamaian PBB akan meningkat dalam menciptakan suatu perdamaian di wilayah konflik. Di satu sisi, misi berada di bawah tekanan

yang meningkat untuk meningkatkan efektivitas operasi mereka, sementara di sisi lain, mereka harus secara bersamaan mengatasi hal ini dengan anggaran yang menyusut dan bahkan lingkungan operasional yang lebih kompleks yang semakin dibatasi oleh virus Covid-19 dan perubahan iklim.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

United Nations. 1996. *The Blue Helmets: a Review of United Nations Peace-keeping*. New York: United Nations, Department of Public Information.

Artikel Jurnal

Carnegie, A., & Carson, A. (2021). *UN Peacekeeping After the Pandemic: An Increased Role for Intelligence*. *Survival*, 63(2), 77–83. doi:10.1080/00396338.2021.1905985

Dorussen, H. (2020). *Peacekeeping after Covid-19*. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 26(3). doi:10.1515/peps-2020-0022

Lal, A., Erondy, N. A., Heymann, D. L., Gitahi, G., & Yates, R. (2020). *Fragmented health systems in COVID-19: rectifying the misalignment between global health security and universal health coverage*. *The Lancet*. doi:10.1016/s0140-6736(20)32228-5.

Makosso, A. M. (2020). United Nations peacekeeping operations in the era of COVID-19. *The Journal of Intelligence, Conflict, and Warfare*, 3(2), 17. <https://doi.org/10.21810/jicw.v3i2.2378>.

Malik, S. M., Barlow, A., & Johnson, B. (2021). *Reconceptualising health security in post-COVID-19 world*. *BMJ Global Health*, 6(7), e006520. doi:10.1136/bmjgh-2021-006520.

Tirta, Leovaldi. "Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) sebagai Sumber Hukum Internasional." *Jurnal Yustika*, vol. 14, no. 1, 2011.

Dokumen legal:

United Nations. (n.d.). *Impact of covid-19 on UN Peacekeeping*. United Nations. Diakses 10 Desember 2021, dari https://peacekeeping.un.org/en/impact-of-covid-19-un-peacekeeping?_gl=1%2A1hnruqp%2A_ga%2AMTcwOTYwNTg4My4xNjM2MjEwMDE5%2A_ga_TK9BQL5X7Z%2AMTYzOTM0Mjk4NS4yLjAuMTYzOTM0Mjk4NS4w.

United Nations. (n.d.). *MONUSCO peacekeeping*. United Nations. Diakses 10 Desember 2021, dari <https://peacekeeping.un.org/en/mission/monusco>.

United Nations. (n.d.). *United Nations Peacekeeping*. United Nations. Diakses 6 November 2021, dari <https://peacekeeping.un.org/en>.

Internet (Journals Online)

De Coning, C. (2020, May 15). Covid-19 will change the way the UN conducts peacekeeping operations in the future. *NUPI Research Online*. <https://nupi.brage.unit.no/nupi-xmlui/handle/11250/2654786>, diakses 10 Desember 2021.

de Coning, C. (2020, October 21). Examining the longer-term effects of COVID-19 on UN Peacekeeping Operations. *NUPI Research Online*. <https://nupi.brage.unit.no/nupi-xmlui/handle/11250/2684680>, diakses 9 Desember 2021.

Rezrazi, E. M. (2020). Peacekeeping missions in the time of coronavirus: new configurations and new challenges. *AfricaPortal*. <https://www.africportal.org/publications/peacekeeping-missions-time-coronavirus-new-configurations-and-new-challenges/>, diakses 3 Juli 2022.

**DIPLOMASI BUDAYA DI ERA PANDEMI
(STUDI KASUS AKTIVITAS PENARI TRANSNASIONAL LENGGER
LANANG BANYUMAS DI MASA PANDEMI COVID-19
TAHUN 2020-2021)**

Agung Triyanto¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Peradaban, Bumiayu.
Email: nyaman.agung@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 membawa pengaruh ke segala lini, termasuk aktivitas berkesenian. Tercatat sekitar 40.081 seniman tergerus Covid-19 akibat pembatalan pertunjukan dan festival seni. Daerah-daerah episentrum pekerja seni mayoritas didominasi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Belum lagi para seniman tradisi yang bisa menerima pertunjukan setiap minggu minimal satu kali pentas. Adalah Rianto seorang penari transnasional Lengger Banyumas yang menetap di Jepang pun terkena imbas pandemi. Rianto dan jejaring pertemanan seniman tari yang tersebar dari global, nasional sampai lokal daerah mengalami nasib yang sama di era pandemi ini. Dengan menggunakan teori teori aktivitas Vygotskian, didapat bahwa aktivitas pertunjukan dan kesenian memiliki kolektivitas sosial erat antara Rianto dengan kolega lain di seluruh dunia. Kegiatan mereka banyak dimediasi melalui Mediating artifacts ini adalah perangkat oleh perangkat komunikasi dan internet, tanda-tanda kemampuan berbahasa asing dan bahasa gerakan tubuh tari, dan peralatan baik itu peralatan perlengkapan menari maupun perlengkapan pertunjukan lainnya. Temuan menarik adalah diinisiasinya kelas daring oleh Rianto dan Rumah Lengger Banyumas ternyata diikuti para seniman tari di seluruh dunia yang ingin mempelajari Lengger Banyumas. Semua ini digunakan oleh subjek untuk berinteraksi dengan objek secara internasional selama melakukan aktivitas diplomasi budaya secara internasional di masa Pandemi tahun 2020-2021.

Kata kunci: *Lengger Lanang Banyumas, Aktor Transnasional, Diplomasi Budaya, Pandemi Covid-19, Teori aktivitas Vygotskian*

Abstract

The Covid-19 pandemic has affected all lines, including art & cultural activities. It was recorded that around 40,081 artists were eroded by Covid-19 due to the cancellation of art shows and festivals. Rianto, a Lengger Banyumas transnational dancer who lives in Japan, is also affected by the pandemic. Rianto and his network of dance artists friends spread from global, national to local regions have suffered the same fate in this pandemic era. By using the theory of Vygotskian activity theory, it is found that performing and artistic activities have a close social collectivity between Rianto and other colleagues around the world. Many of their activities are mediated through mediating artifacts, these are devices by communication devices and the internet, signs of foreign language skills and body language dance movements, and equipment, both dancing equipment and other performance equipment. An interesting finding was that the initiation of online classes by Rianto and Rumah Lengger Banyumas was followed by dance artists around the world who wanted to learn about Lengger Banyumas. All of this is used by the subject to interact with objects internationally while carrying out cultural diplomacy activities internationally during the 2020-2021 Pandemic.

Keywords: *Lengger Lanang Banyumas, Transnational Actor, Cultural Diplomation, Covid-19 Pandemic, Activity Theory Vygotskian.*

I. PENDAHULUAN

31 Desember 2019 *Wuhan Municipal Health Commission, China*, melaporkan adanya kluster kasus pneumonia di Wuhan, Propinsi Hubei (WHO, 2020). Sebuah awal teridentifikasi virus corona. Semenjak itu, virus menyebar ke seluruh dunia. Kemudian hari, WHO mengumumkan pada 11 Februari 2020 yaitu (COVID-19) disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)* (Susilo, 2020).

Sampai kini, Indonesia masih berjuang menghadapi fenomena COVID-19 dengan berbagai cara mulai dari cara medis, ekonomi, dan perubahan perilaku sosial. Tak dapat dipungkiri, pandemi COVID-19 membawa perubahan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perlunya adaptasi di semua lini kehidupan sosial masyarakat. Termasuk dunia kesenian dan kebudayaan baik, lokal, nasional, maupun internasional.

Tercatat sekitar 40.081 seniman tergerus Covid-19 akibat pembatalan pertunjukan dan festival seni. Daerah-daerah episentrum pekerja seni mayoritas didominasi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Koalisi Seni pada 25 Maret 2020 menyebutkan jumlah acara seni yang dibatalkan atau ditunda akibat efek Corona di Indonesia cukup signifikan. Tidak hanya berbicara Jakarta, juga seluruh daerah di Tanah Air. Disebutkan sepuluh proses produksi dan rilis film tertunda, begitu pula 40 konser, tur, dan festival musik; delapan pameran pada museum seni rupa; tiga pertunjukan tari; serta sembilan pentas teater, pantomim, dan boneka. (Safriana, 2020).

Seniman Internasional, jika seorang seniman bisa melakukan workshop keliling secara rutin negara (Belanda, German, Italia) belum pertunjukan pagelaran setahun dua kali, dan mengajar rutin tiap harinya tiba-tiba diberhentikan karena Pandemi Covid 19. Sementara dalam hitungan peneliti, seniman lokal jika seminggu saja ada 2 pertunjukan tanggapan, bisa hitung berapa kali tidak melakukan pertunjukan selama kebijakan PPKM diterapkan. Maka perlu kiranya adanya kajian bagaimana Lengger Lanang Banyumas melakukan langkah kreatif dalam bertahan di era pandemi Covid-19.

Penelitian terkait Lengger Lanang Banyumas sudah ada yang melakukan. Penelitian berjudul, "Lengger Dariah Studi Tentang Pengaruh Gaya *Wetanan* Terhadap Kontinuitas Pertumbuhan Lengger Banyumas" oleh Darno. Penelitian ini berisi tentang perjalanan kesenian Lengger Dariah dan pengaruhnya terhadap eksistensi pertunjukan lengger Banyumas khususnya yang tumbuh di sebelah timur sungai serayu (Darno, 2012). Berikutnya artikel pada Jurnal Imaji Universitas negeri Yogyakarta yang ditulis oleh Resita Aprilia berjudul, "Eksistensi Lengger Lanang Langgeng Sari Banyumas" yang menggunakan metode kualitatif ini menghasilkan temuan meliputi fenomena bentuk pertunjukan, gerak, properti, tata rias, tata busana, musik iringan, dan tempat pertunjukan (Aprilia, 2021). Penelitian ke tiga berjudul "Perspektif Gender pada Lengger Lanang Banyumas" oleh Sugeng Iman Hartanto yang meneliti perubahan peran lengger erat kaitannya dengan pergeseran makna peran lengger oleh Masyarakat Desa Somakaton sebagai sosok keramat yang mewakili Dewi Sri dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan spiritual seperti pengakuan dosa, puasa, persembahan ritual, dan meditasi masih dilakukan oleh Lengger Lanang Dariah. Lengger Banyumasan menggambarkan keterlibatan emosional antara peran Lengger sehingga perubahan sosial mendominasi semua kegiatan tersebut (Hartanto, 2016).

Dari ketiga penelitian ini bisa digambarkan bahwa selama ini yang melakukan penelitian terkait Lengger Lanang Banyumas lebih mengangkat isu praktik kesenian dan perkembangannya sebagai salah satu budaya di masyarakat. Berbeda dengan penelitian kali ini yang mencoba mengangkat dari perspektif Hubungan Internasional.

Implikasi kebaruan baik dari kajian Lengger Lanang Banyumas maupun kajian keilmuan Hubungan Internasional. Dari penelitian Lengger Lanang ternyata belum ada yang mengangkat bagaimana aktivitas pelaku lengger dalam melakukan aktivitasnya secara internasional. Sementara bagi kajian ilmu Hubungan Internasional mampu memperluas

wilayah kajian yang tidak selalu terkait isu politik tinggi tapi juga politik bawah dengan tema kemanusiaan, kebudayaan, isu keseharian, aktor non negara.

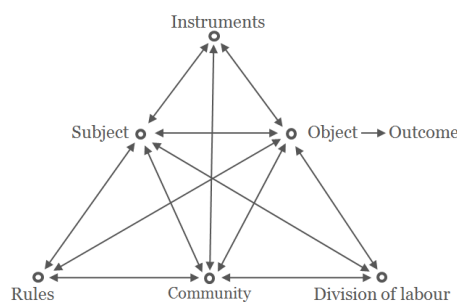
Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Aktivitas Penari Transnasional Lengger Lanang Banyumas di Masa pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Peneliti menggunakan jenis penelitian analisa deskriptif dalam menjelaskan rumusan masalah. Penulis mendeskripsikan suatu fenomena yang ada dan menemukan jawaban dari rumusan masalah (Bungin, 2007). Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti adalah tunggal sehingga tidak menuntut adanya hipotesis (Bungin, 2007). Penulis akan menjelaskan bagaimana Aktivitas Penari Transnasional Lengger Lanang Banyumas di Masa pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.

Menentukan level analisis apa yang akan digunakan dalam penelitian Ilmu Hubungan Internasional penting adanya. Mochtar Mas' oed membagi tingkat analisa didalam Ilmu Hubungan Internasional yaitu individu, kelompok-individu, negara-bangsa, kelompok negara-negara dalam suatu regional, dan sistem global (Mas'oed, 1990). Penelitian ini menggunakan tingkat analisa aktor non negara, dimana penulis akan melihat bagaimana Aktivitas Penari Transnasional Lengger Lanang Banyumas di Masa pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif atau biasa disebut dengan analisa data non statistik.

Tehnik analisa data yang digunakan adalah Teori Aktivitas Sosial Vygotsian dan Diplomasi Budaya. Dua tehnik analisa ini dipilih karena pada penelitian ini karena mencoba mencari tahu bagaimana aktivitas penari internasional lengger lanang di masa pandemi ini dibidik melalui Teori Aktivitas Sosial Vygotsian. Model ini mencoba merepresentasikan interaksi manusia yang dimediasikan oleh perangkat mediasi. *Mediating artifacts* ini adalah perangkat (*tools*), tanda-tanda (*signs*), dan peralatan (*instruments*)—baik yang merupakan alat-alat eksternal (*external implements*) maupun representasi internal (*internal representations*; seperti model-model mental)— yang digunakan oleh subjek untuk berinteraksi dengan objek (Engeström., 1999). Setelah pola ini mampu dideskripsikan, baru kemudian sudut pandang diplomasi budaya digunakan untuk membaca aktivitas sosial yang terbentuk. Diplomasi budaya merupakan bagian dari diplomasi publik yang menggunakan cara memperkenalkan kebudayaan negara tertentu kepada negara lain untuk membangun rasa saling percaya dan saling kenal satu sama lain (Waller, 2009). Dalam penelitian ini mencoba menggali bagaimana aktivitas penari internasional Lengger Lanang yang sudah menjadi aktor transnasional melakukan kegiatan diplomasi budaya di masa Pandemi Covid 19 di tahun 2020-2021.



Gambar 1. Pola Aktivitas Sosial model Vygotsian.
Sumber: Engeström., 1999

III. ANALISIS PENELITIAN

A. Pola Aktivitas Sosial Penari Transnasional Lengger Banyumas

Adalah Rianto, penari lengger lanang Banyumasan yang sudah menjadi aktor transnasional non negara. Pria kelahiran Kaliori, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia pada 8 September 1981 ini mengkhususkan diri dalam tari Lengger, sebuah tari lintas gender tradisional dari Banyumas. Dari genre inilah dia bisa mengembangkan dalam bentuk tradisi dan kontemporer lainnya diberbagai panggung dan festival (Rianto, 2013).

Kegiatan lintas batas negara pun yang dirintis bukan dalam waktu sebentar. Dimulai semenjak 2003 setelah menikah dengan Miray Kawashima hingga memutuskan pindah ke Jepang. Baru pada 2006 mendirikan *Dewandaru Dance Company* dengan tujuan mengajarkan tarian Jawa dan menyebarkan budaya jawa di Jepang (Rianto, 2013). Sepak terjangnya di dunia internasional terbilang moncer. Tak tanggung-tanggung pada 17-20 Januari 2010 membawakan karya *New Spirit of Indonesia* pada *Gala Innauguration of Obama in Washington DC.USA* (Rianto, 2013). Belum terhitung kelas tari internasional dengan peserta dari berbagai negara di seluruh dunia yang terus berlangsung sampai penelitian ini berlangsung.

Sepak terjang internasional Rianto pun terkena imbas dengan datanya pandemi Covid-19. Segala kegiatan internasional pun terhenti. Inisiatif pun diambil dengan mengada kan kelas dalam jaringan (daring). Strategi pun disusun, dimulai dengan menggerakkan Rumah Lengger Banyumas. Pemilihan Rumah lengger bukan tanpa alasan. Alasan diungkapkan Rianto, "Teman-teman penari lengger yang bergabung di Rumah Lengger di tingkatan lokal yang terkena imbas aturan PPKM dan tidak bisa *manggung* selama hampir dua tahun bisa diberdayakan dengan mengajar kelas *online*. *Itung-itung* latihan mengajar murid luar negeri, haha..."

Selanjutnya terkait teknis pelaksanaan kelas. Tantangan paling utama adalah terkait jaringan internet. Tim Rumah Lengger pun mencoba menyusun proposal dan mencari bantuan terkait pengadaan infrastruktur jaringan internet, *smart tv*, dan telpon seluler. Dengan jejaring internasional, pimpinan daerah di Kabupaten Banyumas makan mendapatkan dana CSR dari PT.KAI untuk memenuhi infrastruktur tersebut pada bulan Juli 2021 melalui Program Bina Lingkungan. Apa yang dilakukan Rianto dan Rumah Lengger juga PT. KAI mengungkap ternyata ada kegiatan paradiplomasi. Paradiplomasi merupakan keterlibatan dari daerah dari sebuah negara dalam aktivitas hubungan internasional. Pemerintah daerah ikut terlibat dalam suatu kerjasama internasional dengan bermacam cara, mulai dari menjalankan misi budaya, melakukan perdagangan terbuka, lalu mengadakan perjanjian serta persetujuan dengan pemerintahan luar negeri dan aktor non negara lainnya, mereka berpartisipasi dalam suatu jaringan internasional. Dan biasanya mereka melibatkan pemerintah pusat seperti Kementerian Luar Negeri (Kuznetsov, 2015).

Langkah selanjutnya adalah pelaksana teknis diserahkan ke Rumah Lengger. Pemateri selain Rianto sendiri juga dipilih dari penari lengger lanang Banyumas yang masih berada di wilayah Banyumas dan sekitarnya dan terafiliasi dengan Rumah Lengger Banyumas. Mereka adalah Sigit Kurniawan, Pico Prasetyo, dan Suleman. Selain itu, para penari muda ini juga secara kesejarahan belajar menari Lengger di tempat yang sama, di SMKI Sendang Mas Banyumas yang kini berubah menjadi SMK N 3 Banyumas dan belajar kepada Masetro Lengger Lanang Banyumas, alm Dariah. Sebagai teknis & operator pelaksanaan kelas daring ada Harsya dan Sirwan. Bagian publikasi ada Harsya dan Ayi. Dibuatlah pamflet publikasi, biaya bagi peserta kelas daring dan diaturlah jadwal, materi dan tata cara teknis kelas daring. Untuk ruangan memanfaatkan ruangan Rumah Lengger yang ada di Komplek kantor Kecamatan Banyumas dengan pelaksanaan tetap mematuhi protokol kesehatan dimasa Pandemi.

Alhasil 3 kelas terselenggara selama penelitian ini; kelas Tari Lobong Ilang, Kelas Tari Baladewan, dan Kelas Tari Gambyong Eling-Eling. Tercatat pada kelas tari Lobong Ilang ada 25 peserta dengan rincian dari Jerman 3 orang, Jepang 2 orang, Amerika Serikat 1 orang, Australia 1 dan dari Indonesia sendiri ada 18 orang. Untuk kelas tari Baladewan ada 19 peserta yang semuanya dari Indonesia. Terakhir kelas tari Gambyong Eling-Eling ada 19 peserta dengan 2 dari Singapura dan 17 dari Indonesia.

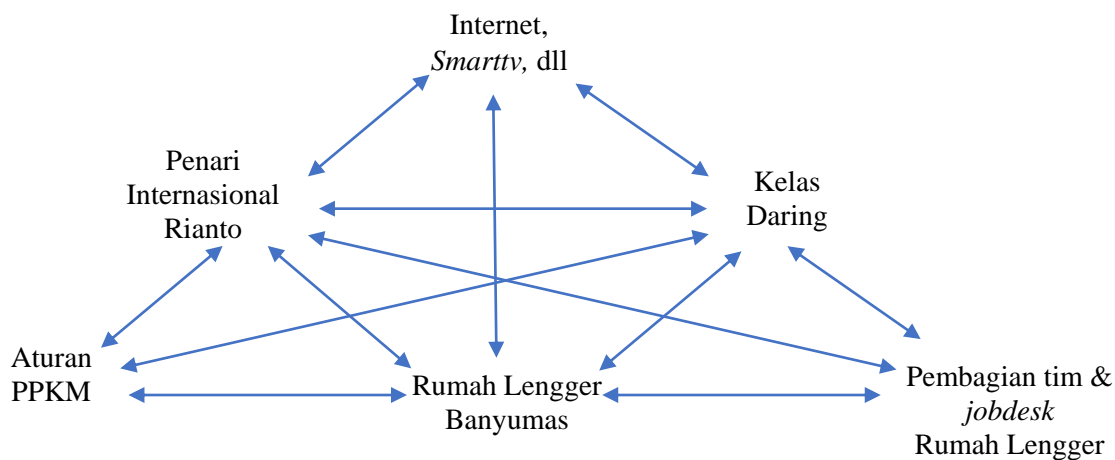


Gambar 2. Pengumuman kelas daring
Sumber: Rumah Lengger Banyumas



Gambar 3. Searah jarum jam: Kelas Tari Daring Lobong Ilang, Baladewan dengan caption protokol kesehatan, dan Kelas Tari Gambyong Eling-Eling.
Sumber: Rumah Lengger Banyumas

Gambaran kegiatan kelas daring Rianto dan Rumah Lengger Banyumas di atas jika digambarkan dalam teori Aktivitas Sosial Vygotsian adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Pola Aktivitas Sosial pada kelas daring para Penari Internasional.
 Sumber: Peneliti.

Mediating artifacts ini adalah perangkat (*tools*), tanda-tanda (*signs*), dan peralatan (*instruments*)—baik yang merupakan alat-alat eksternal (*external implements*) maupun representasi internal (*internal representations*; seperti model-model mental)— yang digunakan oleh subjek untuk berinteraksi dengan objek. Dalam hal ini adalah jaringan internet, *smart tv*, *smartphone*. Dimasa pandemi dengan aturan PPKM yang ketat dan tidak membolehkan interaksi, keberadaan jaringan internet menjadi instrumen penting untuk menjembatani interaksi antar aktor baik Rianto berkomunikasi dengan Rumah Lenggeng Banyumas untuk kemudian melakukan pembagian tim dan *jobdesk* seperti penunjukan penari lokal Banyumas yang menjadi pemateri kelas daring, tim teknis operator, penghubung dengan peserta, dan bagian publikasi serta perijinan pengadaan kelas daring ke pihak-pihak terkait. Aktivitas Sosial yang saling terhubung ini mampu berinteraksi antara Rianto dengan Rumah Lenggeng Banyumas yang berjauhan secara geografis, antar negara sekaligus mematuhi protokol kesehatan.

Pola Vygotsian pada aktivitas Rianto dan Rumah Lenggeng banyumas ini dilakukan secara dialektis, historis, dalam relasi satu dengan yang lain. Dialektis karena ada proses diskusi dua arah antara Rianto, para penari lengger lanang lokal, tim teknis Rumah Lenggeng. Secara historis Rianto dan para penari sesama belajar menari di SMK N 3 Banyumas dan belajar kepada para penari lengger tradisional seperti Masetro Lenggeng Lanang Banyumas, alm Dariah. Inilah yang mampu menjadi dasar relasi bagi mereka dalam tetap beraktivitas kesenian dan kebudayaan secara transnasional di masa pandemi Covid-19.

IV. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Merebaknya pandemi Covid 19 ternyata tidak mampu mengalahkan kreativitas Rianto selaku aktor transnasional Lenggeng Lanang Banyumasan dibantu dengan para penari lengger lanang, tim Rumah Lenggeng Banyumas. Aktivitas kegiatan tari lengger pada masa covid 19 secara internasional tetap berjalan dengan menggunakan bantuan kemajuan teknologi dan kolektivitas sosial yang dapat dimengerti secara dialektis, historis, dalam relasi satu dengan yang lain. Secara dialektis; Rianto melakukan aktivitas yang setara baik dengan organisasi lokal Rumah Lenggeng Banyumas, penari lengger lanang yang berada di Banyumas dan para penari di berbagai negara. Secara historis keterhubungan Rinato dengan penari-penari lengger

Lanang adalah sama-sama berasal dari wilayah sekitar Banyumas yang merupakan tempat lahir Rianto dan juga sesama alumni SMKI Banyumas dan terutama sesama murid Mbok Dariah yang seorang Maestro Lengger Lanang Banyumas. Sinergitas ini yang mampu mewujudkan relasi intens sehingga mampu melahirkan inisiasi kelas daring selama masa PPKM berlangsung.

Kegiatan kelas daring tari Lengger Banyumasan ini ternyata mampu mengungkap fenomena aktivitas aktor-aktor non negara yang ternyata bisa dikategorikan sebagai aktivitas diplomasi budaya di masa pandemi. Aktor non negara, dalam hal ini para penari lengger Lanang Banyumas mampu mengenalkan, mengajar tarian Lengger Lanang Banyumasan, salah satu dari identitas nasional Indonesia kepada para peserta yang berasal dari berbagai negara dan benua. Diplomasi Budaya bertujuan untuk membangun identitas nasional di mata negara-negara lain yang akan akan mempermudah negara tersebut untuk menjalin kerjasama luar negeri, dalam hal ini Budaya Banyumasan yang disampaikan melalui medium lengger lanang turut membangun identitas indonesia di mata peserta dari negara lain.

Selain itu terungkap kegiatan paradiplomasi yang dilakukan Rianto, Rumah Lengger Banyumas. Dengan institusi pimpinan pemerintahan dalam hal perijinan, dengan pimpinan PT KAI dalam kaitan dana *Corporate Social Responsibility* dalam mewujudkan infrastruktur kelas daring mulai pengadaan calung, sampai jaringan internet.

Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa sudah layak pemerintah tingkat daerah, institusi terkait melakukan kegiatan paradiplomasi secara terencana dan matang. Selain itu penelitian aktor non negara dalam kajian Hubungan internasional menjadi tambah luas bisa mengangkat fenomena kemanusiaan, sosial budaya yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Dan terutama, terjadinya kelas daring tari Lengger banyumasan ini menandakan keberlangsungan kegiatan tari lengger pada masa covid 19 secara internasional adalah tetap berlanjutnyadan memberikan imbas. Baik secara ekonomi pemasukan maupun imbas diseminasi budaya Banyumas di dunia transnasional.[].

V. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R. (2021). Eksistensi Lengger Lanang Langgeng Sari Banyumas. *Imaji; Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, 1-7.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada media Grup.
- Darno. (2012). *Lengger Dariah Studi Tentang Pengaruh Gaya Wetanan Terhadap Kontinuitas Pertumbuhan Lengger Banyumas*. Surakarta: Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Surakarta.
- editor. (2008, 12 30). *kompas.com*. Diambil kembali dari *kompas.com*: <https://nasional.kompas.com/read/2008/12/30/0724325/rianto.menari.di.depan.obama?page=all#page2>
- Engeström., Y. (1999). *Innovative learning in work teams: Analyzing cycles of knowledge creation in practice*. Dalam Y. Engeström, R. Miettinen, & R.-L. Punamäki (Eds.), *Perspectives on teori aktivitas*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hartanto, S. I. (2016). Perspektif Gender pada Lengger Lanang Banyumas. *Pantun; Jurnal Ilmiah Seni Budaya ISBI Bandung*, 145-153.
- Kuznetsov, A. (2015). *Theory and Practice of Paradiplomacy*. London & New York: Routledge.
- Mas'oe'd, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Rianto. (2013, - -). <http://rianto-dancer.jugem.jp/>. Diambil kembali dari <http://rianto-dancer.jugem.jp/>: <http://rianto-dancer.jugem.jp/?pid=1>
- Safriana, L. (2020, April 18). <https://katadata.co.id/tentang-katadata>. Diambil kembali dari <https://katadata.co.id/>:

<https://katadata.co.id/muchamadnafi/indepth/5e9a41c87f85e/tantangan-berat-seniman-pertunjukan-di-masa-pandemi-corona>

Susilo, A. e. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7(1), 45-67.

Waller, M. J. (2009). *Strategic Influence: Public Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare*. Washington DC: Crossbow Press.

WHO. (2020, April 27). Diambil kembali dari <https://www.who.int:https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19>

DIPLOMASI DIGITAL INDONESIA PASCA PANDEMI: PROMOSI BALI SEBAGAI TUJUAN WISATA DI DALAM DRAMA KOREA

Rafika Arsyad¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Peradaban, Bumiayu.
Email: rafika.arsyad@gmail.com

Abstrak

Drama Korea merupakan salah satu media yang banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan diplomasi budaya Korea Selatan di dunia internasional. Dalam beberapa dekade ini, popularitas drama Korea masih menunjukkan eksistensi dan perkembangan yang semakin baik, meskipun sepanjang pandemi terdapat beberapa kendala dalam proses produksi beberapa judul drama. Popularitas drama Korea ini kini bukan hanya menarik bagi para pemilik industri dalam negeri Korea saja, namun juga beberapa pihak asing, seperti Indonesia. Paper ini akan membahas tentang pemanfaatan drama Korea sebagai media dalam upaya diplomasi publik pasca pandemi, terkhusus bagi Indonesia yang dalam beberapa drama terlibat dalam alur cerita drama Korea. Metode yang digunakan dalam menjelaskan penelitian ini adalah deskriptif-analisis dengan data primer maupun sekunder dari berbagai sumber terpercaya dan sesuai dengan tema penelitian, kemudian didapatkan hasil penelitian bahwa munculnya promosi Bali sebagai destinasi wisata di dalam drama Korea merupakan upaya pemerintah untuk mendorong rencana optimalisasi pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Kata kunci: drama Korea, diplomasi, Indonesia

Abstract

For decades, Korean drama has become the most significant media in South Korean cultural diplomacy. Even though the producers face many challenges and obstacles in the production process during the pandemic, the popularity of Korean dramas continuously shows their massive existence and development. The widespread Korean Drama popularity spread attracted not only Korean domestic industry owners but also many foreign investors or brands, such as Indonesia. This paper will discuss the use of Korean dramas as a tool in post-pandemic public diplomacy, especially for Indonesia. The method used in this research paper is a descriptive analysis based on primary and secondary data from various reliable sources according to the research theme. The results showed that the Indonesian government joining the Korean Drama sponsor list by promoting Bali as a tourism destination was part of the effort to encourage tourism sector optimization plans as one of the development priorities.

Keywords: Korean drama, diplomacy, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Tayangan televisi merupakan kunci awal kesuksesan penyebaran budaya populer Korea saat ini. Dimulai sejak pertengahan tahun 90an hingga 2000, tayangan televisi berupa drama Korea ini telah ditayangkan berulang – ulang di stasiun televisi besar di Cina, Jepang hingga Turki (KOCIS). Perkembangan drama Korea dalam lebih dalam beberapa terakhir menunjukkan grafik yang positif, dimana sejak mulai dikenal masyarakat dunia, permintaan akan produk industri hiburan ini semakin meningkat, seiring dengan penayangan yang tidak hanya terpaku pada media televisi semata, namun sudah mulai merambah beberapa media *streaming* berbayar. Dengan demikian, akses masyarakat global menjadi semakin mudah dan perkembangan *kwave*, terkhusus drama Korea menjadi semakin luas.

Dilihat dari segi popularitas dan antusiasme masyarakat global, drama Korea memiliki potensi yang sangat besar dalam memperkenalkan sesuatu secara langsung ataupun tidak dan cenderung terlihat menyatu dengan alur cerita dalam drama tersebut, sehingga penonton tidak akan merasa terbebani dengan hal tersebut meskipun akan melihat produk-produk tertentu dalam jangka waktu yang lama. Ini menjadi hal yang penting bagi berbagai perusahaan di Korea, karena *product placement* ini merupakan sarana alternatif yang paling efektif untuk menggantikan iklan komersial, terlebih jika ingin penyasar pemirsa global (Lim, 2021). Pada tahun 2020, Peraturan penyiaran Korea Selatan yang ketat mengizinkan *product placement* dari merek-merek lokal. Namun dengan lonjakan popularitas drama Korea dalam skala global, permintaan akan adanya *product placement* di dalam drama pun semakin ikut meningkat dari berbagai merk internasional. Salah satu merk dari produk makanan asal Amerika Serikat, *Subway* mendapatkan dampak yang positif pada penjualan global (Berkman, 2021). Melihat adanya potensi yang sangat besar, merk lokal Indonesia seperti Kopiko juga memberanikan diri untuk turut terlibat. Dengan menempatkan diri pada drama yang berjudul Vincenzo pada episode 14, 15, 17, dan 19. Kopiko berhasil mencuri perhatian masyarakat lokal maupun internasional dengan adanya peningkatan aset dari Rp19,78 triliun pada 2020 menjadi Rp21,06 triliun pada 2021 (Ningsih, 2021).

Pada tahun 2022 ini *product placement* dari salah satu ikon Indonesia kembali muncul di dalam drama Korea yang berjudul *Again My Life*. Di mana Bali menjadi komoditas yang diperbincangkan dalam dua episode drama tersebut. Hal ini menarik untuk diteliti mengingat munculnya *product placement* tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk kembali membuka diri secara lebih terbuka bagi wisatawan asing setelah dua tahun menutup akses.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Paper ini merupakan tulisan yang menggunakan metode deskriptif analisis yang mana gagasan terbentuk dari kumpulan data primer maupun sekunder yang di dapatkan dari studi literasi. Dalam analisisnya, penulis menggunakan pendekatan diplomasi digital untuk mengerangkan tentang media teknologi yang digunakan untuk menjelaskan sasaran dari upaya pemerintah Indonesia mencapai tujuan nasional dalam bidang pembangunan.

Diplomasi Digital

The UK Foreign and Commonwealth Office (FCO) memberikan definisi tentang diplomasi digital sebagai upaya menyelesaikan masalah kebijakan luar negeri dengan menggunakan sumber daya internet (Adesina, 2017). Sedangkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menginterpretasikan diplomasi digital sebagai "istilah *21st Century Statecraft*". Terdapat pandangan bahwa teknologi-teknologi yang telah ada merupakan *platform* komunikasi, kolaborasi dan perdagangan pada abad ke 21. Yang terpenting dalam hal ini adalah, teknologi tersebut dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, dengan ilmu pengetahuan hingga pada jaringan global (State, 2009).

Pada dasarnya konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Fergus Hanson pada tahun 2012 yang memberikan pengertian bahwa diplomasi digital ini juga bisa disebut sebagai *ediplomacy*, dimana ia menjelaskannya melalui praktik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam perbaruan metode diplomasi. Pada masa kini, *ediplomacy* atau yang kemudian dalam tulisan ini akan disebut sebagai diplomasi digital, pada dasarnya telah digunakan oleh yang salah satunya adalah dalam praktek diplomasi publik. Dalam implementasinya, pada masa kini negara lebih cenderung mengoperasikan apa apa yang secara efektif merupakan bagian dari media global, dimana dapat secara langsung menjangkau audien dalam skala besar dibandingkan dengan surat kabar berbayar Hanson juga menuliskan bahwa pada dasarnya, meskipun secara definisi pasti pengertian diplomasi digital belum sepenuhnya menemui titik temu, namun terdapat satu komponen utama di dalamnya, yakni pemanfaatan media internet untuk membantu melaksanakan tujuan diplomatik dan tidak hanya berpusat pada media sosial saja (Hanson, 2012).

Hanson menyatakan terdapat delapan tujuan dilakukannya digital diplomasi, diantaranya adalah;

- 1) *Knowledge management*; memanfaatkan pengetahuan dari berbagai departemen dan seluruh pemerintah, untuk dapat dipelihara, dibagikan, dan penggunaannya dioptimalkan untuk mengejar kepentingan nasional pada politik luar negerinya.
- 2) *Public diplomacy*; yakni untuk mempertahankan hubungan terhadap masyarakat sebagai sasaran utamanya pada saat mereka aktif di dunia maya dan memanfaatkan alat-alat komunikasi terkini guna menyalurkan informasi yang ditargetkan untuk mendengarkan dan menargetkan penyaluran informasi kunci kepada para sasaran dan untuk dapat mempengaruhi para *influencer* ternama.
- 3) *Information management*; untuk membantu pengumpulan arus informasi yang melimpah dan menggunakannya untuk menginformasikan tentang pembuatan kebijakan dengan lebih baik, selain itu juga dapat untuk mengantisipasi dan menanggapi gerakan sosial dan politik yang muncul.
- 4) *Consular communication and respond*; menciptakan saluran komunikasi pribadi langsung dengan warga yang bepergian ke luar negeri, dengan komunikasi yang dapat dikelola dalam situasi krisis.
- 5) *Disaster response*; memanfaatkan teknologi dalam situasi bencana
- 6) *Internet freedom*; menciptakan teknologi untuk menjaga internet tetap bebas dan terbuka. Hal ini terkait dengan mengkampanyekan kebebasan berbicara dan demokrasi serta untuk meruntuhkan rezim otoriter.
- 7) *External resources*; menciptakan mekanisme digital untuk dapat dimanfaatkan dan untuk memanfaatkan para tenaga ahli dari pihak luar untuk memajukan tujuan nasional.
- 8) *Policy planning*; memungkinkan pengawasan, koordinasi, dan perencanaan kebijakan internasional yang efektif di seluruh pemerintah, dalam menanggapi internasionalisasi birokrasi.

III. ANALISIS

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan bidang ekonomi, dimana pemerintah di seluruh dunia harus membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang berpedoman pada upaya pencegahan penularan virus tersebut, dimana salah satunya adalah dengan membatasi arus mobilitas masyarakat secara global. Bagi Indonesia terdapat penurunan yang sangat drastis atas jumlah wisatawan dan juga secara materi tercatat adanya kerugian mencapai 1.356 triliun rupiah pada tahun 2020 (Ulya, 2021). Kendati demikian, pada Oktober tahun 2020, Indonesia masih berhasil mendapat peringkat keempat sebagai Destinasi Wisata Paling Populer di Dunia dari versi TripAdvisor (RI, 2021).

Sebagaimana destinasi wisata lainnya di seluruh dunia yang mengalami penurunan wisatawan, Bali yang juga mengalami hal serupa. Namun, dengan positif pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf atau Baparekraf) yang bersama dengan para *stakeholders* di Bali menggunakan momen tersebut untuk berbenah diri. Dimana pemerintah Indonesia telah berencana untuk membuka Bali secara bertahap dan terbatas mulai pada bulan Juli 2021, kendati demikian realisasi pembukaan Bali sebagai Destinasi Utama bagi wisatawan mancanegara baru dimulai pada 14 Oktober 2021 dengan lima negara asal seperti Korea Selatan, China, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Selandia Baru yang dinilai memiliki tingkat penanganan Covid-19 yang baik (Indonesia, 2021).

Untuk mempersiapkan Bali dengan wajah yang baru, terdapat beberapa langkah yang dilakukan, diantaranya adalah revitalisasi objek wisata dan vaksinasi dan penerapan protokol CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*). Revitalisasi ini dimaksudkan dengan menambahkan fasilitas penunjang kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan. Pemerintah juga memberikan *soft loan* yang dapat digunakan sebagai modal kerja, insentif biaya pemasaran, relaksasi bagi wisman, hingga hibah pariwisata. Selain itu juga pemerintah meluncurkan satu aplikasi yang bernama Tlusur, sebagai metode *tracing* dan *tracking* wisatawan atau sebagai "pemandu" wisatawan untuk dapat berwisata secara aman dan nyaman (RI, 2021).

Kesiapan Bali untuk membuka diri mulai dipromosikan oleh Dinas Pariwisata yang telah menyiapkan anggaran untuk 4 series video promosi, yakni *Bali is Ready, We Love Bali, Vibration of Bali* dan *The Harmony of Bali* yang ditayangkan melalui channel *Wonderful Indonesia* milik Kementerian Parekraf dan berbagai media sosial (Bali, 2022). Selain itu, guna menunjukkan keseriusan dalam mendorong Bali sebagai Destinasi Wisata utama untuk mendorong pembangunan, Pemerintah Indonesia melalui *Wonderful Indonesia* mulai memasuki ranah promosi melalui drama Korea, dimana ini merupakan hal yang baru dan cukup mengejutkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno bahwa ia melihat Korea Selatan dari segi ekonomi kreatif yang menjadi acuan, baik dari segi music, film dan lini industry kreatif lainnya (Arief, 2022).

Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam jajaran sponsor drama Korea yang pada kasus ini adalah drama yang berjudul *Again My Life*, bukanlah tanpa dasar pertimbangan. Drama yang diadaptasi dari *webtoon* dengan judul yang sama dan memiliki 16-episode ini, memiliki *rating* yang sangat tinggi, baik di dalam negeri maupun secara global. Sejak pertama kali tayang pada bulan April 2022 drama tersebut berhasil memperoleh posisi ke sepuluh secara global dan Sembilan secara nasional Korea, kemudian mengalami kenaikan signifikan dari peringkat ke sepuluh menjadi peringkat ketiga secara global maupun nasional pada episode ke tujuh (Neilson, 2022).

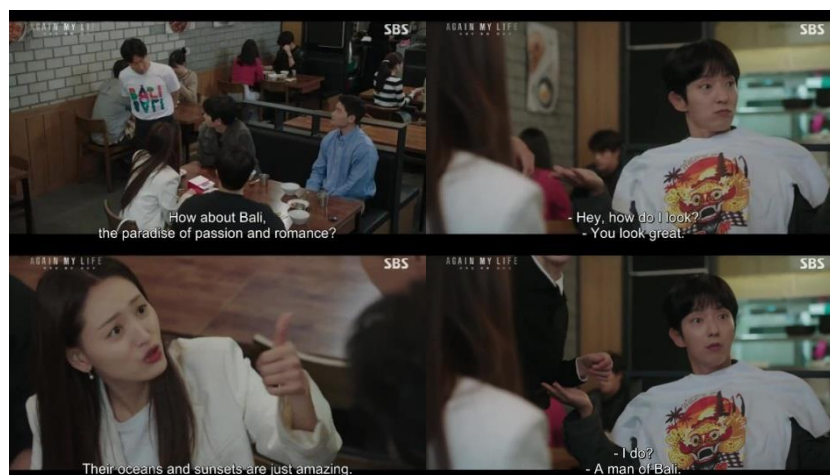
Menjadi bagian dalam sebuah drama Korea bukanlah hal yang asing bagi korporasi. Dalam hal bisnis, drama Korea memiliki peluang yang sangat tinggi dalam mempromosikan berbagai produk melalui skema *product placement*. Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian *Product Placement* ini, dimana salah satunya pengertian dari Balasubramanian, yang mana menyoroti pada media TV dan Film. Dia menyatakan bahwa *product placement* merupakan sebuah tindakan memberikan pesan secara berbayar, dengan tujuan untuk mempengaruhi penonton televisi ataupun acara tertentu yang disiarkan secara luas, melalui perencanaan dan tidak mengganggu audien atas produk yang ditampilkan pada sebuah film atau drama maupun program televisi lainnya (Chin, Wilson, & Russo, 2012). Ginosar dan Levi-Faur menambahkan bahwa yang di maksud dengan *product placement* merupakan penggabungan konten komersial yang disengaja ke dalam pengaturan nonkomersial, yaitu, memposisikan produk yang dihasilkan melalui perpaduan iklan dan hiburan (Williams, Petrosky, Hernandez, & Jr., 2011).

Secara tradisional, dalam beberapa produksi film atupun sejenisnya termasuk yang sering ditemui dalam drama korea adalah sebuah produk di tampilkan dalam adegan tertentu secara langsung (*Screen Placement*), sebuah produk akan dideskripsikan atau disebutkan dalam sebuah adegan (*Script Placement*) dan yang terakhir adalah *Plot Placement*, dimana sebuah produk akan terlihat sebagai ciri khas dari sebuah produksi (Maher, 2016). Penempatan produk dapat menjadi metode yang hemat biaya untuk menjangkau pelanggan sasaran. Karena itu, penempatan produk cenderung melampaui pesan iklan tradisional (Russell & Stern, 2006). Berdasarkan pendekatan digital diplomasi, tindakan pemerintah Indonesia, melalui kemenparekras dapat dikatakan sebagai upaya diplomasi Indonesia, terkhusus adalah diplomasi publik dengan media digital. Dimana hal tersebut adalah upaya untuk dapat menarik perhatian wisatawan asing, terkhusus warga Korea Selatan. Dalam kebijakannya menjadi sponsor acara tersebut, salah satu timbal balik yang di dapat Indonesia adalah adanya pencantuman logo *Wonderful Indonesia* pada akhir episode. Timbal balik ini adalah hal yang signifikan, dimana *rating* yang didapat drama tersebut secara global adalah 10.5 persen dengan *rating* rata-rata adalah 4.5 persen dan menempati *rating* nomor satu sebagai drama yang paling banyak ditonton oleh seluruh kalangan di antara penonton usia 20 hingga 49 tahun (Cha, 2022).

Berdasarkan pada delapan tujuan diplomasi digital, upaya pemerintah Indonesia tersebut dapat dijelaskan sebagai diplomasi publik. Dimana sasaran utama dalam model ini adalah publik secara luas. Menurut Wanke,

"Jika diplomasi publik secara tradisional hanya menargetkan populasi asing sebagai sasaran dan bersifat monolog, maka diplomasi digital bukan hanya menargetkan populasi asing tetapi juga domestik dan bersifat dialogis. Pelibatan masyarakat mengacu pada kebutuhan untuk berkomunikasi dengan publik yang berkumpul di berbagai jaringan online" (Wangke, 2020).

Ini terlihat dari adanya beberapa adegan pada dua episode terakhir, yakni episode 14 yang di mulai dari menit ke 50.40 dan berlangsung selama kurang lebih 1 menit penuh juga pada episode 16 yang muncul pada menit-menit akhir selamat kurang lebih 30 detik dengan penyampaian yang sangat jelas dan juga pencantuman logo *Wonderful Indonesia* pada bagian *credit*. Dalam drama *Again My Life*, para tokoh utama protagonis yang secara langsung membicarakan tentang Bali sebagai tempat yang sangat indah dan menjadi impian banyak orang untuk di kunjungi.



Gambar 1. Promosi Bali pada episode 14 dan 16
Sumber: SBS

Sejak di buka kembali untuk turis asing, jumlah turis yang berkunjung ke Bali mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statisti (BPS), jumlah pengunjung asing pada bulan april 2022 adalah sebanyak 58.335 wisatawan mancanegara (wisman), dimana jumlah ini naik hingga 300% dari bulan maret yang hanya sejumlah 14.620 kunjungan. Dari jumlah tersebut dapat di lihat juga asal dari para wisman adalah dari beberapa negara seperti Australia sebanyak 13.963 wisman, Inggris 4.775, Singapura 4.237, Prancis 3.867 dan Amerika Serikat 3.840 (Annur, 2022). Data tersebut menunjukkan minat masyarakat internasional yang masih tinggi terhadap Bali, kendati demikian upaya promosi Pariwisata harus tetap dilakukan untuk menarik lebih banyak wisatawan guna mencapai target pembangunan nasional. Terhitung sejak 1 – 13 Juni 2022, tercatat jumlah penerbangan internasional yang masuk ke Bali mencapai 351 pesawat dengan total sebanyak 76.770 wisatawan asing dengan jumlah rata-rata penumpang per hari adalah 5.905 orang (Chusna, 2022). Dengan munculnya strategi *wonderful* Indonesia di dalam drama *Again My Life* tersebut, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia yang dimulai dari Bali.

Selain itu, drama Korea yang menjadi media promosi pariwisata Bali sebagai tujuan wisata, juga merupakan wujud dari bentuk pemanfaatan media untuk menciptakan suatu mekanisme digital yang memanfaatkan tenaga ahli dari pihak luar guna mendukung pencapaian kepentingan nasional. Produksi drama Korea memiliki tahapan yang sangat Panjang, serta berbagai tim ahli yang memiliki kualitas sehingga drama yang dihasilkan dapat memikat banyak penonton, baik dari segi alur cerita, penggunaan *background* atau musik serta efek grafis yang sangat memperhatikan detail. Kim Hee Yeol yang merupakan wakil presiden dari Pan Entertainment dan wakil ketua untuk *the Korean Drama Production Association*, mengatakan bahwa proses pembuatan satu judul drama Korea akan melalui 17 tahapan dimana tujuh Langkah awal merupakan tahap pre-produksi dan perencanaan sedangkan 10 tahap selanjutnya adalah bagian produksi itu sendiri (Chua, 2020). Dari lamanya waktu pembuatan, dapat dikatakan bahwa dunia hiburan Korea Selatan memiliki integritas tinggi dalam mempertahankan maupun meningkatkan kualitasnya. Hal ini beriringan dengan adanya permintaan pasar internasional dan berbagai *platform* pasar streaming yang telah meningkatkan nilai dan harapan akan kualitas kreatif dan teknis dari sebuah tayangan (Conran, 2021). Untuk itulah, kemudian pada tahun 2010, pemerintah Korea Selatan melakukan amandemen terkait dengan aturan *product placement* dan mulai membuka diri terhadap produk-produk asing.

Keterlibatan Indonesia dalam jajaran sponsor drama *again my life* ini juga dapat di katakan sebagai upaya memanfaatkan peluang yang ada, dimana drama tersebut disiarkan secara global oleh distributor resmi seperti SBS, VIU, VIKI Rakuten maupun beberapa *platform streaming* ilegal. Kondisi memanfaatkan peluang, dalam hal ini fenomena popularitas drama Korea adalah sejalan dengan pendapat Wallerstein terkait dengan upaya merebut dan memanfaatkan peluang yang ada untuk naik kelas. Penempatan promosi pariwisata dalam drama Korea pada dasarnya tidaklah asing. *Korea Tourism Organization* (KTO) secara berkala menjadi sponsor dalam berbagai drama Korea secara langsung, bahkan telah membuat kolaborasi dengan salah satu *platform streaming* populer Netflix sebagai strateginya dalam mendorong perkembangan sektor pariwisata pasca pandemic COVID-19 (Lim J.-w. , 2020). Dengan tingginya antusiasme global drama Korea maka melakukan *product placement* merupakan media strategis untuk memperkenalkan barang terkait kepada khalayak internasional. Meskipun dalam sebuah kebijakan ada beberapa hal yang memberatkan, seperti halnya dalam topik ini adalah biaya *sponsorship* dalam drama. Kendati demikian, jumlah pasti berapa biaya yang diperlukan untuk terlibat didalam drama Korea tidak pernah dipublikasikan secara terang-terangan, namun dapat dikisarkan bahwa pada beberapa drama populer, biaya biaya yang dikeluarkan dapat menyentuh angka US\$10.000

maupun lebih jika pemeran yang terlibat adalah aktor-aktor papan atas dengan basis fans yang luas (factsanddetails, 2021). rata-rata sebuah episode drama Korea pada tahun 2008 lebih dari 100 juta won per-episode (Conran, 2021).

Meskipun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, namun keterlibatan ini patut untuk diapresiasi, dimana pemerintah Indonesia dinilai sudah mulai melihat potensi dari fenomena budaya Korea. Hal ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah dalam upaya optimalisasi pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan dan telah menetapkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama. Program pariwisata terkait pembangunan infrastruktur dasar untuk 5 destinasi super prioritas ditargetkan selesai pada tahun 2020. Program ini diharapkan bisa menjadikan sektor pariwisata menjadi penghasil devisa terbesar (Khairally, 2019).

IV. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Kesimpulan yang didapat dari paparan tersebut adalah pada dasarnya perkembangan dunia internasional saat ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni sebagai peluang dan juga tantangan. Sebagai peluang bahwa kemajuan informasi dan teknologi bersama dengan isu kontemporer membuka jalan bagi negara yang sedang berkembang untuk semakin mudah mengembangkan diri. Sebagai tantangan bahwa pemikiran kritis terhadap situasi internasional sangatlah diperlukan, pemikiran-pemikiran kolosal yang menghambat kemajuan harus perlahan dikesampingkan dan berani memulai sesuatu yang baru. Ini yang kemudian menjadi gambaran awal dari apa yang penulis tujukan dalam penulisan paper. Dimana pemerintah Indonesia telah memulai Langkah yang cukup signifikan dengan memutuskan untuk terlibat dalam upaya *product placement* di dalam drama Korea. Hal ini patut diapresiasi, dimana untuk melakukan hal tersebut tidaklah murah, dimana *cost* yang dikeluarkan tidaklah sedikit dan juga dampak yang didapatkan tidaklah *instant*.

Pada dasarnya, fenomena budaya yang bukan lagi hal yang baru dapat di tiru oleh Indonesia dengan penyesuaian atas nilai-nilai lokal dan norma yang mencirikan Indonesia sebagai bangsa di Asia yang beragam suku dan budaya. Terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan, terkhusus dalam ranah budaya, sayangnya selama ini Indonesia cenderung menjadi penonton dan pangsa pasar bagi fenomena budaya Asing populer.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adesina, O. S. (2017). Foreign policy in an era of digital diplomacy. *Cogent Social Sciences*. Diambil kembali dari <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2017.1297175>
- Annur, C. M. (2022, Juni 30). *Rekor Selama Pandemi, Ada 58 Ribu Turis Asing ke Bali pada April 2022*. Diambil kembali dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/30/rekor-selama-pandemi-ada-58-ribu-turis-asing-ke-bali-pada-april-2022>
- Arief, A. M. (2022, Mei 9). *Gaet Turis Asing, Kemenparekraf Sponsori Drama Korea Again My Life*. Diambil kembali dari Berita Industri: <https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/62793a3094212/gaet-turis-asing-kemenparekraf-sponsori-drama-korea-again-my-life>
- Bali, P. (2022, April 2022). *Dari Penguatan UMKM Hingga Penerapan CHSE, Wagub Cok Ace Sampaikan Upaya-Upaya Pemulihan Pariwisata Bali Pasca Pandemi*. Diambil kembali dari <https://www.baliprov.go.id/web/dari-penguatan-umkm-hingga-penerapan-chse-wagub-cok-ace-sampaikan-upaya-upaya-pemulihan-pariwisata-bali-pasca-pandemi/>

- Berkman, S. (2021, March 14). *Korean TV's Unlikely Star: Subway Sandwiches*. Diambil kembali dari <https://www.nytimes.com/2021/03/14/business/media/subway-product-placement-korea.html>
- Cha, E. (2022, Mei 29). "Again My Life" Ends On No. 1 Ratings As "My Liberation Notes" Gears Up For Finale. Diambil kembali dari Soompi: <https://www.soompi.com/article/1528478wpp/again-my-life-ends-on-no-1-ratings-as-my-liberation-notes-gears-up-for-finale>
- Chin, S., Wilson, B., & Russo, A. (2012). Product Placement Redefined. *2012 Australian & New Zealand Marketing Academy (ANZMAC) Conference: Sharing the Cup of Knowledge*.
- Chua, Z. B. (2020, 11 10). *How K-dramas are made*. Diambil kembali dari BusinessWorld Online: <https://www.bworldonline.com/editors-picks/2020/11/10/327592/how-k-dramas-are-made/>
- Chusna. (2022, Juni 16). *Pariwisata Bali Berangsur Pulih, Kunjungan Wisman Melesat 41 Persen di Juni 2022*. Diambil kembali dari IDX Channel: <https://www.idxchannel.com/economics/pariwisata-bali-berangsur-pulih-kunjungan-wisman-melesat-41-persen-di-juni-2022>
- Conran , P. (2021, June 26). *How much do K-dramas cost to make? Budgets keep growing, hastened by Netflix's entry with Kingdom and Sweet Home* . Diambil kembali dari South China Morning Post: <https://www.scmp.com/lifestyle/k-pop/k-drama/article/3138546/how-much-do-k-dramas-cost-make-budgets-keep-growing>
- Conran , P. (2021, Juni 26). *How much do K-dramas cost to make? Budgets keep growing, hastened by Netflix's entry with Kingdom and Sweet Home* . Diambil kembali dari South China Morning Post: https://www.scmp.com/lifestyle/k-pop/k-drama/article/3138546/how-much-do-k-dramas-cost-make-budgets-keep-growing?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article&campaign=3138546
- factsanddetails. (2021, Juli). *Business of Korean Drama: Production Cost, Income, Product Placement*. Diambil kembali dari Facts and Details: https://factsanddetails.com/korea/South_Korea/K-Dramas_Television_and_Film/entry-7293.html
- Hanson, F. (2012, March). *Revolution @State: The Spread of Ediplomacy*. Sydney.
- Indonesia, C. (2021, 10 4). *5 Negara yang Boleh Masuk RI Mulai 14 Oktober*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211004182719-532-703268/5-negara-yang-boleh-masuk-ri-mulai-14-oktober>
- Khairally, E. T. (2019, Oktober 23). *Sektor Pariwisata Jadi Program Prioritas Pemerintah*. Diambil kembali dari Detik Travel: <https://travel.detik.com/travel-news/d-4757481/sektor-pariwisata-jadi-program-prioritas-pemerintah>
- KOCIS. (t.thn.). *The official website of the Republic of Korea*. Diambil kembali dari AboutKorea: <https://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu>
- Lim, C. (2021, april 21). *Celebrity Initiative*. Diambil kembali dari The Global Success Of K-Dramas and Its Impact on Product Placement: <https://blog.hollywoodbranded.com/the-global-success-of-k-dramas-and-its-impacts-on-product-placements>
- Lim, J.-w. (2020, Juli 7). *KTO promotes Korea through eyes of Netflix*. Diambil kembali dari Koreanherald.com: <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200707000633>
- Maher, M. (2016, March 25). *The Evolution of Product Placement in Film*. Diambil kembali dari thebeat: <https://www.premiumbeat.com/blog/product-placement-in-films/#:~:text=Traditionally%20there%20have%20been%20three,script%20placement%2C%20and%20plot%20placement.>

- Neilson, A. (2022, August). *Asianwiki*. Diambil kembali dari Again My Life: https://asianwiki.com/Again_My_Life
- Ningsih, L. (2021, April 30). *Kabar Finansial*. Diambil kembali dari Kopiko Ngiklan di Drakor Vincenzo, Bagaimana Nasib Keuangan Mayora Indah? Cuan Gak Sih?: <https://wartaekonomi.co.id/read339581/kopiko-ngiklan-di-drakor-vincenzo-bagaimana-nasib-keuangan-mayora-indah-cuan-gak-sih>
- RI, K. B. (2021, Juni 9). *Bali Siap Sambut Wisatawan dengan Wajah Baru*. Diambil kembali dari <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Bali-Siap-Sambut-Wisatawan-dengan-Wajah-Baru>
- Russell, C., & Stern, B. (2006). Consumers, Characters, and Products: A Balance Model of Sitcom Product Placement Effects. *Journal of Advertising*.
- State, U. D. (2009, January). *21st Century Statecraft*. Diambil kembali dari Archived Content: <https://2009-2017.state.gov/statecraft/overview/index.htm>
- Ulya, F. N. (2021, April 29). *Akibat COVID-19, Kerugian Ekonomi Tahun 2020 Capai Rp1.356 Triliun*. Diambil kembali dari [kompas.com: https://money.kompas.com/read/2021/04/29/143647026/akibat-covid-19-kerugian-ekonomi-tahun-2020-capai-rp-1356-triliun?page=all](https://money.kompas.com/read/2021/04/29/143647026/akibat-covid-19-kerugian-ekonomi-tahun-2020-capai-rp-1356-triliun?page=all)
- Wangke, H. (2020). *DIPLOMASI DIGITAL DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Williams, K., Petrosky, A., Hernandez, E., & Jr., R. P. (2011). Product placement effectiveness: revisited and renewed. *Journal of Management and Marketing Research*.

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI) PADA INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA BERBASIS PARIWISATA BERKELANJUTAN PASCA PANDEMI COVID-19

Muhammad Yamin¹; Ratna Sukmawati²; David Yoanedi Putra³; Afrizal Fajri⁴

^{1,2,3}Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

⁴Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta

¹Muhammad.yamin@unsoed.ac.id; ²davidyoanedi342@gmail.com; ³ratnaasukkma@gmail.com; ⁴afrizalfajri@gmail.com

Abstrak

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang menyumbangkan banyak devisa kepada pendapatan Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Tercatat pada tahun 2019 realisasi devisa dari sektor pariwisata mencapai 280 triliun Rupiah, serta berkontribusi pada PDB nasional sebesar 5,5% dengan jumlah tenaga kerja yang terserap lebih dari 13 juta orang. Penetapan status pandemi covid-19 yang dilakukan oleh WHO pada Maret 2020 membuat banyak negara di dunia untuk melakukan kebijakan lockdown atau setidaknya membatasi mobilitas warga negaranya untuk berpergian baik di dalam ataupun keluar negeri. Dua tahun berlalu sejak penetapan status pandemi covid-19, negara-negara di dunia mulai beraktivitas normal kembali, setelah penyebaran covid-19 mulai terkendali dan sektor pariwisata kembali bergerak menuju arah yang positif. Pengalaman dua tahun era pandemi membuat industri pariwisata Indonesia belajar dan beradaptasi dengan banyak hal, termasuk penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam pengembangan industri pariwisata modern. Pembangunan dan pengembangan industri pariwisata Indonesia pasca pandemi tentu akan berbeda sebelum terjadinya pandemi, oleh karenanya berdasar riset dengan menggunakan metode kualitatif ini, penerapan teknologi informasi yang berbasis konsep pariwisata berkelanjutan merupakan satu keniscayaan jika Indonesia ingin terus mendapatkan keuntungan dari sektor ini secara ekonomi tetapi dengan terus menjaga kelestarian objek wisata tersebut dengan memperhatikan tiga hal utama dalam pariwisata berkelanjutan yaitu: menjaga kelestarian alam, harmonisasi sosial dan budaya, serta berkontribusi pada ekonomi masyarakat sekitar. Kolaborasi antara teknologi informasi dan konsep pariwisata berkelanjutan merupakan jawaban konkrit dalam pengembangan pariwisata Indonesia di masa yang akan datang.

Kata kunci: teknologi informasi; pariwisata berkelanjutan: pandemic covid-19.

Abstract

Tourism industry is one of the industries that has contributed a lot of foreign exchange to Indonesia's income in recent decades. It was recorded that in 2019 the realization of foreign exchange from the tourism sector reached 280 trillion Rupiah, and contributed to the national GDP of 5.5% with a total workforce of more than 13 million people. The determination of status of COVID-19 pandemic carried out by WHO in March 2020 made many countries in the world decide to limit the mobility of their citizens to travel both within and outside the country. Two years have passed, countries in the world have started to return to normal activities, after the spread of Covid-19 began to be controlled. The two-year experience of the pandemic era made the Indonesian tourism industry learn and adapt to many things, including the use of Information Technology (IT) in the development. Indonesian tourism industry will certainly be different before the pandemic, therefore this research using qualitative method sum up application of information technology based on concept of sustainable tourism is a necessity if Indonesia wants to continue to benefit from this sector economically but by continuing to preserve the tourism object by paying attention to three The main things in sustainable tourism are: preserving nature, harmonization of social and

culture, and contributing to the economy of the surrounding community. Collaboration between information technology and the concept of sustainable tourism is a concrete answer in the development of Indonesian tourism in the future.

Keywords: *information technology; sustainable tourism: the covid-19 pandemic.*

I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah bencana global seperti pandemi sebelumnya yaitu pandemi Flu Spanyol diakhir abad ke-20, ataupun guncangan ekonomi global seperti halnya epidemi SARS di tahun 2003 (Metaxas & Folinas, 2020) MERS di tahun 2012 dan krisis finansial global direntang tahun 2007-2009 (Chang et al., 2020). Tetapi, ada hal yang belum pernah terbayangkan sebelumnya bahwa Covid-19 mampu mengubah banyak hal serta memiliki dampak yang besar pada sektor pariwisata, termasuk perjalanan internasional dan industri perhotelan (Chang et al., 2020). Penyebaran pandemi ini menimbulkan kepanikan secara global, dimana hal tersebut berkontribusi pada tren penurunan industri pariwisata (Bakar & Rosbi, 2020). Pariwisata adalah industri yang membutuhkan mobilitas manusia, dengan adanya pembatasan perjalanan dan penutupan batas-batas negara mengakibatkan sektor pariwisata menjadi sektor terdepan yang sangat terdampak dari adanya pandemi ini.

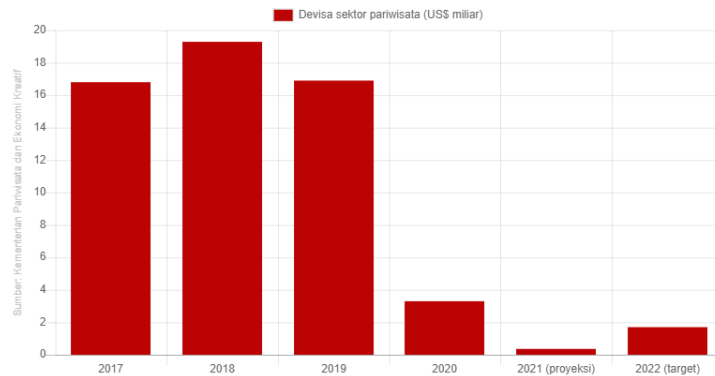
Data dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) menyatakan bahwa pada Mei 2020 terdapat 75% destinasi wisata diseluruh dunia ditutup sepenuhnya dan tercatat penurunan kedatangan turis internasional sebanyak 1 miliar orang atau lebih dari 74% dan hal ini merupakan tahun terburuk dalam pariwisata global (Winahyu, 2021). Sementara itu, World Travel and Tourism Council (WTTC) memaparkan data bahwa sekitar 50 juta orang akan kehilangan pekerjaan dari sektor pariwisata (BBC.com, 2020). Penelitian (Metaxas & Folinas, 2020) bahkan secara spesifik menyatakan bahwa pandemi ini dapat menjadi pendorong utama kehancuran industri pariwisata di setiap negara, karena mampu mempengaruhi semua aktivitas manusia seperti kegiatan sosial, agama, olah raga, seni dan budaya, serta ketidakstabilan politik dan perlambatan ekonomi global mengisyaratkan akan terjadi kontraksi global dalam bisnis pariwisata.

Indonesia sebagai negara yang juga mendapatkan banyak pemasukan dari sektor pariwisata tidak luput dari kerugian serta dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi Covid-19. Penelitian yang dilakukan oleh (Alam & Belakang, 2020) sangat menarik untuk cermati terkait dengan seberapa besar pengeluaran wisatawan baik mancanegara selama tahun 2019 mencapai 225 triliun rupiah atau mengalami kenaikan 1,88 persen dari tahun sebelumnya. Secara umum dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) sektor pariwisata mampu menyumbang devisa 16,9 miliar dollar. Dua data di atas memberikan gambaran betapa besarnya pemasukan negara melalui sektor ini, tetapi pandemi Covid-19 menghancurkan fakta tersebut sejak 2020 pendapatan sektor pariwisata menurun drastis. Data dari Alinea.id (grafik 1) memberikan gambaran penurunan pemasukan devisa dari sektor pariwisata Indonesia selama pandemi ini. Tahun 2017-2019 Indonesia sangat menikmati pemasukan yang sangat besar dari sektor ini bahkan di Tahun 2018 Indonesia mencatat pemasukan hingga 19,29 miliar dollar, tetapi di tahun 2020 Indonesia hanya mendapatkan 3,3 miliar dollar, bahkan di Tahun 2021 proyeksi pemasukan dari sektor pariwisata hanya sekitar 0,36 miliar dollar.

Di sisi lain, menurut penelitian LPEM FEB-UI (2020) sektor-sektor ekonomi yang terkait pariwisata dan terdampak langsung dengan pandemi Covid-19 adalah: industri pengolahan (akibat disrupsi *global supply chain*), transportasi (akibat pembatasan perjalanan), penyediaan akomodasi dan makan minum (akibat pembatasan perjalanan), dan terakhir adalah perdagangan besar dan eceran (akibat penerapan *physical distancing*) (Revindo et al., 2020). Penelitian ini sejalan dengan pendapat (Sugihamretha, 2020) bahwa usaha pariwisata

menyerap tenaga kerja paling besar adalah usaha penyedia makan minum dan perdagangan yang memiliki pangsa mencapai 48,79 persen dan 36,76 persen, kedua usaha ini sangat berkaitan dengan aktivitas para wisatawan dalam perjalanan yang mereka lakukan, baik sebelum, selama perjalanan maupun setelah melakukan perjalanan.

Grafik 1. Perkembangan Devisa Pariwisata



Sumber: Perkembangan devisa pariwisata - Grafik Alinea ID

Fakta penurunan pendapatan devisa dari sektor pariwisata tersebut bisa dipahami akibat berbagai kebijakan yang dilakukan oleh banyak negara dalam upayanya mencegah penularan Covid-19. Kebijakan yang paling banyak diambil oleh negara-negara dalam mengatasi penyebaran virus ini adalah dengan melakukan karantina atau *lockdown* terhadap beberapa kota secara parsial dan bahkan penutupan seluruh wilayah negara. Kebijakan minimal yang dilakukan oleh berbagai negara adalah pembatasan sosial (*social distancing*) dan kontak fisik (*physical distancing*) serta pembatasan perjalanan baik di dalam wilayah maupun secara internasional. Temuan oleh (Milne & Xie, 2020) menyebutkan bahwa pembatasan jarak sosial memiliki tujuan untuk mencegah penularan dengan meminimalkan kontak. Hasil penelitian tersebut mencatat dengan penundaan kegiatan hingga minggu keenam dari kasus infeksi yang terdeteksi serta dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, 90 persen ketidakhadiran di tempat kerja dan pengurangan 70 persen dalam kontak pada seluruh komunitas menghasilkan 66 persen pengurangan tingkat penyeberluasan infeksi.

Kebijakan serupa juga diambil Indonesia dalam usaha mengurangi penyebaran pandemi Covid-19 melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 pemerintah Indonesia pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam, dan mewajibkan setiap pemangku kepentingan yang berada di pemerintah pusat dan bersama pemerintah daerah untuk tunduk dan taat kepada kebijakan penanggulangan Covid-19 tersebut. Implikasi kemudian adalah diberlakukannya "Pembatasan Sosial Berskala besar" (PSBB) di sejumlah daerah di Indonesia dan pelarangan segala jenis kegiatan pariwisata yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020 (Paludi, 2022).

Pembatasan sosial dan fisik yang dilakukan selama pandemi oleh banyak negara termasuk Indonesia memang telah memberikan kontraksi yang dalam terhadap ekonomi khususnya di sektor pariwisata. Meskipun demikian, terdapat suatu peluang yang terlihat selama pandemi ini, yaitu pada sektor teknologi informasi. Digitalisasi merupakan sebuah peluang yang harus dimaksimalkan oleh Indonesia, Selain itu, transformasi ini menekankan bahwa dalam strategi 'e-tourism 4.0' yang kental dengan internet, kesiapan infrastuktur, responsifitas sumber daya manusia dan kolaborasi paripurna dengan stakeholder lain merupakan kunci utama. Internet dan digitalisasi menjadi jembatan yang menghubungkan kebuntuan akibat kemampuan pergerakan semua sektor termasuk pariwisata nasional. Pada masa pandemi, seolah digitalisasi menjadi "pelarian" semata dari dimensi offline dan merupakan hal baru dalam industri pariwisata yang mungkin luput dari kajian maupun

perencanaan yang sudah ada. Adapun hal "baru" yang dimaksud adalah berlangsungnya webinar, *e-commerce*, *virtual tour* serta platform yang memungkinkan para operator pariwisata untuk menawarkan produk dan layanan mereka secara daring. Hal ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru, hanya saja terdapat lonjakan tajam sebagaimana dipengaruhi masyarakat Indonesia yang dominan *stay at home* akibat *social distancing* (Yamin et al., 2021).

Aplikasi sistem *e-tourism* ini memberikan informasi tentang objek wisata dan paket wisata, serta semua komponen yang mendukungnya, dan berinteraksi dengan wisatawan yang membutuhkan informasi melalui website pariwisata. Tampilan yang menarik dengan isi yang lengkap, akurat dan selalu update informasi yang diberikan oleh situs wisata memberikan insentif bagi wisatawan untuk terus mengunjungi situs dan mempelajari lebih lanjut tentang objek wisata yang disediakan. Teknologi internet tidak hanya sebagai media untuk memberikan informasi, tetapi juga dapat memudahkan wisatawan untuk berinteraksi dengan operator wisata. Sangat mudah dan menghemat uang dan waktu, terutama karena tidak perlu pergi sendiri untuk memesan kamar hotel, tiket perjalanan, tiket pertunjukan dan semua informasi wisata lainnya (Kristiana, 2018). Hendriksson (2005) menyatakan bahwa ada empat karakteristik utama dalam mengembangkan *e-tourism*, yaitu 1. Produk Pariwisata 2. Dampak pada mata rantai yang ditimbulkan oleh industri pariwisata. 3. Struktur industri pariwisata. 4. Tersedianya peralatan komunikasi dan teknologi informasi. Lebih lanjut Hendriksson menjelaskan bahwa dalam mempersiapkan karakteristik *e-tourism* perlu dikembangkan untuk mencapai perbaikan di pasar elektronik sebagai berikut: a. warisan sistem yang ada b. Keanekaragaman informasi c. Tidak ada standar global untuk pertukaran data dan d. Operasi tak terbatas (Meilin & Xiaomiao, n.d.).

Selain peluang untuk terus memanfaatkan teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata di era pandemi ini, ada sisi lain yang juga menjadi peluang sekaligus hikmah terjadinya pandemi Covid-19, yaitu terjadinya pemulihan lingkungan dan alam sekitar. Mayoritas destinasi tujuan wisata dunia adalah wisata alam, sehingga eksploitasi terhadap alam terjadi terus menerus. Indonesia yang juga memiliki potensi wisata alam yang besar juga tidak luput dari pemulihan ini akibat adanya pandemi Covid-19, menurut (Ketut et al., 2020) pandemi ini memiliki dampak positif dengan adanya penurunan polusi udara pada kota-kota besar di Indonesia bahkan di beberapa kota internasional dengan kondisi kegiatan yang sangat padat. Lingkungan pariwisata juga terdampak baik dari menurunnya kegiatan perjalanan pada pariwisata di seluruh dunia. Terhentinya kegiatan pariwisata membuat ekosistem alam dapat memulihkan lingkungannya dan terhindar dari eksploitasi manusia.

Pengembangan pariwisata tidak dipungkiri berdampak positif bagi pendapatan atau pemasukan bagi devisa negara, tetapi disisi lain eksploitasi berlebihan dapat membuat alam dan lingkungan di wilayah destinasi wisata menjadi rusak atau bahkan hilang sama sekali. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan khususnya di pasal 5 huruf d menyatakan bahwa industri pariwisata harus dilaksanakan dengan prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan (Widiati & Permatasari, 2022). Industri pariwisata yang dikembangkan dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari definisi pariwisata berkelanjutan. Pembahasan mengenai pariwisata berkelanjutan sendiri telah menjadi pembahasan sejak tahun 1960-an ketika pertumbuhan pariwisata, khususnya pariwisata internasional, dan penyebaran global sangat masif dan tidak dapat dihentikan. Sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan pembahasan mengenai arti penting pariwisata berkelanjutan telah mencakup semua bentuk pembangunan dan kegiatan ekonomi termasuk pariwisata, dalam hal ini Coccossis (1996) menyatakan bahwa terdapat empat interseksi dalam mendefinisikan pariwisata berkelanjutan, yaitu a. keberlanjutan ekonomi pariwisata, b. pariwisata berkelanjutan secara ekologis, c. pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan d.

pariwisata sebagai bagian dari strategi untuk pembangunan berkelanjutan (Khoshnevis Yazdi, 2012).

Mengelaborasi perkembangan teknologi informasi dan pariwisata berkelanjutan selama pandemi covid-19 merupakan hal yang sangat mungkin diwujudkan. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian (Akbar, 2021) bahwa selama ini pemanfaatan teknologi informasi dalam industri pariwisata di Indonesia hanya sebagai *tools* pemasaran baik itu dari proses pembuatan video, hingga pemasaran produknya, hal tersebut sangat efektif tetapi potensi teknologi informasi dalam mendukung perkembangan pariwisata belum dirasa maksimal. Masih dalam penelitiannya Akbar juga menjelaskan salah satu aplikasi dalam teknologi informasi yang bisa dikembangkan lebih lanjut adalah *computer simulation*, dimana aplikasi ini bertujuan untuk melakukan simulasi dari variabel yang menggambarkan keadaan di lapangan untuk mendapatkan skenario akhir. *Computer simulation* dapat digunakan untuk menganalisa dan memprediksi situasi dari berbagai kebijakan yang diambil sehingga kebijakan tersebut dapat sejalan dengan indikator pariwisata berkelanjutan.

Terkait dengan penelitian sebelumnya yang banyak membahas mengenai teknologi informasi dan pariwisata berkelanjutan, selanjutnya artikel ini mencoba untuk menggali lebih jauh bagaimana peran teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia pasca pandemi Covid 19. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia telah menggunakan kerangka pemulihan pariwisata dunia yang dirancang oleh UNWTO dan diterjemahkannya melalui program kebijakan CHSE, dimana program ini sengaja dilakukan dalam menghadapi era *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru, setelah kebijakan vaksinasi dan pelonggaran kegiatan masyarakat dirasa cukup untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19.

II. METODOLOGI

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitik. Menurut Locke, Spirduso, dan Silverman (1987) pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk memahami situasi, peristiwa, kelompok, atau interaksi sosial tertentu (Creswell, 2014). Sukmadinata (2006) dalam (Ikbar, 2014) Studi deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada, baik yang alami maupun buatan. Fenomena dapat berupa benda, bentuk, kegiatan, ciri, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Studi deskriptif adalah studi yang mencoba menjelaskan dan menafsirkan sesuatu, misalnya keadaan atau konteks yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, hasil atau dampak yang terjadi, atau tren yang sedang berlangsung (Ikbar, 2014). Tipe penelitian deskriptif digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan. Pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan survei literatur, laporan hasil penelitian, atau dari hasil studi eksplorasi (Silalahi, 2012).

III. ANALISIS

A. Peran Teknologi Informasi Di Masa Pandemi

Munculnya pandemi COVID 19 sangat berdampak pada kemerosotan berbagai sektor di dunia khususnya kemunduran dalam sektor ekonomi. Ekonomi global memiliki peranan penting dalam keberlangsungan sektor lain dan saling terikat satu sama lain demi keberlanjutan kehidupan manusia. Peran penting tersebut yang mendorong manusia atau masyarakat global untuk mencari solusi yang dapat diimplementasikan sehingga pergerakan sektor ekonomi global serta sektor lainnya tidak terhambat dengan adanya pandemi COVID 19. Oleh karena keadaan tersebut masyarakat dunia dipaksa untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjadi solusi

dalam permasalahan tersebut. Teknologi informasi sudah ada dan terus berkembang bahkan sebelum terjadinya pandemi COVID 19. Produk dari perkembangan teknologi informasi yang paling mencolok adalah Internet yang menjadi salah satu pemicu dalam kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat. Internet menjadi sebuah sarana dalam pertukaran dan arus informasi global yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, hal tersebut juga menjadi faktor pendorong dalam kemunculan globalisasi di dunia.

Penggunaan teknologi informasi khususnya internet tercatat semakin mengalami peningkatan dari tahun ketahun, akan tetapi terdapat peningkatan yang cukup besar pada masa pandemi COVID 19 jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, berdasarkan data yang didapatkan dari bps (Badan Pusat Statistik) bahwa penggunaan internet dalam rumah tangga di Indonesia naik hingga 4,43 poin dari tahun sebelumnya pada 2019 sebesar 73,75% menjadi 78,18% pada tahun 2020. Selain itu juga terdapat peningkatan dalam kepemilikan computer pada setiap rumah tangga mengalami kenaikan menjadi 18,83% dari sebelumnya pada tahun 2019 yaitu 18,78%. Kedua presentasi tersebut ikut berpengaruh dalam kenaikan indeks pembangunan teknologi informasi Indonesia yang menjadi 5,59 pada tahun 2020 yang pada tahun sebelumnya mendapatkan skor 5,32 dari skala 0-10, skor tersebut memiliki nilai pertumbuhan sebesar 5,08 persen dari 2019 hingga 2020. Dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kenaikan indeks pembangunan teknologi informasi Indonesia disebabkan karena terdapatnya kondisi yang memaksa masyarakat untuk dapat memaksimalkan penggunaan internet di masa pandemi

Secara khusus bahwa peran penting teknologi informasi juga dapat dibuktikan dengan adanya kenaikan tingkat pengguna terutama dalam aplikasi atau *software video conference* dan *e-commerce* di Indonesia. Berdasarkan pernyataan Menurut Plt Teknologi Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa bahwa terjadi kenaikan trafik data yang signifikan, lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa kenaikan trafik data tersebut terjadi dengan adanya kenaikan pengguna layanan *video conference* khususnya Zoom dan Google Hangouts serta *software* serupa lainnya yang secara signifikan mengalami peningkatan 20 hingga 23 persen, hal tersebut disebabkan karena sebelum adanya pandemi COVID 19 layanan *video conference* masih jarang digunakan (CNN, 2020). Kenaikan pengguna juga terjadi pada *software e-commerce* di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Iprice terjadi kenaikan pengguna yang cukup signifikan pada beberapa aplikasi *e-commerce* khususnya Tokopedia yang memiliki kenaikan menjadi 86,1 juta pengguna pada kuartal ke 2 2020 dari 69,8 juta pada kuartal ke 1 2020, begitu juga dengan Shopee yang mengalami kenaikan menjadi 93, 4 juta pengguna pada kuartal ke 2 2020 dari 71,5 juta pada kuartal ke 1 2020 (Rakhmawati et al., 2021).

Grafik 2. Perkembangan Pengguna Aplikasi E-commerce



Sumber: Peta E-commerce Indonesia- Iprice.co.id, 2021

Dari data di atas terlihat kenaikan pengguna pada *software* atau aplikasi *video conference* dan *e-commerce* membuktikan bahwa teknologi informasi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat khususnya pada masa pandemi dengan berbagai peraturan dan kondisi yang memaksa masyarakat tersebut untuk membatasi segala bentuk kegiatan di luar rumah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat dalam menjalankan kembali berbagai aktivitas dengan adanya berbagai pembatasan. Teknologi informasi juga berperan penting dalam memberikan informasi terkait COVID 19 kepada masyarakat dan di masa pandemi ini sikap dan perilaku masyarakat sangat ditentukan oleh informasi yang didapatkan (Dai, 2020).

B. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Sektor Pariwisata

Kemajuan teknologi informasi juga ikut mempengaruhi sektor pariwisata, bentuk pariwisata yang juga memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah *e-tourism* dan *smart tourism*. Pertama adalah *e-tourism* yang merupakan pariwisata dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk semakin meningkatkan hubungan pariwisata, membantu serta meningkatkan proses bisnis perusahaan yang bergerak pada industri pariwisata, serta meningkatkan *knowledge sharing* dengan memanfaatkan basis data informasi pariwisata, basis data pengguna, pembayaran elektronik, serta menggunakan jaringan komputer sebagai sarana pengiriman dan transaksi jasa, sebagai bagian dari *e-commerce* (Lu et al., 2002). Pada *e-tourism* terdapat empat karakteristik utama dalam pengembangannya menurut Henrickson (2005), yaitu produk pariwisata, dampak berantai yang ditimbulkan oleh industri pariwisata, struktur industri pariwisata, dan ketersediaan perangkat teknologi informasi. Lebih lanjut Henriksson menjelaskan bahwa dalam mempersiapkan empat karakteristik tersebut dibutuhkan pembangunan untuk mencapai penyempurnaan pasar elektronik seperti warisan sistem yang telah ada, keberagaman informasi, tidak ada standar global dalam penukaran data, operasi tanpa batas. dari penjelasan dan karakteristik tersebut dapat

dikatakan bahwa *e-tourism* berfokus pada sistem online, mulai dari *online booking* hingga promosi yang semuanya terintegrasi sebagai bagian dari *e-commerce*.

Kedua adalah *smart tourism* yang secara garis besar didefinisikan sebagai suatu *platform* pariwisata yang mengedepankan penerapan teknologi komunikasi dan informasi secara terintegrasi. Dalam definisi lain *smart tourism* adalah perkembangan logis dari pariwisata tradisional yang berkembang menjadi *e-tourism* karena dasar inovasi dan orientasi teknologi industri dan konsumen diletakkan di awal dengan adopsi TI yang luas dalam kegiatan pariwisata (werthner & ricci, 2004) (Putra et al., 2020). Suatu pariwisata dapat menjadi *smart tourism* jika dapat memanfaatkan *big data* kepariwisataan, dikelola oleh DMO (*Destination management organization*) pariwisata dan perusahaan teknologi adanya permintaan dari wisatawan *smart*, didukung dengan infrastruktur berbasis teknologi dan *smart technology*, dan memperhatikan *digital marketing* yang efisien (Femenia-Serra & Neuhofer, 2018). Pengintegrasian teknologi informasi yang diterapkan dalam platform ini bertujuan untuk semakin mengoptimalkan informasi dan pelayanan yang efisien untuk wisatawan. Terdapat beberapa tujuan dari adanya *smart tourism* ini yaitu pertama membuat database yang berkaitan dengan sumberdaya pariwisata yang berfokus pada peningkatan wisata melalui identifikasi dan pemantauan data yang didukung dengan perkembangan *Internet of Things* dan *Cloud Computing*. Memajukan daerah destinasi wisata dengan berbagai inovasi industri pariwisata yang pada akhirnya juga bertujuan bagi perkembangan pariwisata itu sendiri terkait promosi, pelayanan dan manajemen pariwisata. Ketiga adalah memperluas skala industri pariwisata dengan *platform* informasi yang *real time* (website, media sosial, dan lainnya), mengintegrasikan penyedia jasa pariwisata dengan peran masyarakat lokal (Nur, 2021). Elaborasi teknologi informasi dan sektor pariwisata tersebut memiliki konsep yang serupa, hanya saja konsep *smart tourism* dapat dikatakan sebagai bentuk lanjutan yang lebih terintegrasi. Keduanya merupakan bentuk inovasi dari penggabungan teknologi informasi dengan sektor pariwisata yang memanfaatkan secara optimal teknologi informasi khususnya internet.

C. TI Sebagai Katalisator Kebangkitan Sektor Pariwisata Pasca Pandemi

Sektor pariwisata di Indonesia juga telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan *e-tourism* dan *smart tourism* yang terintegrasi. Kemenparekraf yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata telah membuat program yang juga memanfaatkan teknologi informasi, yaitu *wonderful Indonesia* dan pesona Indonesia. Kedua program tersebut menggunakan *website* sebagai sarana informasi, *booking*, dan promosi. Dua program tersebut menjadi salah satu pemanfaatan teknologi informasi khususnya internet yang paling optimal dalam sektor pariwisata. Dengan munculnya fenomena pandemi COVID 19 pemanfaatan internet dalam sektor pariwisata ini dapat menunjang, mempercepat dan menjadi katalisator dalam kebangkitan sektor pariwisata pasca pandemi yang sempat mati suri. Penggunaan teknologi informasi sebagai katalisator berfokus pada teknologi informasi sebagai sarana penunjang kegiatan berwisata di lokasi pariwisata dan teknologi informasi sebagai sarana promosi digital. Pertama, adalah teknologi informasi sebagai sarana penunjang kegiatan berwisata seperti penggunaan *cashless payment*, komputerisasi, wifi, dan bentuk teknologi informasi lainnya. Penggunaan teknologi tersebut dapat menarik kembali minat wisatawan untuk berwisata pasca pandemi, hal tersebut sangat berdampak melihat dari kebutuhan wisatawan pasca pandemi yang menginginkan kegiatan pariwisata yang dapat menjaga keamanan Kesehatan mereka. Dengan berpegang pada prinsip ekonomi yaitu permintaan dan penawaran maka upaya untuk menjaga rasa aman wisatawan dapat menjadi katalisator dalam menarik kembali wisatawan untuk berwisata pasca pandemi.

Kedua adalah penggunaan teknologi informasi sebagai sarana promosi digital. Penggunaan Internet dalam menciptakan website dan berbagai platform promosi merupakan salah satu upaya yang efektif dalam menarik kembali minat wisatawan untuk berwisata dan menghidupkan sektor pariwisata pasca pandemi. Kenaikan pengguna internet tiap tahunnya terutama pada masa dan pasca pandemi menjadi alasan kuat untuk melakukan berbagai promosi digital mulai dari penggunaan berbagai media sosial sebagai sarana promosi hingga menawarkan promosi dan paket paket menarik melalui *website*. Tidak hanya sebatas penggunaan internet, peran teknologi informasi dalam menjadi katalisator kebangkitan pariwisata di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya penggunaan *big data* sebagai acuan. *Big data* dapat didefinisikan sebagai sebuah *dataset* informasi yang besar, beragam, terstruktur dan tidak terstruktur yang dihasilkan dan didapatkan oleh organisasi, individu, atau mesin dan transmisi pada tingkatan yang terus meningkat (Ghotkar & Rokde, 2016). Data tersebut biasa di karakterisasi berdasarkan 5V yaitu *value* (sejauh mana data dapat diproses dan dipahami), *veracity* (kualitas dan integritas data), *variety* (struktur atau tidak terstrukturnya bentuk data), *velocity* (kecepatan dalam pembuatan, penyimpanan, penganalisisan, dan penggambaran data), *volume* (banyak-sedikitnya data) (Garg, 2019) *Big data* menjadi sangat penting terutama sebagai sumber informasi terkait apa yang dibutuhkan oleh sektor pariwisata. Dengan menggunakan analisis *big data*, pemerintah, pengelola, dan aktor yang terlibat dalam sektor pariwisata dapat memetakan terkait hal-hal yang paling terdampak dan kurang terdampak dengan hal tersebut maka promosi yang dilakukan dapat lebih tepat dan sangat efektif dalam membangkitkan sektor pariwisata pasca pandemi.

Berdasarkan laporan yang diberikan oleh UNWTO pada tahun 2021 bahwa terdapat beberapa studi kasus penggunaan Analisis big data dalam membantu bangkitnya sektor pariwisata pasca pandemi. Pertama adalah program "Macao Ready Go!" Yang diluncurkan oleh pemerintah sektor pariwisata Macau. Program tersebut menggunakan *big data* yang didapatkan dari penggunaan kupon digital yang digunakan oleh para wisatawan, dengan menganalisis dari data penukaran kupon yang terjadi, pemerintah yang bergerak pada sektor pariwisata dapat memetakan mana produk yang memiliki minat terbesar dan menghasilkan keuntungan tertinggi. Program tersebut juga telah memungkinkan perjalanan aman bagi 17 juta wisatawan antara bulan mei hingga oktober 2020. kedua adalah program "SingapoRediscovery" yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, untuk menarik minat wisatawan dan mengajak wisatawan untuk menjelajahi sisi lain dari negara singapura melalui berbagai macam promosi dan kerjasama dengan agensi perjalanan Klook. Hampir sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah Macau, pemerintah Singapura mendapatkan *big data* melalui persebaran dan penukaran *voucher*, sehingga dapat memetakan lebih baik terkait segmentasi dan pengembangan produk untuk fase promosi selanjutnya. dari kedua studi kasus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan *big data* merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam *recovery* kembali sektor pariwisata pasca pandemi.

Pariwisata Berkelanjutan

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengubah berbagai aktivitas manusia di seluruh dunia, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap aktivitas sosial, perdagangan, dan perjalanan, terutama terkait keberlanjutan industri pariwisata di masa depan. Menurut data, industri pariwisata memiliki 900 juta kegiatan setiap tahun di seluruh dunia, dan pariwisata selalu terkait dengan alam, menjadikannya ancaman utama bagi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di seluruh dunia. Oleh karena itu, diperlukan upaya agar pariwisata lebih berkelanjutan bagi seluruh lapisan dan tingkatan, seperti biro perjalanan internasional besar hingga pemilik usaha kecil pariwisata maupun

perorangan. Tantangan pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah memaksimalkan dampak positif pariwisata, meningkatkan dan menyalurkan manfaatnya dengan baik, dan menghindari dampak negatif. Selain itu, mengacu pada perbedaan sumber daya alam, budaya, dan ekonomi pariwisata yang mempengaruhi berbagai organisasi internasional yang telah membuat definisi, prinsip, piagam, kode, dan kriteria keberlanjutan dalam pariwisata (International Labour Organization, 2012).

Sebelum pandemi Covid-19, industri pariwisata merupakan sektor yang berkembang pesat yang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi tetapi juga menciptakan peluang kerja (Begum, 2014). Akan tetapi, pada masa pandemi Covid-19 menjadi sektor yang paling terdampak secara ekonomi. Pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi kenormalan di semua sektor kehidupan termasuk pada sektor wisata. Pemulihan aktivitas sektor wisata harus mewaspadaai munculnya *cluster* baru pada destinasi wisata, yang disebabkan terabaikannya protokol kesehatan. Kunci utama pemulihan aktivitas wisata adalah harus disiplin menerapkan protokol kesehatan yang *rigid*. Ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19, mengharuskan kita untuk mampu beradaptasi dengan kondisi baru, prasyarat baru (*social and physical distancing*), tatanan baru, baik fisik, sosial dan kesehatan, dengan mempersiapkan *protocol new normal order*.

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) muncul diakibatkan oleh dampak buruk dari kegiatan pariwisata, terutama pada masa tumbuh dan berkembangnya pariwisata massal (*mass tourism*) di berbagai destinasi pariwisata di dunia. Pariwisata massal pada waktu itu sangat identik dengan perencanaan yang buruk, tidak terkendali (sporadis), dan terkesan hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi semata atau materialistis, sehingga seringkali dapat mengikis atau mengurangi kemampuan daya dukung, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya sosial budaya. Dampak buruk tersebut dapat merusak keberlangsungan ekonomi masyarakat secara jangka panjang. Oleh sebab itu, munculah konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang diharapkan bisa meminimalkan dampak buruk atau dampak negatif pembangunan pariwisata secara jangka panjang.

Konsep pariwisata berkelanjutan, yang diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED dalam Laporan Brundtland, 1985), menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan saat ini dan tidak mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya. Demikian pula, *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) mendefinisikannya sebagai pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan sekarang dan di masa depan, menjawab kebutuhan industri, lingkungan, dan komunitas tuan rumah (UNWTO, 2005).

Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* menitikberatkan pada adanya unsur berkelanjutan dalam pengembangan industri pariwisata yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang muncul akibat berkembang pesatnya industri pariwisata. Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* juga menitikberatkan pada pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal demi kesejahteraan masyarakat lokal pula. Berkelanjutan dalam hal ini tidak hanya mempertimbangkan persoalan atau isu lingkungan saja namun juga persoalan ekonomi, sosial, budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan dan estetika.

Pariwisata berkelanjutan secara umum memiliki tiga dimensi, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Menurut Choi dan Sirakaya (2006), dimensi ekonomi pariwisata

berkelanjutan berarti tidak merusak sumber daya yang dikomersialkan untuk kegiatan wisata dan untuk jangka panjang. Dimensi sosial mengurangi perpecahan sosial budaya dengan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antar masyarakat melalui inisiatif kerjasama dan upaya jejaring sosial antar kelompok lokal, yang membutuhkan perhatian dan penekanan pada partisipasi masyarakat lokal. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Masyarakat di sekitar lokasi wisata berpartisipasi dalam kegiatan wisata karena motif ekonomi, seperti tambahan pendapatan dan kesempatan kerja (Tosun, 2000).

Ketiga prinsip dasar pariwisata berkelanjutan (*triple bottom lines*) tersebut selanjutnya dikembangkan lagi menjadi 5 (lima) prinsip oleh UNWTO dengan mengacu pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari UNDP di tahun 2015 yaitu prinsip keseimbangan antara *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership*, yang sekarang dikenal dengan singkatan 5 Ps, dengan 17 indikator yang menyertainya. 5 Ps tersebut yaitu, *People*, di mana pembangunan di sektor apapun termasuk kepariwisataan harus bertujuan untuk menghentikan kemiskinan (*poverty*) dan kelaparan (*hunger*), dalam segala bentuk dan dimensi apapun, dan juga untuk memastikan bahwa semua manusia memiliki kesetaraan dalam martabat dan dalam lingkungan yang sehat. *Planet*, dalam SDGs, pembangunan di sektor apapun termasuk kepariwisataan harus bertujuan untuk melindungi planet atau sumberdaya alam beserta iklim yang dapat selalu mendukung kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Selanjutnya, *Prosperity*, dalam pembangunan di sektor apapun termasuk kepariwisataan harus bertujuan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera, kebutuhan hidup yang terpenuhi, serta memastikan kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berjalan selaras dengan alam. Kemudian, *Peace*, dalam pembangunan di sektor apapun termasuk kepariwisataan harus bertujuan untuk menumbuhkan masyarakat yang menjunjung kedamaian, keadilan, dan inklusifitas. Terakhir, *Partnership*, di mana dalam pembangunan di sektor apapun termasuk kepariwisataan harus bertujuan untuk menguatkan semangat solidaritas dan kolaborasi global, sehingga permasalahan lintas geografis dan lintas sektoral dapat ditanggulangi dengan baik.

Selain dari kelima prinsip yang dikembangkan oleh UNWTO tersebut, terdapat juga kerangka kerja lain dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu UNWTO *Global Code of Ethics for Tourism* (GCET), yang merupakan seperangkat prinsip komprehensif yang dirancang untuk memandu para pemain kunci dalam pengembangan pariwisata. Ditujukan kepada pemerintah, industri perjalanan, komunitas, dan turis, yang bertujuan untuk membantu memaksimalkan manfaat sektor ini sambil meminimalkan potensi dampak negatifnya terhadap lingkungan, warisan budaya, dan masyarakat di seluruh dunia. GCET terdiri dari 10 pasal yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan, yaitu:

1. Kontribusi pariwisata untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antar manusia dan masyarakat (*Tourism's contribution to mutual understanding and respect between peoples and societies*).
2. Pariwisata sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorangan maupun secara kolektif (*Tourism as a vehicle for individual and collective fulfilment*).
3. Pariwisata sebagai faktor pembangunan berkelanjutan (*Tourism, a factor of sustainable development*).
4. Pariwisata sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri (*Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and contributor to its enhancement*).

5. Pariwisata adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan (*Tourism, a beneficial activity for host countries and communities*).
6. Kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan (*Obligations of stakeholders in tourism development*).
7. Hak dasar berwisata (*Right to tourism*).
8. Kebebasan bergerak wisatawan (*Liberty of tourist movements*).
9. Hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata (*Rights of the workers and entrepreneurs in the tourism industry*).
10. Penerapan prinsip-prinsip Kode Etik Pariwisata Dunia (*Implementation of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism*).

Kerangka kerja lain dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan pada tingkat global yaitu, *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)* yang merupakan organisasi non-pemerintah internasional yang didirikan pada tahun 2007 dengan nama *Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria*, bergerak di bidang keberlanjutan dalam pariwisata, dan sertifikasi pariwisata berkelanjutan. Misi GSTC adalah menjadi agen perubahan di dunia perjalanan dan pariwisata berkelanjutan dengan mendorong peningkatan pengetahuan, pemahaman, adopsi, dan permintaan akan praktik pariwisata berkelanjutan.

D. Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 tengah memasuki era normal baru. Perubahan paradigma tengah berlangsung dan sejumlah protokol baru akan diterapkan untuk menyambut kondisi normal baru di industri pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengemukakan, sektor pariwisata yang menyerap banyak lapangan kerja sangat terpuak akibat pandemi Covid-19. Sementara sulit untuk memprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir. Akan tetapi, industri pariwisata harus terus berlanjut dan memasuki era normal baru. Era normal baru membawa peran baru, jalan baru, dan ekspektasi di sektor pariwisata. Digitalisasi berkembang cepat di luar dugaan. Bisnis pariwisata harus beradaptasi terhadap kondisi yang baru serta mengatur kembali strategi model bisnis agar bisa bertahan di era normal baru, dengan menyesuaikan perkembangan teknologi (Grahadyarin, 2020).

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk melakukan inovasi dan perbaikan di sektor pariwisata. Sehingga dengan adanya perubahan tren di pariwisata global saat ini diharapkan Indonesia mampu beradaptasi. Dalam hal ini perubahan tren di pariwisata akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang seperti *solo travel tour*, *virtual tourism*, serta *staycation* dimana isu *health*, *hygiene*, dan *safety* akan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan yang ingin berwisata. Kemudian bagi para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus betul-betul mengantisipasi dan tidak tergesa-gesa untuk membuka destinasi wisata agar tak ada lagi *imported case* yang dapat berdampak buruk pada citra pariwisata. Disamping itu media memiliki peran yang penting dalam pembentukan stigma masyarakat terutama di masa pandemi saat ini. Media menjadi salah satu pusat jembatan informasi antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk informasi mengenai perkembangan sektor pariwisata yang seharusnya dapat menjadi harapan bagi masyarakat untuk *survive* dan bersiap memulai *New Normal* dengan protokol khusus sektor pariwisata. Namun realitanya justru banyak berita negatif yang beredar, tingginya antusiasme masyarakat dalam memandang berita panas seperti angka kematian menyebabkan media terus menggoreng isu tersebut untuk mendapat *traffic* penonton dengan jumlah yang tinggi, sehingga terbentuk kepanikan masyarakat

yang membuat sebagian masyarakat kehilangan harapan untuk bertahan di situasi sulit seperti saat ini (Ekonomi, 2020).

Terdapat empat pilar utama yang menjadi pedoman dalam membangun destinasi wisata berkelanjutan di Indonesia, antara lain:

1. Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan. Artinya, perencanaan pariwisata harus mampu menjaga tingkat kepuasan wisatawan serta memastikan keselamatan dan keamanan wisatawan maupun komunitas atau masyarakat lokal di kawasan destinasi wisata.
2. Pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal. Pembangunan pariwisata harus bisa menjamin adanya peningkatan perekonomian dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan tempat wisata.
3. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung. Pembangunan pariwisata harus menghormati nilai-nilai sosio-budaya komunitas tempat dibangunnya destinasi wisata, melestarikan warisan budaya tradisional mereka, serta berkontribusi pada pemahaman dan toleransi antarbudaya.
4. Pelestarian lingkungan. Tujuan perencanaan pariwisata berkelanjutan adalah untuk memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada (termasuk flora dan fauna) secara optimal. Tetapi, perlu diingat bahwa dalam pembangunannya harus tetap mempertimbangkan kondisi lingkungan dan risiko yang ditimbulkan.

Selain dari keempat pilar utama yang menjadi pedoman dalam membangun destinasi wisata berkelanjutan di Indonesia, terdapat juga 5 strategi *Sustainable Tourism Development* (STDev) di Indonesia. Pembangunan pariwisata berkelanjutan memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini dan daerah tuan rumah sambil melindungi dan meningkatkan peluang untuk masa depan. Hal ini mengarah pada pengelolaan semua sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat terpenuhi dengan tetap menjaga integritas budaya, proses ekologi esensial, dan keanekaragaman hayati, dan sistem penyangga kehidupan. Program STDev diawali dengan *Sustainable Tourism Destination* (STD), yang merupakan program yang terkait dengan *sustainable destination leveling*, pentingnya pedoman/standar destinasi pariwisata berkelanjutan sebagai acuan bagi destinasi untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, yang mencakup Pedoman Nasional Program Pariwisata Berkelanjutan, Platform Strategi Pariwisata Berkelanjutan, Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan, MoU dan Kontrak Destinasi tentang Program Pelatihan Asesor Berkelanjutan, Nasional dan Internasional, Pelatihan Fasilitator dan Mitra Lokal, Konferensi Internasional, Konferensi Nasional STD, Prototyping 10 Destinasi Prioritas. Kemudian dilanjutkan dengan *Sustainable Tourism Observatory* (STO), adalah destinasi wisata yang menjadi fokus utama lokasi pemantauan penerapan pariwisata berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pusat *Monitoring Center Sustainable Tourism Observatory* (MCSTO), yang mana merupakan institusi baik itu Universitas/Lembaga Penelitian yang memonitoring dampak Ekonomi, Lingkungan, Sosial Budaya melalui penggunaan aplikasi/instrumen pedoman standar DPB, memberikan pendampingan memonitor dan mengevaluasi destinasi pariwisata melalui indikator pariwisata berkelanjutan pada level destinasi pariwisata, di Indonesia, pemantauan beberapa destinasi yang dikerjasamakan dengan lima universitas yaitu destinasi Sleman, Yogyakarta bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, Pangandaran, Jawa Barat dengan ITB, Sanur, Bali bekerja sama dengan Universitas Udayana, Sesaut, NTB bekerja sama dengan Universitas Mataram, dan Pangururan Samosir, Sumatera Utara bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara. Sementara itu, *Sustainable Tourism Certification* (STC) merupakan rangkaian ketiga dari keseluruhan program STDev tersebut, yang merupakan program pemberian sertifikasi

bagi destinasi yang telah mempraktikkan/menerapkan indikator pariwisata berkelanjutan. Sertifikasi tersebut dilaksanakan oleh *Indonesian Sustainable Tourism Council (ISTC)* yang sudah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional dan rekognisi dari *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)*, di mana skema sertifikasi yang tersedia yaitu *certified destination*, *certified accommodation*, *certified tour operator*, *certified tourism village*, dan *certified CHSE*. Program STDev keempat yaitu, *Sustainable Tourism Industries (STI)*, merupakan program yang terkait dengan levelling up usaha (industri) pariwisata, hotel, restoran, homestay, tour operator dan usaha lainnya, yang mana pentingnya panduan standar industri pariwisata berkelanjutan sebagai acuan dalam operasional usaha, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Kemudian, yang terakhir yaitu *Sustainable Tourism Management & Marketing (STM)*, merupakan program yang terkait dengan pengembangan produk pariwisata, konsumsi produk pariwisata yang lebih bertanggungjawab, serta tata kelola destinasi (*visitors management*, *carrying capacity*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip/indikator standar pariwisata berkelanjutan.

E. Pemulihan Sektor Pariwisata Indonesia Pasca Pandemi

Berdasarkan data *World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF)*, ekonomi global diperkirakan tumbuh 5,9% pada tahun 2021 setelah sempat mengalami pertumbuhan negatif 3,3% di tahun 2020. Di tahun ketiga pandemi Covid-19 ini, kompleksitas semakin tinggi dengan kondisi global yang sebelumnya mulai pulih perlahan, menurun lagi oleh gelombang baru Omicron. Dampak krisis kesehatan terhadap sektor ekonomi dan sosial sangat nyata, terutama yang dialami oleh sektor pariwisata. Berdasarkan data *UN World Tourism Organization (UNWTO)*, pandemi berdampak pada penurunan pendapatan global sekitar USD 2 triliun dari sektor pariwisata. Sementara itu, penurunan *traffic* pelancong mancanegara juga sangat signifikan, yakni sebesar 80%. Dampaknya, lebih dari 100 juta orang yang bekerja secara langsung atau tidak langsung di industri ini menjadi sangat terdampak (Haryo Limanseto, 2022).

Berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan pariwisata Indonesia. Terdapat tiga fase penyelamatan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), yaitu Tanggap Darurat, Pemulihan, dan Normalisasi. Fase Tanggap Darurat fokuskan pada kesehatan, seperti menginisiasi program perlindungan sosial, mendorong kreativitas dan produktivitas saat WFH, melakukan koordinasi krisis pariwisata dengan daerah pariwisata, serta melakukan persiapan pemulihan. Selanjutnya adalah fase Pemulihan, di mana dilakukan pembukaan secara bertahap tempat wisata di Indonesia. Persiapannya sangat matang, mulai dari penerapan protokol CHSE (*Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability*) di tempat wisata, serta mendukung optimalisasi kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) di Indonesia. Terakhir adalah fase Normalisasi, yaitu persiapan destinasi dengan protokol CHSE, meningkatkan minat pasar, hingga diskon untuk paket wisata dan MICE. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah *Virtual Travel Fair* sejak bulan Agustus-September 2020, di mana *Virtual Tourism* atau turisme virtual dapat menjadi alternatif untuk melakukan kegiatan wisata di masa pandemi. Turisme virtual dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi untuk memperkuat atau menciptakan pengalaman turisme. Melalui turisme virtual, seseorang tidak harus berada secara fisik di suatu tempat untuk berwisata di tempat tersebut. Turisme virtual sebagai industri saat ini sedang berkembang pesat dan menjadi salah satu cara bagi industri pariwisata untuk mencoba untuk bertahan di masa pandemi. Turisme virtual juga berpotensi membuka akses bagi masyarakat terhadap obyek-obyek yang memiliki potensi wisata, namun karena satu alasan atau lain tidak

dapat dijadikan obyek wisata, seperti dilakukan oleh Ascape dengan Vietravel dengan mereka ulang secara virtual wilayah-wilayah yang sulit diakses wisatawan (Stainton, 2022).

Jadi kunci utama bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik. Pasalnya, saat ini pelaku masyarakat mulai berubah, dan dibarengi dengan tren pariwisata yang telah bergeser. Contohnya, sebelum pandemi kita bisa bebas liburan ke destinasi wisata di Indonesia maupun luar negeri. Namun, adanya pandemi menyebabkan tren pariwisata berubah, seperti liburan tanpa banyak bersentuhan dengan orang lain agar tetap aman, yaitu *staycation*. Karena hotel cukup berdampak akibat pandemi, tentu sebagai pelaku industri perhotelan tidak bisa hanya mengandalkan *staycation*. Penyedia hotel juga harus mulai beradaptasi agar bisa bertahan, seperti menawarkan WFH (*Work From Hotel*), hingga dilengkapinya sertifikat CHSE dari Kemenparekraf/Baparekraf agar pengunjung merasa lebih aman saat berlibur. Keinginan liburan tanpa banyak bertemu orang lain pun mengubah tren layanan paket wisata. Para pelaku industri pariwisata harus mulai memberikan layanan paket wisata eksklusif atau *mini group*, agar wisatawan merasa lebih aman dan meminimalisir potensi penularan virus saat liburan.

Sedangkan dari sisi destinasi wisata, banyak tempat wisata yang terpukul akibat pandemi COVID-19, bahkan ada yang terpaksa ditutup karena sepi pengunjung. Untuk itu, para pelaku pariwisata harus memanfaatkan inovasi teknologi yang berperan penting dalam mendukung tren pariwisata yang bergeser di tengah pandemi, salah satunya dengan *virtual tourism* untuk liburan *online*. Tak kalah penting, bergesernya tren pariwisata di Indonesia juga berdampak pada beberapa usaha restoran. Agar dapat bertahan, tentu saja pelaku industri restoran harus berinovasi seiringan dengan pergeseran perilaku dan kebiasaan para konsumen. Karena sekitar 70% orang menggunakan layanan *food online* (*delivery, take away, dan catering*) di masa pandemi COVID-19, maka sudah seharusnya pihak restoran memberikan layanan *take away* dengan menerapkan *contactless service*. Bahkan, diperkirakan konsep *outdoor dining* akan menjadi sangat populer setelah pandemi usai. Hal ini disebabkan karena masyarakat akan tetap patuh terhadap protokol kesehatan, dan menjaga jarak dengan lainnya untuk meminimalkan kontaminasi virus (Kemenparekraf RI., 2021).

Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat ketahanan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pemulihan pasca pandemi. Dengan dukungan mitra internasional dan sesama anggota G20, Indonesia ingin mewujudkan Panduan terkait Penguatan Peran Masyarakat dan UMKM sebagai Agen Perubahan Pariwisata (*Guidelines for Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents*). Selain itu, Indonesia juga ingin menjadi pelopor untuk inovasi bersama di G20 guna memulihkan pariwisata melalui metode *seamless travelling*. Bagi Indonesia, pembangunan infrastruktur pariwisata dan peningkatan kemampuan SDM sektor ini adalah keniscayaan. Karena di masa depan, tantangan pariwisata dihadapkan pada cepat atau tidaknya kita beradaptasi dengan teknologi digital. Selain itu, di tataran global perlu adanya penyamaan persepsi terhadap perhatian dalam memastikan keselamatan wisatawan di satu sisi dan meningkatkan devisa pariwisata di sisi lain. Karena itu, G20 menjadi forum yang sangat relevan dan penting bagi dunia untuk bekerja sama memastikan adanya progress inovasi dan keselarasan mekanisme yang mendukung mobilitas wisatawan secara aman, berstandar, dan sehat (Haryo Limanseto, 2022).

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia kurang lebih dua tahun terakhir ini membuat industri pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak, dikarenakan sektor ini bergantung pada mobilisasi manusia dan berdampak pada sektor penunjangnya, seperti penerbangan, hotel, travel, souvenir dan lain sebagainya. Meskipun demikian, dibalik sebuah tantangan selalu ada peluang yang tercipta, teknologi informasi yang sebelum pandemi hanya dianggap sebagai *tools* penunjang kehidupan dan aktivitas manusia, berubah menjadi sebuah media utama agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan tingkat keamanan kesehatan yang terlindungi. Teknologi informasi mampu memberikan layanan dan keterhubungan antara manusia dan masyarakat tanpa harus melakukan kontak fisik, sehingga upaya negara-negara di dunia untuk mampu menekan penularan dan kegiatan antisipasi terhadap infeksi Covid-19 bisa dilakukan secara maksimal. Teknologi informasi yang telah menjadi *tools* penunjang utama masyarakat selama pandemi ini berkembang menjadi sarana pendukung konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah Indonesia selalu berbasis *big data* dan komputasi analisis, terutama pada sektor pariwisata. Seperti halnya penerapan kebijakan CHSE dan segala aktivitas kegiatan *new normal* lainnya. Elaborasi teknologi informasi dan pariwisata berkelanjutan diharapkan mampu memberikan harapan bagi pemulihan sector pariwisata Indonesia pasca pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- About the Global Sustainable Tourism Council (GSTC). (n.d.). Retrieved July 15, 2022, from GSTC: <https://www.gstcouncil.org/>
- Akbar, M. D. (2021). *Teknologi Informasi Menunjang Pariwisata Berkelanjutan di Masa Pandemi Covid 19*. Wacana.
- Alam, A., & Belakang, A. L. (2020). *No Title*. Dampak Penurunan Kegiatan Pariwisata Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/340117775>
- Atikah Ishmah Winahyu. (2021, March 9). Dampak Pandemi, 32% Destinasi Wisata di Seluruh Dunia Ditutup. <https://mediaindonesia.com/internasional/389404/Dampak-Pandemi-32-Destinasi-Wisata-Di-Seluruh-Dunia-Ditutup>.
- Bakar, N. A., & Rosbi, S. (2020). Effect of Coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, 7(4), 189–193. <https://doi.org/10.22161/ijaers.74.23>
- BBC.com. (2020). *Virus corona: Sekitar 50 juta orang akan kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata akibat pandemi*. *BBC.Com/Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51764525>
- Begum, H. E. (2014). Tourist's perceptions towards the role of stake-holders in sustainable tourism. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 144, 313–321. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.301>
- Brundtland, G. H. (1985). World commission on environment and development. *Environmental policy and law*, 14(1).
- Chang, C. L., McAleer, M., & Ramos, V. (2020). A charter for sustainable tourism after COVID-19. *Sustainability (Switzerland)*, 12, 9. <https://doi.org/10.3390/su12093671>
- Choi, H. C. (2006). Sustainability indicators for managing community tourism. *Tourism management*, 27(6).
- Dr. Diena Mutiara Lemy, A. M. (n.d.). Sustainable Tourism Development (STDev) Strategy in Indonesia. The 3rd International Seminar On Tourism (ISOT) Hospitality and Tourism Sustainability: Research, Innovation and Technology. Retrieved July 15, 2022, from

- [http://isot.event.upi.edu/file/download/Sustainable_Tourism_Development_Strategy_in_Indonesia_\(Dr._Diena_Mutiara_Lemy\).pdf](http://isot.event.upi.edu/file/download/Sustainable_Tourism_Development_Strategy_in_Indonesia_(Dr._Diena_Mutiara_Lemy).pdf)
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (3rd ed.)*. Pustaka Pelajar.
- Ekonomi, W. (2020). Jokowi: Sektor Pariwisata Mulai Siapkan Transisi ke Tatanan Baru. Retrieved July, 15, 2022. <https://www.wartaekonomi.co.id/read287463/jokowi-sektorpariwisata-mulai-siapkan-transisike-tatanan-baru>
- Femenia-Serra, F., & Neuhofer, B. (2018). Smart tourism experiences: Conceptualisation, key dimensions and research agenda. *Investigaciones Regionales*, 2018(42), 129–150.
- Garg, A. (2019). Feature, Planning and Uses of Big Data. *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*, 16(2), 864–867.
- Ghotkar, M., & Rokde, P. (2016). Big Data : How it is Generated and its Importance. *IOSR Journal of Computer Engineering*, 20(2), 1–5.
- Grahadyarin, B. L. (2020). Pariwisata Bersiap Hadapi Normal Baru Pasca Pandemi Covid. Retrieved July, 15, 2022. <https://bebas.kompas.id/baca/bebasakses/2020/05/16/pariwisatabersiap-hadapi-normal-baru/>
- Ikbar, Y. (2014). *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional (1st ed.)*. Refika Aditama.
- Ketut, I. G., Pranata, I., Ni, D., & Rai, M. (2020). Pemulihan Fungsi Alam Pariwisata Ditengah Pandemi Covid-19 Covid-19. *Khasanah Ilmu : Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 11(2), 101–108. <https://doi.org/10.31294/khi.v11i2.8480>
- Kemendikbud/Baparekraf RI. (2021). Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi. Retrieved July 15, 2022, from <https://kemendikbud.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>
- Khoshnevis Yazdi, S. (2012). Sustainable Tourism. In *American International Journal of Social Science (Vol., 1, 1)*.
- Komunikasi, H. L. (Kepala B., & I., L. (2022). Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata Didukung Program Penguatan Digital. *Jakarta: Wwww.Ekon.Go.Id*. Retrieved July, 15, 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3718/upaya-pemulihan-sektor-pariwisata-didukung-program-penguatan-digital>
- Kristiana, Y. (2018). APLIKASI PERJALANAN DAN PERILAKU WISATAWAN. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3, 1. <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i1.2022>
- Khoshnevis Yazdi, S. (2012). Sustainable Tourism. In *American International Journal of Social Science (Vol. 1, Issue 1)*. www.aijssnet.com
- Lu, Z., Lu, J., & Zhang, C. (2002). Website Development and Evaluation in the Chinese Tourism Industry. *Netcom*, 16(3), 191–208. <https://doi.org/10.3406/netco.2002.1556>
- Meilin, Z., & Xiaomiao, G. (n. d. . (n.d.). *No Title*. Research on Innovative Development of Tourism E-Commerce in Hubei Province of China.
- Metaxas, T., & Folinas, S. (2020). No Title. *Tourism: The Great Patient of Coronavirus COVID-*, 2019. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12069.24804>
- Milne, G., & Xie, S. (2020). No Title. *The Effectiveness of Social Distancing in Mitigating COVID-*, 19. <https://doi.org/10.1101/2020.03.20.20040055>
- No Title*. (n.d.). <https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism>
- Nur, H. (2021). *Penerapan Smart Tourism Dalam Pengelolaan Pariwisata di Era Pandemi COVID-19 Kabupaten Bantaeng*.
- Organization, I. L. (2012). Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan Dan Green Jobs Untuk Indonesia.
- Paludi, S. (2022). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi SETAHUN PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA. 19. 1*. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium>

- Putra, R. R., Siti Khadijah, U. L., & Rakhman, C. U. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penerapan Konsep Smart Tourism di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, July, 257. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2020.v07.i01.p12>
- Rakhmawati, N. A., Permana, A. E., Reyhan, A. M., & Rafli, H. (2021). Analisa Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknoinfo*, 15, 1. <https://doi.org/10.33365/jti.v15i1.868>
- Revindo, M. D., Sabrina, S., & Sowwam, M. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pariwisata Indonesia: Tantangan*. Outlook dan Respon Kebijakan Briefing Note.
- RI., K. (2021). Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi. Retrieved July, 15, 2022. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>
- Ritchi, H., Zulkarnaen, R. M., Dewantara, Z., Akuntansi, D., Ekonomi, F., & Padjadjaran, U. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Upaya Peningkatan Aksesibilitas Ukm (Desa Wisata) Kepada Pasar Di Lokasi Wisata Pangandaran Dan Sekitarnya. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 36–40.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial (1st ed.)*. Refika Aditama.
- Stainton, H. (2020). (2022). November 19). *Virtual Tourism Explained: What, Why and Where*, 15. <https://tourismteacher.com/virtual-tourism>
- Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV(, 2, 191–206. <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/113/85>
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21, 6.
- UNWTO. (2005). Making Tourism More Sustainable. Retrieved July 15, 2022, from <https://www.unwto.org/sustainable-development>
- UNWTO. (n.d.). Global Code of Ethics for Tourism. Retrieved July 15, 2022, from <https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism>
- Widiati, I. A. P., & Permatasari, I. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung. *KERTHA WICAKSANA*, 16(1), 35–44. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.35-44>
- Winahyu, A. I. (n.d.). (2021, March 9). *Dampak Pandemi*, 32.
- Warta Ekonomi. (2020). Jokowi: Sektor Pariwisata Mulai Siapkan Transisi ke Tatanan Baru. Retrieved July 15, 2022, from <https://www.wartaekonomi.co.id/read287463/jokowi-sektorpariwisata-mulai-siapkan-transisike-tatanan-baru>
- Yamin, M., Darmawan, A., & Rosyadi, S. (2021). No Title. *Analysis of Indonesian Tourism Potential Through the Sustainable Tourism Perspective in the New Normal Era*, 10, 1. <https://doi.org/10.18196/hi.v10i1.10500>

PERAN JUSTICE WITHOUT BORDERS DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ratna Ningtyas⁵; Sri Wijayanti⁶

^{1,2}Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
Email: ratna.ningtyas@mhs.unsoed.ac.id, sri.wijayanti@unsoed.ac.id

Abstrak

Hong Kong merupakan salah satu negara tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena memiliki permintaan yang tinggi atas pekerja migran dari Asia Tenggara terutama pada sektor domestik. Era pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi PMI yang bekerja di Hong Kong, hal tersebut dapat ditemui pada risiko paparan virus di tempat kerja dan minimnya bentuk perlindungan kesehatan untuk PMI, permasalahan tentang gaji yang tidak dibayarkan, pemutusan kontrak kerja secara sepihak, hingga meningkatnya tingkat kekerasan domestik. Untuk menjamin perlindungan hak-hak PMI di masa pandemi COVID-19, diperlukan integrasi terhadap peran NGO. Tulisan ini akan mendeskripsikan peran Justice Without Borders dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di masa pandemic. Tulisan ini menggunakan tiga pendekatan dalam human security yaitu economic security, health security dan personal security untuk membahas tentang identifikasi ancaman yang dialami oleh pekerja migran Indonesia. Identifikasi ini memperjelas peran yang dilakukan JWB untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik wawancara dan telaah dokumen.

Kata kunci: *Justice Without Borders, keamanan manusia, pekerja migran Indonesia.*

Abstract

Hong Kong is one of the destination countries for Indonesian Migrant Workers (PMI) because it has a high demand for migrant workers from Southeast Asia, especially in the domestic sector. The era of the COVID-19 pandemic has become a challenge for PMIs working in Hong Kong; this can be found in the risk of exposure to the virus in the workplace and the lack of health protection for PMIs, problems regarding unpaid salaries, unilateral termination of employment contracts, and increasing level of domestic violence. During the COVID-19 pandemic, integration of the role of NGOs is required to protect PMI rights. This paper will describe the role of Justice Without Borders in efforts to protect Indonesian migrant workers during the pandemic. This paper uses three approaches in human security, namely economic security, health security and personal security, to discuss the identification of threats experienced by Indonesian migrant workers. This identification clarifies the role that JWB plays in contributing to solving the problem. This paper uses a qualitative method with interview techniques and document review.

Keywords: *human security, Justice Without Borders, migrant domestic workers.*

I. PENDAHULUAN

Migrasi internasional adalah sebuah fenomena yang terjadi di setiap negara. Salah satu alasan manusia melakukan migrasi adalah ekonomi, misalnya keterbatasan pekerjaan di negara asal dan permintaan tenaga kerja di negara tujuan. *International Labor Organization (ILO)* mendefinisikan pekerja migran sebagai aktor arus migrasi dari suatu negara ke negara

lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. (International Labour Organization, 1999). Sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia mendefinisikan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Kementerian Ketenagakerjaan, 2020).

Hong Kong merupakan negara tujuan yang populer di kalangan pekerja migran Indonesia (Constable, 2007: 40). Permintaan tenaga kerja, terutama untuk sector domestic, sejalan dengan perkembangan situasi ekonomi negara Hongkong. Para pekerja memilih untuk bekerja di luar rumah sehingga mereka memerlukan orang lain untuk mengurus rumah mereka. Kebutuhan penduduk Hongkong akan tenaga kerja lebih murah dipenuhi oleh para pekerja dari Asia Tenggara dimana upah mereka lebih murah dibandingkan dengan pekerja lokal. Sejak saat itu, banyak pekerja asing dari Indonesia pergi bekerja ke Hongkong. Pada tahun 2021 di semester pertama, tercatat jumlah pekerja migran Indonesia yang berangkat ke Hong Kong yaitu 26.695 orang (BP2MI, 2021).

Tahun 2020 terjadi pandemi global COVID-19 yang membuat para pekerja migran Indonesia khususnya sektor domestik di Hong Kong menjadi kelompok rentan yang terkena dampaknya. Selama pandemic, para pekerja migran tidak dapat memenuhi hak mereka antara lain hak ekonomi, hak social dan hak-hak lain yang melekat dalam pekerjaannya dan status mereka sebagai manusia. Salah satu contoh tidak terpenuhinya hak pekerja migran di sektor domestik adalah hak untuk beristirahat yaitu ketika mereka dilarang untuk keluar rumah dan harus tinggal di rumah karena pemberi kerja khawatir bahwa mereka akan membawa virus dari luar, namun ketika mereka tinggal di rumah, mereka tidak dapat beristirahat karena pemberi kerja (majikan) meminta mereka untuk mengerjakan hal-hal tertentu (May, 2021). Selain hak social, para pekerja migran juga rentan mengalami permasalahan ekonomi, misalnya rentan untuk dipecah, gaji yang tidak sesuai standar, perselisihan dengan pemberi kerja (majikan) dll.

Kondisi yang dihadapi oleh pekerja migran menarik perhatian salah satu *Non-governmental organization* (NGO) untuk memperjuangkan hak mereka. Salah satu NGO tersebut adalah *Justice Without Borders* yang merupakan organisasi regional dengan kantor yang berada di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong yang fokus terhadap isu-isu pekerja migran. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana *Justice Without Borders* (JWB) membantu para pekerja migran Indonesia di Hong Kong untuk memperoleh hak-haknya di masa pandemic berdasarkan tiga pendekatan yang terdapat dalam human security yaitu pendekatan *economic security*, *health security* dan *personal security*. Peran yang dilakukan oleh JWB menarik untuk dibahas karena bersifat transnasionalisme yaitu dalam penyelesaian kasus melibatkan kerjasama antara organisasi yang berlokasi di Indonesia dan di Hong Kong. Untuk menunjukkan peran JWB maka akan dibahas terlebih dahulu permasalahan pekerja migran dengan menggunakan konsep human security sehingga terlihat jelas peran JWB yang dilakukan JWB.

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang menekankan pada deskripsi dengan memakai metode pengambilan data yaitu wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan perwakilan *Justice Without Borders* di Indonesia dan studi literature yang terkait. Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah peran *Justice Without Borders* dalam upaya perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia di Hong Kong tahun 2020, sedangkan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi adalah pekerja migran Indonesia (PMI) di Hong Kong tahun 2020. Level analisis dari penelitian ini menggunakan level analisis pada tingkat kelompok yang berarti bahwa Hubungan

Internasional dapat dilihat pada hubungan antara kelompok kecil di berbagai negara (Mas'ood, 1990: 46).

III. ANALISIS

A. Human Security

Tulisan ini menggunakan konsep human security sebagai perlindungan terhadap manusia dari ancaman dan situasi kritis. *Human Security* pada dasarnya memberikan perhatian pada individu manusia yang terancam oleh hal-hal tidak terduga baik yang berasal dari negara, kelompok masyarakat, atau individu lain seperti krisis keamanan negara, krisis ekonomi internasional, bencana alam, dan wabah penyakit menular (Michael, 2005: 1). Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan proses yang membangun kekuatan dan aspirasi masyarakat untuk menciptakan sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer, dan budaya yang bersama-sama memberi orang-orang rasa aman untuk memiliki kehidupan yang bermartabat (Commission on Human Security, 2003: 4).

Pendekatan dalam human security yang akan dipakai dalam tulisan ini yaitu pendekatan *economic security*, *health security* dan *personal security*. Pendekatan keamanan ekonomi mengacu pada kondisi kehidupan berbagai kelompok sosial dan individu, serta perlindungan terhadap kemiskinan yang dimana konsep tersebut mencerminkan penekanan pada standar hidup individu (Mesjasz, 2008: 577). Pendekatan *health security* memiliki relevansi atas kondisi kesehatan para pekerja migran Indonesia di Hong Kong pada masa pandemi COVID-19 yang tidak memiliki akses fasilitas kesehatan dan perlindungan lainnya agar tidak terpapar virus. *Health security* menunjukkan suatu kondisi dimana individu yang menempati suatu negara terhindar ancaman yang berasal dari penyebaran penyakit menular lintas batas baik yang terjadi secara alami, disengaja, atau tidak disengaja; atau berasal dari dampak krisis kesehatan besar pada yang mengancam stabilitas dan keamanan negara (Rushton, 2011: 782). Indikator keamanan dalam pendekatan *personal security* adalah setiap individu yang memiliki rasa aman dan terhindar dari ancaman kekerasan berupa penyerangan; perang; dan ketegangan etnis dari negara asal, negara lain, kelompok masyarakat lain, atau dari individu lain. Kemudian *personal security* memiliki indikasi bahwa setiap individu harus terhindar dari kekerasan domestik dan tindak perkosaan yang umumnya terjadi pada kelompok perempuan dan anak-anak, serta terhindar dari ancaman terhadap diri sendiri berupa bunuh diri dan penggunaan narkoba (United Nations Development Programme, 1994: 30).

Untuk mewujudkan ketiga faktor keamanan manusia maka peran NGO diperlukan karena NGO adalah aktor yang dapat meningkatkan peluang pembangunan berkelanjutan masyarakat dalam memberikan bantuan kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosial individu manusia (Michael, 2005: 7). Dalam kasus pekerja migran, bentuk perlindungan terhadap keamanan manusia oleh NGO dapat dilihat dalam bentuk adanya dominasi inisiatif advokasi pekerja migran (Ford, 2006: 1). Hal ini dapat dilihat pada kegiatan NGO seperti memberikan nasihat hukum dan dukungan dalam kasus-kasus individu ketika pekerja telah dilecehkan, memberikan pelatihan untuk komunitas pekerja migran, dan mendirikan tempat penampungan bagi pekerja migran yang menjadi korban kekerasan ketika bekerja

B. Peran Justice Without Borders (JWB) dalam perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia di Hongkong

Justice Without Borders (JWB) merupakan organisasi non-pemerintah regional yang berupaya untuk memberdayakan para korban eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia melalui upaya pemulihan hukum terhadap para pelakunya,

dimanapun mereka berada. JWB bekerja di negara penempatan dan negara asal pekerja migran yang melingkupi Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Filipina. NGO tersebut memiliki target untuk mengembangkan jaringan dukungan hukum lintas negara yang efektif serta menyebarkan informasi dari kasus lintas batas untuk meningkatkan layanan klien dan untuk mendukung advokasi hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mengintegrasikan hak-hak dasar pekerja migran sektor domestik. Peran JWB dalam konteks memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia pada masa pandemi COVID-19 antara lain : bantuan litigasi melalui bantuan legal atau hukum dan bantuan non-litigasi melalui edukasi dan pengembangan kapasitas untuk organisasi-organisasi garda depan, membangun jaringan dengan organisasi-organisasi lain, dan kampanye

Di masa pandemi, salah satu ancaman *economic security* yang dihadapi oleh PMI adalah resiko menjadi pengangguran karena kontrak diputuskan sepihak atau PMI tidak mendapatkan upah kerja yang sesuai. PMI juga terbatas untuk melakukan aktifitas di luar rumah sebagai upaya untuk mengendalikan covid 19. Sebenarnya, permasalahan yang dihadapi oleh PMI bukan hanya ketika pandemic, namun permasalahan tersebut terjadi juga di masa sebelum pandemic. Situasi pandemic membuat permasalahan semakin kompleks, misalnya penyelesaian soal permasalahan gaji. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dibutuhkan kehadiran pihak yang dirugikan namun terkadang pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah PMI telah kembali pulang ke negaranya. Sehingga penyelesaian masalah tersebut harus dilakukan dengan strategi dan Kerjasama lintas negara. Sebagai lembaga non pemerintah, JWB berperan menjembatani para PMI yang dirugikan akibat gaji yang tidak dibayarkan dan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengajukan klaim perdata melalui proses litigasi lintas negara yang bertujuan untuk mendapatkan kembali gaji yang tidak dibayarkan oleh majikan ataupun kompensasi finansial atas hak-hak PMI yang dilanggar dan dirugikan saat bekerja di Hong Kong. Pada tahun 2019, JWB Hong Kong dan Indonesia membantu 16 PMI yang dikenakan biaya penempatan secara ilegal oleh agensi ketenagakerjaan secara ilegal melalui klaim perdata litigasi lintas negara dengan bekerjasama dengan mitra organisasi seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian melalui proses mediasi, agensi tersebut bersedia untuk mengembalikan kelebihan biaya penempatan yang dipungut secara ilegal ke 16 PMI yang menjadi korban (Justice Without Borders, 2019). JWB memiliki program bernama AKSES untuk memberikan pengetahuan tentang hak-hak PMI sebagai langkah preventif dalam perlindungan hak-hak PMI agar terhindar dari mendapatkan pelanggaran hak yang menimbulkan kerugian-kerugian secara finansial dan kehilangan pekerjaan. Program ini dilatarbelakangi bahwa JWB kerap menemukan fakta ketika berupaya memberikan bantuan kepada PMI dalam proses klaim perdata lewat mediasi atau litigasi lintas negara seringkali pekerja migran tidak memiliki salinan dokumen yang menjadi bukti penting untuk menunjukkan kondisi mereka yang dirugikan oleh majikan atas gaji yang tidak dibayarkan dan agen ketenagakerjaan atas pemungutan biaya penempatan secara ilegal. PMI kerap menandatangani kontrak dan banyak dokumen lainnya tanpa mengerti isi dari kontrak dan dokumen tersebut, sehingga banyak dari PMI yang tidak mengetahui kalau sebenarnya hak-hak mereka telah dilanggar (Justice Without Borders, 2021)

Dalam health security menjelaskan individu manusia harus memiliki jaringan kesehatan dan terhindar dari penyakit menular yang menyebar cepat di dunia yang menimbulkan ancaman bagi individu, populasi, atau negara dan relevansi nya dengan ancaman-ancaman kesehatan yang dihadapi oleh PMI sektor domestik di era pandemi COVID-19 (Feldbaum & Lee, 2004: 22-23). Isu kesehatan yang mempengaruhi kondisi

kerja menjadi semakin memburuk juga menjadi dampak yang mempengaruhi PMI selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 – 2021. Selama masa pandemi, pemerintah Hong Kong menghimbau masyarakat untuk bekerja, bersekolah, dan melakukan aktivitas lain dari rumah, sehingga tempat kerja yang notabene adalah rumah majikan PMI akan membuat semua anggota keluarganya menetap disana. Kondisi tempat kerja PMI selama pandemi COVID-19 membuat mereka dilarang untuk pergi keluar rumah oleh majikan pada hari libur untuk mencegah masuknya virus ke rumah. JWB menandai banyaknya pelanggaran hak-hak PMI sektor domestik di Hong Kong terkait dengan adanya kebijakan *lockdown* di Hong Kong sehingga menciptakan lingkungan kerja dengan tingkat stres yang tinggi karena majikan dan PMI terisolasi di dalam rumah untuk jangka waktu yang lama. Pembatasan untuk aktivitas keluar rumah menyebabkan kurangnya interaksi sosial sehingga meningkatkan rasa stres yang dapat mengancam kesehatan mental PMI (Justice Without Borders, 2020). Berbagai upaya harus diintegrasikan untuk memastikan setiap individu termasuk PMI sektor domestik memiliki kondisi hidup yang aman dan sehat. *Justice Without Borders* memiliki perhatian untuk memastikan hak-hak PMI sektor domestik terpenuhi termasuk hak atas memperoleh fasilitas kesehatan dan memiliki tempat kerja yang aman untuk PMI di sektor domestik bekerja. Untuk mengintegrasikan hal tersebut, JWB mengambil langkah preventif dengan cara membagikan informasi-informasi layanan kesehatan yang dapat diakses dengan mudah termasuk informasi mengenai tindakan pencegahan, informasi kesehatan, dan akses ke perawatan kesehatan primer bagi PMI. JWB aktif mengunggah artikel untuk memberikan informasi kepada PMI dalam perlindungan diri di era pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021, tercatat sebanyak lebih dari 10 artikel telah diunggah oleh JWB di laman media sosial seperti web resmi organisasi, facebook, dan linkedin. Contoh dari upaya tersebut dapat dilihat melalui unggahan infografis yang berisikan tentang informasi kondisi kesehatan fisik dan mental PMI di era pandemi COVID-19 dimana 50% pekerja migran domestik tidak mendapatkan hari istirahat dan 90% pekerja migran domestik memiliki jam kerja yang lebih panjang, JWB memberikan informasi dan imbauan yang dapat diterapkan oleh majikan dan masyarakat umum. Sebagai contoh, JWB menghimbau majikan untuk menghormati kebutuhan PMI untuk beristirahat karena jam istirahat dapat membantu PMI sektor domestik menyesuaikan diri dalam bekerja dan memiliki kehidupan yang sehat selama pandemi COVID-19.

Personal security atau keamanan personal memiliki indikator yang salah satunya menjelaskan bahwa setiap individu harus terhindar dari kekerasan domestik dan tindak perkosaan yang umumnya terjadi pada kelompok perempuan dan anak-anak (United Nations Development Programme, 1994: 30). Hal ini kemudian menunjukkan bahwa posisi PMI sektor domestik yang mayoritas adalah perempuan di Hong Kong tergolong sangat rentan menerima kekerasan domestik dan pelecehan seksual di tempat kerjanya. Himbauan agar PMI tetap berada di rumah dapat menimbulkan potensi terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan seksual dari majikan mengingat hal tersebut terjadi di dalam rumah yang terisolasi dan mengakibatkan PMI akan kesulitan untuk mendapatkan bantuan pertolongan dari orang lain (Justice Without Borders, 2020). Pada situasi tersebut *Justice Without Borders* mengisi peran dalam mengadvokasi dan melindungi hak-hak perempuan migran dari ancaman-ancaman personal melalui berbagai program organisasi dan perluasan jaringan dengan lembaga lain untuk memberikan rasa aman bagi PMI sektor domestik. Selain itu, JWB mengintegrasikan pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender bagi PMI dan masyarakat umum. Salah satu contoh upaya dalam melindungi rasa aman bagi PMI sektor domestik dapat ditemui pada JWB Hong Kong yang telah mengintegrasikan perlindungan terhadap PMI sektor domestik apabila mereka terjebak dalam situasi darurat. JWB Hong Kong bekerja sama dengan organisasi-

organisasi garda depan dalam menyediakan *shelter* atau tempat penampungan untuk menampung para pekerja migran domestik untuk mengungsi ketika mengalami tindak kekerasan domestik saat bekerja (Lam, wawancara, 2022). JWB berperan aktif dalam kampanye-kaampanye untuk perlindungan PMI.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Masalah pelanggaran hak-hak pekerja migran domestik merupakan sebuah isu yang menarik perhatian banyak pihak dan harus segera ditangani. Permasalahan yang timbul berasal dari beragam aspek, salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang hak-hak apa saja yang dimiliki sehingga ketika hak-hak mereka dilanggar, pekerja migran domestik tidak tahu harus berbuat apa dan membiarkan dirinya mengalami pelanggaran tersebut di tempat kerja. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan agar hak-hak PMI terpenuhi sehingga berbagai aspek keamanan para PMI semakin terjamin. Salah satu pihak yang dapat membantu terwujudnya keamanan PMI adalah NGO.

Pada masa pandemic ketika para PMI mengalami berbagai permasalahan, JWB hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Sebenarnya, permasalahan PMI tidak muncul sejak pandemic namun sudah ada sebelum pandemic namun permasalahan yang dialami oleh PMI semakin kompleks. JWB telah menangani kasus litigasi lintas negara sebanyak 48 kasus pada tahun 2019 – 2021 untuk memenuhi keamanan ekonomi PMI melalui klaim perdata yaitu mendapatkan kompensasi finansial dan memberikan edukasi terhadap PMI agar terhindar dari kehilangan pekerjaannya. Dalam bidang kesehatan, upaya yang JWB lakukan untuk memenuhi keamanan kesehatan dapat ditemui pada kerjasama dengan organisasi garda depan lain untuk memberikan alat perlindungan diri seperti masker kepada PMI agar terhindar dari paparan virus COVID-19, selain itu JWB juga menyebarkan berbagai informasi tentang akses fasilitas kesehatan lewat unggahan video, artikel, infografis, dan lain-lain di media sosial agar bisa dijangkau lebih mudah oleh PMI. Dalam memenuhi keamanan personal PMI yang sebagian besar disebabkan oleh kekerasan domestik dan kekerasan seksual, JWB memberikan bantuan perlindungan hukum untuk PMI semenjak tahun 2019-2021 agar PMI bisa memperoleh keadilan. Selain itu JWB memiliki peran penting untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan berbasis gender, memfasilitasi PMI ke untuk memperoleh bantuan pemerintah, dan menyediakan tempat penampungan untuk PMI yang berada di situasi darurat ketika bekerja. Sedangkan pada konteks keamanan komunitas, JWB berpartisipasi dalam upaya penghapusan diskriminasi yang dialami oleh PMI dan memastikan bahwa komunitas PMI ini bebas dari rasa takut dan kekurangan serta bisa menjamin eksistensi identitas mereka. Berdasarkan tiga pendekatan dalam human security, JWB sebagai NGO yang merupakan salah satu pihak selain negara telah berusaha untuk memenuhi human security untuk melakukan perlindungan terhadap PMI di masa pandemic

V. DAFTAR PUSTAKA

- Commission on Human Security. (2003). *Human Security Now*. New York: Commission on Human Security
- Constable, N. (2007). *Maid To Order in Hong Kong Stories of Migrant Workers*. Cornell University Press.
- Feldbaum, H., & Lee, K. (2004). Public Health and Security. In A. Ingram, *Health, Foreign Policy & Security* (pp. 22-23). London: The Nuffield Health and Social Services Fund.
- Ford, M. (2006). Migrant worker organizing in Indonesia. *Asian and Pacific Migration Journal*, 15(3), 313–334. <https://doi.org/10.1177/011719680601500302>

- International Labour Organization. (1999, Juni). *ILC87 - Report III (1B) Migrant Workers*. Retrieved September 11, 2021, from International Labour Organization: <https://www.ilo.org/public/english/standards/reim/ilc/ilc87/r3-1b2.htm>
- Justice Without Borders. (2019, September 27). *First 'Reverse Cross-Border' Mass Claim Against Illegal Agency Fees*. Dipetik April 6, 2022, dari Justice Without Borders: <https://forjusticewithoutborders.org/jwb-leads-first-reverse-cross-border-mass-claim-against-illegal-agency-fees/>
- Justice Without Borders. (2020, Juli 7). *Coping with Covid-19 – Perspectives from NGOs on the Ground*. Dipetik Februari 18, 2022, dari Justice Without Borders: <https://forjusticewithoutborders.org/coping-with-covid-19-perspectives-from-ngos-on-the-ground/>
- Justice Without Borders. (2021, Juli 23). *Pursuing Illegal Agency Fees Back Home, for Those Still Abroad*. Dipetik April 6, 2022, dari Justice Without Borders: <https://forjusticewithoutborders.org/pursuing-illegal-agency-fees-back-home-for-those-still-abroad/>
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2020, Juli 20). *Apa artinya Pekerja Migran Indonesia Perseorangan?* Retrieved September 11, 2021, from Kementerian Ketenagakerjaan: <https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/articles/43000586010-apa-artinya-pekerja-migran-indonesia-perseorangan->
- Lam, J. (2022, Maret 11). Justice Without Borders Role in Protecting Indonesian Migrant Domestic Workers. (R. Ningtyas, Pewawancara) Hong Kong.
- Mas'oe'd, M. (1990). Tingkat-Tingkat Analisa. In M. Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (pp. 39-69). Jakarta: LP3ES.
- May, W. M. L. (2021). The impacts of Covid-19 on foreign domestic workers in Hong Kong. *Asian Journal of Business Ethics*, 10(2), 357–370. <https://doi.org/10.1007/s13520-021-00135-w>
- Mesjasz, C. (2008). Economic Security. In H. G. Brauch, N. C. Behera, B. Chourou, P. Dunay, J. Grin, P. Kameri-Mbote, et al., *Globalization and Environmental Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century* (pp. 569-580). Berlin: Springer.
- Michael, S. (2005). The Role of NGOs in Human Security. *SSRN Electronic Journal*, 1, 1–30. <https://doi.org/10.2139/ssrn.351240>
- Rushton, S. (2011). Global Health Security: Security for Whom? Security from What? *Political Studies*, 59(4), 779–796. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2011.00919.x>
- United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994*. Oxford: Oxford University Press.

ANALISIS ANCAMAN EPIDEMI VIRUS EBOLA TERHADAP KEAMANAN KESEHATAN (*HEALTH SECURITY*) NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO TAHUN 2018-2020

Dea Winanda Dwi Lestari¹; Nuriyeni Kartika Bintarsari²

¹Dea Winanda Dwi Lestari: Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

²Nuriyeni Kartika Bintarsari: Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto

Email: deawinandad1@gmail.com nuriyeni.bintarsari@unsoed.ac.id

Abstrak

Penelitian yang berjudul Analisis Ancaman Epidemik Virus Ebola terhadap Keamanan Kesehatan (Health Security) Negara Republik Demokratik Kongo Tahun 2018-2020 dianalisis menggunakan konsep Keamanan Kesehatan (Health Security) sebagai salah satu dimensi dalam Human Security. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo (RDK) menimbulkan ancaman terhadap Keamanan Kesehatan dilihat dari konteks Keamanan Manusia (Human Security). Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, konsep Health Security melihat bahwa wabah virus Ebola yang terjadi di Republik Demokratik Kongo di tahun 2018 menimbulkan ancaman keamanan kesehatan individu dan ancaman keamanan kesehatan global. Tingginya risiko penularan virus terhadap individu dan semakin meluasnya zona merah di RDK membuat status risiko penularan sangat tinggi di tingkat nasional dan regional meskipun masih tergolong rendah di tingkat global. Konsep Health Security dalam keamanan manusia yang merujuk pada International Health Regulation (IHR) bahwa Health Security ada untuk meningkatkan sistem kesehatan dasar pada individu dari fenomena tidak biasa agar keamanan kesehatan menjadi lebih baik di masa depan.

Kata Kunci : *Ancaman Virus Ebola, Health Security, Human Security, Keamanan Kesehatan Global.*

Abstract

The research entitled " Analysis of the Threat of the Ebola Virus Epidemic to the Health Security of the Democratic Republic of the Congo in 2018-2020" was analyzed using the concept of Health Security as one of the dimensions in Human Security. The focus of this study is to analyze how the Ebola virus outbreak in the Democratic Republic of the Congo (DRC) poses a threat to Health Security in terms of Human Security. Based on the data and analysis conducted, the Health Security concept sees that the Ebola virus outbreak that occurred in the Democratic Republic of the Congo in 2018 poses a threat to individual Health Security and a threat to global Health Security. The high risk of transmitting the virus to individuals and the increasingly widespread red zone in the DRC have made the transmission risk status very high at the national and regional levels, although it is still relatively low at the global level. The concept of Health Security in Human Security refers to the International Health Regulation (IHR) that Health Security exists to improve the basic health system for individuals from unusual phenomena so that Health Security will be better in the future.

Keywords: *Ebola virus threat, Health Security, Human Security, Global Health Security.*

I. PENDAHULUAN

Kasus virus Ebola pada manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di dekat sungai Ebola, kasus-kasus baru virus Ebola mulai meluas ke beberapa wilayah Afrika dari masa ke masa (CDC, 2018a). Dikutip dari laporan badan World Health Organization (WHO)

(2021) virus ini sebelumnya dikenal sebagai demam berdarah Ebola yang tergolong dalam penyakit berbahaya jika menyerang manusia. Penularan virus ini terjadi jika ada kontak langsung melalui cairan tubuh seperti darah, sekresi dan cairan lainnya dari hewan yang terinfeksi virus Ebola seperti simpanse, kelelawar, monyet, dan kijang hutan yang mati kemudian menjangkit ke manusia. Penularan virus juga dapat terjadi dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh dari orang yang sakit atau meninggal karena Ebola, dan benda-benda yang terkontaminasi cairan tubuh seperti darah, feses, muntahan dari orang yang terinfeksi virus Ebola (WHO, 2021). Gejala terberat jika terjangkit virus Ebola adalah gangguan fungsi ginjal dan fungsi hati, dalam beberapa kasus diikuti dengan pendarahan (eksternal maupun internal) misal keluarnya darah dalam gusi atau dari tinja yang berakibat pada jumlah sel darah putih dan trombosit yang rendah dan berujung pada kematian (WHO, 2021). Pada tanggal 1 Agustus 2018 Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo (RDK) melaporkan adanya kasus baru virus Ebola di daerah Kivu Utara dan Ituri (CDC, 2018). Data dari WHO (2020) mencatat hingga per 26 Januari 2020 jumlah total kasus mencapai 3418 dengan rasio angka kematian secara keseluruhan akibat virus Ebola tercatat mencapai 66% (WHO, 2020).

Virus Ebola menyebabkan krisis kesehatan di RDK, dalam Dewan Keamanan PBB tahun 2019 memuat laporan keprihatinan terhadap situasi keamanan di daerah yang terkena wabah Ebola khususnya serangan terhadap personel bantuan kemanusiaan dan petugas medis, pembunuhan terhadap petugas kesehatan, perusakan sarana dan transportasi hingga perusakan peralatan medis di tengah terjadinya epidemi Ebola di RDK (UN Security Council, 2019). Wabah kesepuluh yang diumumkan pertama kali di Kinshasa pada Agustus 2018 di Provinsi Kivu Utara dan Ituri, dinyatakan dalam Epidemi Ebola terbesar kedua dalam sejarah sejak tahun 1976 yang akhirnya dinyatakan berakhir pada 25 Juni 2020 (Mayhew, 2021, hal. 1732). Munculnya wabah penyakit di beberapa negara di Afrika memusatkan perhatian baru terhadap keamanan kesehatan global (Heymann dkk, 2015, hal. 1884).

Setelah diumumkannya wabah yang ke-10 pada Agustus tahun 2018, Direktur Jenderal WHO menyelenggarakan pertemuan Komite Darurat pada Rabu, 17 Oktober 2018 yang berlandaskan pada peraturan *International Health Regulation (IHR)* tahun 2005 tentang *Ebola Virus Disease (EVD)* di RDK. Secara garis besar pertemuan ini membahas mengenai keprihatinan atas peristiwa wabah Ebola di RDK tahun 2018 serta menekankan pada kewaspadaan dan peningkatan tanggapan yang intensif untuk menghadapi wabah yang sedang berlangsung (WHO, 2018a). Tujuan diadakan pertemuan ini adalah untuk menetapkan apakah wabah Ebola yang diumumkan pada tahun 2018 di RDK menjadi Darurat Kesehatan yang Menjadi Perhatian Internasional (PHEIC) atau tidak. Salah satu tujuan dari resolusi ini adalah menekankan peran negara anggota untuk berperan lebih pada agenda keamanan kesehatan global dan menyediakan layanan kesehatan masyarakat yang memadai guna mendeteksi, mencegah, menanggapi, dan mengurangi wabah penyakit menular melalui sistem kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan responsif (UNSC, 2014). Pada Pertemuan Komite Darurat pada Oktober 2018 tersebut, WHO belum menetapkan wabah Ebola di RDK menjadi PHEIC. Wabah yang diumumkan pada tahun 2018 berlanjut hingga tahun 2019, sehingga pada 17 Juli 2019 terjadi perubahan status peristiwa wabah Ebola di RDK disebabkan lonjakan kasus yang terus meningkat, di mana dalam pertemuan tersebut menetapkan wabah Ebola di RDK menjadi *Public Health Emergency International Concern (PHEIC)*. Sebagaimana yang pernah terjadi pada wabah Ebola sebelumnya di Afrika Barat dengan terbentuknya resolusi 2177 tahun 2014 maka penetapan PHEIC ini bertujuan untuk menghentikan penyakit virus Ebola, bersamaan dengan mengelola konsekuensi dari potensi penyebaran internasional yang lebih jauh dan melakukan misi aktif seperti pengendalian infeksi, mobilisasi dan pemulihan masyarakat, untuk menyelesaikan wabah Ebola (UNSC, 2014). Dibawah naungan WHO *International Health Regulations (IHR)* dikelola untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular ke wilayah internasional,

IHR memiliki implementasi yang mengharuskan negara- negara keluar dari kedaulatan nasional jika terjadi wabah demi kebaikan bersama (WHO, 2017) serta memberikan akses penuh terhadap responden bantuan asing untuk menyelidiki dan membuat data serta catatan selama wabah berlangsung (WHO, 2017).

Keamanan Manusia (*Human Security*) berfokus pada kesejahteraan dan martabat individu sehingga pendekatan ini mengakui ancaman di luar kekerasan dan mengenali ancaman baru. Dalam keamanan manusia terdapat 2 jenis ancaman, yaitu ancaman terstruktur (ancaman yang sengaja dibuat) seperti genosida, kejahatan narkoba, dan ada ancaman tidak terstruktur (ancaman yang tidak di sengaja/ tidak dibuat) seperti ancaman pendidikan dan ancaman kesehatan. Kesehatan termasuk dalam ancaman tidak terstruktur karena banyak menyertai aspek non-teritorial keamanan seperti cedera, penyakit, dan kekerasan yang berasal dari kelangkaan lingkungan atau migrasi. Buruknya akses terhadap pelayanan kesehatan adalah bentuk ancaman yang objektif dan nyata (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007, hal. 14-16). Alasan penulis menulis penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana Epidemologi virus Ebola yang terjadi di RDK tahun 2018-2020 mengancam keamanan kesehatan di negara tersebut dilihat dari segi kesehatan global menggunakan konsep *Health Security* sebagai salah satu dimensi dalam keamanan manusia (*Human Security*).

Terdapat 5 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Pertama artikel jurnal yang berjudul *The Political Economic of the Ebola Virus Disease* yang ditulis oleh Obeng-Odoom, F., & Bockarie, M.M.B. dalam artikel jurnal *Social Change*, (2018), 48 (1), 18-35. Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem kesehatan yang dapat mempengaruhi keterasingan sosial dan ikatan sosial di tingkat keluarga, komunitas, nasional dan regional. Franklin dan Matthew menggunakan kerangka konseptual ekonomi politik untuk menganalisis ekonomi politik kesehatan di Afrika akibat virus Ebola, dimana kerangka hubungan sosial menganggap hasil kesehatan suatu masyarakat dipengaruhi oleh struktur sosial-ekonomi atau dalam kata lain hasil kesehatan individu dipolakan menurut kelas, ras dan asosiasi gender serta identitas kelompok lainnya. Hasil penelitian ini berasumsi bahwa strategi kesehatan masyarakat lokal yang dipromosikan oleh negara kapitalis maju melihat wabah Ebola sebagai sasaran ketidaksetaraan dan hierarki di Afrika, di mana perawatan kesehatan menjadi tidak merata karena sistem sosial. Perbedaan penelitian Obeng dan Bockarie dengan penelitian penulis adalah konsep penelitian yang digunakan, dimana Obeng dan Bockarie menggunakan konsep ekonomi politik untuk menganalisis sistem kesehatan di Afrika, sedangkan penelitian penulis menggunakan konsep *Health Security* dalam *Human Security*. Perbedaan kedua terletak di cakupan wilayah, di mana Obeng dan Bockarie mengambil cakupan wilayah regional Afrika, sedangkan penelitian penulis berfokus pada lingkup nasional yaitu Republik Demokratik Kongo.

Kedua, penelitian yang berjudul —*Local perspectives on Ebola during its tenth outbreak in DR Congo: A nationwide qualitative study* yang ditulis oleh Muzembo, B.A., Ntontolo, N.P., Ngatu, N.R., Khatiwada, J., Ngombe, K., Numbi, O.L & Ikeda S., dkk. Dalam *Journal PloS one*, (2020), 15 (10). Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menghambat upaya RDK dalam menangani kasus Ebola di tahun 2018-2019 di daerah Kivu Utara, penelitian ini menggunakan studi kualitatif melalui wawancara langsung dengan masyarakat RDK di wilayah Kivu Utara selama 2 bulan. Hasil dari penelitian ini terbagi menjadi 3 tema besar diantaranya: 1) Minimnya pengetahuan tentang penyebab, penyebaran serta mitos akan virus Ebola di kalangan masyarakat. 2) Kepercayaan masyarakat mengenai virus Ebola yang dianggap berasal dari perusahaan besar. 3) Ketidakpercayaan masyarakat pada otoritas publik dan tenaga medis. Perbedaan penelitian Muzembo dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian, dimana Muzembo dkk menggunakan metode wawancara langsung dengan koresponden masyarakat RDK sedangkan penelitian penulis menggunakan metode teknik pengumpulan data. Perbedaan yang kedua terletak pada tahun

penelitian, Muzembo dkk mengambil tahun 2018-2019 sedangkan penelitian penulis mengambil tahun 2018-2020. Ketiga, artikel jurnal yang berjudul —The cost of insecurity: from flare-up to control of a major Ebola virus disease hotspot during the outbreak in the Democratic Republic of the Congo, 2019¹¹ yang ditulis oleh Jombart, T., Jarvis, C. I., Mesfin, S., Tabal, N., Mossoko, M., Mpia, L.M., dkk. Dalam jurnal *Eurosurveillance*, (2020), 25 (2). Penelitian ini mengevaluasi kemungkinan dampak serangan virus Ebola dalam hal penularan dan kasus tambahan di RDK di tahun 2019. Hasil dari penelitian ini mencatat sejak Januari 2019 lebih dari 350 insiden mengganggu kegiatan tanggap darurat, dimana sepertiga dari 80% masyarakat target tanggap darurat melakukan perlawanan terhadap penanganan virus, pencegahan dan pengendalian infeksi, dan penguburan yang aman. Perbedaan penelitian Jombart dkk dengan penelitian penulis adalah jika Jombart mengevaluasi dampak serangan yang menekankan pada jumlah kasus dan jumlah penularan Ebola di negara Kongo. Sedangkan penelitian penulis menganalisis ancaman yang ditimbulkan akibat virus Ebola yang terjadi di RDK tahun 2018-2020 terhadap keamanan kesehatan jika dilihat dari konsep *Health Security* dalam *Human Security* yang merujuk pada kesehatan global. Keempat, artikel jurnal yang berjudul —Leadership in Times of Crisis: The Example of Ebola Virus Disease in Liberia¹² yang ditulis oleh Nyenswah, T., Engineer, C. Y., & Peters, D. H. Dalam artikel jurnal *Health System and Reform*, (2016), 2 (3), 194-207. Berdasarkan pengalaman pengendalian epidemi di Liberia, penelitian ini berfokus pada peran penting yang dimainkan pemimpin selama empat fase respons epidemi di Liberia.

Penelitian ini memeriksa bagaimana keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemimpin di setiap fase dalam menangani epidemi, dan melihat bagaimana pendekatan kepemimpinan berkembang selama fase epidemi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan teori Kepemimpinan Kontingensi (*contingency leadership theory*) untuk mengidentifikasi situasi dimana kepemimpinan yang kuat, bagaimana hubungan pemimpin dengan anggota, dan tugas terstruktur dapat mempengaruhi situasi dalam menangani krisis wabah Ebola di Liberia. Hasil dari penelitian ini secara umum menunjukkan perbedaan pengaruh yang ditimbulkan dari setiap pengambilan keputusan terhadap respons penanganan Ebola di Liberia. Perbedaan penelitian Nyenswah dkk dengan penelitian penulis terletak di subjek penelitian, dimana penelitian Nyenswah dkk berfokus pada analisis pengambilan keputusan oleh pemimpin dalam merespons epidemi Ebola di Liberia, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis ancaman yang ditimbulkan akibat wabah virus Ebola di RDK terhadap keamanan kesehatan. Perbedaan kedua terletak di pendekatan yang digunakan, jika Nyenswah dkk menggunakan pendekatan *contingency leadership theory*, maka dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan *Health Security* dalam *Human Security*. Terakhir artikel jurnal yang berjudul —Strategi World Health Organization dalam menangani Virus Ebola di Demokratik Republik Kongo tahun 2018-2019¹³ yang ditulis oleh Nurjanah, B., & Azzqy, A.A.R. Dalam jurnal *Balcony*, (2021), 5:1, 11-19. Penelitian ini menggunakan *International Regime Theory* atau Teori Rezim Internasional di dukung dengan konsep *Human Security* dan humaniter sebagai landasan teori. Hasil dari penelitian ini menunjukkan strategi dan langkah yang dilakukan oleh WHO untuk menghapus virus Ebola yang terjadi di DRK pada tahun 2018-2019. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada konsep yang digunakan yaitu konsep *Human Security* sebagai landasan teori. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus analisis, jika penelitian di atas menganalisis strategi yang dilakukan WHO dalam menangani virus Ebola di RDK tahun 2018-2019, maka penelitian penulis berfokus pada analisis ancaman wabah virus Ebola terhadap keamanan kesehatan (*Health Security*) di RDK tahun 2018-2020.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana epidemi virus Ebola mengancam keamanan kesehatan (*Health Security*) di Negara Republik Demokratik Kongo tahun 2018-2020 menggunakan konsep *Health Security* dalam *Human Security* dalam konteks Kesehatan Global.

II. METODE PENELITIAN / PETA PEMIKIRAN Konsep *Health Security* dalam *Human Security*

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep *Health Security* dalam *Human Security* sebagai kerangka pemikiran. Menurut UNDP, konsep *Human Security* atau keamanan manusia merupakan pendekatan yang secara kategoris memperluas arti keamanan yang mencakup keselamatan individu dan kelompok dari ancaman seperti kelaparan, penyakit, dan ketidakstabilan politik, serta perlindungan dari gangguan yang tiba-tiba mengancam kehidupan sehari-hari. Konsep ini mengidentifikasi tujuh dimensi utama yang apabila dicapai dapat mencerminkan kebutuhan dasar keamanan manusia, tujuh dimensi tersebut diantaranya: keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan kesehatan (*Health Security*), keamanan lingkungan (*environment security*), keamanan pribadi (*personal security*), keamanan masyarakat (*community security*), keamanan politik (*political security*). Terdapat 4 komponen penting dalam keamanan manusia yaitu berpusat pada individu, bersifat multidimensi, saling berhubungan dan universal. Natasha Lindstaedt (2021, hal. 14-15) dalam bukunya *Human Security in Disease and Disaster* menjelaskan empat komponen tersebut diantaranya: 1) Berpusat pada individu (*People centered*), konsep ini menentang gagasan tradisional tentang keamanan nasional (yang berfokus pada keselamatan negara dan agresi militer). Di mana inti dari komponen ini adalah melindungi kehidupan, berfokus pada kesehatan, kesejahteraan individu, dan memprioritaskan kebebasan mendasar pada individu. 2) Bersifat Multidimensi (*Multidimensional*), pendekatan keamanan manusia melihat dari berbagai aspek keseharian masyarakat termasuk, ekonomi, lingkungan, pangan, dan kesehatan. 3) Saling berhubungan (*Interconnected*), komponen ini merupakan kunci dari keamanan manusia karena ancaman tidak memiliki batas, saling berkaitan, dan berpotensi menyebarnya ancaman pada masyarakat di seluruh dunia (Macfarlane dan Khong, 2006 dalam *Human Security in Disease and Disaster*). 4) Universal (*Universal*), komponen ini berkaitan dengan tindakan preventif seperti pencegahan terhadap ancaman, Lindstedt (2021, hal.15) memberikan pandangan bahwa kegiatan pencegahan harus dilakukan dari bawah ke atas dan didukung oleh masyarakat yang mendapatkan akses ke perawatan kesehatan, dan pendidikan secara universal.

Konsep *Health Security* dalam keamanan manusia adalah keamanan dari ancaman penyakit menular yang mematikan, makanan dan air yang tidak aman, dan kurangnya akses ke perawatan kesehatan (Bajpai, 2003). Keamanan kesehatan memastikan tersedianya layanan dan perawatan kesehatan dasar, serta sistem pengawasan yang saling berhubungan guna mengidentifikasi wabah penyakit di semua tingkatan. Selain itu pendidikan dan pengetahuan universal mengenai masalah kesehatan, dan pengetahuan berbasis masyarakat menjadi faktor penting dalam konsep keamanan kesehatan (Lindstaedt, 2021, hal. 14). Penyediaan kebutuhan dasar individu dan pemikiran tentang bagaimana mencapai keamanan global menjadi fokus pendekatan keamanan manusia (Fidler, 2003 dalam *Human Security in Disease and Disaster*). Lindstaedt (2021, hal. 17) menyatakan bahwa muncul ancaman baru terhadap manusia di tingkat global yang melampaui negara, ancaman baru akan selalu ada mulai dari kelebihan populasi, polusi, degradasi lingkungan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan serta penyakit. Ancaman epidemi dapat memberikan dampak yang besar, seperti beberapa penyakit menular yang pernah terjadi di dunia yaitu Kolera di Amerika Latin, Wabah di India, Demam Berdarah di Asia, dan Ebola di Afrika. Lindstaedt (2021, hal. 14-45) menegaskan bahwa epidemi dapat merusak kapasitas negara untuk menyediakan perawatan kesehatan dan perlindungan dasar

pada individu. Konsep *Health Security* dalam keamanan manusia digunakan oleh penulis untuk menganalisis ancaman virus Ebola terhadap keamanan kesehatan di negara Republik Demokratik Kongo tahun 2018-2020.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Ancaman Epidemi Virus Ebola Terhadap Keamanan Kesehatan (*Health Security*) Negara Republik Demokratik Kongo Tahun 2018-2020.

Wabah Ebola yang terjadi di RDK pada tahun 2018-2020 menimbulkan ancaman terhadap Keamanan Kesehatan (*Health Security*) bagi masyarakat RDK jika dilihat menggunakan 4 komponen utama Keamanan Manusia berdasarkan penjelasan Natasha Lindstaedt (2021, hal. 14-15) adapun ancaman yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

1) **People Centered /Berpusat pada Individu**

Terancamnya keamanan kesehatan individu bagi masyarakat RDK, maksud dari komponen ini adalah melindungi kehidupan, berfokus padakesehatan, kesejahteraan individu, dan memprioritaskan kebebasan mendasar pada individu. Wabah Ebola yang terjadi di RDK di tahun 2018-2020 mengalami peningkatan jumlah kasus di tahun 2019 yang berdampak pada meningkatnya angka kematian individu di negara tersebut.

Peningkatan yang signifikan terjadi antara Maret hingga Juli 2019. Data tersebut diambil berdasarkan zona kesehatan di RDK yaitu di zona kesehatan Kivu Utara dan Ituri dari tahun 2018-2019. Selama beberapa bulan terakhir sejak diumumkankasnya kasus Ebola di provinsi Kivu Utara dan Ituri oleh pemerintah Republik Demokratik Kongo pada Agustus 2018, virus Ebola sudah menginfeksi 373 total kasus dengan angka kematian mencapai 217 jiwa terakhir per 19 November 2018. Sementara kasus terus berlanjut hingga tahun 2019 dan mengalami peningkatan baik dari segi jumlah kasus maupun angka kematian terakhir per 21 Juli 2019 dengan jumlah total kasus 2592 jiwa dengan total kematian akibat virus Ebola mencapai 1743 jiwa (WHO, 2019a).

Peningkatan kasus terjadi akibat dari penularan virus yang tergolong cepat dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut WHO (2018a) faktor tersebut seperti jaringan transportasi antar daerah yang masih berjalan tanpa adanya protokol kesehatan untuk mencegah penularan, perpindahan populasi secara internal yang mengakibatkan pendeteksian dan pengamanan kemungkinan kasus sulit dilakukan, kurangnya sosialisasi akan pemakaman yang aman menjadi salah satu risiko penularan Ebola cepat menyebar (WHO, 2021). Peningkatan kasus secara eksternal juga dapat dipengaruhi situasi keamanan yang sedang bergejolak, mulai dari aksi penolakan, keengganan masyarakat melaporkan kasus baru atau pelaporan kasus lanjutan yang menghambat pelaksanaan kegiatan tanggap darurat Ebola di wilayah-wilayah tertentu. Sejalan dengan konsep *Human Security* dimana fokus utama adalah individu atau populasi sebagai dasar terbentuknya keamanan suatu negara. *Human Security* atau keamanan manusia memiliki pandangan bahwa masyarakat yang sejahtera akan membentuk suatu negara yang aman (Lindstedt, 2021, hal.15). Tentu dengan munculnya kasus Ebola di RDK di tahun 2018 dan berlanjut ke tahun 2019 serta mengalami lonjakan kasus yang signifikan akan mengancam keamanan kesehatan individu di negara tersebut dikarenakan sulitnya mengakses perawatan kesehatan serta rawannya seorang individu tertular virus Ebola melihat dari jumlah kasus yang terus meningkat tentu risiko penularan terhadap individu juga semakin tinggi.

2) **Multidimensional (Multidimensional)**

Wabah Ebola di RDK menimbulkan potensi pencemaran ekosistem berdasarkan komponen ini pendekatan keamanan manusia melihat dari berbagai aspek keseharian masyarakat termasuk ekonomi, lingkungan, pangan, dan kesehatan. Meskipun virus Ebola bukan satu-satunya faktor yang menghambat sistem kesehatan di RDK akan tetapi wabah Ebola yang terjadi pada tahun 2018-2020 mengalami lonjakan kasus yang cukup tinggi mengakibatkan negara sulit untuk mengendalikan wabah sehingga menimbulkan ancaman baru. Jika dilihat dari aspek lingkungan yang dapat berdampak langsung dengan keamanan kesehatan adalah dilihat dari sejarah awal mula terinfeksi manusia pada virus Ebola yang ditularkan melalui hewan seperti Simpanse dan kelelawar. Virus Ebola dapat dikaitkan dengan perubahan ekologi yang mendekatkan manusia pada alam inang virus Ebola yang sebelumnya tidak berpenghuni akibat dari eksploitasi manusia sehingga penularan dapat terjadi.

Penemuan menunjukkan kelelawar adalah inang utama virus Ebola, dan kera besar menjadi inang sekunder, hal tersebut menunjukkan sebagian besar wabah EVD pada manusia ditandai dengan kematian kera besar dalam skala besar (Monath (62) dalam Ohimain, 2016. hal 15). Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya seorang etnologi perempuan asal Swiss. Wanita tersebut ditemukan sakit beberapa hari setelah melakukan otopsi pada seekor bangkai simpanse yang ditemukannya di taman Nasional Tai di Ivory Coast (dekat dengan perbatasan Liberia). Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa simpanse dan wanita tersebut telah terinfeksi virus Ebola di tahun 1994 (CDC, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa virus Ebola dapat mempengaruhi ekologi yang berdampak pada kesehatan. Berlandaskan pada definisi *Health Security* menurut Bajpai (2006) bahwa keamanan kesehatan adalah keamanan dari penularan penyakit yang mematikan, keamanan dari ancaman makanan, air, yang tidak aman (Lindstaedt, 2021. hal.15). Dilihat dari segi lingkungan virus Ebola yang dapat menular ke manusia melalui hewan maupun buah-buahan yang sudah terkontaminasi virus Ebola, dan manusia sebagai inang terakhir mengeksploitasi alam dengan berburu hewan kelelawar, simpanse, untuk disembelih, dijual bahkan dikonsumsi sebagai sumber protein tanpa mengetahui bahaya didalamnya dan mengancam kesehatan (Ohimain, 2016. Hal. 11). Meskipun belum diketahui secara pasti jumlah korban yang ditularkan oleh hewan secara langsung kepada manusia pada wabah EVD di tahun 2018-2020 tersebut, melihat dari kasus-kasus sebelumnya maka masyarakat RDK tentu memiliki ancaman berupa makanan yang tidak aman karena virus Ebola yang dibawa oleh inang pertama dapat ditularkan pada manusia. Makanan yang bersumber dari hewan, buah bahkan air sanitasi dapat terancam jika tidak ditangani dengan tepat, terutama pada saat pemakaman korban infeksi Ebola atau penyembelihan hewan hasil berburu yang dapat terbawa melalui darah.

3) **Saling berhubungan (Interconnected)**, Epidemologi virus Ebola menimbulkan kekhawatiran di tingkat nasional, regional maupun internasional. Komponen ini merupakan kunci dari keamanan manusia karena ancaman tidak memiliki batas, saling berkaitan, dan berpotensi menyebarnya ancaman pada masyarakat di seluruh dunia (Macfarlane dan Khong, 2006 dalam *Human Security in Disease and Disaster*). Selain dapat mengancam individu di negara RDK, virus Ebola dapat memunculkan kekhawatiran baik itu dalam skala nasional, regional dan internasional. Dalam laporan Eksternal WHO tahun 2018 yang ke-16, virus Ebola menyebar ke wilayah geografis yang lebih luas. Berdasarkan luas persebaran kasus Ebola di RDK tahun 2018 dan mengalami peningkatan di tahun 2019 maka

Direktur Jenderal WHO mengadakan Pertemuan Komite Darurat yang diselenggarakan pada 17 Juli 2019 memutuskan bahwa EVD yang terjadi di RDK menjadi salah satu penyakit Darurat Kesehatan Masyarakat yang menjadi perhatian Internasional atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) (WHO,2019b). Hal itu sejalan dengan konsep *Health Security* bahwa masalah keamanan kesehatan pada batas tertentu mungkin bisa untuk diatasi karena tidak semua masalah kesehatan menimbulkan sebuah ancaman yang serius untuk keamanan manusia, namun ada beberapa kriteria masalah kesehatan yang menimbulkan ancaman transnasional dimana negara tidak lagi mampu menanganinya hingga berpengaruh pada keamanan dan kehidupan individu (Curley & Thomas 2004: 19-20 dalam McInnes, 2015, hal. 12). Dalam laporan pernyataan Komite IHR yang diselenggarakan oleh WHO pada 17 Juli tahun 2019 menyatakan bahwa wabah Ebola yang terjadi di RDK memerlukan adanya tanggapan dan koordinasi di bawah peraturan IHR tahun 2005 sudah memenuhi syarat sebagai Kondisi Darurat Kesehatan Masyarakat yang menjadi Perhatian Internasional (PHEIC) (WHO, 2019.b). Di mana perluasan penyebaran virus Ebola di tahun 2018 meluas di tahun 2019, bahkan daerah-daerah yang sebelumnya tidak terkonfirmasi kini menjadi terkonfirmasi.

Berdasarkan laporan dari perwakilan Kementerian Kesehatan RDK dan Sekretariat WHO memberikan uraian terkait situasi wabah Ebola terkini di RDK, di mana terdapat perluasan geografis terhadap penyebaran virus Ebola di RDK, dan terus berlanjut ke daerah-daerah baru. Data dari WHO (2019a) daerah-daerah baru terkonfirmasi berdasarkan zona kesehatan di Kivu Utara dan Ituri adalah Alimbongo, Biena, Goma, Kayna, Lubero, Mangredjipa, Ariwara, Bunia, Komanda, Mambasa, Mandima dn Rwampa. Hal tersebut menjadi alasan kuat ditetapkannya virus Ebola di RDK menjadi PHEIC. Tujuan di deklarasikan PHEIC dibawah naungan IHR tahun 2005 adalah untuk melihat seberapa besar suatu peristiwa kesehatan yang mengarah pada kemungkinan adanya peningkatan risiko penularan baik nasional, regional maupun internasional dan berusaha meningkatkan tindakan untuk melakukan koordinasi dalam pengelolaannya. Walaupun risiko penularan secara internasional masih tergolong rendah akan tetapi melihat dari penyebarannya dapat meningkatkan risiko secara berkelanjutan (WHO, 2019b). Dalam laporan menyebutkan bahwa tingginya kasus juga menjadi salah satu alasan yang kuat wabah Ebola di RDK menjadi PHEIC, karena dilaporkan hampir 80 kasus tiap minggunya terjadi di daerah-daerah baru khususnya wilayah RDK (WHO, 2019a). Maka dari itu munculnya virus Ebola tidak hanya memunculkan kekhawatiran pada individu tetapi juga kekhawatiran pada tingkat regional dan internasional melihat persebaran kasus yang tergolong cepat pada wabah Ebola di tahun 2018 tersebut. Jika persebaran tidak cepat dihentikan maka tidak hanya mengancam stabilitas kesehatan tetapi juga ekonomi dan keselamatan para pelancong atau turis yang akan berkunjung di RDK seperti relawan bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya.

4) Universal

Komponen ini berkaitan dengan tindakan preventif seperti pencegahan terhadap ancaman. Lindstedt (2021, hal.15) memberikan pandangan bahwa kegiatan pencegahan harus dilakukan dari bawah (masyarakat) ke atas (pemerintah) dan didukung oleh masyarakat yang mendapatkan akses keperawatan kesehatan, serta pendidikan secara universal. Pada tanggal 1 Agustus 2018 Pemerintah RDK melaporkan adanya kasus virus Ebola di Provinsi Kivu Utara, dan Ituri kepada WHO. Kebijakan Pemerintah RDK dengan melaporkan wabah tersebut

kepada WHO berarti menunjukkan bahwa negara tersebut tidak dapat menangani kasus Ebola sendiri, dan memerlukan bantuan internasional untuk penanganannya. Lembaga- lembaga PBB seperti WHO, UNICEF dan lainnya bekerja sama membantu menangani wabah Ebola di RDK dengan tugas masing-masing, hal tersebut sejalan dengan ketentuan IHR tahun 2005 yang mendesak negara anggota untuk berkolaborasi dengan organisasi internasional secara aktif sesuai dengan ketentuan dibawah Regulasi Kesehatan Internasional agar dalam penerapannya dapat berjalan secara efektif (IHR, 2005. hal. 4). Hal ini bertujuan agar negara-negara anggota mudah untuk berkoordinasi serta memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di suatu negara serta penguatan respon kesehatan masyarakat global terhadap penyebaran penyakit internasional.

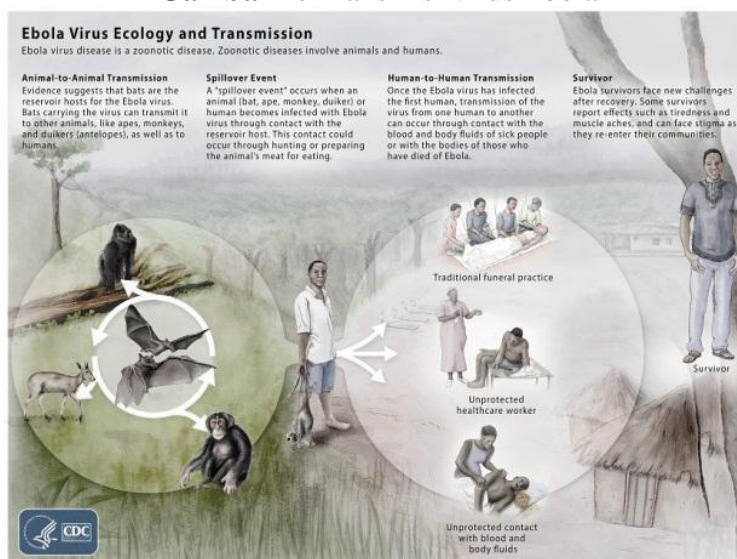
Keterlibatan bantuan asing untuk membantu menangani kasus Ebola memunculkan beragam respon, salah satu respon masyarakat terhadap bantuan asing untuk penanganan wabah Ebola menimbulkan kerugian bahkan sampai mengancam keselamatan petugas medis dan responden bantuan kemanusiaan. Beberapa kelompok orang di RDK menunjukkan ketidakpercayaan dan ketidaksukaan terhadap responden bantuan asing dengan cara melakukan penyerangan di beberapa pusat zona kesehatan penanganan Ebola di tengah berlangsungnya wabah di tahun 2018 hingga tahun 2019. Menurut BBC (2019a) kekerasan kelompok milisi disebabkan munculnya kecurigaan mereka terhadap bantuan petugas medis asing. Serangan dimulai dalam rentang waktu Mei 2019 hingga Desember 2019 tercatat lebih dari 300 kali serangan yang dilakukan oleh milisi lokal terhadap petugas medis hingga menewaskan 6 orang dan 70 orang luka-luka (MSF, 2020). Contoh kasus pembunuhan terhadap petugas medis yang paling disorot media adalah pembunuhan seorang dokter bernama Mouzoko merupakan petugas medis yang cukup berpengaruh dan banyak berjasa dalam penanganan wabah Ebola di RDK selama beberapa tahun terakhir, Mouzoko ditembak oleh sekelompok orang ketika sedang menangani pasien Ebola pada April 2019 (BBC, 2019a). Kasus lain juga menimpa seorang jurnalis Kongo yaitu Papy Mumbere Mahamba di Lwebma, yang banyak meliput berita dan kabar mengenai berlangsungnya wabah Ebola di RDK. Papy ditemukan tewas di kediamannya sementara isterinya di temukan terluka, tidak hanya itu pelaku pembunuhan juga membakar rumahnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti siapa pelaku pembunuhan tersebut (BBC, 2019b).

Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Medis Lancet tahun 2018 menyimpulkan bahwasannya kecurigaan tersebut muncul akibat masyarakat mempercayai informasi yang keliru sehingga tersebar luas, dimana riset menunjukkan bahwa satu dari empat responden percaya bahwa virus Ebola itu tidak ada, mereka percaya wabah Ebola bertujuan untuk keuntungan finansial para pemangku politik di negara mereka yang bekerjasama dengan pihak asing. Menurut Lara Salahi seorang penulis yang menulis tentang tanggapan terhadap wabah Ebola mengatakan bahwa kerusuhan sipil memang sudah terjadi di wilayah tersebut (Kivu Utara), dan kerusuhan semakin memburuk dengan datangnya bantuan asing ke RDK. Akibat serangan tersebut salah satu badan amal medis internasional Medecins Sans Frontieres (MSF) terpaksa menunda kegiatannya di Butembo dan Katwa di Kivu Utara (BBC, 2019a). Munculnya bantuan asing untuk Ebola serta adanya sosialisasi yang dilakukan petugas medis kepada masyarakat untuk tidak lagi mengobati sakit dengan ritual tradisional hal tersebut kerap membuat kemarahan di beberapa sekelompok orang, mereka menganggap virus Ebola hanyalah strategi para petugas kesehatan agar dapat bekerja dengan bayaran yang tinggi

(BBC,2019b). Dapat dilihat bahwa penanganan penanggulangan wabah EVD di RDK memiliki banyak hambatan karena kurangnya pengetahuan dasar akan sistem kesehatan, membuat pemenuhan kesehatan di negara tersebut sulit dilakukan. Komponen Universal dalam *Human Security* dalam hal ini belum terpenuhi di RDK disebabkan adanya wabah Ebola yang muncul kemudian bantuan internasional berdatangan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga petugas medis dan bantuan kemanusiaan dalam melakukan tindakan preventif seperti pencegahan, penanganan serta penghentian penularan virus terancam keselamatannya. Komponen Universal dalam keamanan manusia di negara tersebut sulit dicapai akibat kurangnya koordinasi beberapa kelompok militan dengan responden bantuan sehingga hal tersebut menimbulkan ancaman keselamatan bagi petugas medis maupun responden Ebola yang sedang bertugas.

B. PENULISAN TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1: Transmisi virus Ebola



Sumber: *Ebola Virus Ecology and transmission*, CDC.gov, 2018

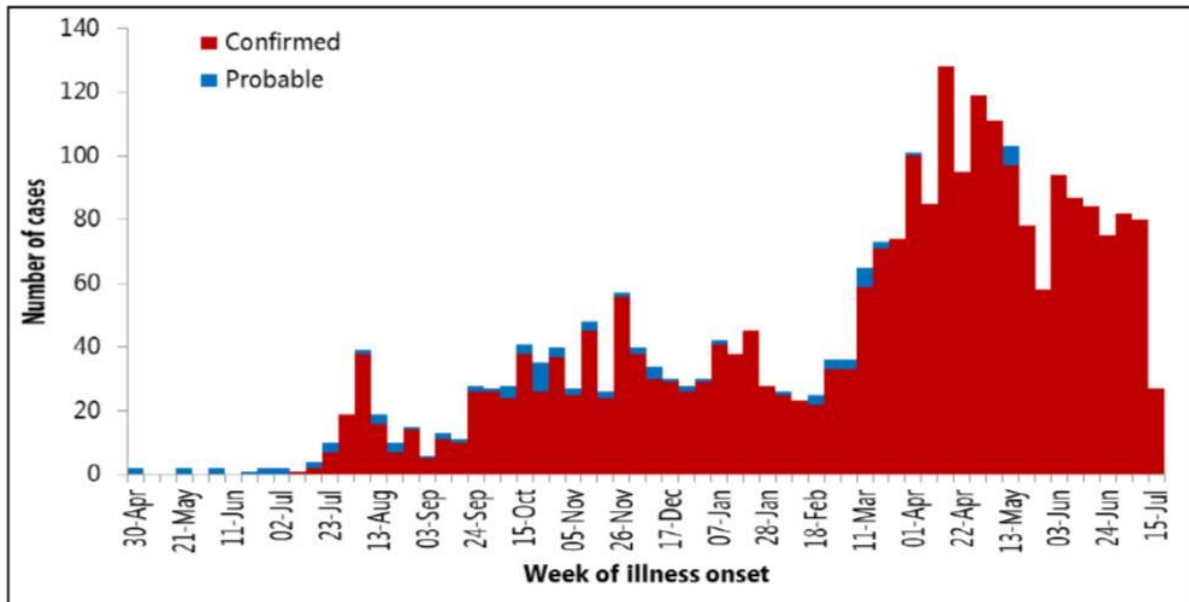
Tabel 1: Tahun Peristiwa Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo

No	Tahun	Tipe Virus	Wilayah kasus	Terkonfirmasi	Angka kematian/ Persentasi
1	1976	Zaire	Provinsi Equateur	318	280 (88%)
2	1995	Zaire	Kikwit	315	254 (81%)
3	2001	Zaire	Perbatasan Gabon, Mbomo, Kéllé	59	44 (75%)
4	2003	Zaire	Distrik Mbomo, Kéllé	143	128 (89%)
5	2005	Zaire	Pusat Kesehatan Etoumbi	12	10 (83%)
6	2007	Zaire	Mweka & Luebo	264	187 (71%)
7	2008	Zaire	Mweka & Luebo	32	15 (47%)
8	2014	Zaire	Sekitar wilayah Boende berbatasan dengan provinsi Quateur	69	49 (71%)
9	2017	Zaire	Bas Uele	8	4 (50%)
10	2018	Zaire	Kivu Utara, Kivu Selatan, Ituri	3418	2240 (66%)

Sumber: CDC, 2021

Berdasarkan data dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa wabah Ebola ke-10 yang terjadi di RDK pada tahun 2018 adalah wabah terbesar sejak tahun 1976, dilihat dari jumlah korban terinfeksi dan angka kematian tertinggi sepanjang wabah yang pernah terjadi di RDK. (CDC, 2021).

Gambar 2 : Kasus dikonfirmasi dan kemungkinan kasus Ebola di RDK per April 2018- 21 July 2019



Sumber: WHO, 2019a.

Gambar grafik menunjukkan adanya peningkatan kasus terkonfirmasi dan kemungkinan dari tahun 2018-2019, di mana peningkatan kasus tertinggi terjadi antara Maret hingga Juli 2019.

Tabel 2 : Kasus EVD berdasarkan klasifikasi dan zona kesehatan di Kivu Utara dan Ituri, Republik Demokratik Kongo, terakhir per 19 November 2018

Provinsi	Zona Kesehatan	Kasus dikonfirmasi	Kasus kemungkinan	Total kasus	Total meninggal
Kivu Utara	Beni	167	9	176	96
	Butembo	11	0	11	7
	Katwa	23	3	26	17
	Kalunguta	24	12	36	22
	Kyondo	2	2	4	3
	Mabalako	67	16	83	52
	Masereka	6	1	7	2
	Musienene	2	1	3	3
	Mutwanga	1	0	1	0
	Oicha	2	0	2	0
Ituri	Vuhovi	2	0	2	1
	Komanda	1	0	1	0
	Mandima	16	3	19	12
Total	Tchomia	2	0	2	2
		326	37	373	217

Sumber: WHO, 2018b.

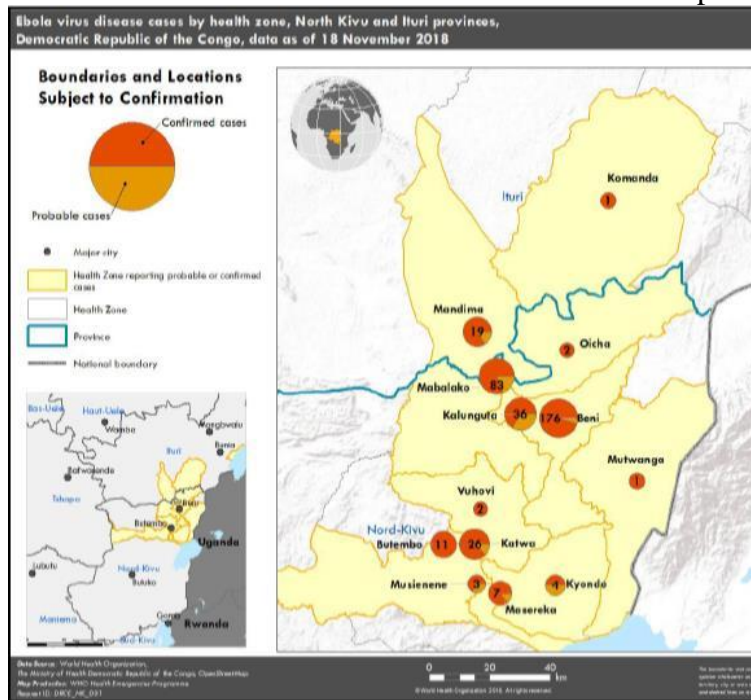
Dari data tersebut dapat disimpulkan dari awal diumumkannya kemunculan kasus Ebola di provinsi Kivu Utara dan Ituri hingga 19 November 2018 total kasus dikonfirmasi 326, kemungkinan kasus 37 jiwa, total kasus 373 dengan angka kematian mencapai 217 jiwa di tahun 2018. (WHO, 2018b).

Tabel 3 : Kasus Ebola berdasarkan zona kesehatan di Provinsi Kivu Utara & Ituri terkahir per 21 Juli 2019

Provinsi	Zona Kesehatan	Kasus konfirmasi	Kemungkinan kasus	Total kasus	Total meninggal
Kivu Utara	Alimbongo	4	0	4	2
	Beni	517	9	526	337
	Biena	15	1	16	13
	Butembo	258	0	258	295
	Goma	1	0	1	1
	Kalunguta	128	15	143	69
	Katwa	622	16	638	447
	Kayna	9	0	9	5
	Kyondo	22	2	24	15
	Lubero	29	2	31	6
	Mabalako	353	16	369	266
	Manguredjipa	20	0	20	12
	Masereka	48	6	54	22
	Musienene	71	1	72	30
	Mutwanga	13	0	13	7
	Oicha	51	0	51	24
Vuhovi	93	13	106	47	
Ituri	Ariwara	1	0	1	1
	Bunia	4	0	4	4
	Komanda	32	9	41	22
	Mambasa	3	0	3	2
	Mandima	193	4	197	110
	Nyakunde	1	0	1	1
	Rwampara	8	0	8	3
	Tchomia	2	0	2	2
Total		2498	94	2592	1743

Sumber: WHO, 2019a.

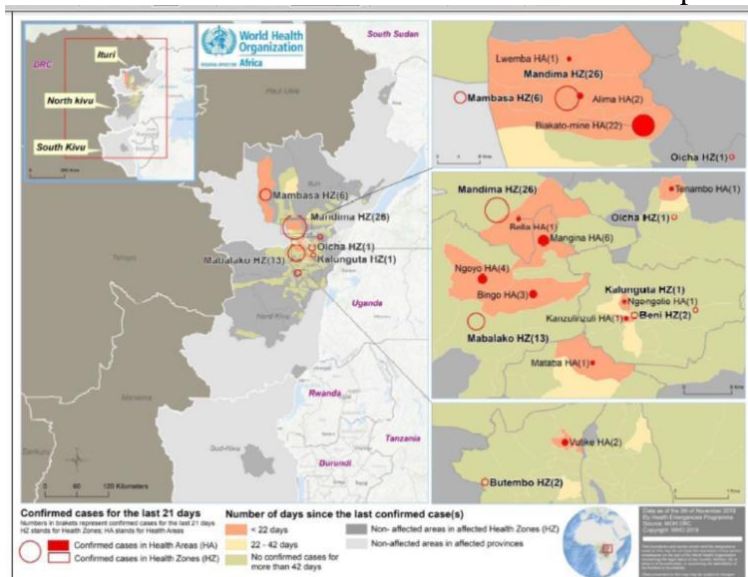
Gambar 3 : Persebaran Kasus EVD Berdasarkan Zona Kesehatan per 18 November 2018



Sumber: WHO, 2018b.

Gambar persebaran virus Ebola berdasarkan zona kesehatan di RDK di tahun 2018, di mana kasus terkonfirmasi belum memasuki angka yang tinggi dan persebaran titik virus belum meluas (WHO,2018b).

Gambar 4: Persebaran EVD Berdasarkan Zona Kesehatan di RDK per 3 November 2019



Sumber : WHO, 2019a

Dari gambar tersebut dapat dilihat persebaran virus Ebola di RDK mengalami perluasan penyebaran kasus di tahun 2019 dengan bertambahnya titik merah dan zona merah di zona kesehatan Provinsi Kivu Utara dan Ituri.

Tabel 4.1 : Lembaga Khusus Penanggulangan wabah Ebola di tahun 2018

No	Badan/Institusi Khusus	Tugas
1	Africa Centers for Disease Control	Penempatan tenaga kesehatan untuk pengawasan dan pelacakan kontak
2	US Centers for Disease Control (CDC)	Mendukung operasi manajemen insiden melalui penempatan staf
3	UK Department for International Development (DFID)	Mendukung pengawasan, IPC, Komunikasi risiko, dan keterlibatan masyarakat
4	US Agency for International Development (USAID)	Mendukung pengawasan, perlindungan dan pengendalian infeksi komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat, pengubran yang aman.

Sumber data: WHO, 2018b.

IV. KESIMPULAN & REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Ditetapkannya wabah Ebola menjadi PHEIC adalah karena melihat adanya ancaman yang ditimbulkan akibat dari wabah Ebola yang sedang berlangsung terhadap masyarakat dan di khawatirkan ancaman yang ditimbulkan akan terus meluas hingga ke negara-negara lain. Dalam konsep *Human Security* terdapat tujuh dimensi yang menjadi acuan dasar, yang mana apabila tujuh dimensi tersebut dapat dicapai maka kesejahteraan individu dapat terpenuhi. Keamanan kesehatan berfokus pada bagaimana suatu individu dapat terbebas dari ancaman penyakit menular, terbebas dari ancaman makanan tidak aman. Konsep *Health Security* dalam keamanan manusia dan kesehatan global melihat bahwa wabah Ebola yang terjadi di RDK pada tahun 2018-2020 dapat mengancam keamanan kesehatan individu di negara tersebut. Dapat dinyatakan baik dari komponen *People Centered*, *Multidimensi*, *Interconnected*, dan *universal*, ancaman yang muncul adanya virus Ebola saling berkaitan mulai dari ancaman peningkatan risiko pada individu, mengancam lingkungan yang berdampak langsung dengan kesehatan, risiko perluasan penularan virus ke beberapa wilayah yang lebih luas yang mengancam kesehatan global. Setelah dua tahun bergelut dengan penyebaran virus Ebola yang mewabah di RDK serta upaya penghentian kasus maka wabah Ebola di RDK tahun 2018 dinyatakan berhenti oleh WHO pada 25 Juni 2020 karena jumlah penurunan kasus yang turun secara drastis.

B. REKOMENDASI

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini baik dari segi penulisan maupun substansi yang ada, maka dari itu di harapkan nantinya penelitian ini dapat di kembangkan dan diteliti lebih dalam mengenai respon dan upaya pemerintah RDK dalam menangani virus Ebola di negaranya yang mana bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah RDK menerapkan peraturan perjanjian kesehatan dunia untuk menangani wabah Ebola di tahun 2018-2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Leaning, J. 2009. Health and *Human Security* in the 21st Century. In Facing Global Environmental Change (pp. 541-551). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Lindstaedt, N. 2021. *Human Security* in Disease and Disaster. Routledge. MacFarlane, S. N., & Khong, Y. F. 2006. *Human Security* and the UN: A critical history. Indiana University Press
- Mas'ood, M. 1990. Disiplin dan Metodologi Ilmu Hubungan Internasional. McInnes, C. 2015. The many meanings of *Health Security*. Routledge handbook of global *Health Security*, 7-17.
- Mulyana, Deddy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. 2007. *Human Security: Concepts and implications*. Routledge.

Jurnal:

- Bajpai, K. 2003. The idea of *Human Security*. *International Studies*, 40(3), 195-228. DOI: 10.1177/002088170304000301
- Heymann, D. L., Chen, L., Takemi, K., Fidler, D. P., Tappero, J. W., Thomas, M. J., ... & Rannan-Eliya, R. P. 2015. Global *Health Security*: the wider lessons from the west African Ebola virus disease epidemic. *The Lancet*, 385(9980), 1884-1901. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60858-3
- Jombart, T., Jarvis, C. I., Mesfin, S., Tabal, N., Mossoko, M., Mpia, L. M., ... & Fall, I. S. 2020. The cost of insecurity: from flare-up to control of a major Ebola virus disease hotspot during the outbreak in the Democratic Republic of the Congo, 2019. *Eurosurveillance*, 25(2), 1900735. <https://doi.org/10.2807/1560-7917>.
- Mayhew, S. H., Kyamusugulwa, P. M., Bindu, K. K., Richards, P., Kiyungu, C., & Balabanova, D. 2021. Responding to the 2018–2020 Ebola virus outbreak in the Democratic Republic of the Congo: rethinking humanitarian approaches. *Risk Management and Healthcare Policy*, 14, 1731.
- Mbala-Kingebeni, P., Pratt, C. B., Wiley, M. R., Diagne, M. M., MakialaMandanda, S., Aziza, A., ... & Ahuka-Mundeke, S. 2019. 2018 Ebola virus disease outbreak in Équateur Province, Democratic Republic of the Congo: a retrospective genomic characterisation. *The Lancet Infectious Diseases*, 19(6), 641647. [http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099\(19\)30124-0](http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30124-0)
- Mullen, L., Potter, C., Gostin, L. O., Cicero, A., & Nuzzo, J. B. 2020. An analysis of international health regulations emergency committees and public health emergency of international concern designations. *BMJ global health*, 5(6), e002502. DOI: 10.1136/bmjgh-2020-002502.
- Muzembo, B. A., Ntontolo, N. P., Ngatu, N. R., Khatiwada, J., Ngombe, K. L., Numbi, O. L., ... & Ikeda, S. 2020. Local perspectives on Ebola during its tenth outbreak in DR Congo: A nationwide qualitative study. *PloS one*, 15(10), e0241120. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241120>.
- Nguyen, V. K. 2019. An epidemic of suspicion—ebola and violence in the DRC. *New England Journal of Medicine*, 380(14), 12981299. DOI:10.1056/NEJMp1902682
- Nurjanah, B., & Azzqy, A. A. R. 2021. Strategi World Health Organization dalam Menangani Virus Ebola di Demokratik Republik Kongo Tahun 2018-2019. *Balcony*, 5(1), 11-19. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/240>
- Nyenswah, T., Engineer, C. Y., & Peters, D. H. 2016. Leadership in times of crisis: the example of Ebola virus disease in Liberia. *Health Systems & Reform*, 2(3), 194-207. DOI: 10.1080/23288604.2016.1222793.

- Obeng-Odoom, F., & Bockarie, M. M. B. 2018. The political economy of the Ebola virus disease. *Social Change*, 48(1), 18-35. DOI: 10.1177/0049085717743832.
- Ohimain, E. I. 2016. Ecology of Ebolavirus: a Review of Current Knowledge, Speculations and Future Research Directions. *Virology*, 1(3), 555564. DOI:10.19080/JOJIV.2016.01.555564
- Pourrut, X., Kumulungui, B., Wittmann, T., Moussavou, G., Délicat, A., Yaba, P., ... & Leroy, E. M. 2005. The natural history of Ebola virus in Africa. *Microbes and infection*, 7(7-8), 1005-1014. 04:006, 1-9. DOI: 10.1016J.micinf.2005.04.006.

Website Berita:

- BBC.News. DR Congo medics arrested over death of Ebola doctor. (8 Agustus, 2019a). <https://www.bbc.com/news/world-africa49276219> (diakses pada 11 April, 2022).
- BBC.News. Ebola:Attackers kill DR Congo journalist shining light on virus. (3 November, 2019b) <https://www.bbc.com/news/worldafrica-50283286> (diakses pada 11 April 2022).
- CDC (Centers for Disease Prevention and Control). Eastern Democratic Republic of the Congo Outbreak. CDC (Agustus, 2018). <https://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/drc/2018-august.html>. (diakses pada 7 Juni, 2021)
- CDC (Centers for Disease Prevention and Control). Ebola Histories Summaries. (Juli, 2020). <https://www.cdc.gov/vhf/ebola/history/summaries.html>. (diakses pada 7 Juni 2021).
- CDC (Centers for Disease Democratic Republic of the Congo). History of Ebola Virus Disease (EVD) Outbreaks. (October, 2021) <https://www.cdc.gov/vhf/ebola/history/chronology.html> (diakses pada 1 Januari 2022).
- CDC (Centers for Disease Democratic Republic of the Congo). 2017 Democratic Republic of the Congo, Bas Uélé District. (July, 2017) <https://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/drc/2017may.html> (Di akses pada 1 Januari 2022).

Sumber Lainnya:

- CDC.gov. (2018). Ebola Virus Ecology and transmission. Di unduh dari <https://www.cdc.gov/vhf/ebola/resources/virus-ecology.html>
- DREF. (2009). Operational Final Report: Democratic Republic of the Congo: Ebola Fever. Di unduh dari https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4415B6B BBCEE5D8085257600005517BE-Full_Report.pdf
- Gomez, O. (2013). *Human Security*. Laporan. UNDP. Di unduh dari http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_r-nhdrs.pdf
- IFRC. (2021). International Federation Red Cross Cooperation Update DRC, Africa: Ebola Virus Disease Outbreak. Di unduh dari <https://reliefweb.int/report/democratic-republiccongo/democratic-republic-congo-drc-africa-ebola-virusdisease-outbreak-0>.
- IHR. (2005). International Health Regulations (2005): Thrid Edition. Di unduh dari <https://www.who.int/publication/i/item/9789241550486>
- IMF. (2015). International Monetary Fund: Democratic Republic of the Congo. Di unduh dari <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15281.pdf>
- Jolly dan Ray. (2006). Human Development Report Office, National Human Development report series. Laporan. UNDP. Di unduh dari http://hdr.undp.org/sites/default/files/nhdr_human_security_gn.pdf
- MSF (Medecins Sans Frontieres). (2020). DRC's Tenth Ebola Outbreaks. Di unduh dari <https://www.msf.org/drc-tenth-ebola-outbreak>

- Ripoll, S., Gercama, I., Jones, T., & Wilkinson, A. (2018). Social science in epidemics: Ebola virus disease lessons learned. Di unduh dari <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/14160>
- UN Security Council. (2019). Statement by the president of Security Council. Di unduh dari <https://www.securitycouncilreport.org/undocuments/democratic-republic-of-the-congo/>
- UN Security Council. (2017). Statement by the President of Security Council. Di unduh dari <https://www.securitycouncilreport.org/undocuments/democratic-republic-of-the-congo/>
- UN Security Council. (2014). Resolution 2117/ Adopted by the Security Council at its 7268th meeting on 18 September 2014. Di unduh dari <https://digitallibrary.un.org/record/779813?ln=en#recordfiles-collapse-header>
- WHO. (2015a). Ebola Virus Disease. A Preliminary Report 21 May 2015. Di unduh dari <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/ebola-virus-disease>
- WHO. (2015b). Improving health system efficiency: Democratic Republic of the Congo: improving aid coordination in the health sector (No. WHO/HIS/HGF/CaseStudy/15.4). World Health Organization. Laporan WHO di unduh dari <https://apps.who.int/iris/handle/10665/186673>
- WHO. (2015c). Health worker Ebola infections in Guinea, Liberia and Sierra Leone: A Preliminary Report 21 May 2015. Di unduh dari http://www.who.int/hrh/documents/21may2015_web_final.pdf
- WHO. (2017). *Health Security: Is the World better prepared?* Di unduh dari <https://www.who.int/publications/10-year-review/chapterhealth-security.pdf?ua=1>
- WHO. (2018a). Statement on the October 2018 meeting of the IHR Emergency Committee on the Ebola virus disease outbreak in the Democratic Republic of the Congo. Di unduh dari <https://www.who.int/news/item/17-10-2018-statement-on-the-meeting-of-the-ihr-emergency-committee-on-the-ebola-outbreak-in-drc>
- WHO. (2018b). Ebola Virus Disease Democratic Republic of the Congo: External situation Report 16. Di unduh dari http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275944/SITREP_EVD_DRC_20181121-eng.pdf
- WHO. (2019a). Democratic Republic of Congo: Ebola Virus. External Situation Report 77. Di unduh dari <https://www.who.int/publications/i/item/ebola-virus-diseasedemocratic-republic-of-congo-external-situation-report-66-2019>
- WHO. (2019b). Statement on the meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee for Ebola virus disease in the Democratic Republic of the Congo on 17 July 2019. <https://www.who.int/ihr/procedures/statement-emergencycommittee-ebola-drc-july-2019.pdf>
- WHO. (2020). Ebola North Kivu/Ituri, Democratic Republic of the Congo, August 2018-June 2020. <https://www.who.int/emergencies/situations/Ebola-2019-drc->
- WHO. (2021). Ebola Virus Disease. (Februari, 2021). Di unduh dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease>
- World Bank. (2021). The World Bank in DRC. Di unduh dari <https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview#>

FENOMENA PERNIKAHAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN SUMBANG, KABUPATEN BANYUMAS

Dyah Retna Puspita¹; Slamet Rosyadi²; Pawrtha Dharma³; Alizar Isna

¹JDepartemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

²Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirnan, Purwokerto

³Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirnan, Purwokerto

⁴Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirnan, Purwokerto

dyah.puspita@unsoed.ac.id; slamet.rosyadi@unsoed.ac.id; pawrtha.dharma@unsoed.ac.id; alizar.isna@unsoed.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 membawa berbagai dampak sosial, antar lain adalah meningkatnya kasus pernikahan anak (di bawah usia 19 tahun). Di Kabupaten Banyumas, data tahun 2022 menunjukkan, dari sejumlah 306 kasus, jumlah terbanyak adalah di Kecamatan Sumbang sebanyak 72 kasus (23,5 persen). Untuk itulah, penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena pernikahan anak di kecamatan tersebut. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisis data sekunder dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang. Agar diperoleh perubahan kondisi baik sebelum dan selama pandemi Covid-19, maka dianalisis data tahun 2018- Mei 2022. Selanjutnya, data dikaji kecenderungannya dari aspek jumlah kasusnya berdasarkan gender, lokasi desa, pendidikan dan pekerjaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama hampir lima tahun ini, kasus terbanyak dan meningkat selama masa pandemi Covid-19 terjadi di Desa Kotayasa, Gandatapa dan Banteran. Terutama pada tahun 2000, kasus kebanyakan terjadi di kalangan anak perempuan. Baik perempuan maupun laki-laki, kebanyakan berpendidikan SLTP. Kebanyakan anak perempuan tidak bekerja, sedangkan anak laki-laki bekerja sebagai buruh lepas. Dari fenomena ini, diharapkan pihak Pemerintah Desa beserta semua pihak yang terkait (antara lain PKK, kader KB dan tokoh masyarakat) khususnya di ketiga desa dengan kasus terbanyak tersebut lebih meningkatkan sosialisasi pencegahannya melalui kegiatan penyuluhan, tidak hanya di kalangan perempuan melainkan juga laki-laki, termasuk di kalangan remaja.

Kata kunci: Kecamatan Sumbang, pernikahan anak, PKK, Kader KB, pandemi Covid-19

Abstract

The Covid-19 pandemic has brought various social impacts, including the increase in cases of child marriage (under the age of 19). In Banyumas Regency, data for 2022 shows, out of a total of 306 cases, the largest number is in the Subdistrict of Donations as many as 72 cases (23.5 percent). For this reason, this study aims to examine the phenomenon of child marriage in the sub-district. This type of research is descriptive qualitative by analyzing secondary data from the Office of Religious Affairs (KUA) in the Sub-district of Donor. In order to obtain changes in conditions both before and during the Covid-19 pandemic, the data for 2018-May 2022 was analyzed. Furthermore, the trend of the data was reviewed from the aspect of the number of cases based on gender, village location, education and occupation. The results of the analysis show that for almost five years, the most and increasing cases during the Covid-19 pandemic occurred in the villages of Kotayasa, Gandatapa and Banteran. Especially in 2000, cases mostly occurred among girls. Both women and men, mostly junior high school education. Most of the girls do not work, while the boys work as casual labourers. From this phenomenon, it is hoped that the Village Government and all related parties (including PKK, family planning cadres and community leaders) especially in the three villages with the most cases will further enhance prevention socialization through outreach activities, not only among women but also men. , including among adolescents.

Keywords: Subdistrict of Sumbang, child marriage, PKK, family planning cadres, Covid-19 pandemic

I. PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang banyak terjadi di masa pandemi Covid-19 adalah kasus pernikahan anak. Secara global, studi UNFPA (United Nations Population Fund) pada tahun 2020 menyebutkan adanya potensi terjadinya sekitar 13 juta perkawinan anak di dunia pada rentang waktu 2020-2030 akibat pandemi Covid-19. Adapun di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa meskipun secara nasional angka perkawinan anak turun dari 11,21 persen pada 2018 menjadi 10,82 persen pada 2019 dan 10,35 persen pada 2020, akan tetapi terjadi kenaikan di sembilan provinsi. Selain itu, data pada 2020 menunjukkan adanya 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka nasional (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun 2019 yang sebanyak 23.700. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Mengutip data BPS, pada tahun 2020 sebanyak 3,22 persen perempuan menikah di bawah usia 15 tahun, sedangkan pada laki-laki hanya 0,34 persen. Pada kelompok umur 16-18 tahun, sebanyak 27,35 persen perempuan, sedangkan pada laki-laki hanya 6,40 persen (Jayani, Januari, 8, 2021).

Fenomena peningkatan kasus pernikahan dini di masa pandemi tersebut terjadi di banyak daerah dan sudah banyak dikaji. Misalnya di Jawa Tengah (Atik dan Susilowati, 2022, Muhajarah dan Fitriani, 2022), Jawa Timur (Nikmah, 2021; Khasanah, 2022; Pramesti, 2022; Thahir, dan Husna, 2021; Saputra dkk., 2021, Geraldy, dkk, 2022), Bengkulu (Pitrianti dan Syakurah, 2021; Aulia, 2022; Luayyin, 2021) maupun Nusa Tenggara Barat (Maemunah dan Hafsa, 2021; Rini, 2021; Rahiem, 2021, Nazar, 2021). Fenomena serupa juga terjadi di beberapa negara miskin seperti di Bangladesh (Hossain et al, 2021; Mahtab dan Fariha, 2022), India (Paul & Mondal, 2021), Nigeria (Musa et al, 2021), Niger (Diane, 2021) dan Sub-Sahara Afrika (Kons & Sznajder, 2022). Pada umumnya mereka mengkaji faktor penyebab dan dampaknya. Akan tetapi, masih jarang yang menampilkan secara keseluruhan profil anak-anak yang menikah muda tersebut.

Peningkatan kasusnya juga terjadi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dengan 27 kecamatan yang ada, kabupaten ini memiliki dua Pengadilan Agama (PA) yang mengurus perkara dispensasi kawin sebagai syarat bagi pasangan (salah satu maupun keduanya) beragama Islam yang masih di bawah umur. Kedua PA tersebut adalah PA Banyumas yang membawahi 11 kecamatan dan PA Purwokerto yang membawahi 16 kecamatan. Di Pengadilan Agama (PA) Banyumas, terjadi lonjakan pemohon dispensasi nikah, dari yang semula hanya 114 pemohon di tahun 2019, menjadi 234 pemohon di tahun 2020. Pada tahun 2021, hingga bulan Maret 2021, Pengadilan Agama ini mencatat sudah 59 pemohon (Kuasakata, Maret 4, 2021). Adapun PA Purwokerto (yang membawahi 11 wilayah kecamatan) menyebutkan bahwa hingga bulan Oktober 2021, sudah terdapat 224 pemohon, padahal tahun sebelumnya hingga akhir tahun hanya 298 pemohon. Bahkan di tahun 2019 hanya 138 pemohon. Mayoritas dari kasus tersebut disebabkan karena pihak perempuan telah hamil terlebih dahulu (Radar Banyumas, Oktober 13, 2021).

Sementara itu, data Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menyebutkan bahwa pada akhir tahun 2020 terdapat 306 kasus pernikahan di bawah umur dengan kasus terbanyak (72 kasus atau 23 persen) terjadi di Kecamatan Sumbang. Mayoritas kasusnya terjadi pada anak perempuan yakni sebanyak 343 kasus. Adapun pada anak laki-laki jumlahnya 135 anak. Adapun pasangan yang keduanya masih di bawah umur adalah sebanyak 79 pasang. Di Kecamatan Sumbang, sebagian besarnya juga adalah anak perempuan (56 anak), sedangkan anak laki-laki sebanyak 17 anak. Adapun pasangan yang keduanya masih di bawah umur sebanyak 10 pasang (Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, 2021).

Dengan fenomena tersebut, perlu dikaji lebih mendalam bagaimana profil anak-anak yang menikah muda tersebut. Hal ini penting diketahui, agar memudahkan para pengambil kebijakan untuk melakukan penanganan dan pencegahannya. Agar diketahui perbedaan kondisinya dibandingkan sebelum pandemic Covid-19, perlu dikaji pula data yang sama di tahun sebelum terjadinya Covid-19. Atas dasar inilah, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana fenomena pernikahan anak di Kecamatan Sumbang pada tahun 2018 hingga bulan Mei 2022 dilihat dari perkembangan jumlahnya berdasarkan gender, penyebaran desanya, tingkat pendidikan serta jenis pekerjaan pasangan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang sebagai instansi yang mengurus proses perkawinan di wilayah Kecamatan Sumbang. Agar diperoleh perubahan kondisi sebelum dan selama pandemi Covid-19, maka fenomenanya dianalisis sejak tahun 2018 hingga bulan terakhir sebelum penelitian dilaksanakan yakni Mei 2022. Data yang terkumpul selanjutnya dikaji kecenderungannya dari aspek jumlah kasusnya berdasarkan gender, lokasi desa, umur, pendidikan dan pekerjaan.

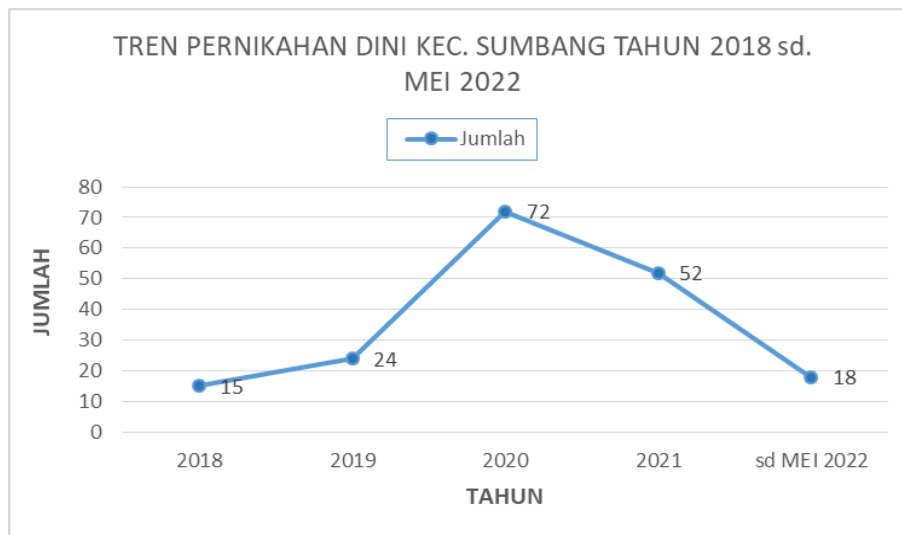
III. ANALISIS

Pernikahan anak, yakni pernikahan yang salah satu atau kedua mempelai masih berumur di bawah batas minimal yang dipersyaratkan. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal umur menikah baik untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Dengan demikian, jika calon pengantin yang beragama Islam (baik salah satu maupun keduanya) akan mendaftarkan pernikahannya di KUA dalam kondisi umur di bawah 19 tahun, maka pihak KUA setempat akan menolaknya dan meminta mereka untuk mengurus dispesasi (disebut Dispensasi Nikah) terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.

Berikut ini ditampilkan profil pasangan yang menikah di bawah umur 19 tahun di Kecamatan Sumbang sejak tahun 2018-Mei 2022. Data diambil dari Buku Nikah di KUA Kecamatan Sumbang. Lembaga ini merupakan instansi yang mengurus pernikahan bagi mereka yang beragama Islam.

A. Jumlah Kasus Pernikahan Anak Tahun 2018 – Mei 2022

Selama tahun 2018 hingga bulan Mei 2022, jumlah kasus pernikahan muda (yang masuk kategori Bawah Umur/BU) yang terjadi di Kecamatan Sumbang terus meningkat. Diawali dengan 15 kasus di tahun 2018, jumlahnya terus meningkat hingga menjadi 18 kasus di bulan Mei 2022. Peningkatan sangat tajam terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 72 kasus dari yang semula hanya 24 kasus, meskipun kemudian menurun menjadi 52 kasus di tahun 2021. Hingga bulan Mei tahun 2022, kasusnya sudah mencapai 18 kasus. Dengan asumsi setiap tahun terjadi 4 kasus (yang diperoleh dari rata-rata setiap tahun selama tahun 2018-2021), maka diperkirakan pada akhir tahun 2022 akan terjadi 48 kasus. Berikut ini ditampilkan data pada tahun 2018-Mei 2022.



Gambar 1. Grafik Tren Pernikahan Muda di Kecamatan Sumbang Tahun 2018-Mei 2022

Sumber: KUA Kecamatan Sumbang, Kab. Banyumas (Olah Data)

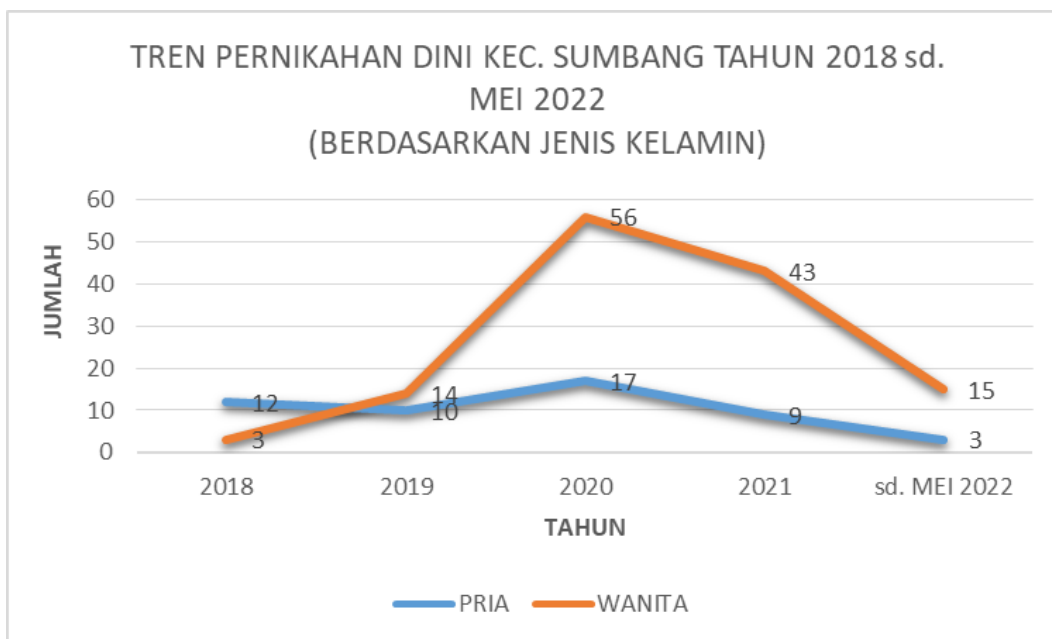
Apabila dilihat dari total pernikahan yang terjadi di KUA Sumbang setiap tahun pada periode yang dikaji tersebut, tampak bahwa persentase pernikahan mudanya berkisar antara 1,91 persen hingga 10,10 persen. Persentase tertinggi tersebut terjadi pada tahun 2020 yang kemudian beranjak turun hingga menjadi 8,11 persen di bulan Mei 2022. Berikut ini tabel mengenai persentase jumlah pernikahan anak di Kecamatan Sumbang tahun 2018 hingga bulan Mei 2022.

Tabel 1. Jumlah Pernikahan dan Jumlah Pernikahan Anak di Kecamatan Sumbang Tahun 2018-Mei 2022

Tahun	Jumlah pernikahan	Jumlah Perkawinan Anak	% Perkawinan Anak
2018	786	15	1,91
2019	838	24	2,86
2020	713	72	10,10
2021	739	52	7,04
Mei 2022	222	18	8,11

Sumber: KUA Kecamatan Sumbang (Olah Data)

Apabila dilihat dari gendernya, tampak bahwa setiap tahunnya kasus pernikahan muda tersebut selalu didominasi oleh anak wanita/perempuan. Perbedaan yang paling menyolok terjadi pada tahun 2020 di mana jumlah anak perempuannya adalah sebanyak 56 anak, sedangkan anak laki-laki hanya 17 anak. Dengan kata lain, jumlah anak perempuan yang menikah dini di tahun tersebut mencapai 76,71 persen, sedangkan anak laki-laki hanya 23,29 persen. Selanjutnya pada tahun 2021, jumlahnya menurun menjadi 52 kasus. Namun demikian, persentase anak perempuannya meningkat menjadi 82,69 persen atau 43 anak, sedangkan pada anak laki-laki hanya 9 kasus. Kondisi ini ditampilkan pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Jumlah Pernikahan Muda di Kecamatan Sumbang Berdasarkan Gender Tahun 2018-Mei 2022

Sumber: KUA Kecamatan Sumbang, Kab. Banyumas (Olah Data)

Apabila diperbandingkan dengan semua desa di Kecamatan Sumbang, maka fenomena dominannya anak perempuan yang menikah muda hanya tampak pada data di tahun 2020 sebagaimana tampak pada Gambar 3 berikut ini. Adapun desa yang dominan dengan anak perempuan yang menikah adalah desa Gandatapa, Kotayasa dan Banteran.

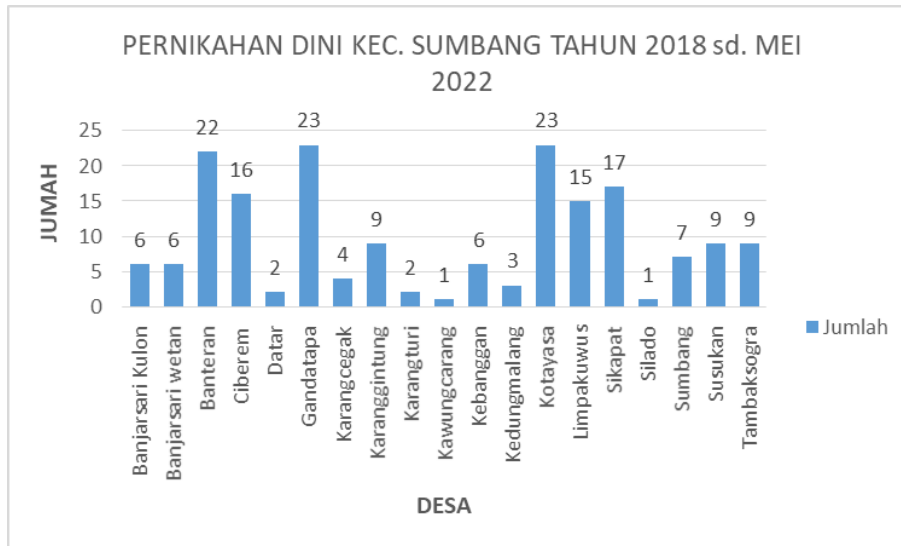


Gambar 3. Perkembangan Kasus Pernikahan Muda di Kecamatan Sumbang Berdasarkan Gender Tahun 2018-Mei 2022

Sumber: KUA Kecamatan Sumbang, Kab. Banyumas (Olah Data)

B. Sebaran Desa

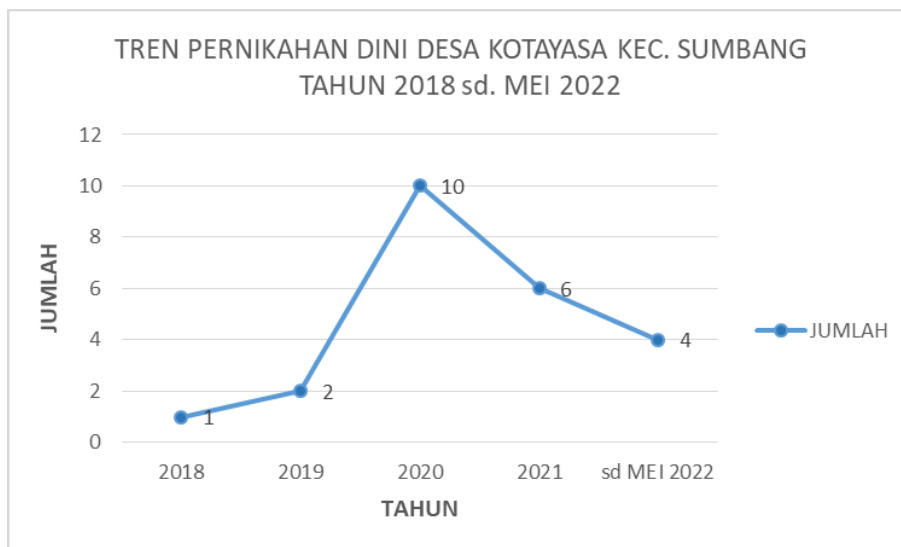
Agar dapat dilakukan upaya penanganan dan pencegahannya, perlu digali pula informasi lokasi terjadinya kasus tersebut. Selama tahun 2018-Mei 2022, desa yang memiliki jumlah kasus terbanyak adalah desa Gandatapa dan Kotayasa (masing-masing 23 kasus) dan desa Banteran dengan 22 kasus. Adapun desa yang selama periode tersebut hanya memiliki satu kasus adalah desa Karangturi dan Silado yakni masing-masing dengan satu kasus. Berikut ini ditampilkan gambarnya.



Gambar 4. Sebaran Desa Terjadinya Pernikahan Muda di Kecamatan Sumbang Tahun 2018-Mei 2022

Sumber: KUA Kecamatan Sumbang, Kab. Banyumas (Olah Data)

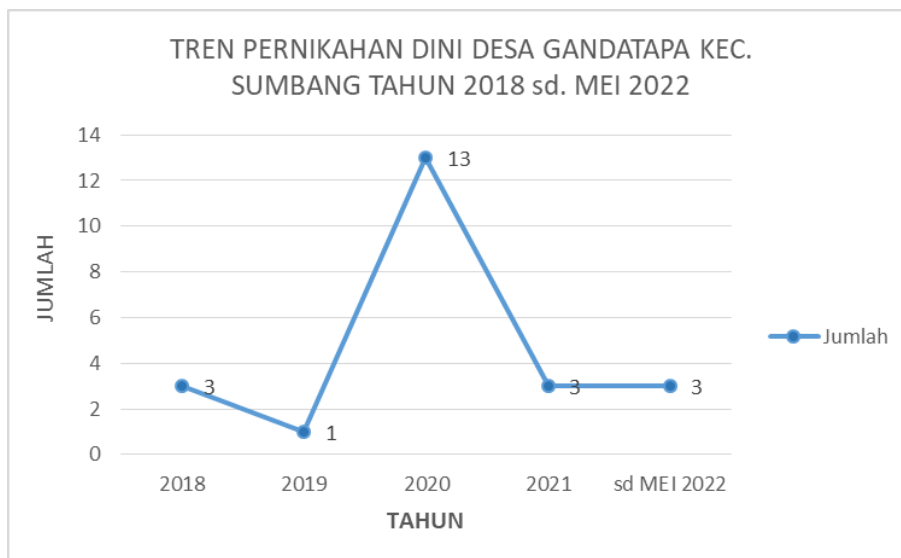
Di desa Kotayasa, jumlah kasusnya meningkat dari yang semula hanya satu kasus di tahun 2018, bertambah menjadi dua kasus di tahun 2019 dan meningkat pesat menjadi 10 kasus di tahun 2020, meski kemudian turun lagi menjadi enam dan empat kasus di tahun-tahun sesudahnya. Fenomena ini ditampilkan di Gambar 5 berikut ini.



Gambar 5. Perkembangan Kasus Pernikahan Muda di Desa Kotayasa Tahun 2018- Mei 2022

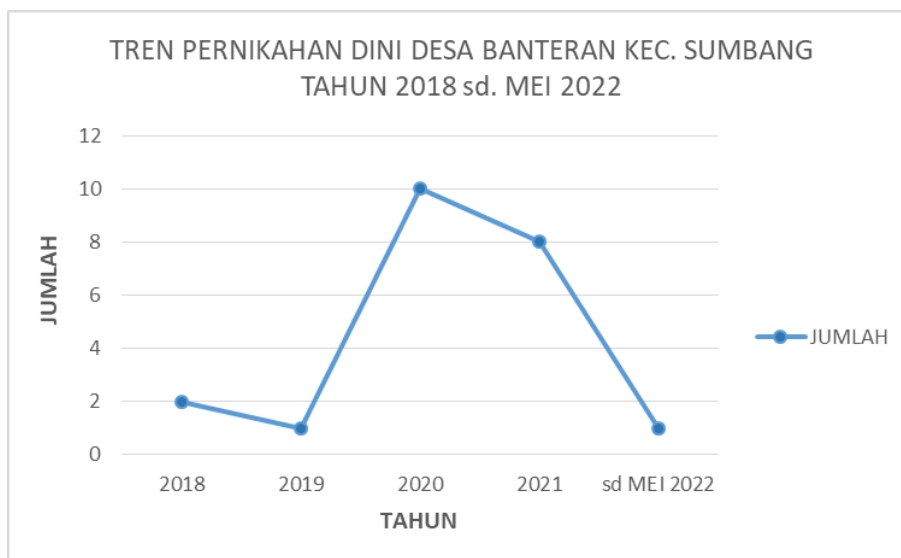
Sumber: KUA Kecamatan Sumbang, Kab. Banyumas (Olah Data)

Di desa Gandatapa, lonjakan kasusnya juga terjadi di tahun 2020. Jika semula hanya tiga kasus di tahun 2018 dan bahkan kemudian menurun menjadi hanya satu kasus, tiba-tiba melonjak menjadi 13 kasus di tahun 2020. Namun demikian, di tahun berikutnya hingga bulan Mei 2022 jumlahnya kembali menurun menjadi hanya tiga kasus (Gambar 6). Pelonjakan pada tahun 2020 juga terjadi di desa Banteran sebagaimana tampak pada Gambar 7.



Gambar 6. Perkembangan Kasus Pernikahan Muda di Desa Gandatapa Tahun 2018- Mei 2022

Sumber: KUA Kecamatan Sumbang, Kab. Banyumas (Olah Data)



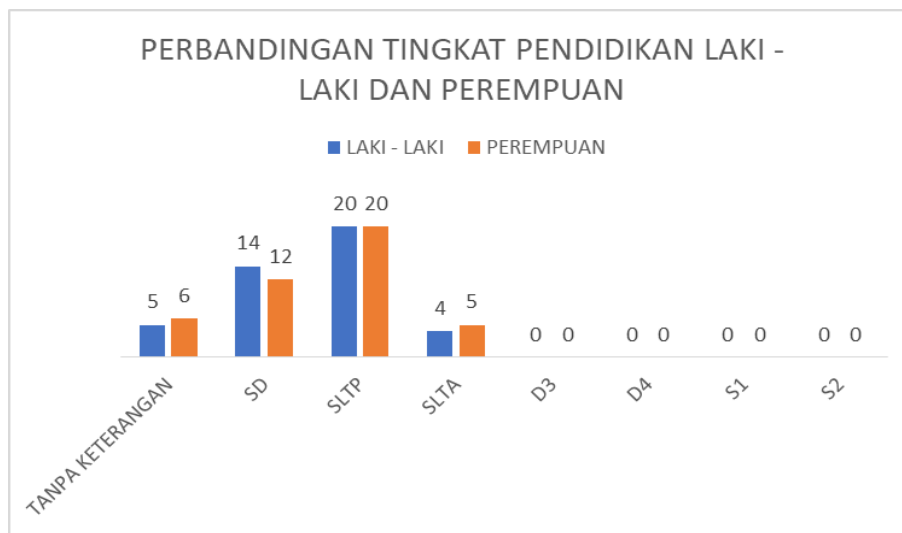
Gambar 7. Perkembangan Kasus Pernikahan Muda di Desa Banteran Tahun 2018-Mei 2022

Sumber: KUA Kecamatan Sumbang, Kab. Banyumas (Olah Data)

C. Tingkat Pendidikan

Informasi lain yang dapat digali dari data KUA Kecamatan Sumbang adalah tingkat pendidikan dari mereka yang menikah muda meskipun hanya muncul pada format Buku Nikah Tahun tahun 2021. Dari data yang ada tampak bahwa pada umumnya

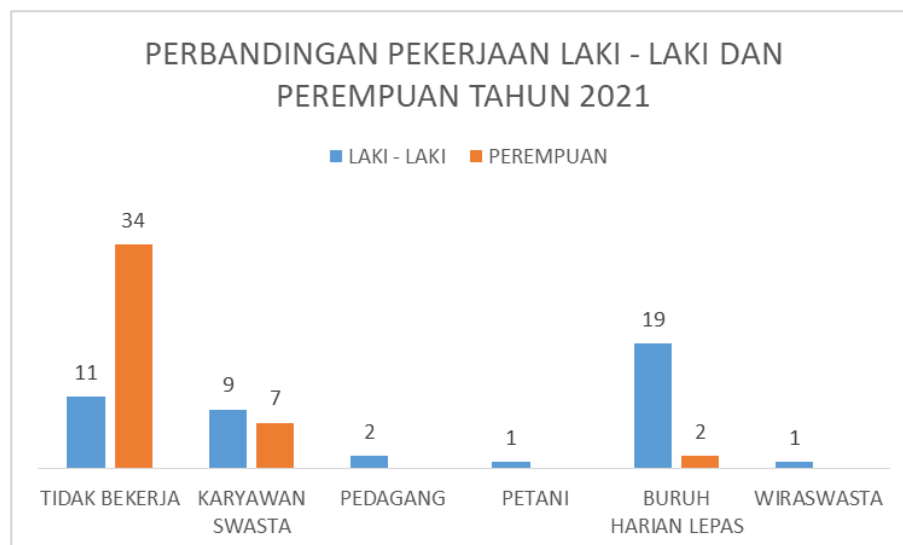
mereka yang menikah muda tersebut (baik perempuan maupun laki-laki) hanya berpendidikan SMP. Tingkat pendidikan yang paling tinggi hanyalah SMA. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 8 berikut ini.



Gambar 8. Tingkat Pendidikan Anak yang Menikah Muda di Kecamatan Sumbang Berdasarkan Gender Tahun 2021
Sumber: KUA Kecamatan Sumbang, Kab. Banyumas (Olah Data)

D. Jenis Pekerjaan

Informasi lain yang dapat dikaji dari Buku Nikah di KUA Kecamatan Sumbang adalah jenis pekerjaan dari pasangan tersebut, meskipun data yang tersedia hanya di tahun 2021. Dari data ini tampak bahwa di kalangan anak perempuan, kebanyakan mereka tidak bekerja, sedangkan di kalangan anak laki-laki, kebanyakan bekerja sebagai buruh harian lepas. Dengan kata lain, tingkat penghasilan mereka termasuk rendah. Hal ini tidak terlepas dari tingkat pendidikan mereka yang juga rendah. Kondisi ini ditampilkan pada Gambar 9 berikut ini.



Gambar 8. Jenis Pekerjaan Anak yang Menikah Muda di Kecamatan Sumbang Berdasarkan Gender Tahun 2021
Sumber: KUA Kecamatan Sumbang, Kab. Banyumas (Olah Data)

Pembahasan

Dominannya anak perempuan yang mengalami pernikahan usia muda sejak tahun 2018-Mei 2022 yang ditemukan di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ini memperkuat data yang dikeluarkan BPS yang menyebutkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 3,22 persen perempuan menikah di bawah usia 15 tahun, sedangkan pada laki-laki hanya 0,34 persen. Pada kelompok umur 16-18 tahun, sebanyak 27,35 persen perempuan, sedangkan pada laki-laki hanya 6,40 persen (Jayani, 8 Januari 2021). Hal ini ditemukan juga dari penelitian Pitriyanti, dkk., (2021) dan bahkan terjadi di banyak negara (Alqahtani & Alqahtani, 2021).

Data yang ada di Buku Nikah Kecamatan Sumbang tidak menyebutkan faktor penyebab terjadinya pernikahan muda, terutama di kalangan anak perempuan. Namun demikian, beberapa penelitian (antara lain Nikmah, 2021; Geraldi dkk., 2022; Luayyin, 2021) menemukan bahwa salah satu alasannya adalah karena anak perempuan tersebut sedang hamil. Faktor lainnya adalah rendahnya pendidikan dan kemiskinan (antara lain Hastuty, 2018; Nazar, 2021). Hal ini juga terjadi di Kecamatan Sumbang di mana hal ini tampak dari tingkat pendidikan mereka yang rendah (kebanyakan SLTP). Demikian pula dengan jenis pekerjaannya yang kebanyakan adalah buruh harian lepas. Dilihat dari lokasi desa yang banyak terdapat kasus ini, kebanyakan lokasinya cukup jauh dari ibukota kecamatan. Desa-desanya tersebut (terutama Kotayasa) juga tidak memiliki sekolah jenjang SMA/ sederajat. Adapun lokasi SMK yang terdekat, ada di Kecamatan Baturaden yang cukup jauh dari desa tersebut, sehingga apabila harus bersekolah di sana harus memiliki sarana kendaraan (motor). Jikapun tidak, berarti harus indekost, yang berarti menambah biaya. Hal inilah yang membuat kebanyakan anak (terutama putri) tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SLTP

Pelonjakan kasus pernikahan muda pada tahun 2020 antara lain disebabkan oleh mulai diberlakukannya amandemen Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU yang baru ini, batasan umur menikah bagi perempuan dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Adapun batasan umur minimal bagi laki-laki tetap, yakni 19 tahun. Dugaan ini terkait dengan meningkat tajamnya jumlah anak perempuan yang menikah di tahun tersebut yakni 56 anak, sedangkan anak laki-laki hanya 17 anak. Hal ini masih terjadi di tahun berikutnya di mana jumlah anak perempuan mencapai 43 anak, sedangkan anak laki-laki hanya sembilan anak.

Banyaknya anak (terutama anak perempuan) yang menikah di Kecamatan Sumbang tersebut perlu diwaspadai, mengingat dampaknya yang multidimensi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pernikahan muda pada keluarga miskin akan berdampak negatif tidak saja merugikan anak dan keluarganya, melainkan juga Negara. Fenomena ini dapat meningkatkan resiko terjadinya KDRT karena banyaknya faktor pemicu, antara lain kondisi psikis dan ekonomi yang belum siap. Juga dapat membahayakan bayi/anak akibat kurang gizi, pola asuh anak yang salah dan tidak ditunaikannya hak-hak anak lainnya. Pada akhirnya kondisi ini dapat merugikan Negara dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Dampak lainnya adalah intifikasi anak yang tidak tercatat karena tidak memiliki akta kelahiran, sehingga memunculkan resiko terburuk yaitu terjadinya perdagangan anak (Maemunah dan Hafsah, 2021)

IV. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Dari potret pernikahan muda di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tahun 2018-Mei 2022 tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemic Covid-19, terjadi pelonjakan kasusnya, terutama di tahun 2020. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Hal ini terutama terjadi di tiga desa yang lokasinya cukup jauh dari ibukota kecamatan. Kebanyakan dari mereka adalah dari keluarga kurang mampu yang tampak dari mayoritas tingkat pendidikannya yang hanya SMP/ sederajat dan di kalangan anak laki-laki kebanyakan hanya buruh lainnya lepas.

Dari fenomena tersebut maka direkomendasikan beberapa hal yakni:

- (1) Perlunya upaya pencegahannya melalui penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, pentingnya pendidikan, penggunaan gawai (*gadget*) secara positif dan bertanggungjawab serta pendidikan agama yang tidak hanya kepada anak dan remaja laki-laki, melainkan bahkan terutama anak/remaja perempuan.
Hal ini dilakukan secara bersinergi oleh Penyuluh KB, Penyuluh Agama serta organisasi-organisasi social keagamaan yang ada di desa seperti PKK, Karang Taruna, NU, dan Muhammadiyah.
- (2) Perlunya upaya mengatasi kemiskinan di desa dengan mengoptimalkan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi bagi keluarga-keluarga miskin, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Termasuk juga kebutuhan untuk bersekolah bagi anak-anak mereka.

V. PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada LPPM Universitas Jenderal Soedirman yang telah mendanai penelitian ini dengan Dana DIPA Tahun Anggaran 2022. Juga kepada para petugas/staf di KUA Kecamatan Sumbang yang telah memberikan datanya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi upaya pencegahan kasus pernikahan muda di kecamatan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alqahtani, J., & Alqahtani, I. (2021). COVID-19 and child marriage: A red flag. *Journal of Clinical Nursing*.
- Atik, N. S., & Susilowati, E. (2022). Hubungan Peran Keluarga dengan Tingkat Pengetahuan Siswa SMK tentang Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 13(1), 360-367.
- Aulia, R. D. (2022). *Maraknya pernikahan dini di masa pandemi: Studi sosio-legal di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Deane, T. (2021). Marrying young: limiting the impact of a crisis on the high prevalence of child marriages in Niger. *Laws*, 10(3), 61.
- Gerald, G., Pratama, D. E., Amzali, M., & Ravasio, G. W. (2022). Perkawinan Dini di Masa Pandemi: Studi Fenomenologi di Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 23(1), 47-61.
- Hastuty, Y. D. (2018). Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan dini di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*, 2(2), 55-64.
- Hossain, M. J., Soma, M. A., Bari, M. S., Emran, T. B., & Islam, M. R. (2021). COVID-19 and child marriage in Bangladesh: emergency call to action. *BMJ paediatrics open*, 5(1).
- Jayani, Dwi Hadya, 8 Januari 2021. Analisis Data Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>
- Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Data Perkawinan Tahun 2021.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 7 Agustus 2020. Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan!
- Khasanah, U. (2022). *Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Kons, K., Biney, A. A., & Sznajder, K. (2022). Factors Associated with Adolescent Pregnancy in Sub-Saharan Africa during the COVID-19 Pandemic: A Review of

- Socioeconomic Influences and Essential Interventions. *International Journal of Sexual Health*, 1-12. LT.com., Maret 12, 2022. Menteri PPPA Akui Angka Perkawinan Dini di Indonesia Masih Tinggi. <https://labuanbajoterkini.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-1643956036/menteri-pppa-akui-angka-perkawinan-dini-di-indonesia-masih-tinggi?page=2>
- Kuasaakata, Maret 4, 2021. 234 ABG Usia 16-18 Tahun di Banyumas Ajukan Dispensasi Nikah Muda. <https://kuasaakata.com/read/berita/27953-234-abg-usia-16-18-tahun-di-banyumas-ajukan-dispensasi-nikah-muda>
- KUA Kecamatan Sumbang. Buku Nikah. Tahun 2018 – Mei 2022.
- Luayyin, R. H. (2021). Pernikahan Dini Dan Problematikanya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3(2), 76-89.
- Maemunah, M., & Hafisah, H. (2021). Dampak-Dampak Terjadinya Perkawinan Anak di Era Pandemi Covid-19. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 53-62.
- Mahtab, N., & Fariha, T. N. (2022). Pandemic Within a Pandemic: Gendered Impact of COVID-19 in Bangladesh with a Focus on Child Marriage and Domestic Violence. In *Understanding Post-COVID-19 Social and Cultural Realities* (pp. 199-226). Springer, Singapore.
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). EDUKASI STOP PERNIKAHAN DINI MELALUI PENYULUHAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268-2274.
- Musa, S. S., Odey, G. O., Musa, M. K., Alhaj, S. M., Sunday, B. A., Muhammad, S. M., & Lucero-Prisno, D. E. (2021). Early marriage and teenage pregnancy: The unspoken consequences of COVID-19 pandemic in Nigeria. *Public Health in Practice*, 2, 100152.
- Nazar, A. (2021). *Pernikahan dini remaja pada masa pandemi covid-19 (studi di dusun montong nangka desa kerembong kecamatan janapria kabupaten lombok tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Nikmah, J. (2021). Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi: Studi Kasus Di Desa Ngunut. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3).
- Paul, P., & Mondal, D. (2021). Child marriage in India: A human rights violation during the COVID-19 pandemic. *Asia Pacific Journal of Public Health*, 33(1), 162-163.
- Pitrianti, L., Novrikasari, N., & Syakurah, R. A. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 488-498.
- Pramesti, A. D. (2022). *Pola Komunikasi Orang Tua Dengan Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Kediri* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).
- Rahiem, M. D. (2021). COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia. *Child Abuse & Neglect*, 118, 105168.
- Rini, I. (2021). *KEBIJAKAN PEMERINTAH LOMBOK TIMUR DALAM MENANGGULANGI KASUS PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI DI DESA LEPAK KECAMATAN SAKRA TIMUR TAHUN 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Saputra, B. N. A., Wicaksana, Y., Lestari, E. D., & Triningtyas, D. A. T. (2021, August). FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI COVID-19. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL DIES NATALIS 41 UTP SURAKARTA* (Vol. 1, No. 01, pp. 117-121).
- Thahir, A. H., & Husna, N. (2021). Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk. *Abdimas Indonesian Journal*, 1(2), 113-131.

ADAPTASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) DENGAN PENDEKATAN GENDER SEBAGAI BENTUK INKLUSI SOSIAL MENGHADAPI COVID 19 (STUDI KASUS PROGRAM TJSL 'IBU SIAGA COVID 19' PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT IV CILACAP)

Aditya Anung Dwi Nugroho¹; Puji Rahmawati²; King Amil Hamzah Al Hakim Shodikin³

¹Jr. Officer CSR and SMEPP: PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV CILACAP, CILACAP

² Administration Staff: PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV CILACAP, CILACAP

³ Community Development Officer: PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV CILACAP, CILACAP

Email : csr Pertamina.ruiv@gmail.com

Abstrak

PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit IV Cilacap (PT KPI RU IV Cilacap) telah melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Program ini dikemas dengan nama program Kemiren Asri (Kampung Ekonomi Kreatif Untuk Masyarakat Mandiri) atau kini dikenal dengan branding inovasi program 'Ibu Siaga Covid 19'. Kegiatan program ini terfokus pada pengembangan kelompok UMKM. Pandemi Covid-19 memberikan perubahan yang cukup drastis pada berbagai aspek. Pendapatan kelompok Kegiatan UMKM menurun hingga > 50%, wilayah ini juga terpaksa menerapkan local lockdown dikarenakan adanya kasus positif Covid 19 di wilayah tersebut. Dampak negatif yang terjadi segera diakomodir oleh PT KPI RU IV Cilacap dengan menerapkan adaptasi program TJSL yaitu program dengan pendekatan gender dan inklusi sosial. Proses yang terjadi ini melatarbelakangi branding program 'Ibu Siaga Covid 19' dimana kata 'Ibu' mengacu pada potensi inklusi sosial dengan pendekatan gender. Adaptasi ini mampu memberikan perubahan yang signifikan dalam program. Dengan menggunakan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) diperkuat dengan metode dari Michael Quinn Patton, mendapatkan kesimpulan bahwa adaptasi program TJSL di tengah pandemic akan berhasil dengan penerapan beberapa tahapan program yaitu : supporting potensi inklusi sosial, kolaborasi stakeholder, pendampingan dan evaluasi berkala oleh perusahaan.

Kata Kunci: *Kemiren Asri, Ibu Siaga Covid 19, Inklusi Sosial, Gender*

Abstract

PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit Cilacap (PT KPI RU IV Cilacap) has carried out a Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) program in Tegalkamulyan Village, South Cilacap District, Cilacap Regency. This program is packaged under the name of the Kemiren Asri program (Creative Economic Village for Independent Communities) or now known as the innovation branding of the 'Mother Siaga Covid 19' program. This program activity focuses on developing the MSME group. The Covid-19 pandemic has brought about drastic changes in various aspects. The income of the MSME Activity group decreased by > 50%, this region was also forced to implement a local lockdown due to positive cases of Covid 19 in the region. The negative impact that occurred was immediately accommodated by PT KPI RU IV Cilacap by implementing the adaptation of the CSR program, namely a program with a gender approach and social inclusion. This process is the background for the branding of the 'Ibu Siaga Covid 19' program where the word 'Ibu' refers to the potential for social inclusion with a gender approach. This adaptation is able to provide significant changes in the program. By using the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) reinforced by the method from Michael Quinn Patton, it is concluded

that the adaptation of the CSR program in the midst of a pandemic will succeed by implementing several stages of the program, namely: supporting the potential for social inclusion, stakeholder collaboration, mentoring and periodic evaluations by the company.

Keywords: Kemiren Asri, Ibu Siaga Covid 19, Social Inclusion, Gender

I. PENDAHULUAN

Program Kampung Ekonomi Kreatif untuk Masyarakat Mandiri (Kemiren Asri) merupakan program pengembangan UMKM wilayah Kampung Kemiren, tepatnya di Kelurahan TegalKamulyan RW 14. Program yang diinisiasi oleh PT Pertamina RU IV Cilacap dari empat tahun terakhir, telah berhasil mengembangkan wilayah tersebut menjadi sentra produksi UMKM. Produksi UMKM dihasilkan dari 10 kelompok kegiatan dan 3 kelembagaan. Adapun 10 kelompok kegiatan yang telah terbentuk adalah : 1) kelompok produksi jamur, 2) kelompok budidaya cacing, 3) kelompok produksi jamu, 4) kelompok budidaya lele, 5) kelompok budidaya bebek bergulir, 6) kelompok pupuk organik, 7) kelompok budidaya basur, 8) kelompok kebun gizi, 9) kelompok handycraft 10) kelompok telur asin dan 11) kelompok keaksaraan fungsional Selain itu, terbentuk pula tiga kelembagaan yang telah aktif yaitu : 1) Koperasi Kemiren Asri Mandiri, 2) Pos PAUD, dan 3) Posyandu. Keunikan dalam program kelompok Kemiren Asri adalah pada sinergisitas yang terbentuk antar kelompok kegiatan dan kelembagaan yang ada.

Gambar 1. Sinergisitas Progam Kemiren Asri



Sumber : Dokumen Presentasi PROPER Emas 2020 PT KPI RU IV Cilacap

Selain membentuk *system zerowaste*, keberhasilan Program Kemiren Asri juga telah memberikan dampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada hasil laporan kelompok tahun 2019 kelompok diperoleh data bahwa setiap bulan setidaknya setiap anggota mendapatkan rata rata 500 – 600 ribu rupiah / bulan, pada kegiatan keaksaraan fungsional juga telah menekan angka buta aksara menjadi 0 kasus, dan pada tahun yang sama sudah tidak ditemukan adanya kasus gizi buruk. Program Kemiren Asri juga mendapatkan penghargaan IGA Awards 2020 untuk kategori pengolahan sampah terpadu, selain itu juga telah mendapat penghargaan PR Awards untuk kategori ComDev 2020. Namun semenjak adanya pandemic

Covid 19, segala progress yang telah dicapai oleh Program Kemiren Asri semakin. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan dari penerima manfaat.

“kita sedih sekali adanya corona memang bikin pesenan menurun, ada kali lebih dari 30%, itu dari satu produk aja, yak lo di rata rata lebih dari 50 % ada” (wawancara kelompok produksi jamur 16 Juni 2020)”

Kondisi seperti ini dirasakan hampir oleh semua kelompok kegiatan UMKM, terlebih lagi wilayah Kampung Kemiren telah masuk dalam zona merah karna telah ditemukan kasus positif Covid 19 di awal tahun 2019. Kondisi ini juga mempengaruhi terhadap kepercayaan pelanggan. Melihat keterputusan ini, akhirnya PT KPI RU IV Cilacap melakukan sebuah adaptasi sekaligus inovasi dalam kegiatan yang ada di Kampung Kemiren dalam bingkai program ‘Ibu Siaga Covid 19 Kemiren’. Dalam hal ini program Ibu Siaga Covid 19 adalah pengembangan adaptasi dari program Kemiren Asri. Sasaran dalam kegiatan ini adalah kelompok wanita atau dalam hal ini disebut ibu – ibu, mengingat lebih dari 90% kelompok Kemiren Asri didominasi oleh wanita / ibu rumah tangga. Penelitian yang membahas terkait TJSL sudah pernah dibahas dalam beberapa jurnal atau kajian ilmiah, dalam hal ini peneliti telah menelaah beberapa jurnal terkait TJSL sebagai landasan latar belakang untuk memperkuat latar belakang penelitian ini.

Pertama, pada jurnal berjudul ‘Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Ecovillage di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali’ dijelaskan terkait program pemberdayaan masyarakat atau TJSL yang berfokus pada lingkungan. Program ini menekankan pada implementasi konsep *eco-village* dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah atau limbah. Hasil dalam penelitian ini masyarakat lebih memahami metode pengolahan sampah, baik organik maupun non organik. Kritik dari penelitian tersebut adalah masih belum menjelaskan terkait proses perubahan perilaku pada masyarakat sehingga masih terkesan praktis atau kontekstual. Selain itu metode yang digunakan masih dirasa kurang tepat. Perlu kajian lebih mendalam dari penelitian ini.

Kedua, pada jurnal berjudul ‘Covid-19 Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam’ dijelaskan bahwa sejatinya pengembangan masyarakat sangat berkaitan dengan sejarah perkembangan dakwah islam, dimana secara perspektif pengembangan komunitas Islam juga memberikan rekomendasi adaptasi dan mitigasi pengembangan Covid-19. Kritik dalam penelitian ini terkait penggunaan metode *study literature* masih kurang relevan untuk membuktikan hipotesis penelitian tersebut. Sehingga perlu adanya kajian lapangan yang lebih mendalam untuk menemukan hasil yang lebih objektif, terutama dalam penelitian sosial yang dinamis dimana realitasnya bisa jauh berbeda apabila dilihat lebih dekat di lapangan.

Dari kedua penelitian tersebut, nampaknya masih sangat sedikit penelitian yang membahas mendalam terkait proses dalam TJSL khususnya peran dari sebuah inklusi sosial, sehingga sangat diperlukan penelitian lanjutan atau pengembangan dengan melihat implementasi TJSL di lapangan. Dalam hal ini penerapan adaptasi program TJSL Program Kemiren Asri menjadi sangat menarik untuk diteliti, pasalnya masih belum ada penelitian yang membahas terkait strategi adaptasi program TJSL yang mampu memberikan perubahan atau dampak positif di tengah masyarakat. Harapannya dengan adanya penelitian ini mampu memberikan contoh bagaimana UMKM mampu beradaptasi di tengah pandemic Covid 19 ataupun rekomendasi program kepada *stakeholders* terkait baik dari pemerintah, institusi pendidikan maupun perusahaan.

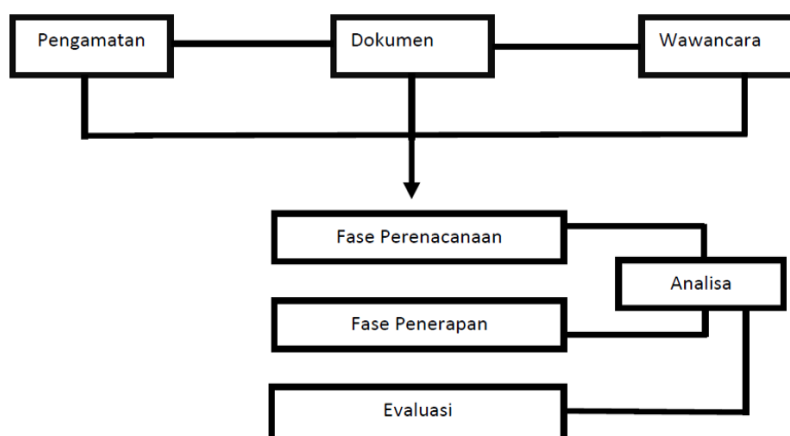
II. METODE PENELITIAN / PETA PEMIKIRAN

Tipe metode penelitian yang digunakan dalam penelitian atau peta pemikiran jika artikel berupa opini. Program Ibu Siaga Covid 19 Kemiren Asri, adalah sebuah program adaptasi dan inovasi pengembangan kegiatan TJSL, sehingga guna memetakan alur dan konsep diperlukan kerangka teori ataupun konsep guna membedah kondisi ini. Guna menjawab hal tersebut menggunakan konsep TJSL, dalam buku berjudul '*Corporate Social Responsibility*' dijelaskan bahwa Konsep *Community Development* (ComDev) atau dalam hal ini adalah TJSL merupakan kegiatan pembangunan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimanta, 2002 dalam *Corporate Social Responsibility*. Bambang Rudianto & Mella Famion. Hal 141).

Dari konsep tersebut dapat diketahui bahwa suatu program TJSL adalah program yang terencana bukan terjadi tiba – tiba atau mengalir tanpa arahan. Guna mempermudah dalam melakukan kajian, peneliti akan memaparkan penelitian menjadi tiga fase, yaitu : perencanaan, penerapan dan evaluasi. Data yang diperoleh menyesuaikan dengan metode yang ada dari Michael Quinn Patton. Dalam sebuah penelitian metode adalah hal yang sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi kualitatif dari *Michael Quinn Patton*, dimana dalam metode ini dijelaskan bahwa metode kualitatif dapat dikumpulkan data sebagai berikut : (1) wawancara mendalam, (2) observasi langsung dan (3) pemanfaatan dokumen tertulis (Metode Evauasi Kualitatif, *Michael Quinn Patton*, hal.1). dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga cara tersebut guna memperoleh data yang konkrit selanjutnya data yang terkumpul dilakukan reduksi data agar memperoleh data yang relevan dengan studi kasus.

Wawancara yag dilakukan oleh peneliti menyasar pada penerima manfaat (masyarakat Kemiren Asri). Disperindakop, Plut, dan CV AW Collection. Observasi langsung telah dilakukan peneliti dengan cara partisipasi langsung dalam setiap kegiatan dilaksanakanya program. Peneliti melakukan pengamatan mulai dari perencanaan, penerapan hingga kegiatan evaluasi sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Pemanfaatan dokumen tertulis diperoleh dari data dokumen laporan progress kegiatan program sebagai data primer dan dokumentasi berupa foto. Pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan penelitian adalah pendekatan dinamika. Pendekatan ini digunakan untuk melihat segala fenomena sosial yang terjadi dalam penerapan progam, sehingga dapat ditemukan sebuah pola tertentu. Dari definisi konsep dan metode tersebut, dapat dirumuskan sebuah framework penelitian sebagai berikut:

Gambar 2. Framework Penelitian



III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN (Analisis untuk hasil penelitian dan Pembahasan untuk Artikel Opini)

Dalam penelitian ini, ditemukan fakta bahwa telah terjadi adaptasi pelaksanaan program TJSL yang diinisiasi oleh PT KPI RU IV Cilacap dengan penerima manfaat. Anggaran pengembangan program yang dilokasi untuk wilayah Kemiren Asri, diadaptasi menjadi program dalam merespon Covid 19. Adaptasi terjadi dalam tiga tahapan pelaksanaan TJSL yang terbagi menjadi tiga fase yaitu : perencanaan, penerapan dan evaluasi.

A. PERENCANAAN

Pada tahap perencanaan PT KPI RU IV Cilacap melakukan update kajian *social mapping* pada penerima manfaat, kajian *social mapping* ini dilakukan oleh *Community Development Officer* (CDO) sebagai fasilitator dari pihak perusahaan. Adapun hasil *social mapping* ditemukan catatan sebagai berikut :

Tabel 1. Kajian Update Social Mapping Kelurahan Tegalkamulyan

Aspek	Catatan
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah Kemiren Asri masuk dalam kategori zona merah, hal ini dikarenakan ditemukannya kasus positif Covid 19 pada salah satu warganya. • Kemiren Asri melakukan 'local lockdown' guna mengantisipasi kemungkinan persebaran.
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Kemiren Asri masih melaksanakan produks olahan UMKM namun kuantitasnya dikurangi hingga 40% • Pemasaran produk hanya dipasarkan secara lokal Kemiren Asri melalui Koperasi Kemiren Aari Mandiri dan warung warung kecil • 30% warga yang berprofesi sebagai nelayan, terhambat aktivitasnya karena kondisi paila, adalah kondisi 'paceklik' bagi nelayan dikarenakan kondisi alam yang tidak menentu • Berkurangnya kepercayaan 'pelanggan' akibat status zona merah di Kemiren Asri
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi penurunan pendapatan lebih dari 50% bagi masyarakat pelaku UMKM di Kemiren Asri akibat Covid 19
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat sadar akan status zona merah dan urgensi adanya Covid 19, sehingga masyarakat inisiatif membentuk gugus tugas serta melakukan 'locak lockdown' • Kemiren Asri menjadi wilayah wajib masker

Data hasil *social mapping* dijadikan sebagai landasan dalam tindak lanjut program atau rencana strategis yang akan ditentukan oleh perusahaan. Dalam Program Adaptasi Ibu Siaga Covid 19, perusahaan menggandeng institusi lain untuk bekerjasama antara lain : Disperindakop Kabupaten Cilacap, CV AW Collection, PT Baris Jaya Indonesia dan Koperasi Kemiren Asri Mandiri. Sinergisitas dengan kelembagaan memiliki fungsi yang berbeda. Disperindakop sebagai perwakilan dari dinas atau pemerintahan berkordinasi dengan Plut Cilacap. Sedangkan CV AW Collection merupakan pelaku usaha dalam bidang produksi aneka design kain jahitan. Sedangkan Koperasi Kemiren Asri adalah institusi kelembagaan *non profit* yang ada di masyarakat, Koperasi Kemiren Asri sendiri berperan dalam pengawasan kegiatan UMKM di wilayah pengembangan.

B. PENERAPAN

Kegiatan program Ibu Siaga Covid 19 Kemiren Asri adalah berbentuk pelatihan untuk kelompok kegiatan yang terkena dampak dari adanya Covid 19. Terdapat tiga kegiatan pelatihan ini, setiap kegiatan memiliki penerima manfaat yang berbeda satu sama lainnya, namun memiliki tujuan yang sama yaitu memlihkan keterpurukan akibat Covid 19 sekaligus memberikan

pemahaman baru atau ilmu baru. Secara umum konsep adaptasi program yang diusung oleh perusahaan adalah program diversifikasi produk, artinya penambahan produk lokal UMKM dari yang sebelumnya telah dikembangkan oleh perusahaan. Diversifikasi produk yang dikembangkan tidak dilakukan tanpa alasan. Perusahaan bersama dengan masyarakat, memetakan potensi apa yang ada di lingkungan sekitar. Kesepakatan terbentuk dengan melihat adanya beberapa potensi lingkungan diantaranya :

1. Terdapat jahe merah hasil kebun warga dengan pemanfaatan kebun gizi dan lahan terbatas yang belum dimanfaatkan
2. Terdapat lidah buaya hasil kebun gizi yang belum dimanfaatkan secara optimal
3. Tingginya permintaan masyarakat untuk belajar menjahit di tengah pandemi, pasalnya banyak penerima manfaat yang terhenti untuk memproduksi produk UMKM selama pandemic

Kegiatan diversifikasi produk UMKM pada program Ibu Siaga Covid 19 dimulai dengan pelatihan olahan jahe merah. Sebelumnya Kemiren asri telah memiliki olahan rempah-rempah dari hasil kebun warga yaitu : minuman serbuk cair dari jahe 'biasa' dan kunir. Sebelum adanya pandemic Covid 19, jahe merah tidak digunakan dalam oleh kelompok ini namun tetap dibiarkan tumbuh dan berkembang di pekerangan warga dan juga kebun gizi warga. Namun dengan adanya Covid 19 potensi Jahe Merah yang dipercayai memiliki khasiat untuk meningkatkan imun tubuh mulai dilirik oleh warga.

Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Olahan Jahe Merah



Sumber : Dokumentasi PT KPI RU IV Cilacap

Proses dalam pembuatan olahan jahe merah, tidak berbeda dengan pembuatan olahan jahe biasa. Sehingga kemampuan dalam olahan jahe merah adalah sebuah *local knowledge* yang sudah ada di masyarakat khususnya kelompok olahan jahe. Seperti sudah kita ketahui bahwa kelompok olahan jahe sudah ada pada pengembangan program Kemiren Asri. Dengan adanya pandemic Covid 19 diversifikasi produk dan *sharing knowledge* dilakukan oleh kelompok olahan jamu tradisional kepada masyarakat. Sasaran pelatihan adalah warga Kemiren Asri yang belum memiliki kelompok UMKM dan atau yang telah memiliki kelompok UMKM namun terhenti karena terdampak Covid 19.

Dalam hal ini peran Koperasi Kemiren Asri Mandiri melakukan pendataan warga sejumlah 12 orang untuk melakukan pelatihan. Indikator keberhasilan dalam pelatihan ini adalah dimana penerima manfaat mampu mempraktikkan kembali dalam proses produksi olahan jahe merah. Adapun olahan yang diajarkan dalam kegiatan ini adalah : geplak jahe merah, sirup jahe merah dan serbuk jahe merah.

Guna memperkuat adaptasi program Covid 19, pelatihan pembuatan masker dan hazmat juga dilaksanakan oleh CV AW Collection. Pelatihan selama 2 hari ini menasar pada 11 orang penerima manfaat yang terdiri dari beberapa mitra, dimana sebagian dari penerima manfaat

adalah warga Kemiren Asri. Para perwakilan ini nantinya diwajibkan untuk *sharing knowledge* dan membentuk kelompok di lingkungannya. Cara ini juga merupakan strategi TJSL dalam memunculkan *local hero* pada wilayah penerima manfaat.

Gambar 4. Pelatihan Menjahit Masker dan Hazamat



Sumber : Dokumentasi PT KPI RU IV Cilacap

Setelah melaksanakan pelatihan, CV AW Collection akan memonitoring dengan membentuk MoU agar kegiatan pelatihan tetap berkelanjutan. Beberapa point dalam MoU antara CV AW Collection dengan Koperasi Kemiren Asri memahas terkait pemasaran, dimana CV AW Collection wajib melakukan kordinasi dengan dengan kelompok Kemiren Asri apabila terdapat potensi pemasaran.. Membicarakan terkait Covid 19, tentunya perlu membiasakan masyarakat untuk menjaga kebersihan. Gerakan untuk selalu mencuci tangan digalakan oleh kelompok Ibu Siaga Covid 19 Kemiren Asri dengan pengawasan dari Koperasi Kemiren Asri, pelatihan pembuatan *handsinitizer* dengan mengoptimkan hasil dari kelompok kebun gizi juga telah dilakukan.

Gambar 5. Pelatihan Pembuatan Handsinitizer



Sumber : Dokumentasi PT KPI RU IV Cilacap

Pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM ini tidak hanya sebatas peningkatan pemahaman kapasitas dalam diversifikasi produk. Lebih dari itu pelatihan yang dilakukan juga dengan optimalisasi pemasaran dengan pelatihan media marketing. Kemampuan dalam melakukan digital marketing diharapkan mampu menjadi cara paten dari Kelompok UMKM dalam melakukan pemasaran. PT KPI RU IV Cilacap memberikan komitmennya dengan pengadaan Kegiatan Pelatihan *digital marketing*.

Gambar 6. Kegiatan Pelatihan Digital Marketing



Sumber : Dokumentasi PT KPI RU IV Cilacap

Pelatihan ini merupakan bentuk Kerjasama dari PT KPI RU IV Cilacap dan DPKUKM, dimana dalam kegiatan ini pelatih teknis adalah CV Baris Jaya. Materi yang diajarkan untuk kelompok adalah bagaimana mereka mampu memasarkan melalui social media seperti *facebook* dan *Instagram*. dari kegiatan ini, kelompok telah mampu menerapkan ilmu yang diajarkan oleh instruktur.

C. EVALUASI

Proses evaluasi yang dilakukan oleh PT KPI RU IV Cilacap yaitu dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara kuantitatif dan diperkuat dengan wawancara secara kualitatif. Adapun hasil dari IKM dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Nilai IKM Program Ibu Siaga Covid 19

No	Pertanyaan	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi
1	Apakah Petugas Pendamping Masyarakat yang ditugaskan Pertamina bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pengembangan program?	3,74	93,38%
2	Apakah Petugas Pendamping Masyarakat yang ditugaskan Pertamina diterima keberadaanya di lingkungan Anda?	35,3	88,24%
3	Apakah Petugas Pendamping Masyarakat yang ditugaskan Pertamina diterima keberadaanya di lingkungan Anda?	3,50	87,50%
4	Apakah Anda dilibatkan dalam perencanaan program	3,56	88,97%
5	Apakah Anda berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program ?	3,56	88,97%
6	Apakah program dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan?	3,53	88,24%
7	Apakah Anda dilibatkan dalam evaluasi program?	3,53	88,24%
8	Apakah Anda memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pendapat?	3,47	86,76%
9	Apakah program yang Anda terima sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi?	3,76	94,12%
10	Apakah anda memahami pengetahuan dari program yang selama ini anda ikuti ?	3,56	88,97%

No	Pertanyaan	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi
11	Apakah Anda menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui program yang Anda terima?	3,53	88,24%
12	Apakah pengetahuan yang diterima dalam program sudah Anda sebarluaskan kepada orang lain?	3,56	88,97%
13	Berapa Pendapatan bersih per Bulan Penjualan Produk UMKM Pesisir periode Juni 2019 sampai dengan Juli tahun 2020 ?	3,56	88,97%
14	Apakah Anda akan melanjutkan usaha Anda/Program walaupun tidak dibantu Pertamina?	3,56	88,97%

Sumber : Dokumen Monitoring Evaluasi PT KPI RU IV Cilacap Tahun 2020

Hasil penilaian mutu pelaksanaan program pengembangan Kemiren Asri mencapai 87,39%. Nilai ini berada dalam kategori “A” (sangat baik). Hasil tersebut berdasarkan jumlah responden sebanyak 34 responden dengan nilai penimbang yang digunakan adalah 0,055 sehingga nilai indeks yang dihasilkan sejumlah 3,57.

D. ANALISA

Usaha PT KPI RU IV Cilacap dalam mengembangkan masyarakat melalui berbagai program TJSL bukanlah langkah yang mudah. Terdapat banyak dinamika yang terjadi dalam tahapan perencanaan, penerapan hingga evaluasi. Terlebih lagi PT KPI RU IV Cilacap saat ini tengah menjadi sorotan berbagai *stakeholder* khususnya perusahaan – perusahaan dengan status BUMN. Bagaimna tidak, PT KPI RU IV Cilacap pada tahun 2019 telah menorehkan prestasi dengan di dapatkannya penghargaan PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup, dimana penghargaan ini adalah sebuah pencapaian bergengsi untuk dunia korporasi.

Perusahaan yang telah mampu mendapatkan penghargaan PROPER Emas dinilai sebagai perusahaan yang baik dan telah mampu menyeimbangkan antara produksi serta dampaknya terhadap aspek lingkungan (termasuk aspek sosial). Pencapaian PT KPI RU IV Cilacap tersebut melalui berbagai tahapan mulai dari penilaian dokumen, presentasi hingga kunjungan lapangan, rangkaian kegiatan penilaian PROPER ini, dipantau langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup beserta jajaran tim penilai, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian penghargaan PROPER bukanlah sesuatu yang bersifat formalitas.

Pada Tahun 2019 PT KPI RU IV Cilacap mengunggulkan tiga program utama antara lain : 1) Program E-Mas Bayu & E-Mbak Mina, 2) Program Kolak Sekancil dan 3) Program Kemiren Asri. Program unggulan PT KPI RU IV Cilacap ini, menjadi icon sekaligus bukti nyata bahwa perusahaan telah memberikan dampak yang luas untuk masyarakat. Ketiga progam unggulan ini, juga dipersiapkan guna menghadapi penilaian PROPER di tahun yang mendatang, artinya perencanaan terhadap inovasi yang dilakukan sudah disusun sejak jauh hari, dimana perencanaan ini juga telah tertuang dalam rencana kerja strategis (renstra) dan rencana kerja (renja).

Namun sayangnya perencanaan yang telah disusun ternyata mengalami kendala yang cukup besar, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid 19. Kendala yang terjadi tampak pada program Kemiren Asri. Pada tahun 2020 Kemiren Asri direncanakan akan memasuki fase kemandirian, dimana pada fase ini, penerimaan manfaat dalam suatu program TJSL dianggap telah mandiri, sehingga segala bentuk bantuan yang dilakukan harus dihentikan. Maksud dari dihentikannya bantuan adalah guna mengurangi efek

ketergantungan, sehingga kegiatan pemberdayaan tidak dapat dikatakan sebuah kegiatan *charity*.

Pada tahap kemandirian di tahun 2020 rencananya program Kemiren Asri akan dikembangkan dengan pendirian sebuah pasar wisata. Secara konsep pasar ini akan menaungi kelompok kelompok UMKM dan menguatkan sinergisitas kelembagaan – kelembagaan yang telah terbentuk. Contohnya adalah lembaga Koperasi Kemiren Asri Mandiri, dimana akan menjadi pusat simpan pinjam pedagang yang menggunakan pasar UMKM ini sebagai media berjualan. Dengan adanya pasar UMKM mingguan ini, juga diharapkan mampu menjawab permasalahan terkait pemasaran yang belum optimal. Konsep pasar ini juga diciptakan sebagai pasar wisata yang memiliki spot wisata menarik, selain itu, pasar juga menjadi wahana belajar terkait kampung dengan konsep *zerowaste* yang sudah melekat di Kampung Kemiren Asri.

Perencanaan dalam pengembangan program Kemiren Asri ini rupanya tidak mudah, pasalnya banyak Kelompok UMKM yang justru terdampak adanya Covid 19. Kelompok UMKM seolah mati suri dengan adanya pandemi ini. Kebimbangan dirasakan oleh penerima manfaat salah satunya adalah Ibu Rumdani Prapti Sumiwi dimana sebagai ketua Kelompok Kemiren Asri, dirinya mengaku bahwa semenjak adanya Covid 19, Pendapatan menurun drastis bahkan tidak Lebih dari 50%. Kondisi ini seolah diperkuat dengan fakta bahwa wilayah tersebut masuk dalam kategori zona merah pada awal maret tahun 2020. Anggota Kelompok lain yaitu Ibu Parjiem, yang merupakan anggota Kelompok Produksi Jamu, dimana pada saat mulai diberlakukannya *local lockdown*, pemesanan tidak ada sama sekali.

Kondisi yang terjadi pada Program Kemiren Asri tidak rupanya menarik banyak *stakeholder*, salah satunya Pemerintah Kelurahan Tegalkamulyan. Pada bulan Februari 2020, Pak Maini selaku Kepala Desa setempat mengadakan forum internal guna menemukan solusi. Forum ini difasilitasi oleh PT KPI RU IV Cilacap. Dalam forum tersebut, terdapat beberapa *point* yang menjadi kesepakatan bersama yaitu :

1. Penundaan acara peresemian pengebangan program pasar UMKM, langkah ini dilakukan untuk mematuhi instruksi pemerintah dalam membentuk kerumunan
2. Pendataan kerugian Kelompok UMKM yang terkena dampak, dari 10 kelompok UMKM yang aktif disebutkan bahwa rata rata pendapatan tidak Lebih dari 25%
3. Adaptasi Program Kemiren Asri menjadi Program Ibu Siaga Covid 19 difasilitasi oleh PT KPI RU IV Cilacap, hal ini dilakukan mengingat bahwa Kemiren Asri merupakan wilayah pengembangan sekaligus program unggulan dari PT KPI RU IV Cilacap
4. Memperkuat kerjasama lintas *stakeholder* guna mencapai tujuan program Ibu Siaga Covid 19
5. Menciptkan inovasi sosial terhadap program guna mengurangi dampak dari adanya Covid 19.

Dengan diadakanya forum tersebut maka dapat dikatakan bahwa PT KPI RU IV Cilacap mengusung konsep *bottom up* dalam Menyusun sebuah progam. Proses *bottom up* adalah cara yang digunakan untuk menjaring pendapat dari Kelompok ‘akar rumput’, sehingga dalam penerapan suatu program tidaklah terkesan otoriter atau memaksa. Karena sejatinya program yang baik bukanlah program yang diadakan secara mendadak, ataupun memaksa. Strategi ini tentunya bagi PT KPI RU IV Cilacap merupakan strategi yang baik guna mempertahankan status program Kemiren Asri di tengah Pandemi. Berikut adalah perbandingan Roadmap Program Kemiren Asri sebelum dan sesudah diadakan adaptasi.

Tabel 3. Roadmap Program Kemiren Asri

Tahun	Tahapan	Kegiatan
2016	INISIASI	Identifikasi kebutuhan dan pembentukan posyandu model
2017	PELAKSANAAN	Penurunan angka gizi kurang dan gizi buruk melalui program budidaya jamur dan olahannya
2018	PENGUATAN	Kegiatan keaksaraan fungsional melalui praktik membaca dan menulis resep
2019	PENGEMBANGAN	Pengembangan Koperasi Kemiren Asri Mandiri dan sinergisitas 11 Kelompok UMKM dengan sistem zero waste
2020	KEMANDIRIAN	Pengembangan pasar wisata UMKM berbasis zerowaste

Sumber : Dokumen PT KPI RU IV Cilacap

Tabel 4. Roadmap Progam Kemiren Asri Adaptasi Covid 19

Tahun	Tahapan	Kegiatan
2016	INISIASI	Identifikasi kebutuhan dan pembentukan posyandu model
2017	PELAKSANAAN	Penurunan angka gizi kurang dan gizi buruk melalui program budidaya jamur dan olahannya
2018	PENGUATAN	Kegiatan keaksaraan fungsional melalui praktik membaca dan menulis resep
2019	PENGEMBANGAN	Pengembangan Koperasi Kemiren Asri Mandiri dan sinergisitas 11 Kelompok UMKM dengan sistem zero waste
2020	ADAPTASI	Adaptasi Kelompok Ibu Siaga COVID-19 Pelatihan pembuatan, baju hazmat, masker, dan handsanitizer kebun Pengembangan kapasitas dengan digital marketing
2021	KEMANDIRIAN	Menjadi percontohan kampung kreatif produk UMKM berbasis digital marketing

Sumber : Dokumen PT KPI RU IV Cilacap

Dari tabel diatas dapat dilihat sebuah perbandingan terkait roadmap pengembangan Program Kemiren Asri yang telah disusun oleh PT KPI RU IV Cilacap dimana pengembangan program yang terencana akan dilakukan dalam jangka pelaksanaan selama 5 tahun. Namun dengan adanya pandemi Covid 19 maka pengembangan program direncanakan di tahun depan. Dari adaptasi program ini, maka dapat diketahui bahwasanya rencana pengembangan masyarakat bukanlah hal yang kaku namun elastis. Perlu respon cepat dari berbagai *stakeholder* dalam merepon dampak yang terjadi.

Adaptasi yang dilakukan dalam program Kemiren Asri menjadi program 'Ibu Siaga Covid 19' secara teknis pelaksanaan, diawali dengan pelatihan olahan jahe merah, produksi dan produksi handsinitzer kebun. Kedua kegiatan ini merupakan insiasi dari Kelompok dimana Kelompok telah melihat bahwa saat pandemi kebutuhan akan produk yang dapat mencegah penularan covid 19 saat ini sangatlah mahal, terlebih lagi dengan diberlakukannya *local lockdown* di wilayah Kemiren asri menyebabkan akses masyarakat sangat terbatas. Dengan adanya potensi Kebun Gizi dan Kebun Warga, PT KPI RU IV

Cilacap menggandeng Koperasi Kemiren Asri Mandiri melakukan kerjasama untuk diadakanya pelatihan memproduksi jahe merah dan handsitizer kebun.

Jauh sebelum adanya pandemi Covid 19, masyarakat Kemiren asri telah mengembangkan berocok tanam yang menghasilkan TOGA, selain itu pengembangan Kebun Gizi juga telah di dukung oleh Perusahaan di tahun 2020, dimana dalam Kebun Gizi ini, dimanfaatkan untuk penanaman sayuran dan juga aneka macam TOGA. Pelatihan olahan jahe merah menyasar Kelompok baru yang belum tergabung dengan kelompok yang sudah ada namun memiliki latar balakang masyarkat yang terdampak Covid 19.

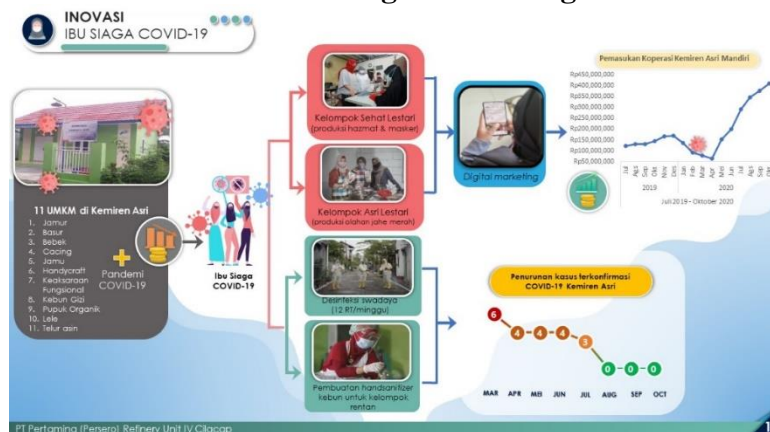
Sedangkan pelatihan produksi *handsinitizer* kebun menyasar kelompok masyarakat secara umum, harapanya masyarakat mampu mempraktekan ilmu pembuatan handsinitizer secara sederhana sehingga dapat melindungi anggota keluarga masing. Disinilah salah satu sisi keunikan yang di temui dari adanya adaptasi program dimana, program tidak hanya berfokus dalam kegiatan pemulihan namun juga penyeberluasan / perlindungan masyarakat diluar kelompok dalam hal ini adalah kelompok rentan.

Salah satu anggota kelompok yang bergerak dalam kegiatan pembuatan *handsinitizer* adalah Ibu Eni. Beliau menuturkan bahwa pada saat terjadi pandemi di area Kemiren Asri, harga Handsinitizer sangatlah tinggi, sehingga banyak kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi hal tersebut, sehingga pelatihan pembuatan handsinitizer sangatlah membantu kelompok rentan.

"Handsinitizer kita gak jual mas, karna memang untuk edarnya memerlukan pengurusan yang lama harus punya No PKRT dan itu prosesnya gak bisa cepet jadi, sejauh ini kita bagikan secara gratis ke kelompok rentan sekaligus mengajarkan" (wawancara Bu Eni Kelompok Kebun Gizi Desember 2020)

Ibu Eni menuturkan bahwa sejauh ini *handsinitizer* mamang belum diperjualbelikan, sehingga pembagian *handsinitizer* ini merupakan salah satu *impact* dari adanya adaptasi program, karena pembuatan *handsinitizer* diambil dari sebagaian keuntungan kelompok. Kegiatan *charity* lain yang dilakukan dalam adaptasi program ini yang diinisiasi kelompok adalah kegiatan penyemprotan disinfektasi desa secara rutin, hingga pada saat ini kelompok relah menyemprotkan hingga ke 12 RT. Dari serangkaian kegiatan dalam adaptasi program Ibu Siaga Covid 19 ini menghasilkan sebuah inovasi baru yang berbeda dari tahun lalu.

Gambar 7. Inovasi Program Ibu Siaga Covid 19



Sumber : Dokumentasi Presentasi PROPER PT KPI RU IV Cilacap, 2021

Dari dokumen presentasi tersebut dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan dalam program Ibu Siaga Covid 19, memberikan dampak yang baik, pasalnya telah terjadi peningkatan omzet dari bulan April – Oktober 2020. Selain itu kasus terkonformasi positif di wilayah ini dari 6 kasus hingga konsisten 0 mulai bulan Oktober hingga Desember tahun 2020. Saat dikonfirmasi pada anggota kelompok bahwa peningkatan omzet yang terjadi dikarenakan kelompok telah mampu menerapkan pelatihan *digital marketing*. Selain itu kelompok menjahit bekerjasama dengan CV AW Collection juga telah mampu memproduksi >10.000 pcs hazamat dan masker disaat pandemi, produk produk ini telah disalurkan diantaranya : Wisma Atlet Jakarta, Bazana Cilacap, Dompot Duafa dll. Sedangkan untuk Penurunan kasus Covid 19 dianggap oleh kelompok karena telah meningkatnya kesadaran masyarakat akan adanya PHBS, juga karena adanya kontribusi dari pemerintah desa dan dinas terkait, dimana *stakeholder* tersebut senantiasa mendukung inovasi sosial yaitu penyemprotan disinfeksi desa secara rutin dan pembangian *handsinitzer* gratis kepada kelompok rentan.

Program inovasi Ibu Siaga Covid 19, tidak hanya berfokus pada pengembangan produk dan inovasi sosial, namun juga didukung oleh pelatihan digital marketing kelompok dilatih untuk mengoptimalkan pemasaran produk. Pelatihan ini merupakan kerjasama antar PT KPI RU IV Cilacap, DPKUKM Kabupaten Cilacap dan CV Baris Jaya. Kerjasama diawali dengan kordinasi antar pihak PT KPI RU IV Cilacap dengan DPKUKM Kabupaten Cilacap sehingga disepakati untuk diadakan pelatihan digital marketing. Sasaran dari pelatihan ini adalah Kelompok UMKM Kemiren Asri dan mitra binaan PT KPI RU IV Cilacap dan mitra UMKM dari DPKUKM Kabupaten Cilacap. Selanjutnya peran CV Baris Jaya Indonesia adalah sebagai instruktur, CV Baris Jaya ini merupakan pelaku dunia usaha yang telah menerapkan berbagai macam strategi / media branding terhadap suatu produk. *Goal* dari pelatihan ini adalah peserta mampu mengoperasikan media sosial maupun *marketplace* lain untuk mengoptimalkan penjualan. Berdasarkan dari wawancara yang mendalam yang telah dilakukan ditemukan bahwa kelompok memang telah beradaptasi dari metode penjualan produk dimana media yang digunakan antarlain seperti : *Facebook, Instagram* dan *Whatsaap*. Selain itu mereka juga telah memulai menggunakan *marketplace* seperti : *Shopee* dan *Tokko.com*.

Dari serangkaian kegiatan program Kemiren Asri yang beradaptasi menjadi inovasi program 'Ibu Siaga Covid 19' peran interaksi antar *stakeholder* menjadi hal yang penting dalam kesuksesan program. PT KPI RU IV Cilacap telah menjalin sinergi mulai dari perusahaan, pemerintah dan institusi sosial yang dalam hal ini adalah inklusi sosial dengan pendekatan gender dengan peran wanita sebagai penggerak. Hal ini berbanding lurus terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDSs)* pada point 1 (No Poverty), point 2 (*Zero Hunger*), point 4 (*Quality Education*), point 10 (*Reduced Inequalities*) dan point 11 (*Sustainable Cities and Communities*)

Pelaksanaan program TJSL bukanlah hal yang mudah terlebih lagi dengan adanya pandemic *Covid 19*, pelaksanaan Program Ibu Siaga Covid 19 merupakan sebuah bentuk adaptasi program dari Program Kemiren Asri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa program adaptasi ini dapat dikatakan berhasil, terlebih lagi keberhasilan PT KPI RU IV Cilacap memperoleh PROPER Emas Ke-2 di tahun 2020, menjadi penguat bahwa pelaksanaan program TJSL yang diinisiasi oleh PT KPI RU IV Cilacap khususnya program adaptasi Ibu Siaga Covid 19 telah sesuai kaidah penilaian yang telah ditapkan oleh Dewan Penilai PROPER dan Kementerian Lingkungan Hidup.

IV. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Dari penjelasan yang telah dipaparkan terkait pelaksanaan adaptasi Program Ibu Siaga Covid 19 dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Program Ibu Siaga Covid 19 merupakan bentuk adaptasi program TJSL yang diinisiasi oleh PT KPI RU IV Cilacap dari yang sebelumnya dikenal sebagai program Kampung Ekonomi Kreatif Untuk Masyarakat Mandiri (Kemiren Asri)
2. Program Kemiren Asri berhasil beradaptasi menjadi program Ibu Siaga Covid 18 dengan diversifikasi produk melalui penguatan pada perluasan kerjasama lintas stakeholder, digital marketing dan penguatan kelembagaan.
3. Pada tahap perencanaan perusahaan melakukan update social mapping di wilayah kemiren asri, kajian ini dijadikan landasan sebagai penentuan pengembangan program. Dari hasil update kajian social mapping diketahui bahwa terdapat beberapa aspek seperti : lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya segala aspek dalam kegiatan yang sudah terbentuk dalam program Kemiren Asri terkena dampak dari adanya Covid 19
4. Pada tahap penerapan PT KPI RU IV Cilacap bersinergi dengan Disperindakop Kabupaten Cilacap, CV AW Collection, Koperasi Kemiren Asri Mandiri dan CV Baris Jaaya. Hubungan sinergitas ini membuktikan bahwa dalam adaptasi program Covid 19 memerlukan kerjasama dengan lintas stakeholder.
5. Evaluasi yang dilakukan oleh PT KPI RU IV Cilacap menggunakan dua metode yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai data primer dan diperkuat dengan dokumen laporan kegiatan sebagai data sekunder. Hasil evaluasi program Ibu Siaga Covid 19 sebagai bentuk adaptasi program TJSL memiliki dampak positif dibuktikan dengan angka IKM 87,39%. Nilai ini berada dalam kategori "A" (sangat baik). Hasil tersebut berdasarkan jumlah responden sebanyak 34 responden dengan nilai penimbang yang digunakan adalah 0,055 sehingga nilai indeks yang dihasilkan sejumlah 3,57.
6. Strategi penjangkaran pendapat atau pola penentuan program yang dilakukan oleh PT KPI RU IV Cilacap menggunakan strategi *bottom up* yaitu cara menjangkaran pendapat dari bawah (masyarakat / akar rumput)
7. Hubungan *stakeholder* antara lembaga yang terdiri dari institusi pemerintah dan korporasi menjadi strategi komunikasi *stakeholder* yang baik yang mampu mendukung dilaksanakannya adaptasi program TJSL
8. Program Ibu Siaga Covid 19 sebagai program adaptasi sesuai dengan alur perencanaan, penerapan dan evaluasi sebagaimana konsep proses dari Michael Quinn Patton, dimana data berupa dokumen dan wawancara digunakan untuk melengkapi ketiga proses tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Permana, G.P.L dan Putri, D.A.P.A.G. 2020. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Ecovillage di Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Bali." *Journal Of Communit Development & Empowerment* 1 (2):96-102.
- Turasih. 2020. "Covid 19 Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam." *Journal For Islamic Social Sciences* 4 (1):75-82.
- Melia, F. & Bambang Rudito.2013. *Corporate Social Responsibility*.Rekayasa Sains: Bandung.
- Quinn, Patton Michael.2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Pustaka Pelajar. Bandung.
- Communication Relation & Corporate Social Responsibility Department.2020.*Monitoring Evaluasi Program Kemiren Asri*. Cilacap: PT Kilang Pertamina Internasional RU IV.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER

"Global Health dan COVID-19: Tantangan dan Adaptasi dalam Konstelasi Hubungan Internasional".

Communication Relation & Corporate Social Responsibility Department.2020.Dokumen Rencana Kerja Program Kemiren Asri. Cilacap: PT Kilang Pertamina Internasional RU IV.

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan.2020.Dokumen Laporan Social Mapping.Yogyakarta:Social Development Studies Centre.

Communication Relation & Corporate Social Responsibility Department.2020.Dokumen Presentasi PROPER Emas:Cilacap:PT Kilang Pertamina Internasional RU IV.



UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Gd. UNSOED Press
Jalan Prof. Dr. H.R. Boenyamin 708 Purwokerto
Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 626070
Email: unsoedpresspwt@gmail.com

ISBN 978-623-465-064-8 (PDF)



9 786234 650648